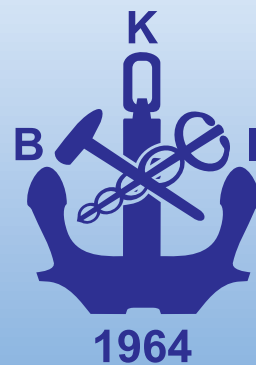


2013

Laporan Tahunan
Annual Report



Memperkokoh dan Menggiatkan Eksistensi di Sektor Maritim, Minyak dan Gas

Strengthening and Encouraging the Existence in
Maritime, Oil and Gas Sectors

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (Persero)



Memperkokoh dan Menggiatkan Eksistensi di Sektor Maritim, Minyak dan Gas

*Strengthening and Encouraging the Existence in
Maritime, Oil and Gas Sectors*

Bagi Biro Klasifikasi Indonesia, atau BKI, tahun 2013 merupakan tahun dimana BKI kembali menunjukkan kapasitas dan kapabilitasnya untuk mengelola kegiatan usaha dan terus tumbuh di tengah-tengah situasi makro ekonomi yang kurang menguntungkan bagi Indonesia. Pencapaian demi pencapaian ditorehkan, dengan topangan fokus pada strategi meraih lebih banyak pasar dan melakukan efisiensi pada mesin perusahaan. BKI secara optimis merengkuh tahun 2013 melalui eksistensi di sektor maritim, minyak dan gas; dimana sektor-sektor ini memberikan kontribusi besar terhadap laju pertumbuhan ekonomi serta penggunaan sarana-prasarana-infrastruktur kelautan. Dari sektor-sektor inilah BKI kemudian mengembangkan kompetensinya untuk menjaga perairan Indonesia dari setiap ancaman kegagalan sarana dan infrastruktur kelautan yang dapat menimbulkan bencana dan kerugian terhadap lingkungan perairan Indonesia.

Sebagai badan klasifikasi yang ditunjuk Pemerintah Indonesia untuk melakukan survei dan sertifikasi klasifikasi kapal di perairan Indonesia, BKI memiliki tanggung jawab besar untuk melaksanakan tugas dan fungsinya memberikan penilaian independen atas kondisi kapal dan fasilitas terapung lainnya. Tentu ini merupakan tugas mulia, dimana Indonesia merupakan negara maritim dengan kondisi alam kepulauan dan area perairan yang cukup luas yang membutuhkan sebuah badan klasifikasi untuk memberikan jaminan keselamatan jiwa, kapal dan benda serta lingkungan di laut. Dengan visibilitas manajemen dan totalitas kinerja seluruh insan BKI, serta dukungan seluruh Pemangku Kepentingan, BKI mampu melaksanakan tugas di pundaknya dan akan terus berupaya mengemban tugas tersebut demi menciptakan situasi akan sarana dan lingkungan kelautan Indonesia yang kondusif.



For Biro Klasifikasi Indonesia, or BKI, 2013 was the year in which BKI once again showed its capacity and capability in managing business operations and continued to grow amidst the unfavorable macroeconomic condition for Indonesia. Achievements were made with a focus on strategy to reach greater markets and improve efficiency on the corporate machine. BKI optimistically embraced 2013 through its existence in maritime, oil and gas sectors, which contributed greatly to the economic growth and the use of marine infrastructures. From these sectors, BKI develop competencies to protect Indonesian waters from any threat of failure in marine infrastructures and facilities that can lead to disaster and losses to Indonesian marine environment.

As the classification agency appointed by the Indonesian government to conduct survey and certification of ship classification in Indonesian waters, BKI has a great responsibility to carry out its duties and functions in providing independent assessment of the condition of vessels and other floating facilities. This is a noble task since Indonesia is a maritime country with extensive archipelago and waters, which requires a classification agency that can ensure the safety of lives, ships, objects, and environment of the sea. With management visibility and total performance of all BKI members, as well as support from all stakeholders, BKI is able to carry out its duties and will continue to carry out these tasks in order to create a conducive situation for Indonesian marine environment and facilities.

Daftar Isi



Table of Content

PENDAPATAN TUMBUH REVENUE GREW

132,45%

(Rp419,18 miliar di tahun 2012 menjadi
Rp555,20 miliar di tahun 2013)
(from Rp419.18 billion in 2012 to Rp555.20
billion in 2013)

PENINGKATAN LABA KOMPREHENSIF COMPREHENSIVE INCOME GREW

157,7%

(Rp67,44 miliar di tahun 2012 menjadi Rp106,35 miliar
di tahun 2013)
(Rp67.44 billion in 2012 to Rp106.35 billion in the year
2013)

PENINGKATAN PRODUKSI KLAS TUNGGAL INCREASE IN SINGLE CLASS PRODUCTION

179,37%

(Rp201,21 juta poin di tahun 2012 menjadi 360,90 juta
poin di tahun 2013)
(from 201.21 million points in 2012 to 360.90 million
points in 2013)

SEKTOR MARINE & INDUSTRIAL TUMBUH MARINE & INDUSTRIAL SECTOR GREW

147,99%

(dari Rp145,17 juta mandays di tahun 2012 menjadi
214,83 juta mandays di tahun 2013)
(from 145.17 million man days in 2012 to 214.83
million man days in 2013)

TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN COMPANY'S SOUNDNESS LEVEL

“AAA” Sehat Healthy

(sejak tahun 2005 hingga 2013)
(since 2005 until 2013)

KILAS KINERJA 2013

PERFORMANCE HIGHLIGHTS 2013

- 06. Ikhtisar Keuangan
Financial Highlights
- 08. Peristiwa Penting 2013
Event Highlights 2013

LAPORAN MANAJEMEN

MANAGEMENT REPORT

- 12. Laporan Dewan Komisaris
Report of the Board of Commissioners
- 17. Profil Dewan Komisaris
Profile of the Board of Commissioners
- 20. Laporan Direksi
Report of the Board of Directors
- 28. Profil Direksi
Profile of the Board of Directors
- 31. Pertanggungjawaban Laporan Tahunan
Accountability Annual Report

PROFIL PERUSAHAAN

COMPANY PROFILE

- 38. Sekilas Tentang Biro Klasifikasi Indonesia
Biro Klasifikasi Indonesia in Brief
- 40. Jejak Langkah
Milestones
- 41. Visi, Misi, dan Nilai Perusahaan
Company Vision, Mission, and Values
- 44. Lambang Perusahaan
Company Emblem
- 45. Lingkup Kegiatan Usaha
Scope of Business
- 50. Struktur Organisasi
Organizational Structure
- 52. Pemegang Saham dan Modal Saham
Shareholders and Share Capital
- 53. Penghargaan dan Sertifikasi
Awards and Certifications
- 54. Alamat Kantor Pusat, Kantor Cabang dan Unit
Usaha
*Address of Head Office, Branch Offices, and
Business Units*

ANALISA DAN PEMBAHASAN KINERJA MANAJEMEN

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

- 60. Tinjauan Makro
Macro Overview
- 64. Tinjauan Operasional Per Segmen Usaha
Operational Overview per Business Segment
- 85. Pengelolaan Sumber Daya Manusia
Human Resources Management
- 94. Teknologi Informasi
Information Technology
- 95. Tinjauan Pemasaran
Marketing Overview
- 102. Strategi dan Fokus Manajemen Tahun 2013
Strategies and Management Focus in 2013
- 105. Tinjauan Keuangan
Financial Overview
- 121. Prospek Usaha Tahun 2014
Business Outlook 2014
- 122. Jaringan Kerjasama
Partnership Network
- 124. Rencana Strategis 2014-2018
Strategic Plan 2014-2018

TATA KELOLA PERUSAHAAN

GOOD CORPORATE GOVERNANCE

- 130. Prinsip Tata Kelola Perusahaan
Principles of Corporate Governance
- 132. Struktur dan Hubungan Organisasi Tata Kelola Perusahaan
Organizational Structure and Relationships
- 163. Organ Pendukung Direksi
Board of Directors Supporting Organs
- 179. Penerapan Sistem Manajemen Mutu (Quality System)
The Application of Quality Management System (System Quality)
- 182. Keterbukaan Informasi
Information Disclosure
- 183. Etika Kerja dan Etika Bisnis
Work Ethics and Business Ethics
- 186. Benturan Kepentingan
Conflict of Interest

- 189. Pelaporan Pelanggaran
Whistle Blowing System

- 192. Rencana Pengembangan GCG tahun 2014
GCG Development Plan 2014

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

- 196. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility
- 198. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan
Partnership and Environmental Assistance Program (PKBL)
- 203. Tanggung Jawab Terhadap Konsumen
Responsibility to Customers

INFORMASI PERUSAHAAN

CORPORATE INFORMATION

- 206. Informasi Perusahaan
Corporate Information
- 209. Lembaga Profesi dan Penunjang
Professional and Supporting Institutions

LAPORAN KEUANGAN

210. FINANCIAL STATEMENT

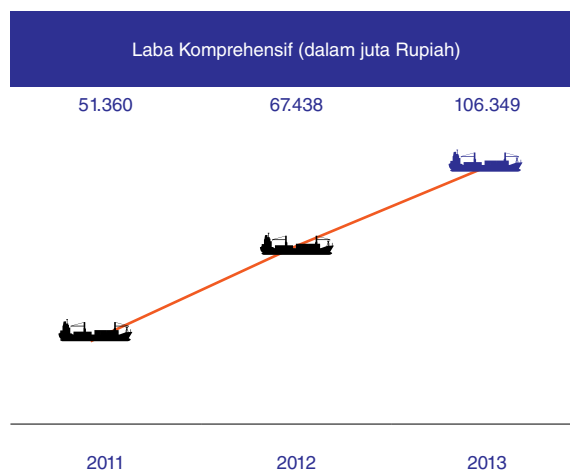
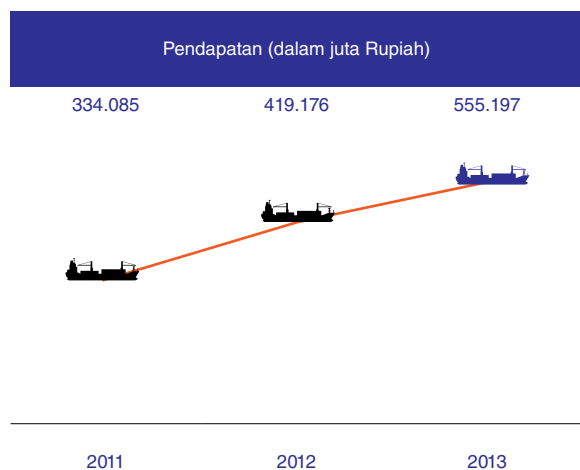
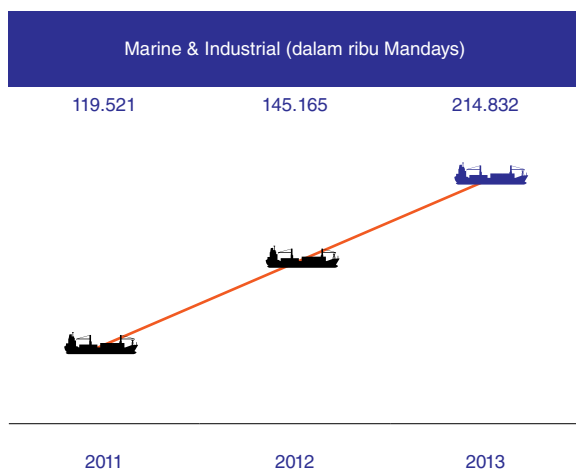
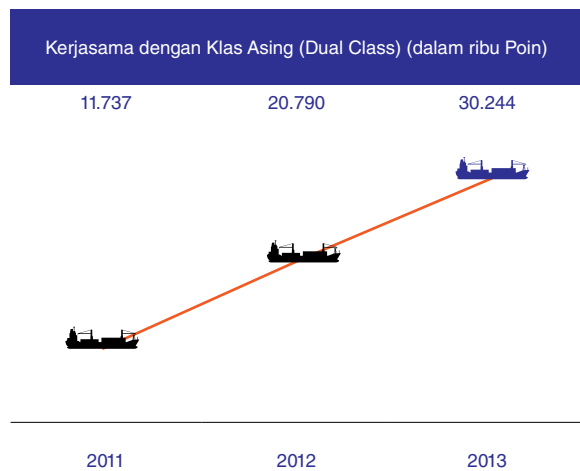
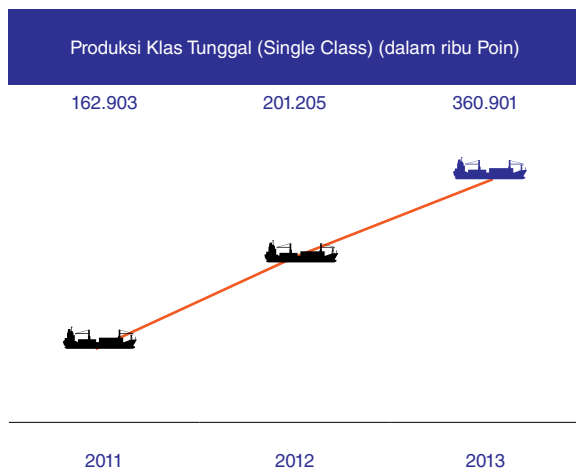


(dalam Juta Rupiah/ in Million rupiah)

Laba Rugi <i>Income Statement</i>	2013	2012	2011
Pendapatan <i>Revenue</i>	555.197	419.176	334.085
Beban Jasa <i>Service Expense</i>	103.574	76.527	67.968
Laba Kotor <i>Gross Profit</i>	451.623	342.649	266.118
Beban Usaha <i>Operating Expense</i>	315.458	254.338	199.330
Laba Usaha <i>Operating Profit</i>	136.165	88.312	66.788
Pendapatan/(Beban) Lain-lain - Bersih <i>Other Revenue/(Expense) - Net</i>	8.820	6.147	1.555
Laba/(Rugi) sebelum Pajak Penghasilan <i>Profit/(Loss) before Income Tax</i>	144.985	94.458	68.343
Beban Pajak Penghasilan <i>Income Tax Expense</i>	(39.870)	(27.020)	(16.983)
Laba Bersih Setelah Pajak <i>Net profit after Tax</i>	105.115	67.438	51.360
Pendapatan komprehensif lainnya <i>Other comprehensive revenue</i>	1.234	-	-
Laba (Rugi) Komprehensif <i>Comprehensive Profit (Loss)</i>	106.349	67.438	51.360

Posisi Neraca <i>Balance Position</i>	2013	2012	2011
Aset Lancar <i>Current Assets</i>	274.463	186.003	136.520
Aset Tidak Lancar <i>Non Current Assets</i>	130.997	118.177	80.213
Jumlah Aset <i>Total Assets</i>	405.460	304.180	16.733
Liabilitas Jangka Pendek <i>Current Liabilities</i>	62.846	60.207	36.267
Liabilitas Jangka Panjang <i>Non Current Liabilities</i>	14.016	11.608	5.780
Jumlah Liabilitas <i>Total Liabilities</i>	76.861	71.815	42.047
Jumlah Ekuitas <i>Total Equity</i>	328.598	232.365	174.686
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas <i>Total Liabilities and Equity</i>	405.460	304.180	216.733

Rasio Keuangan <i>Financial Ratio</i>	2013	2012	2011
<i>Likuiditas Liquidity</i>			
Rasio Lancar <i>Current Ratio</i>	436,73	308,94	293,33
Rasio Cepat <i>Acid Test Ratio</i>	436,73	308,94	293,33
Rasio Kas <i>Cash Ratio</i>	170,16	113,65	97,30
Rasio Modal Kerja terhadap Total Aset <i>Working Capital to Total Asset Ratio</i>	52,19	41,36	43,13
<i>Solvabilitas Solvency</i>			
Rasio Hutang terhadap Ekuitas <i>Total Debt to Equity Ratio</i>	23,35	30,91	32,98
Rasio Beban Operasi <i>Operating Ratio</i>	75,47	78,93	80,01
Rasio Marjin Laba Bersih <i>Net Profit Margin (NPM)</i>	26,11	22,53	15,37
Rasio Imbalan Investasi <i>Return on Investment (ROI)</i>	38,19	37,88	36,04
Rasio Imbalan Kepada Pemegang Saham <i>Return on Equity (ROE)</i>	32,11	40,89	41,65
<i>Aktivitas Activities</i>			
Perputaran Total Aset <i>Total Assets Turn Over (TATO)</i>	1,37	1,61	1,52
Perputaran Piutang <i>Receivable Turn Over</i>	5,01	5,14	4,73
Jangka Waktu Penagihan <i>Collection Period (CP)</i>	104	96	89
Rasio Total Modal Sendiri terhadap Total Aset <i>Equity To Total Assets (ETTA)</i>	81,04	76,39	75,20





Peristiwa Penting 2013

Events Highlight 2013

Maret

March



Sosialisasi Peraturan PM.7/2013

Untuk mengakselerasi lebih jauh terkait Peraturan Kementerian Perhubungan No. PM.7 tahun 2013 tentang Kewajiban Klasifikasi bagi Kapal Berbendera Indonesia pada Badan Klasifikasi, Kementerian Perhubungan melakukan sosialisasi Peraturan PM.7/2013 di Kementerian Perhubungan Maret 2013.

Dissemination of Regulation PM.7/2013

To further accelerate the Ministry of Transportation Regulation No. PM.7 of 2013 on the Indonesian Fleet Classification Obligation to Classification Board, the Ministry of Transportation disseminated Regulation PM.7/2013 in March 2013.

Kunjungan IACS

Dalam rangka menuju keanggotaan *International Association of Classification Societies* (IACS), Perusahaan mengupayakan komunikasi intensif dengan jajaran pimpinan pusat IACS: *Chairman*, Tom Boardley; *Permanent Secretary*, Derek Hodgson; dan *Quality Secretary*, Peter William terkait upaya Perusahaan untuk mendaftarkan diri menjadi anggota IACS. Acara ini diselenggarakan di Hotel Borobudur Jakarta, 13 Maret 2013.

Kunjungan IACS

In order to be a member of the *International Association of Classification Societies* (IACS), the Company conducts intensive communication with the IACS central leadership ranks: *Chairman*, Tom Boardley; *Permanent Secretary*, Derek Hodgson; and *Quality Secretary*, Peter William in relevance to the Company's action to register to be IACS member. The event was held at the Borobudur Hotel Jakarta, 13 March 2013.



Peletakan Lunas SPUB PT Pusri Indonesia

Upacara peletakan lunas pembangunan *Self Propelled Urea Barge* (SPUB) milik PT Pusri Indonesia yang dibangun dengan menggunakan standar klasifikasi *Common Structural Rules* (CSR) dengan klasifikasi *single class* BKI, di galangan kapal PT Anggrek Hitam, Batam, 22 Maret 2013, merupakan awal dari konstruksi kapal, yang biasa dianggap sebagai hari kelahiran kapal dan diawali dengan pembuatan rangka lunas kapal.

Keel laying of SPUB PT Pusri Indonesia

Keel laying ceremony of the construction of *Self Propelled Urea Barge* (SPUB) PT Indonesia Pusri which is built using the classification standard of the *Common Structural Rules* (CSR) with BKI single-class classification, at PT Anggrek Hitam shipyard, Batam, 22 March 2013. Keel laying is the beginning of ship construction, which is commonly regarded as the ship's birthday and begun with the making of the keel framework.

Pertemuan Komite BKI ke-2

Setelah pertemuan pertama pada Desember 2012, Komite Teknik dan Komite Klasifikasi mengadakan pertemuan kedua di Hotel Harris Kelapa Gading, Jakarta, 25 Maret 2013. Agenda utama pada pertemuan ini adalah penyerahan piagam keanggotaan dan *validasi rules* BKI. Direktur Utama Ibnu Wibowo melihat pertemuan ini sebagai bentuk komitmen BKI untuk lebih profesional dalam meminta validasi terlebih dahulu dari para pemakai kepentingan sebelum memberlakukan *rules*-nya.

Second BKI Committee Meeting

After the first meeting in December 2012, BKI Committee consisting of Technical Committee and Classification Committee held a second meeting at Hotel Harris Kelapa Gading, Jakarta, 25 March 2013. The main agenda at this meeting was the delegation of membership charter and validation of BKI rules. President Director Ibnu Wibowo viewed this meeting as BKI's commitment to be more professional in requesting validation first from the interest users first before imposing the rules.



BKI Tuan Rumah Seminar Asian Classification Societies (ACS) ke-2

Bertepatan dengan ulang tahun yang ke-49, Perusahaan ditunjuk sebagai tuan rumah penyelenggaraan Seminar Asian Classification Societies (ACS) ke-2 yang dibuka oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Capt. Bobby R. Mamahit, 2 Juli 2013 di Hotel Harris Kelapa Gading Jakarta. Dalam sambutannya, Ibnu Wibowo menyampaikan bahwa BKI merupakan salah satu inisiator "Semangat Asia" yang diwujudkan melalui penyelenggaraan Seminar ACS ke-2 ini. Hasil dan materi seminar ACS ini diharapkan dapat meningkatkan keselamatan dan standar kapal di Indonesia, serta sebagai perlindungan lingkungan laut di Indonesia dan Asia.

BKI Hosted the Second Asian Classification Societies (ACS) Seminar

Coinciding with its 49th anniversary, the Company was appointed as the host of the second Asian Classification Societies (ACS) Seminar which was opened by the Director General of Sea Transportation, Capt. Bobby R. Mamahit, on 2 July 2013 at Harris Hotel Kelapa Gading Jakarta. In his speech, Ibnu Wibowo said that BKI is one of the initiators of the "Spirit of Asia" which is realized through this second ACS Seminar. The results and material of this ACS seminar is expected to improve the safety and standards in Indonesian ships, as well as protection of the marine environment in Indonesia and Asia.

Rapat Kerja dan TOMSI 2013

Perusahaan menggelar agenda rutin Rapat Kerja pencapaian target anggaran tahun berjalan 2014 dan Technical and Operational Meeting Surveyor and Inspector (TOMSI) 2013, di Bandung, 29 September 2013. Dengan mengusung tema "BKI One Mission One Vision", Rapat Kerja dan TOMSI 2013 ini digelar dengan membahas berbagai permasalahan teknis yang terkait dengan pelaksanaan operasional dan pelayanan jasa di bidang klasifikasi, konsultasi & supervisi sebagai bidang usaha utama Perusahaan.

Work Meeting and TOMSI 2013

The Company held a regular agenda of Work Meeting of budget target achievements for the year 2014 and the Technical and Operational Meeting Surveyor and Inspector (TOMSI) 2013, in Bandung, 29 September 2013. With the theme "BKI One Mission One Vision", the Work Meeting and TOMSI 2013 were held to discuss various technical issues related to operational implementation and services in classification, consultancy & supervision as the Company's main business.



Penandatanganan Kerjasama BKI dan Germanischer Lloyd (GL)

Pada 8 Oktober 2013 Perusahaan menandatangani perjanjian dengan Germanischer Lloyd terkait kerjasama dalam implementasi Peraturan Kementerian Perhubungan RI No. PM. 7 Tahun 2013 tentang Kewajiban Klasifikasi bagi Kapal berbendera Indonesia pada Badan Klasifikasi.

Penandatanganan Kerjasama BKI dan Germanischer Lloyd (GL)

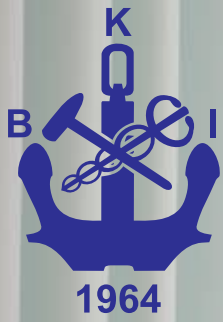
On 8 October 2013, the Company entered into an agreement with Germanischer Lloyd on cooperation in the implementation of the Ministry of Transportation Regulation No. PM. 7 of 2013 on Indonesian-flagged Ships Classification Obligation to Classification Body.

BKI Hadiri ACS EC21

Asosiasi Badan Klasifikasi di Asia, Asian Classification Societies (ACS) menyelenggarakan pertemuan tahunan ke-21 Komite Eksekutif (EC21) di Hanoi, Vietnam, 15-16 Oktober 2013. Pertemuan tersebut menghasilkan beberapa hal, salah satunya kesepakatan pembentukan kantor sekretariat bersama ACS di Shanghai dan Seoul. Selain itu, pertemuan EC21 menyepakati pembenahan semua kelompok kerja yang bekerja lebih efisien sejalan dengan proses IMO.

BKI Attended ACS EC21

The Asian Classification Societies (ACS) hosted the 21st annual meeting of the Executive Committee (EC21) in Hanoi, Vietnam, 15-16 October 2013. The meeting resulted in the agreement to establish ACS joint secretariat office in Shanghai and Seoul. Moreover, the EC21 meeting agreed on revamping all work groups to work more efficiently in line with the IMO process.



Laporan Manajemen

Management Report





Laporan Dewan Komisaris

Message from the Board Commissioner

Kilas Kinerja 2013
Performance Highlight 2013

Laporan Manajemen
Management Report

Profil Perusahaan
Corporate Profile

Analisa dan Pembahasan Manajemen
Management discussion and Analysis





Terus Tumbuh dan Menjaga Kepercayaan *Keep Growing and Maintain Trust*

Di tengah laju pertumbuhan ekonomi dan neraca perdagangan yang stagnan, Perusahaan justru meningkatkan 157,7% laba dari tahun lalu. Dengan kerja keras dan fokus pada strategi yang tepat, Perusahaan telah menunjukkan kemampuannya untuk terus tumbuh dan mendapatkan kepercayaan Pemegang Saham dan seluruh Pemangku Kepentingan.

In the middle of stagnant economic growth and trade balance, the Company's profits actually increased 157.7% from last year. With hard work and focus on the right strategy, the Company has demonstrated its ability to keep growing and gained the trust of Shareholders and all Stakeholders.

Assalamu'alaikum Wr.Wb, Para Pemangku Kepentingan yang terhormat,

Secara umum perekonomian Indonesia pada tahun 2013 hanya tumbuh 5,7% atau lebih rendah dari asumsi dalam APBN-Perubahan 2013 sebesar 6,3%. Laju inflasi tercatat sebesar 8,5% (yoy); sementara pelemahan rupiah masih terjadi disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, yaitu adanya *tapering off* di Amerika Serikat dan tekanan pada rupiah. Kondisi ini sesungguhnya mencerminkan stagnasi pertumbuhan ekonomi dan neraca perdagangan kita, dimana hal tersebut sangat berjalın-kelindan dengan arus transportasi dan perdagangan melalui jalur laut yang dapat mempengaruhi kinerja Perusahaan secara langsung.

Namun, meskipun dilatarbelakangi kondisi tersebut, kinerja PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) pada tahun 2013 berhasil membukukan pendapatan sebesar Rp555,20 miliar atau naik 32,45% dari pencapaian tahun 2012, dan laba (rugi) komprehensif sebesar Rp106,35 miliar atau naik 157,7% dari tahun sebelumnya. Pencapaian ini mencerminkan kerja keras seluruh jajaran Perusahaan untuk menjaga kepercayaan pelanggan setiap tahunnya. Secara umum, target kinerja yang ditetapkan Pemegang Saham untuk tahun 2013 sebagian besar dapat tercapai dan jumlah kontribusi pajak dan dividen meningkat kepada Negara.

Kinerja di atas tidaklah membuat insan jajaran Perusahaan cepat berpuas diri. Sebagai penyedia layanan jasa klasifikasi dan jasa teknik terkait, PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) berupaya lebih meningkatkan profesionalisme dan integritasnya untuk memberikan pelayanan secara prima, terpercaya dan beretika. Perusahaan juga perlu terus melanjutkan kiprah aktifnya dalam sidang IMO (*International Maritime Organization*) dan semakin mensejajarkan dirinya dengan badan klasifikasi asing lainnya di Asia melalui Forum ACS (*Asian Classification Societies*) *Executive Meeting* untuk belajar dan meningkatkan kompetensi dan kapasitasnya di tingkat internasional. Dalam bidang Konsultasi dan Supervisi, Perusahaan juga tetap memperkuat eksistensinya dengan meraih pasar dari kebutuhan jasa industri swasta, merealisasikan potensi pasar dan melengkapi infrastruktur serta kompetensi Sumber Daya Manusia untuk meningkatkan layanan kepada pengguna jasa.

Assalamu'alaikum Wr.Wb, Dear Stakeholders,

In general, the Indonesian economy in 2013 grew only 5.7% or lower than the 6.3% assumed in the 2013 Budget Amendment. The inflation rate stood at 8.5% (yoy); while rupiah still weakened due to internal and external factors, i.e. tapering off in the U.S. and the pressure on rupiah. This condition actually reflected the stagnation of Indonesian economic growth and trade balance, which is intertwined with flow of transport and trade by sea, that in turn could directly affect the Company's performance.

However, despite these conditions, in 2013 PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) recorded a revenue of Rp555.20 billion, increased 32.45% from the figure in 2012, and comprehensive income (loss) of Rp106.35 billion, increased 157.7% from the previous year. This achievement reflected the hard work of all employees of the Company to maintain the customers' trust each year. In general, most of the performance targets set for 2013 by the Shareholders could be achieved and the amount of tax contributions and dividends to the State also increased.

These achievements did not readily satisfy the Company's members. As a provider of classification and related technical services, PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) strives to further improve its professionalism and integrity in providing prime, reliable, and ethical services. The Company also needs to continue its active pursuit in IMO (International Maritime Organization) council and further align itself with other foreign classification agencies in Asia through ACS (Asian Classification Societies) Executive Meeting Forum to learn and increase its competence and capacity at international level. The Company also strives to further strengthen its presence in Consulting and Supervision by reaching the markets of private industries, realizing market potential, as well as equipping infrastructure and human resources competencies in order to improve services to users.

Tata Kelola Perusahaan

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal untuk mewujudkan Tata Kelola Perusahaan yang baik, Dewan Komisaris memiliki komite-komite di bawah Dewan Komisaris, yaitu Komite Audit dan Komite Investasi (Pengembangan Usaha). Komite-komite tersebut telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai kelengkapan perangkat Dewan Komisaris secara independen, efektif, dan optimal.

Tanggung jawab utama Dewan Komisaris beserta komite-komite di bawahnya untuk mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam hal manajemen dan perumusan arah strategis Perusahaan. Dewan Komisaris mewakili Pemegang Saham berkewajiban memastikan Direksi menjalankan tugas manajemen yang mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan kinerja operasional Perusahaan, yang harus sesuai dengan standar Tata Kelola Perusahaan yang baik. Direksi pun senantiasa melaksanakan saran yang diberikan oleh Dewan Komisaris serta melaksanakan praktik Tata Kelola Perusahaan yang baik sehingga tercapai keseimbangan antara kinerja usaha dan praktik Tata Kelola Perusahaan yang baik.

Dalam rangka melaksanakan praktik Tata Kelola Perusahaan yang baik, Perseroan juga melakukan berbagai kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan sebagai wujud kepedulian Perusahaan terhadap lingkungan di sekitarnya dan sesama.

Prospek Usaha Perseroan di Masa Mendatang

Secara umum, Dewan Komisaris bersama-sama dengan Direksi akan menekankan pentingnya menjaga pertumbuhan nilai Perusahaan secara jangka panjang. Perusahaan perlu mengkomunikasikan dan mengimbangi kegiatan usahanya dengan upaya pengembangan pada Sumber Daya Manusia sebagai modal utama Perusahaan, kegiatan riset dan pengembangan, penciptaan pasar baru, memperkuat *database* Perusahaan serta pemenuhan mutu layanan yang berorientasi pada standar mutu internasional. Demikian juga, pemanfaatan *Information Technology* (IT) untuk inovasi pelayanan dan peningkatan efektivitas dan efisiensi operasional harus terus dilanjutkan.

Corporate Governance

In carrying out the internal control function to achieve good corporate governance, the Board of Commissioners is supported by committees under its supervision, i.e. the Audit Committee and Investment (Business Development) Committee. These committees carry out their duties and functions in an independent, effective, and optimal manner as part of the Board of Commissioners.

The main responsibility of the Board of Commissioners and Committees under it is to oversee and provide advice to the Board of Directors on the Company's management and formulation of strategic direction. The Board of Commissioners representing the Shareholders is obliged to ensure that the Board of Directors performs its management duties in order to achieve the Company's vision, mission and operational performance goals, which must be in accordance with the standards of Good Corporate Governance. The Board of Directors must also implement the advice given by The Board of Commissioners as well as implements good corporate governance practices in order to achieve a balance between business performance and good corporate governance practices.

In order to implement good corporate governance practices, the Company also conducted various Corporate Social Responsibility (CSR) activities as a form of its concern for others and the surrounding environment.

The Company's Business Outlook

In general, the Board of Commissioners together with the Board of Directors will emphasize the importance of maintaining the growth of the Company's long-term value. The Company needs to communicate and balance its business activities with the development of Human Resources as the Company's main assets, research and development activities, creation of new markets, reinforcement of the Company database, and fulfillment of service based on international quality standards. Likewise, the use of Information Technology (IT) for service innovation and to improve the operational effectiveness and efficiency should be continued.

Seluruh pencapaian Perusahaan di tahun 2013 dapat diraih atas rahmat dan karunia-Nya semata. Oleh karena itu, Dewan Komisaris memanjatkan rasa syukur ke-hadirat Tuhan Yang Maha Esa dan menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada jajaran Direksi dan seluruh karyawan hingga mampu mempersembahkan kinerja Perusahaan yang baik sesuai dengan visi dan misi Perusahaan. Demikian pula kepada semua *stakeholders* atas kepercayaannya kepada Perusahaan, Pemegang Saham yang senantiasa memberikan saran dan arah pengelolaan Perusahaan serta kepada Komite Audit dan Komite Investasi dan Pengembangan Usaha yang telah bekerja sama dalam upaya pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membimbing kita dalam melanjutkan kesuksesan PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) di masa mendatang serta secara konsisten mampu menerapkan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*.

All of the Company's achievements in 2013 were possible thanks to the blessings of God Almighty. Therefore, the Board of Commissioners would like to express its gratitude to the Almighty God and also to the Board of Directors and all employees for recording a good performance in accordance with the Company's vision and mission. The Board of Commissioners would also like to express its highest appreciation to all stakeholders for their trust in the Company, to the Shareholders who always provide management advice and direction, and to the Audit Committee as well as the Investment and Business Development Committee who have supported the Board of Commissioners in carrying out its duties.

May God guide us in our efforts to maintain the success of PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) in the future and to consistently implement the Principles of Good Corporate Governance.

Atas Nama Dewan Komisaris
PT Biro Klasifikasi Indonesia,
On behalf of the Board of Commissioners
PT Biro Klasifikasi Indonesia



Machfud Sidik
Komisaris Utama
President Commissioner



Profil Dewan Komisaris

Board of Commissioners Profile

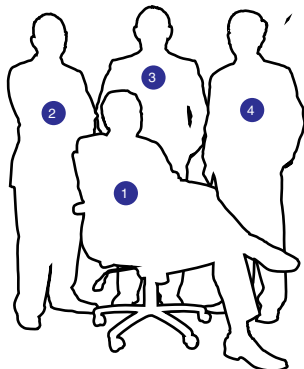


Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility

Informasi Perusahaan
Corporate Information

Laporan Keuangan
Financial Statement



01. Machfud Sidik
Komisaris Utama
President Commissioner

02. Minto Widodo
Komisaris
Commissioner

03. Erwin Rosmali
Komisaris
Commissioner

04. Faisal Halimi
Komisaris
Commissioner



Profil Dewan Komisaris

Board of Commissioners Profile



Machfud Sidik
Komisaris Utama
President Commissioner

Machfud Sidik (67 tahun, kelahiran Jombang, 18 Agustus 1946) merupakan lulusan Sarjana Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (1981), kemudian melanjutkan pendidikan Magister di Carnegie Mellon University, Amerika Serikat (1985), dan mendapatkan gelar Doktor di Universitas Gadjah Mada (1998). Ia memiliki banyak pengalaman di bidang pajak, khususnya ketika ia mendirikan konsultan pajak Dr. Machfud Sidik dan *partner*. Pengangkatannya sebagai Komisaris Utama Perusahaan berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. SK-322/MBU/2012. tanggal 11 September 2012 dan Keputusan Dewan Komisaris Nomor KU.001/Dekom.101/III/2013 tanggal 1 Maret 2013.

Machfud Sidik (67 years old, born in Jombang, 18 August 1946) holds a Bachelor degree in Economics from the Faculty of Economics, University of Indonesia (1981). He also holds a Master degree from Carnegie Mellon University, United States (1985), and a PhD from Gadjah Mada University (1998). He is highly experienced in taxation, especially when he established a tax consultant firm Dr. Machfud Sidik and partner. His appointment as the Company's President Commissioner is based on the Decision of the Minister of SOE No. SK-322/MBU/2012 dated 11 September 2012 and the Decision of the Board of Commissioners No. KU.001/Dekom.101/III/2013 dated 1 March 2013.



Minto Widodo
Komisaris
Commissioner

Minto Widodo (62 tahun, kelahiran Semarang, 11 April 1952), mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi Universitas Gadjah Mada (1981) dan Master of Art Economics dari Colorado State University, Amerika Serikat (1989). Ia memiliki pengalaman di Kementerian Keuangan RI (1981), Sekretaris Bapeksta Keuangan (1996), dan menjabat Kepala Pusat Sistem Informasi Keuangan Daerah (1996 - 2004). Minto Widodo diangkat sebagai Komisaris berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. SK-322/MBU/2012. tanggal 11 September 2012 dan Keputusan Dewan Komisaris Nomor KU.001/Dekom.101/III/2013 tanggal 1 Maret 2013.

Minto Widodo (62 years old, born in Semarang, 11 April 1952) holds a Bachelor degree in Economics from Gadjah Mada University (1981) and Master of Art in Economics from Colorado State University, USA (1989). He worked in the Ministry of Finance (1981), Secretary of the Agency for Export Facility Services and Financial Data Processing (1996), and served as Head of Center for Regional Financial Information System (1996-2004). Minto Widodo was appointed as Commissioner based on the Decision of the Minister of SOE No. SK-322/MBU/2012 dated 11 September 2012 and the Decision of the Board of Commissioners No. KU.001/Dekom.101/III/2013 dated 1 March 2013.



Erwin Rosmali
Komisaris
Commissioner

Erwin Rosmali (58 tahun, kelahiran Surabaya, 28 Juli 1955) merupakan lulusan Akademi Ilmu Pelayaran. Ia memiliki pengalaman sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI dan Komisaris Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) (2012 - sekarang). Pengangkatannya sebagai Komisaris berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. SK-322/MBU/2012. tanggal 11 September 2012 dan Keputusan Dewan Komisaris Nomor KU.001/Dekom.101/III/2013 tanggal 1 Maret 2013.

Erwin Rosmali (58 years old, born in Surabaya, 28 July 1955) graduated from the Academy of Maritime Science. He serves as Secretary of the Directorate General of Sea Transportation, Ministry of Transportation and as Commissioner of PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) (2012 - present). His appointment as Commissioner is based on the Decision of the Minister of SOE No. SK-322/MBU/2012 dated 11 September 2012 and the Decision of the Board of Commissioners No. KU.001/Dekom.101/III/2013 dated 1 March 2013.



Faisal Halimi
Komisaris
Commissioner

Faisal Halimi (45 tahun, kelahiran L. Inong, 6 April 1969) merupakan lulusan Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) Jakarta (1996). Ia berpengalaman sebagai Komisaris PT Terminal Petikemas Surabaya (2011 - 2012) dan menjabat sebagai Komisaris PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) (2012 - sekarang). Dasar pengangkatannya sebagai Komisaris berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. SK-322/MBU/2012. tanggal 11 September 2012 dan Keputusan Dewan Komisaris Nomor KU.001/Dekom.101/III/2013 tanggal 1 Maret 2013.

Faisal Halimi (45 years old, born in L. Inong, 6 April 1969) graduated from the Institute of Governance Studies (IIP) Jakarta (1996). He served as Commissioner of PT Terminal Petikemas Surabaya (2011 - 2012) and as Commissioner of PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) (2012 - present). His appointment as Commissioner is based on the Decision of the Minister of SOE No. SK-322/MBU/2012 dated 11 September 2012 and the Decision of the Board of Commissioners No. KU.001/Dekom.101/III/2013 dated 1 March 2013.



Laporan Direksi

Message from Board of Director

Kilas Kinerja 2013
Performance Highlight 2013

Laporan Manajemen
Management Report

Profil Perusahaan
Corporate Profile

Analisa dan Pembahasan Manajemen
Management discussion and Analysis





Mengemban Tugas Mulia

Keep Growing and Maintain Trust

Dengan peningkatan pendapatan mencapai 132,45% dibandingkan tahun sebelumnya, Perusahaan tumbuh dengan terus melakukan inovasi, diversifikasi dan sinergi untuk memantapkan pengembangan operasi dan usahanya. Selain itu, Perusahaan sebagai badan klasifikasi memiliki tugas mulia terkait menjamin keselamatan kapal di perairan Indonesia. Perusahaan percaya, mengemban dua aspek ini dengan penuh dedikasi menjadi sebuah kunci untuk terus menumbuhkan Perusahaan hingga dapat bersaing di taraf internasional.

With the 132.45% increase in revenue over the previous year, the Company is growing by keep doing innovation, diversification and synergy to strengthen its business and operational development. Moreover, the Company as a classification body has a noble task to ensure the safety of ships in Indonesian waters. The Company believes that carrying out these two aspects dedicatedly is the key to continue its growth and compete at international level.

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang terhormat,

Sebagai badan klasifikasi kapal nasional yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia, PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi Pemangku Kepentingan guna memenuhi kebutuhan jasa klasifikasi kapal dan menjamin keselamatan sarana-prasarana di perairan Indonesia. Di samping itu, sebagai badan usaha yang mengharuskan asas-asas profitabilitas, Perusahaan menjalankan kegiatan usaha dan operasionalnya dengan menerapkan strategi perluasan pangsa pasar dan diversifikasi usaha; mentransformasikan diri untuk dapat menciptakan sebuah organisasi yang solid dan efektif; menerapkan asas neraca keuangan yang efisien; mengembangkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai alat produksi Perusahaan; serta meningkatkan kompetensi Perusahaan untuk dapat berkalah di tingkat internasional.

Dengan upaya-upaya tersebut, Perusahaan berkeyakinan mampu menjawab tugas mulia yang diberikan sekaligus memenuhi kebutuhan pasar, yang kemudian akan memberikan nilai tambah kepada Pemegang Saham dan seluruh Pemangku Kepentingan. Untuk itu, izinkan kami selaku Direksi PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) menyampaikan kinerja Perusahaan selama tahun buku 2013 yang terangkum dalam buku laporan tahunan Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) tahun 2013.

Pertumbuhan Perusahaan dan Dinamika Tahun 2013

Tahun 2013 menjadi tahun yang mencerminkan pertumbuhan signifikan Perusahaan. Tingkat pertumbuhan perekonomian Indonesia yang stabil, dan program percepatan pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Indonesia demi mengakselerasi pertumbuhan ekonomi telah memberikan kontribusi positif terhadap laju perkembangan Perusahaan. Dengan situasi yang demikian mendukung, Perusahaan secara optimis mengembangkan aktivitas usahanya dan melakukan upaya korporasi dengan memberikan penugasan yang terukur dan terarah terhadap setiap fungsi organisasi yang diwujudkan dalam kontrak manajemen serta sebagai alat ukur penilaian kinerja dalam pemberian *reward & punishment*. Perusahaan juga berupaya mensejajarkan pelayanan setara dengan badan klasifikasi asing yang beroperasi di Indonesia untuk memperoleh pengakuan dan reputasi dari semua Pemangku Kepentingan, sehingga jasa klasifikasi dari Perusahaan adalah karena “kebutuhan” dan bukan “keharusan”.

Terkait visibilitas Perusahaan dalam mengupayakan dirinya menjadi anggota IACS, Perusahaan terus berusaha meningkatkan level kompetensi, khususnya SDM sebagai alat produksi utama. Perusahaan

Dear Shareholders and Stakeholders,

As a national ship classification body appointed by the Government of the Republic of Indonesia, PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) is committed to provide the best services for Stakeholders to meet the needs of ship classification services and ensure the safety of infrastructures in Indonesian waters. In addition, as a business entity that requires the principles of profitability, the Company runs its business and operational activities by implementing strategies to expand market share and diversify business; transforming itself to create a solid and effective organization; applying the principles of efficient financial balance; developing the capacity of Human Resources (HR) as the Company's means of production; and improving the Company's competence to compete at international level.

With these efforts, the Company is confident to fulfill the noble task that is given and at the same time meet the needs of the market, which then will provide added value to the Shareholders and all Stakeholders. For that, please allow us as the Board of Directors of PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) to present the performance of the Company during fiscal year 2013 which is summarized in the 2013 annual report book of Biro Klasifikasi Indonesia (BKI).

Company Growth and Dynamics in 2013

2013 is the year that reflected the Company's significant growth. Indonesia's stable economic growth rate and the acceleration of infrastructure development programs by the Government of Indonesia to accelerate economic growth have contributed positively to the Company's growth rate. With this favorable situation, the Company is optimistic in developing its business activities and conducting corporate efforts by giving measurable and targeted assignments to each organizational function which is embodied in the management contract as well as a measurement tool of performance appraisal in giving reward and punishment. The company also seeks to align its services to be equivalent with foreign classification bodies operating in Indonesia to obtain recognition and reputation from all Stakeholders, so that the Company's classification service becomes a “necessity” and not “mandatory”.

As for the Company's visibility in pursuing the IACS membership, the Company continues to increase its competence level, particularly its human resources as the primary means of production. The Company

memperkuat jumlah dan kemampuan *technical staff* di Kantor Pusat sebagai *think-tank* pengembangan jasa klasifikasi, sekaligus pula mengirimkan para *technical staff* dan surveyor untuk aktif dalam kegiatan-kegiatan badan klasifikasi asing dan menghadiri pertemuan *International Maritime Organization (IMO)* dan *Asian Classification Societies (ACS)* untuk mempelajari sistem operasional dan pelaksanaan survei di lapangan serta peraturan keselamatan. Untuk meningkatkan level kompetensi SDM, Perusahaan mengembangkan *training center* yang mampu memberikan sejumlah pelatihan dan diklat baik dari aspek teknis maupun pengelolaan organisasi Perusahaan.

Selain SDM, Manajemen memahami bahwa produk *Rules & Regulation* yang ditelurkan sendiri oleh Perusahaan menjadi sebuah tolak ukur kompetensi Perusahaan sebagai badan klasifikasi dalam menjalankan tugas dan aktivitas usahanya. Perusahaan kemudian melakukan kerjasama dengan lembaga penelitian seperti BPPT dan Perguruan Tinggi untuk melakukan riset bersama dalam menyusun dan mengembangkan *Rules & Regulation* secara mandiri. Perusahaan kemudian mampu menerbitkan beberapa *Rules & Regulation* mandiri di sepanjang tahun 2013, di antaranya *Rules Volume I* (edisi *English & Indonesia*), *Rules Volume II*, *Rules Volume III*, *Rules Volume IV*, *Rules Volume V* dan *Rules Volume VI*. Perusahaan berharap, penerbitan *Rules & Regulation* mandiri ini akan dapat mendorong tugas dan aktivitas Perusahaan sebagai badan klasifikasi ke tingkat kompetensi yang lebih tinggi.

Di bidang jasa statutoria, Perusahaan mengupayakan pelimpahan otoritas penuh statutoria oleh Pemerintah. Ini menjadi hal yang penting terutama disebabkan kebutuhan "*one stop service*" atau pelayanan satu pintu dari para Pemangku Kepentingan lainnya seperti Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan, pihak asuransi dan perbankan, asosiasi seperti INSA dan Gapasdap serta pihak galangan. Untuk itu manajemen mengarahkan membentuk *image* kesiapan dan kemampuan Perusahaan di bidang statutoria, antara lain menginformasikan persyaratan statutoria dari IMO secara *up to date*, merespon kapal klas yang terkena detensi/defisiensi dari PSC, serta memberikan edukasi tentang persyaratan statutoria. Dalam mengajukan pelimpahan statutoria secara penuh, dilakukan secara bertahap yaitu kapal klas dengan tonase > 2000 GT terlebih dahulu dan bukan > 500 GT. Strategi ini dilakukan untuk menunjukkan kelebihan layanan Perusahaan dan pertimbangan kesiapan Perusahaan jika pelimpahan penuh benar-benar diberlakukan. Di samping itu, Perusahaan melakukan *Harmonizes Survey System (HSS)* dan optimalisasi pelayanan satu pintu terhadap pelaksanaan survei klasifikasi dan statutoria, serta memperkuat *technical staff* di bidang statutoria yang memahami produk-produk peraturan IMO untuk

increases the number and capabilities of technical staff in the Head Office as a think-tank in developing classification services, and also send the technical staff and surveyors to be active in the activities of foreign classification bodies and attend the International Maritime Organization (IMO) and Asian Classification Societies (ACS) meetings to study the operational systems, the implementation of field surveys and safety regulations. To increase the HR competence level, the Company developed a training center that can provide trainings and education on technical and organizational management aspects.

Besides HR, the Management understands that the Rules & Regulations products created by the Company is a benchmark for the Company's competence as a classification body in performing its tasks and business activities. The company also collaborates with research institutes, such as BPPT, and universities to conduct joint research in preparing and developing the Rules & Regulations independently. In 2013, the company was able to independently publish several Rules & Regulations, including Rules Volume I (English & Indonesian edition), Rules Volume II, Rules Volume III, Rules Volume IV, Rules Volume V and Rules Volume VI. The Company hopes that the publication of these Rules & Regulations will boost its tasks and activities as a classification body to a higher level of competence.

In the field of statutory services, the Company seeks full statutory delegation of authority from the Government. This is important mainly due to the need of "one stop service" from other Stakeholders such as the Ministry of SOE, Ministry of Transportation, insurance and banking, associations such as INSA and Gapasdap, and shipyards. Therefore, the management directed to form the image of the Company's readiness and capability in the field of statutory, such as inform the up-to-date statutory requirements from IMO, respond to class ships in PSC detention/deficiency, give education about statutory requirements. The application for full statutory delegation is done in stages, the first is class ships with a tonnage > 2000 GT (not > 500 GT). This strategy is to show the advantages of the Company's services and considering the Company's readiness if the full delegation is really given. Moreover, the Company uses Harmonizes Survey System (HSS), optimize one stop service on the implementation of classification and statutory survey, and strengthen the technical staff in statutory field who understand the IMO regulation products to educate the surveyors in the field internally,

kemudian melakukan edukasi secara internal kepada surveyor di lapangan sekaligus mensosialisasikan persyaratan statutoria kepada *stakeholder* terkait.

Tahun 2013 Perusahaan juga mengupayakan untuk memperbesar dan memperkuat segmen Konsultansi & Supervisi. Perusahaan memberikan nilai tambah kepada pengguna jasa layanan seperti kecepatan layanan inspeksi, kecepatan penerbitan pelaporan dan sertifikasi, dan pengumuman informasi status inspeksi terhadap *equipment* yang diinspeksi melalui situs elektronik Perusahaan. Mengingat bisnis Konsultansi & Supervisi memiliki kecenderungan biaya tinggi dan *profit margin* rendah, maka diterapkan harga yang kompetitif dengan penekanan efektivitas penggunaan sumber daya dan efisiensi biaya melalui strategi pengendalian penggunaan biaya *Cost Control System* yang terpadu per proyek/pekerjaan. Perusahaan juga melakukan pemetaan bisnis per unit produksi untuk menentukan potensi pasar, kebutuhan tenaga inspektor, kompetensi yang diperlukan, serta peralatan pengujian yang diperlukan, sehingga masing masing area/unit produksi mampu melakukan pemasaran secara efektif. Dalam melakukan diversifikasi usaha pada segmen yang belum dikuasai secara teknis namun pasarnya cukup berpotensi, Perusahaan melakukan strategi kerjasama bisnis dengan mitra strategis yang memiliki reputasi, kemampuan teknologi dan berkualitas global. Tak hanya itu, Perusahaan menerapkan standar SNI 19-17020 sebagai perusahaan jasa inspeksi teknik dan standar SNI 19-17025 untuk kegiatan pengujian di laboratorium Perusahaan.

Sebagai badan usaha yang mengemban asas profitabilitas dan efektif-efisien, Perusahaan menerapkan strategi penyempurnaan struktur organisasi dengan mengoptimalkan fungsi dan penyesuaian organisasi sesuai kebutuhan. Perusahaan juga terus mendorong budaya penggunaan Teknologi Informasi (TI) pada seluruh lapisan manajemen dan mengoptimalkan pemanfaatan TI sebagai penunjang kegiatan operasional sekaligus penyebaran informasi layanan kepada *stakeholder* terkait.

Atas strategi dan upaya yang telah dilakukan, Perusahaan dengan bangga menginformasikan peningkatan pendapatan sebesar Rp555,20 miliar atau naik 132,45% dari pencapaian tahun 2012 sebesar Rp419,18 miliar. Dengan peningkatan pendapatan tersebut, Perusahaan mampu membukukan peningkatan laba komprehensif sebesar Rp106,35 miliar atau naik 157,7% dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp67,44 miliar. Pencapaian ini sebagian besar disebabkan kenaikan pendapatan Klasifikasi sebesar Rp363,47 miliar dibandingkan tahun 2012 yang sebesar Rp274,01 miliar, dimana produksi Klas Tunggal tumbuh 134,63% dari 201,20 juta poin di tahun 2012 menjadi 270,89 juta poin di tahun 2013, dan

as well as disseminate the statutory requirements to the relevant stakeholders.

In 2013, the Company also strived to expand and strengthen the Consultancy & Supervision segment. The Company provides added value to service users, such as the speed in inspection service, speed in report and certification issuance, and the announcement of equipment inspection status through the Company website. As the Consultation & Supervision business have a tendency of high costs and low profit margins, competitive pricing is applied with emphasis on effectiveness of the use of resource and cost efficiency through the strategy of cost control (integrated Cost Control System) for each project/job. The Company also does business mapping per production unit to determine the market potential, the needs of inspectors, competencies required, as well as the necessary testing equipment so that each production area/unit is capable to conduct effective marketing. In conducting business diversification on segments that have not been technically mastered but have potential markets, the Company implements a strategy of business cooperation with strategic partners that have the reputation, technological capabilities and global quality. The Company also implements SNI 19-17020 standard as a technical inspection service company and SNI 19-17025 standard for testing activities in the Company's laboratory.

As a business entity that assumes the principles of profitability and effective-efficient, the Company implements strategies to improve organizational structure by optimizing the functions and making organizational adjustments as needed. The Company also continues to encourage the culture of Information Technology (IT) utilization at all management levels and optimize the use of IT to support operational activities and disseminate service information to relevant stakeholders.

As the result of above strategies and efforts, the Company is pleased to inform the increase in revenue to Rp555.20 billion, increased by 132.45% from Rp419.18 billion in 2012. With the increased revenue, the Company managed to record an increase in comprehensive income to Rp106.35 billion, increased by 157.7% from Rp67.44 billion in the previous year. This achievement is mainly due to the increase in revenue from Classification amounted to Rp363.47 billion compared to Rp274.01 billion in 2012, of which the production of Single Class grew 134.63% from 201.20 million points in 2012 to 270.89 million points in in 2013, and cooperation with Foreign Class grew 128.77% from 20.79 million points

peningkatan kerjasama dengan Klas Asing 128,77% dari 20,79 juta poin di tahun 2012 menjadi 26,77 juta poin di tahun 2013; serta kenaikan pendapatan Konsultasi & Supervisi sebesar Rp191,73 miliar dibandingkan tahun 2012 yang sebesar Rp145,17 miliar, dengan produksi di sektor ini tumbuh 132,08% dari 145,16 juta mandays di tahun 2012 menjadi 191,73 juta *mandays* di tahun 2013.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Perusahaan menyadari pentingnya penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) dalam menjalankan tugasnya sebagai badan klasifikasi dan aktivitasnya sebagai badan usaha. Untuk itu, Perusahaan senantiasa mengedepankan nilai-nilai integritas dengan menerapkan prinsip-prinsip GCG, meliputi penetapan strategi Perusahaan yang jelas, praktik etika usaha, pengelolaan manajemen risiko usaha atau *Enterprise Risk Management* (ERM), hubungan dan komunikasi yang harmonis dengan seluruh Pemangku Kepentingan dan pengawasan operasional baik oleh Dewan Komisaris maupun oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) atau Audit Internal Perusahaan. Perusahaan berkeyakinan, dengan menerapkan prinsip-prinsip GCG di tengah optimisme dan pertumbuhan usahanya, Perusahaan dapat menjaga visibilitas dan kesinambungan usaha untuk jangka waktu jauh ke depan.

Perusahaan terus berupaya untuk meningkatkan serta melakukan penguatan infrastruktur organ GCG dengan penyesuaian sistem dan prosedur guna mencapai praktik GCG yang terbaik sehingga pelaksanaan GCG di Perusahaan menjadi semakin efektif. Sebagai badan klasifikasi yang erat kaitannya dengan segala bentuk informasi, Perusahaan bertanggung jawab penuh terhadap kerahasiaan seluruh informasi yang terkait dengan pengguna jasa. Kebijakan Perusahaan melarang insan Perusahaan untuk mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia terkait pengguna jasa kepada pihak ketiga, baik di dalam maupun di luar Perusahaan.

Selain itu, Perusahaan juga menerapkan Sistem Manajemen Mutu (*Quality System*) yang mengacu kepada standar internasional dan nasional, yaitu ISO 9001:2008, SNI 17020, SNI 17025 dan juga standar QSCS-IACS (*Quality System for Certification Scheme - International Association of Classification Society*). Penerapan Sistem Manajemen Mutu ini memberikan fokus Perusahaan kepada pengguna jasa dengan konsistensinya melakukan evaluasi atas kebutuhan (*Customer Need*) dan kepuasan pemakai jasa (*Customer Satisfaction*) dan mengkomunikasikan hasil evaluasi tersebut kepada seluruh unit kerja terkait.

in 2012 to 26.77 million points in 2013; as well as the increase in revenue from Consultation & Supervision amounted to Rp191.73 billion compared to Rp145.17 billion in 2012, with production in this sector grew 132.08% from 145.16 million mandays in 2012 to 191.73 million mandays in 2013.

Implementation of Corporate Governance and Corporate Social Responsibility

The Company realizes the importance of Good Corporate Governance (GCG) implementation in carrying out its duties as a classification body and its activity as a business enterprise. To that end, the Company always prioritize the values of integrity by applying GCG principles, including the establishment of clear company strategy, ethical business practices, Enterprise Risk Management (ERM), a harmonious relationship and communication with all Stakeholders and operational monitoring by the Board of Commissioners or by the Internal Audit Unit (IAU). The Company believes that by applying GCG principles in the midst of its business optimism and growth, the Company can maintain its visibility and business sustainability for a long time.

The company strives to improve and strengthen the infrastructure of GCG organs by adjusting systems and procedures to achieve the best GCG practices so that the implementation of GCG becomes more effective. As a classification body that is closely related to all forms of information, the Company is fully responsible for the confidentiality of all information related to the service users. The Company's policy prohibits members of the Company to disclose confidential information related to service users to a third party, either inside or outside the Company.

Moreover, the Company also implements Quality Management System (Quality System) which refers to international and national standards, such as ISO 9001:2008, SNI 17020, SNI 17025, as well as QSCS-IACS (Quality System for Certification Scheme - International Association of Classification Society) standards. Implementation of Quality Management System makes the Company focuses on service users by consistently evaluating the Customer Need and Customer Satisfaction, and communicating the results of these evaluations to all related units.

Selain itu, Perusahaan terlibat aktif untuk mengupayakan bentuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) kepada lingkungan dan masyarakat. Perusahaan menyadari, sebagai bagian dari entitas Bangsa Indonesia, Perusahaan memiliki tugas dan kewajiban untuk turut membangun potensi sosial yang ada dalam masyarakat. Dibentuknya unit pelaksana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang memiliki pembukuan tersendiri di luar pembukuan Perusahaan dan bertanggung jawab langsung kepada Direksi merupakan salah satu bagian dari program CSR yang dikembangkan Perusahaan.

Hingga akhir tahun 2013, Unit PKBL Perusahaan telah menyalurkan dana kemitraan di 6 (enam) wilayah binaan dengan jumlah mitra binaan sebanyak 773. Selain modal pinjaman, Perusahaan mengupayakan kepesertaan mitra binaan dalam berbagai pameran berskala nasional yang kemudian dapat membantu peningkatan usaha mitra binaan. Di samping itu, Unit PKBL Perusahaan juga menyalurkan sejumlah bantuan melalui program bina lingkungan dengan bentuk bantuan bencana alam, bantuan pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan sarana/prasarana umum.

Perubahan Komposisi Anggota Direksi

Akhir tahun 2013 merupakan lembaran awal bagi saya selaku Direktur Utama PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) menggantikan Sdr. Ibnu Wibowo, serta Sdr. Ibrahim Gause sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Keuangan & SDM menggantikan tugas Sdr. Anang Sundana. Untuk itu, atas nama Manajemen dan seluruh jajaran PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas segala dedikasi yang telah diberikan Sdr. Ibnu Wibowo dan Sdr. Anang Sundana selama mengabdikan dan membangun Perusahaan. Kontribusi yang telah diberikan Sdr. Ibnu Wibowo dan Sdr. Anang Sundana telah menciptakan pertumbuhan signifikan di segala sektor dari aktivitas usaha dan tugas badan klasifikasi dari Perusahaan.

Kepada Pemegang Saham dan seluruh Pemangku Kepentingan, saya mewakili seluruh Direksi menyampaikan ucapan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan untuk mengemban mandat meningkatkan level kompetensi dan mengembangkan aktivitas usaha Perusahaan. Kami berharap, strategi yang diupayakan akan menunjukkan buah di tahun-tahun mendatang, yang akan semakin memperbesar rasa kepercayaan Pemegang Saham dan seluruh Pemangku Kepentingan.

The Company is actively engaged in seeking forms of Corporate Social Responsibility (CSR) to the environment and society. The Company realizes that as a part of the Indonesian nation, the Company has a duty and responsibility to help build the social potential that exists in society. One of CSR programs developed by the Company is the establishment of Partnership and Community Development Program (PKBL) implementation unit which has its own bookkeeping apart from the Company's books and directly responsible to the Board of Directors.

By the end of 2013, the Company's PKBL Unit has disbursed partnership funds in 6 (six) regions with 773 Patronage Partners. Besides lending capital, the Company strives for the participation of patronage partners in various national exhibitions which can help to improve their business. In addition, PKBL Unit also distribute aids through community development programs in the form of disaster relief, health and educational aids, as well as the construction of public facilities/infrastructure.

Changes in the Composition of Board of Directors

End of 2013 is a new beginning for me as the President Director of PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) replacing Mr. Ibnu Wibowo, and Mr. Ibrahim Gause as Acting Director of Finance & HR replacing Mr. Anang Sundana. Therefore, on behalf of the Management and all members of PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), we would like to express our appreciation and gratitude for all the dedication given by Mr. Ibnu Wibowo and Mr. Anang Sundana in serving and building the Company. Mr. Ibnu Wibowo and Mr. Anang Sundana's contributions have created significant growth in all sectors of business activity and the Company's task as a classification body.

On behalf of the Board of Directors, I would like to express gratitude to the Shareholders and all Stakeholders for the trust given to carry out the mandate of improving the Company's level of competence and developing its business activities. We hope that the strategies pursued will produce results in the coming years, which will further increase the trust of Shareholders and all Stakeholders.

Menjemput Masa Depan

Sebagai penutup, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemegang Saham dan seluruh Pemangku Kepentingan, baik kepada Pemerintah Republik Indonesia dan Kementerian BUMN sebagai penentu kebijakan serta kementerian lainnya, komite BKI dan pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap badan klasifikasi di Indonesia, pengguna jasa, para pemangku kepentingan lainnya, dan para pihak yang telah membantu aktivitas Perusahaan, serta seluruh insan BKI atas kerja keras, soliditas dan loyalitas yang telah ditunjukkan. Tak lupa, kami haturkan apresiasi dan terima kasih kepada Dewan Komisaris atas arahan dan dedikasinya. Dengan jalinan kerjasama, Perusahaan telah menjadi badan klasifikasi dan sekaligus badan usaha yang tumbuh dan terpercaya bagi kepentingan masyarakat melalui penerapan peraturan dan kebijakan yang tepat. Kami percaya bahwa dengan dukungan, kerjasama, dan tekad yang kuat, Perusahaan dapat terus tumbuh dalam mengemban visinya, baik sebagai badan usaha berorientasi *profit* maupun badan klasifikasi yang mengemban tanggung jawab menciptakan situasi akan sarana dan lingkungan kelautan Indonesia yang kondusif.

Embrace the Future

Finally, we would like to express appreciation and gratitude to the Shareholders and all Stakeholders, both to the Government of the Republic of Indonesia and the Ministry of SOE as policy makers as well as other ministries, BKI committees and parties with vested interest in the classification body in Indonesia, service users, other stakeholders, and those who have helped the Company's activities, as well as all members of BKI for their hard work, solidiity and loyalty. We would also like to express our appreciation and gratitude to the Board of Commissioners for their guidance and dedication. With this cooperation, the Company has become a growing and reliable classification body and business entity for the benefit of society through the application of appropriate regulations and policies. We believe that with the support, cooperation, and strong determination, the Company will continue to grow and carry out its vision, either as a for-profit entity or as a classification body that responsables for creating a conducive situation for Indonesian marine facilities and environment.

Atas nama Direksi
PT Biro Klasifikasi Indonesia,
On behalf of the Board of Directors
PT Biro Klasifikasi Indonesia



Rudiyanto
Direktur Utama
President Director



Profil Direksi

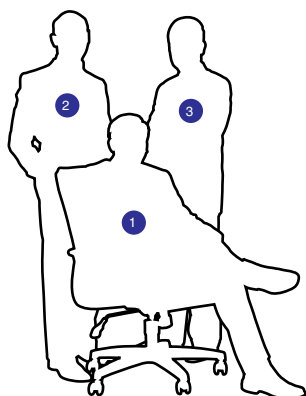
Board of Directors Profile

Kilas Kinerja 2013
Performance Highlight 2013

Laporan Manajemen
Management Report

Profil Perusahaan
Corporate Profile

Analisa dan Pembahasan Manajemen
Management discussion and Analysis



01. Rudiyanto
Direktur Utama
President Director

02. Iman Satria Utama
Direktur Teknik & Operasi
*Operation & Technique
Director*

03. Ibrahim Gause
**Direktur Pemasaran &
Pengembangan merangkap
Plt. Direktur Keuangan &
SDM**
*Director Of Marketing &
Development Concurrently
With Plt. Director Of
Finance & Human
Resources*



Rudiyanto
Direktur Utama
President Director

Rudiyanto (45 tahun, kelahiran Bandung, 24 Juni 1968) mendapatkan gelar Sarjana Teknologi Perminyakan dari UPN Veteran Yogyakarta (1995) dan Sarjana Ilmu Politik dari Univ. Gadjah Mada Yogyakarta, kemudian melanjutkan pendidikan Magister Manajemen di STIE IPMI dan International Institute for Risk & Safety Management, BSC, Inggris. Ia memiliki banyak pengalaman di bidang *engineer*, baik sebagai *engineer* di Schlumberger Anadril, Divisi *Engineering Services* PT Sucofindo, *Vice President* SBU Sucofindo, International Certification Services (SICS), Direktur Utama PT Episi, *Vice President* SBU Rekayasa dan Transportasi (2008-2013), dan Direktur Komersial II dan Pgs Direktur Komersial I PT Sucofindo (2013). Pengangkatan Rudiyanto sebagai Direktur Utama Perusahaan berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. SK-.424/MBU/2013 tanggal 19 Desember 2013.

Rudiyanto (45 years old, born in Bandung, 24 June 1968) holds a Bachelor's degree in Petroleum Technology from UPN Veteran Yogyakarta (1995), Bachelor's degree in Political Science from Gadjah Mada University, Master's degree in Management from STIE IPMI, and International Institute for Risk & Safety Management, BSC, England. He has a lot of experience in engineering from his works as an engineer at Schlumberger Anadril, Division of Engineering Services in PT Sucofindo, as Vice President of SBU Sucofindo, International Certification Services (SICS), as President Director of PT Episi, Vice President of SBU Engineering and Transport (2008-2013), and Director of Commercial II, and Acting Director of Commercial I at PT Sucofindo (2013). Rudiyanto's appointment as President Director of the Company is based on the SOE Ministerial Decree No. SK-.424/MBU/2013 dated 19 December 2013.



Iman Satria Utama
Direktur Teknik & Operasi
Operation & Technique Director

Iman Satria Utama (53 tahun, kelahiran Jakarta, 20 Agustus 1960) merupakan lulusan Akademi Ilmu Pelayaran, Jakarta (1981), MPB-I/ANT-I (1990/2001), Sarjana Sosial Politik Univ Saburai, Bandar Lampung (1991) dan Magister Manajemen STIE Budi Luhur, Jakarta (2001). Ia berpengalaman dalam dunia pelayaran dan pelabuhan, diantaranya sebagai Kepala Subseksi Kesyahbandaran Bengkulu (1992-1995), Kepala Seksi Lalu Lintas Angkatan Laut dan Kesyahbandaran Lampung (1995-2001), Kepala Bidang Kelaiklautan Kapal Adpel Panjang, Lampung (2001-2006), Kepala Bidang Kelaiklautan Kapal Adpel Pontianak (2006-2007), Kepala Bidang Kelaiklautan Kapal Adpel Semarang (2007-2009), Kasubdit Nautis, Teknik dan Radio Kapal Ditkapel Jakarta (2009-2011) dan Kepala Kantor Adpel Palembang (2011-2012). Iman Satria Utama telah menjabat sebagai Direktur Teknik & Operasi Perusahaan sejak tahun 2012 dengan dasar pengangkatan Keputusan Menteri BUMN No. SK-284/MBU/2012 tanggal 3 Agustus 2012 yang kemudian dikukuhkan kembali melalui Keputusan Menteri BUMN No. SK-.424/MBU/2013 tanggal 19 Desember 2013.

Iman Satria Utama (53 years old, born in Jakarta, 20 August 1960) graduated from Merchant Marine Academy, Jakarta (1981), MPB-I/ANT-I (1990/2001), holds a Bachelor's degree in Social and Political Science from Saburai University, Bandar Lampung (1991) and a Master's degree in Management from STIE Budi Luhur, Jakarta (2001). He is experienced in shipping and ports industry. He served as Head of Bengkulu Port Management Subsection (1992-1995), Head of the Traffic Section of the Navy and Lampung Port Management (1995-2001), Head of Ship Seaworthiness Division - Panjang Port Administrator, Lampung (2001-2006), Head of Ship Seaworthiness Division - Pontianak Port Administrator (2006-2007), Head of Ship Seaworthiness Division - Semarang Port Administrator (2007-2009), Head of Subdirector of Ship Radio, Technical and Nautical - Directorate of Shipping and Seafaring, Jakarta (2009-2011) and Head of Palembang Port Administration Office (2011-2012). Iman Satria Utama has served as the Company's Director of Engineering & Operations since 2012 based on the SOE Ministerial Decree No. SK-284/MBU/2012 dated 3 August 2012 which was reaffirmed by the SOE Ministerial Decree No. SK-.424/MBU/2013 dated 19 December 2013.



Ibrahim Gause

Direktur Pemasaran & Pengembangan merangkap Plt. Direktur Keuangan & SDM

Director of Marketing & Development concurrently Acting Director of Finance & HR

Ibrahim Gause (54 tahun, kelahiran Palembang, 25 Januari 1960) menyelesaikan gelar Sarjana Hukum Perdata Internasional di Univ. Diponegoro Semarang. Ia berpengalaman sebagai Corporate Secretary PT Surveyor Indonesia, Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT Surveyor Indonesia (Persero) dan Direktur operasi I PT Surveyor Indonesia (Persero). Ibrahim Gause telah menjabat sebagai Direktur Pemasaran & Pengembangan Perusahaan melalui Keputusan Menteri BUMN No. SK-175/MBU/2013 tanggal 5 Maret 2013 yang kemudian kembali dikukuhkan melalui Keputusan Menteri BUMN No. SK-.424/MBU/2013 tanggal 19 Desember 2013. Ia juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Keuangan & SDM Perusahaan dengan dasar pengangkatan Keputusan Menteri BUMN No. SK-.424/MBU/2013 tanggal 19 Desember 2013.

Ibrahim Gause (54 years old, born in Palembang, 25 January 1960) holds a Bachelor's degree in International Law from Diponegoro University. He served as Corporate Secretary of PT Surveyor Indonesia, Director of Planning and Development of PT Surveyor Indonesia (Persero), and Director of Operations I of PT Surveyor Indonesia (Persero). Ibrahim Gause's appointment as the Company's Director of Marketing and Development is based on the SOE Ministerial Decree No. SK-175/MBU/2013 dated 5 March 2013 and reaffirmed by the SOE Ministerial Decree No. SK-.424/MBU/2013 dated 19 December 2013. He was also appointed as the Company's Acting Director of Finance & HR based on the SOE Ministerial Decree No. SK-.424/MBU/2013 dated 19 December 2013.



Pertanggungjawaban Laporan Tahunan

Accountability of Annual Report

SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2013 PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO) TBK.

STATEMENT OF MEMBERS OF BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS ON RESPONSIBILITY FOR ANNUAL REPORT OF PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam laporan tahunan PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) tahun 2013 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We undersigned clarify that all information in annual report 2013 of PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) is included completely and are responsible for the accuracy of this annual report.

This statement is made truly to the best of our knowledge

Dewan Komisaris
Board of Commissioners

Machfud Sidik
Komisaris Utama
President Commissioner

Erwin Rosmali
Komisaris
Commissioner

Minto Widodo
Komisaris
Commissioner

Faisal Halimi
Komisaris
Commissioner

Direksi
Board of Commissioners

Rudiyanto
Direktur Utama
President Director

Iman Satria Utama
Direktur Teknik & Operasi
Operation & Technique Director

Ibrahim Gause
Direktur Pemasaran &
Pengembangan merangkap Plt.
Direktur Keuangan & SDM
Director of Marketing &
Development concurrently Acting
Director of Finance & HR



Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility

Informasi Perusahaan
Corporate Information

Laporan Keuangan
Financial Statement





Profil Perusahaan *Company Profile*



Profil Perusahaan

Company Profile

Nama:
PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)

Alamat:
Jl. Yos Sudarso Kav.38-40
Jakarta - 14320

Phone: 62-21-4301017
Fax: 62-21-43936175

Lingkup Kegiatan Usaha:
Klasifikasi dan Registrasi Kapal

Kepemilikan Saham:
100% Pemerintah Republik Indonesia

Tanggal Pendirian:
1 Juli 1964

Situs web:
www.bki.co.id

Surel:
bki@bki.co.id

Name:
PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)

Address:
Jl. Yos Sudarso Kav.38-40
Jakarta - 14320

Phone: 62-21-4301017
Fax: 62-21-43936175

Scope of Business:
Vessel Classification and Registration

Share Ownership:
100% of the Government of the Republic of Indonesia

Establishment Date:
July 1, 1964

Website:
www.bki.co.id

Email Address:
bki@bki.co.id







Sekilas Tentang Biro Klasifikasi Indonesia

Biro Klasifikasi Indonesia in Brief

Struktur geografis dan alam Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau dengan area teritori laut yang sangat luas, dimana sarana perhubungan laut berupa kapal sebagai sarana terpenting yang harus dikelola dan membutuhkan pemeriksaan yang teliti, teratur dan sistematis terhadap kondisi kapal agar terjaga keselamatan jiwa dan benda di laut. Berdasarkan kondisi tersebut serta didorong oleh kesadaran nasional dan hasrat untuk memiliki badan klasifikasi nasional yang pada gilirannya akan membuka kesempatan kerja bagi tenaga-tenaga ahli perkapalan bangsa sendiri, maka pemerintahan Presiden pertama Republik Indonesia Ir Soekarno atas prakarsa Wisnoentoro Martokoesoemo dan kawan-kawan mendirikan PN (Perusahaan Negara) Biro Klasifikasi Indonesia dan ditandatangani pada 1 Juli 1964 oleh Ali Sadikin.

Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) menjadi badan klasifikasi ke-4 di Asia setelah Jepang, China dan Korea, dan menjadi satu-satunya badan klasifikasi nasional yang bertugas untuk mengklaskan kapal-kapal niaga berbendera Indonesia dan kapal berbendera asing yang secara *reguler* beroperasi di perairan Indonesia. Wisnoentoro Martokoesoemo sendiri aktif dalam berbagai organisasi dan anggota Dewan Eksekutif Indonesia German Circle, Sekretaris Jenderal Perhimpunan Alumni Jerman (PAJ), dan Dewan Manajemen dari The German-Indonesian Chamber of Industry and Commerce (EKONID). Ia dianugerahkan "Verdients Kreuz der Bundes Republik Deutschland" oleh Pemerintah Jerman, dan penghargaan atas kontribusinya dalam mengembangkan Fakultas Teknologi Kelautan Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya. Wisnoentoro lulusan Diploma Teknik di Naval Architect dari Technische Hochschule Hannover, Jerman pada tahun 1962.

Kegiatan klasifikasi BKI merupakan pengklasifikasian kapal berdasar konstruksi lambung, mesin dan listrik kapal dengan tujuan memberikan penilaian atas laik tidaknya kapal tersebut untuk berlayar. Selain itu, BKI juga dipercaya oleh Pemerintah untuk melaksanakan survei dan sertifikasi statutoria atas nama Pemerintah Republik Indonesia, antara lain Load Line, ISM Code dan ISPS Code.

BKI dibentuk dengan menerapkan standar teknik dalam melakukan kegiatan desain, konstruksi dan survei *marine* terkait dengan fasilitas terapung, termasuk kapal dan konstruksi *offshore*. Standar ini disusun dan dikeluarkan oleh BKI sebagai publikasi

The Indonesian geographical and natural structures consist of thousands of islands with a very wide sea territory, in which means of sea transportation in the form of vessel, as the most important means, and the vessel condition must be managed and inspected in a thorough, regular and systematic manner so as to safeguard the safety of the passengers and goods at the sea. Based on that condition and urged by national awareness and ambition to have a national classification agency which in turn, it would open work opportunity for the Indonesian vessel experts, then the first President of the Republic of Indonesia, Ir. Soekarno, in his government on the initiative of Wisnoentoro Martokoesoemo and his friends, established Biro Klasifikasi Indonesia, a State-owned Enterprise (SoE), and its Deed of Establishment was signed by Ali Sadikin on July 1, 1964.

Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) has been the fourth Asian classification agency following Japan, China and Korea, and it has been the sole national classification agency in charge of making a classification of Indonesian flagged and foreign flagged commercial vessels which regularly operates in Indonesian waters. Wisnoentoro Martokoesoemo himself was actively involved in various organizations and a member of Executive Board of Indonesia German Circle, Secretary General of the German Alumni Association (PAJ), and the Management Board of the German-Indonesian Chamber of Industry and Commerce (EKONID). He was awarded "Verdients Kreuz der Bundes republik Deutschland" by the German Government for his contribution to the development of the Department of Marine Technology of Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) in Surabaya. Wisnoentoro was a graduate of the Engineering Diploma majoring in Naval Architect of the Technische Hochschule Hannover, Germany, in 1962.

BKI has been conducting the vessel classification based on hull construction, machinery and electricity installation of the vessels for the purpose of evaluating the seaworthiness of the vessels. In addition, BKI has been entrusted by the Government to conduct surveys and statutory certifications in the name of the Government of the Republic of Indonesia, inter alia, Load Line, ISM Code and ISPS Code Certifications.

BKI was established by implementing technical standards in the activities of design and construction as well as maritime surveys related to floating facilities, including vessels and offshore construction. These standards were prepared and issued by BKI

teknik. Sebuah kapal yang didesain dan dibangun berdasarkan standar BKI akan mendapatkan Sertifikat Klasifikasi dari BKI, dimana penerbitan sertifikat dilakukan setelah BKI menyelesaikan serangkaian survei klasifikasi yang dipersyaratkan.

Sebagai Badan Klasifikasi yang independen dan mengatur diri sendiri, BKI tidak memiliki kepentingan terhadap aspek komersial terkait dengan desain kapal, pembangunan kapal, kepemilikan kapal, operasional kapal, manajemen kapal, perawatan/perbaikan kapal, asuransi atau persewaan. BKI juga melakukan penelitian dan pengembangan dalam rangka peningkatan mutu dan standar teknik yang dipublikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan jasa klasifikasi kapal.

Melihat peningkatan kegiatan dan perkembangan serta prospek usaha yang cukup cerah, di tahun 1977 Pemerintah RI selaku pemilik BKI mengupayakan peningkatan kemandirian usaha BKI dengan melakukan perubahan status badan organisasi menjadi Perseroan Terbatas, atau PT (Persero) yang diperkuat melalui Peraturan Pemerintah (PP) No.1 Tahun 1977 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Biro Klasifikasi Indonesia Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

BKI didirikan untuk menghemat devisa Negara bagi layanan inspeksi kapal-kapal nasional dan mendukung kemandirian dunia industri maritim Indonesia. Melalui dukungan kerjasama dengan Germansicher Lloyd, German, BKI saat ini telah menjadi sebuah badan klasifikasi nasional yang besar. Hingga saat ini, selain kegiatan usaha klasifikasi, BKI juga mengembangkan kegiatannya di bidang jasa Konsultasi dan Supervisi. Berkantor pusat di Jakarta, BKI memiliki jaringan kantor cabang di pelabuhan besar seluruh Indonesia dan Singapura. Selain itu BKI juga memiliki kerjasama dengan Badan Klasifikasi Asing, baik dalam bentuk *Mutual Representative* maupun *Dual Class*.

as technical publications. A vessel designed and built based on the BKI standards would obtain a Classification Certificate issued by BKI after BKI completed a set of requisite classification surveys.

As an independent Classification Agency which was self-regulatory, BKI had no interest in commercial aspects related to the design, building, ownership, operation, management, maintenance/repair, insurance or leasing of the vessel. BKI also conducted research and development for the purpose of enhancing technical quality and standards which were published to the stakeholders of vessel classification services.

Since it was seen that there were increasing activities and development as well as the business prospect seemed quite good, in 1977 the Government of the Republic of Indonesia as the BKI owner attempted to improve the BKI business independence by changing the status of legal entity of Biro Klasifikasi Indonesia into a Limited Liability Company or PT (Persero) which was strengthened by Government Regulation No.1 Year 1977 regarding the Change in the Status of Biro Klasifikasi Indonesia from a State-owned Enterprise to a Limited Liability Company (Persero).

BKI was established to minimize the Indonesian foreign exchange for the inspection services of domestic vessels and to support the independence of the Indonesian maritime industry. BKI, supported by cooperation with Germansicher Lloyd, Germany, has been currently a major national classification agency. Until now, in addition to the Classification services, BKI has developed its business activities in the field of Consultancy and Supervision services. BKI, with its headquarters located in Jakarta, has a network of branches in major ports throughout Indonesia and Singapore. BKI also has established cooperation with Foreign Classification Agencies, both in the form of Mutual Representative and Dual Class.



1964

PN Biro Klasifikasi Indonesia berdiri sesuai dengan keputusan Menteri Perhubungan Laut No. Th.1/17/2 tanggal 26 September 1964.

Biro Klasifikasi Indonesia, an SoE, was established pursuant to Decree of the Minister of Sea Transportation No. Th.1/17/2 of September 26, 1964.

1977-1978

Perubahan status badan hukum menjadi PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 1977 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Biro Klasifikasi Indonesia Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Pembuatan Anggaran Dasar dihadapan Notaris Imas Fatimah, S.H. dengan Akte No.57 tanggal 19 Oktober 1978 dan disahkan oleh Menteri Kehakiman RI No. Y.A.5/345/1978 tanggal 7 November 1978 serta diumumkan pada Berita Negara No.58 tahun 1979.

The change in the status of legal entity into PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) pursuant to Government Regulation No. 1 Year 1977 regarding the Change in the Status of Biro Klasifikasi Indonesia from a State-owned Enterprise to a Limited Liability Company (Persero). The Articles of Association was made before Notary Imas Fatimah, S.H., in Deed No.57 of October 19, 1978 and legalized by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in Decree No. Y.A.5/345/1978 of November 7, 1978 and announced in Official Gazette No.58 Year 1979.

1982

Perusahaan merintis bidang usaha jasa konsultansi dan supervisi di bidang maritim dan industri serta teknik lainnya yang merupakan diversifikasi usaha dan merupakan *profit making*, sehingga kegiatan usaha Perusahaan terbagi menjadi dua: jasa Klasifikasi & Statutoria, dan jasa Konsultansi & Supervisi.

The Company started the business of Consultancy and Supervision services in marine, industrial and other technical fields for the purpose of business diversification and making profit so that the business activities of the Company were divided into two fields: Classification and Statutory Certification services and Consultancy and Supervision services.

1984-1985

Perubahan Anggaran Dasar melalui Akte Notaris Imas Fatimah, S.H.No. 180 tanggal 30 November 1984 dan No. 110 tanggal 26 Juli 1985 tentang Pernyataan Keputusan Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar dengan merubah nama Klasifikasi Indonesia menjadi PT (Persero) Biro Klasifikasi Indonesia. Perubahan ini disahkan oleh Menteri Kehakiman RI No. C.2-5322HT.0104 tahun 1985 tanggal 24 Agustus 1985 serta diumumkan dalam No. 97 tanggal 3 Desember 1985.

The Articles of Association was changed by Notary Imas Fatimah, S.H., in Deed No. 180 of November 30, 1984 and Deed No. 110 of July 26, 1985 regarding the Declaration of Meeting Resolutions and the Change in the Articles of Association by changing the name from Klasifikasi Indonesia to PT (Persero) Biro Klasifikasi Indonesia. This change was legalized by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in Decree No. C.2-5322HT.0104 Year 1985 of August 24, 1985 and announced in Official Gazette No. 97 of December 3, 1985.

1998-1999

Perubahan Anggaran Dasar yang disahkan oleh Menteri Kehakiman RI dengan keputusan No. C2-20.099 HT.01.04 tahun 1998 tanggal 15 Oktober 1998 dibuat oleh Notaris Neneng Salmiah, S.H., M.Hum. serta diumumkan dalam Berita Negara No. 35 tanggal 30 April 1999.

The change in the Articles of Association legalized by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in Decree No. C2-20.099 HT.01.04 of 1998 of October 15, 1998 was made by Notary Neneng Salmiah, S.H., M.Hum., and announced in Official Gazette No. 35 of April 30, 1999.

1995

Perubahan Anggaran Dasar di hadapan Notaris Neneng Salmiah, S.H. dengan akta pernyataan Keputusan Rapat tanggal 12 Maret 1995.

The Articles of Association was changed before Notary Neneng Salmiah, S.H., in Deed of Declaration of Meeting Resolutions of March 12, 1995.





Visi, Misi & Nilai Perusahaan

Company's vision, Misions & Values

Visi

Menjadikan BKI sebagai badan klasifikasi yang mengutamakan terjaminnya keselamatan jiwa, kapal, harta benda dan lingkungan laut dan yang setara dengan badan klasifikasi internasional serta perusahaan jasa teknik yang terpercaya dan terbaik dari segi kualitas produk, kualitas SDM dan kinerja perusahaan dan yang mampu bersaing dengan perusahaan jasa teknik lainnya baik nasional maupun internasional.

Misi

Segmen Klasifikasi dan Statutoria

Mengembangkan profesionalisme pelayanan jasa klasifikasi sesuai standar internasional dalam rangka turut serta menjaga terjaminnya keselamatan jiwa, kapal, harta benda dan lingkungan laut.

Segmen Konsultasi dan Supervisi

Mengembangkan dan mengimplementasikan profesionalisme dalam kegiatan konsultasi dan supervisi yang diakui dan memiliki keunggulan bersaing, baik nasional maupun internasional.

Sebagai dasar dalam mengelola Perusahaan terutama dalam melaksanakan misi dan tugas, maka falsafah yang dianut oleh Perusahaan hingga saat ini adalah:

1. Mengutamakan mutu dan pelayanan jasa berdasarkan komitmen yang tinggi terhadap masalah keselamatan;
2. Senantiasa meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Perusahaan secara konsisten dan berkesinambungan;
3. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama yang berkaitan dengan keselamatan kapal dan keselamatan peralatan produksi di bidang migas, mineral, batubara, naker, industri dan perhubungan.

Tujuan Perusahaan

Meningkatkan reputasi dan nilai Perusahaan dengan:

- a. Mengutamakan terjaminnya keselamatan jiwa dan benda di laut serta perlindungan lingkungan melalui pengembangan dan pemeriksaan standar kapal serta fasilitas terkait lainnya;
- b. Membentuk Citra Perusahaan (*Corporate Image*), bahwa jasa BKI dibutuhkan dan menjadi standar dan acuan kualitas;
- c. Membantu peningkatan pendapatan negara baik dalam bentuk Rupiah maupun valuta asing;

Vision

To create BKI to be a classification agency prioritizing the safety of passengers, vessels, assets and sea environment and to be equivalent to international classification agency as well as to be a reliable and best technical service provider from the aspects of product quality, human resources quality and company performance and able to compete with other technical service providers, both domestically and internationally.

Misions

Classification and Statutory Certification Segment

To develop professionalism of the classification service to meet international standards for the purpose of being involved in safe guarding the safety of passengers, vessels, assets and sea environment.

Consultancy and Supervision Segment

To develop and implement professionalism of the consultancy and supervision activities to be recognized and competitive, both domestically and internationally.

To serve as a basis in managing the Company, especially in implementing the missions and tasks, until now the Company has implemented the principles as follows:

1. *To prioritize the quality and services based on high commitment to safety issues;*
2. *To keep improving the quality of the Company's Human Resources consistently and sustainably;*
3. *To respond to the development of science and technology, especially those related to the safety of vessels and production equipment in the fields of oil and gas, mineral, coal and geothermal, labors, industry and transportation.*

Objectives

To improve the Company's reputation and values by:

- a. *Prioritizing the safety of passengers and assets at the sea as well as environmental protection through development and inspection of vessel standards and other related facilities;*
- b. *Creating Corporate Image that the BKI services are necessary and serve as quality standards and reference;*
- c. *Helping increase in state revenue, both in Rupiah and foreign exchange;*

- d. Memberikan kesempatan kepada para tenaga ahli kelautan nasional untuk berpartisipasi melalui pengembangan ilmu dan pengetahuan serta pengalamannya; dan
- e. Pengelolaan Perusahaan secara efektif dan efisien dengan menerapkan *Good Corporate Governance*.

Nilai Perusahaan

Integritas

Kepribadian karyawan yang etis dan selalu memperjuangkan kebenaran melalui kejujuran, kedisiplinan, keteladanan dan dedikasi yang tinggi dengan menjunjung tinggi nama baik perusahaan.

Profesionalisme

Sikap professional setiap karyawan yang memiliki komitmen tinggi untuk mencapai hasil terbaik dan melampaui sasaran yang ditetapkan melalui inovasi dan perbaikan berkelanjutan.

Kerjasama

Usaha karyawan untuk menyatukan kemampuan dan menggali potensi setiap orang melalui sinergi dan kerja tim untuk mencapai tujuan bersama melalui sikap dan perilaku empirik, proaktif, percaya dan terbuka.

Pelayanan Prima

Sikap dan perilaku karyawan yang ramah, menebar salam, santun, ikhlas, proaktif dalam melayani demi kepuasan pelanggan.

Sadar Lingkungan

Peran aktif karyawan untuk melestarikan lingkungan alam, lingkungan kerja dan lingkungan usaha, menjaga hubungan baik dengan mitra kerja, masyarakat, menciptakan suasana kerja yang sehat dan menyenangkan serta mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja.

Kepuasan Pelanggan

Memberikan kepuasan kepada pemakai jasa melalui produk dan pelayanan prima yang bermutu berlandaskan kepada tujuan etos kerja yaitu bertindak segera, responsif, disiplin, kerja keras, kreatif, bersih dan baik sangka.

Budaya Perusahaan

Untuk mencapai tujuan Perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang diperlukan kerja keras dengan menumbuhkan kembangkan motivasi berprestasi dikalangan pegawai yang dirumuskan dalam budaya perusahaan yang merupakan nilai-nilai pokok yang

- d. *Providing national maritime experts with opportunity to participate in the development of science and knowledge as well as its experience; and*
- e. *Managing the Company effectively and efficiently by implementing the Good Corporate Governance.*

Values

Integrity

Employees must have good personality traits, ethics and continuously strive for the truth, honesty, discipline, leading by example and high dedication to uphold the Company's reputation.

Professionalism

Every employee must be highly committed to achieving best results and exceeding the determined goals by making continuous innovations and improvement.

Cooperation

Employees must put their endeavors to unite the capabilities and explore potentialities of every person by achieving synergy and establishing teamwork to reach mutual objectives through empirical, proactive, trustworthy and transparent attitude and behaviour.

Excellent Services

Employees must have attitude and behaviour which are friendly, hospitable, polite, sincere and proactive in providing services for the customer satisfaction.

Environmentally-friendly Behavior

Employees must play an active role in preserving natural, working and business environment, maintaining good relationship with working partners and community, creating fair and good working atmosphere as well as prioritizing occupational health and safety.

Customer Satisfaction

Employees must provide service users with quality products and excellent services for the customer satisfaction based on the purpose of work ethic, namely taking immediate actions as well as being responsive, disciplined, hard-working, honest and unprejudiced.

Culture

In order to achieve the Company's objectives, both in the short term and in the long term, the employees must be encouraged to be hard-working and motivated to make achievements. The employees must adopt the core values, namely "TERTIB" Culture, which are

harus dianut oleh segenap karyawan, yaitu budaya "TERTIB" yang mengandung pengertian:

T = Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

E = Etos kerja yang tinggi;

R = Reputasi yang senantiasa ditingkatkan, dijaga dan terpelihara;

T = Tertib dalam menerapkan kebijakan manajemen maupun sikap tindak pribadi;

I = Ilmu pengetahuan dan teknologi tinggi yang harus dikuasai;

B = Baik dalam pelayanan dan hasil kerja.

Moto Perusahaan

Moto perusahaan adalah TERPERCAYA yang mengandung maksud:

1. Mutu jasa yang diberikan oleh Perusahaan benar-benar berkualitas tinggi, dilaksanakan secara efisien dan tepat waktu;
2. Setiap pegawai Perusahaan memiliki kualifikasi yang dapat diandalkan pada masing-masing bidang tugas/profesinya;
3. Sebutan BKI dijadikan merek dagang/*trade mark* yang bermakna produk unggulan.

Sebagai dasar dalam mengelola Perusahaan terutama dalam melaksanakan misi dan tugas, maka falsafah yang dianut di Perusahaan adalah TERPERCAYA yang dikembangkan melalui paradigma :

1. Mengutamakan mutu dan pelayanan jasa berdasarkan komitmen yang tinggi terhadap masalah keselamatan;
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Perusahaan secara konsisten dan berkesinambungan;
3. Tanggap dan *concern* terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama yang berkaitan dengan keselamatan kapal.

formulated in the Company's values containing the following definitions:

T = Being devoted to God Almighty;

E = Having strong work ethic;

R = Having good reputation which continues to improve, keep and maintain;

T = Being ordered in the implementation of management policy as well as in personal attitude and behavior;

I = Acquiring science and high-technology;

B = Having good services and work performance.

Slogan

The Company's slogan is TRUSTWORTHY which means:

1. *The services provided by the Company is of high quality, efficient and on time;*
2. *Every employee of the Company has reliable qualifications in their respective tasks/professions;*
3. *BKI is a trademark representing world-class products.*

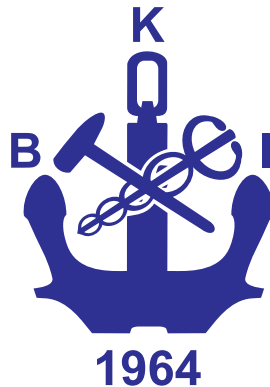
As a basis for managing the Company, especially for carrying out the missions and tasks, the Company adopts the principle, namely TRUSTWORTHY, which is developed by paradigm of :

1. *Prioritization of the quality and services based on high commitment to safety issues;*
2. *Improved quality of the Company's Human Resources in consistent and sustainable manner;*
3. *Responsiveness to and concerned about the development of science and technology, especially that is related to vessel safety.*



Lambang Perusahaan

Company's Emblem



Perusahaan menggunakan simbol jangkar untuk mengasosiasikan lingkup dan kegiatannya di sektor kelautan. Jangkar merupakan bagian dari kapal yang merupakan sarana dan transportasi utama di laut, sekaligus memberikan makna tentang kestabilan dan keselamatan kapal dimana jangkar memiliki fungsi sebagai penambat kapal agar tidak berpindah tempat akibat hembusan angin, arus maupun gelombang. Pada bagian tengah terdapat simbol rantai dan palu yang melambangkan alat dan perkakas untuk membangun dan atau merenovasi sebuah kapal. Ini sekaligus memberikan gambaran tentang keberadaan Perusahaan yang erat kaitannya dengan penilaian atas material komponen dan seluruh proses pembuatan kapal, serta penilaian atas proses renovasi yang harus sesuai dengan standar *Rules & Regulation* yang ditetapkan Perusahaan.

Di bagian bawah terdapat angka 1964 yang menandakan tahun berdirinya Perusahaan. Selain itu, masing-masing huruf dari BKI sebagai nama inisial sekaligus merek dagang dari Perusahaan ditempatkan secara berurutan di sisi samping kiri, atas dan kanan logo yang diasosiasikan sebagai penanda arah mata angin. Secara khusus Perusahaan memberikan makna lingkup dan kegiatan badan klasifikasi sebagai tugas penting yang dapat memberikan petunjuk keselamatan kepada kapal saat berada di perairan.

Warna biru menjadi warna resmi Perusahaan sebagai pralambang akan warna perairan di laut. Warna ini sekaligus memberikan cerminan Perusahaan sebagai penyedia jasa badan klasifikasi yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab.

The Company uses anchor as its symbol to associate its scope of business and activities in the maritime sector. Anchor is a part of the vessel which is a main means of sea transportation and represents the stability and safety of the vessel where an anchor functions to moor the vessel to be steady despite the winds, currents and waves. Chain and hammer in the middle of the emblem represent tools and appliances to build and or repair a vessel. It also describes the Company's existence which is closely related to the evaluation of materials and components as well as all building processes and repair processes of the vessel which must comply with standardized Rules & Regulation stipulated by the Company.

At the bottom of the emblem are numbers 1964 representing the Company's establishment year. In addition, each letter of BKI as an initial and the Company's trademark is placed in a series on the left, top and right sides of the emblem, associated with the markers of wind directions. In particular, the Company defines the scope and activities of the classification agency as significant tasks which can provide the vessels with the safety guide when the vessels are in the waters.

Blue is the Company's official color which represents the color of sea waters and reflects that the Company is a classification agency as well as a reliable and responsible service provider.



Perusahaan merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang bergerak dalam bidang pengklasifikasian kapal yang beroperasi di teritori laut Republik Indonesia. Dalam pelayanan jasanya, Perusahaan melakukan kegiatan riset dan mempublikasikan serta menerapkan standar teknik (*Rules & Regulation*) dengan melakukan kegiatan desain, konstruksi dan survei maritim terkait dengan kapal termasuk fasilitas terapung. Standar ini disusun dan dikeluarkan oleh Perusahaan sebagai Publikasi Teknik. *Rules & Regulation* yang dikembangkan tidak hanya struktur konstruksi lambung, namun juga meliputi peralatan keselamatan, instalasi permesinan dan kelistrikan.

Sesuai dengan Anggaran Dasarnya, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah sebagai berikut:

I. Bidang Usaha Klasifikasi dan Registrasi Kapal, yaitu:

- Pemeriksaan konstruksi kapal, pengawasan dan pengujian serta penerbitan sertifikat klas, registrasi kapal dan konstruksi lepas pantai;
- Pemeriksaan dan pengujian alat-alat apung dan fasilitas konstruksi lepas pantai;
- Pengujian dan sertifikasi material dan komponen;
- Pengujian dan penerbitan sertifikat kualifikasi juru las, inspektor las dan ahli las lainnya;
- Melaksanakan pemeriksaan dan sertifikasi di bidang statutoria berdasarkan otorisasi dari Pemerintah Republik Indonesia maupun dari pemerintah negaralain;
- Bertindak sebagai agen dan atau mewakili klasifikasi asing/konsultan asing; dan
- Melaksanakan pengawasan sistem mutu produk dan jasa perusahaan yang berkaitan dengan pembangunan kapal.

II. Bidang Konsultansi dan Supervisi

- Konsultansi dan supervisi di bidang kelautan dan industri minyak dan gas, panas bumi serta pertambangan pada umumnya;
- Penilaian, perencanaan, dan pengawasan dibidang teknologi kelautan dan industri minyak dan gas, panas bumi serta pertambangan pada umumnya;
- Pengujian material dan komponen;
- Konsultansi teknik/engineering sesuai standar nasional internasional;
- Pelatihan keahlian teknik dan non teknik

The Company is a State-owned Enterprise (SoE) in the form of a Limited Liability Company (PT) which is engaged in the field of the vessel classification and operated in the sea territory of the Republic of Indonesia. In the provision of the services, the Company conducts research as well as publishes and implements technical standards (Rules & Regulation) by making design and construction and conducting maritime surveys related to vessels, including floating facilities. These standards are prepared and issued by the Company as Technical Publications. The Rules & Regulation developed are not only regarding the hull construction structure, but also including safety equipment, machinery and electricity installation.

Based on its Articles of Association, the Company's scope of business is as follows:

I. Business Field of Vessel Classification and Registration, namely:

- *Conducting inspection of vessel construction, supervision and examination as well as issuance of class certificate, vessel registration and offshore construction;*
- *Conducting inspection and examination of floating equipment and offshore construction facilities;*
- *Conducting examination and certification of materials and components;*
- *Conducting examination and issuance of qualification certificates of welder, welding inspector and other welding experts;*
- *Conducting inspection and certification in the Statutory Certification based on authorization both from the Government of the Republic of Indonesia and foreign governments;*
- *Acting as an agent and or representing the foreign classification agencies/consultants; and*
- *Conducting supervision of quality control system of the Company's products and services related to the vessel building.*

II. Consultancy and Supervision

- *Conducting Consultancy and Supervision in marine and industrial fields of oil and gas, geothermal and mining in general;*
- *Conducting evaluation, preparation and supervision in marine technology and industrial fields of oil and gas, geothermal and mining in general;*
- *Conducting evaluation of materials and components;*
- *Conducting consultancy of engineering based on domestic/international standards;*
- *Holding training of technical and non-technical*



dibidang teknologi kelautan dan industri minyak dan gas, panas bumi serta pertambangan pada umumnya;

- Melakukan sertifikasi teknik pada umumnya;
- Kegiatan jasa rekayasa, jasa konstruksi dan jasa pemborongan non konstruksi dibidang instalasi minyak dan gas, panas bumi serta industri pertambangan pada umumnya.

skills in marine technology and industrial fields of oil and gas, geothermal and mining in general;

- *Conducting technical certification in general;*
- *Carrying out engineering, construction and non-construction contracting services in industrial fields of installations of oil and gas, geothermal and mining in general.*

III. Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk properti, perkantoran, apartemen, dan perhotelan.

Perusahaan mendapatkan otorisasi dari Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara lain untuk melaksanakan pemeriksaan dan sertifikasi di bidang statutoria, meliputi Sertifikasi Garis Muat (*Loadline*), Sertifikasi *Safety Construction*, Sertifikasi *Fitness Chemical/Gas Carrier in Bulk*, Sertifikasi *International Safety Management (ISM) Code*, Sertifikasi *International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code*, Sertifikasi *Condition Assessment Scheme (CAS)*, Sertifikasi *Annex IV of Marpol 73/78* dan Sertifikasi *Annex VI of Marpol 73/78*.

Sebagai badan klasifikasi, Perusahaan dalam memberikan jasa bertindak obyektif, profesional dan independen dalam memberikan penilaian dengan pemenuhan terhadap *Rules & Regulation* diatas kepentingan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder & shareholder*) dengan hasil penilaian teknis Perusahaan, yaitu:

- a. Bagi Pemerintah—dalam hal ini, *the Ministry of Perhubungan*—dimana Perusahaan ikut berperan aktif menjamin kelaik-lautan kapal yang beroperasi di Indonesia dan sebagai dasar para Syahbandar dalam memberikan ijin berlayar suatu kapal.
- b. Bagi Pemerintah—dalam hal ini, *the Ministry of BUMN (major shareholder)*—dimana Perusahaan sebagai BUMN dikelola secara sehat dan mampu memberikan *profit* usaha. Namun sesuai dengan sifat bisnis Perusahaan, target *profit* ini tidak menyebabkan berkurangnya peran dan misi Perusahaan sebagai badan klasifikasi yang mengemban misi keselamatan.
- c. Bagi Pemilik Kapal, dimana hasil survei dijadikan program pemeliharaan kapal dan sertifikat klasifikasinya menjadi dasar untuk mengasuransikan kapal dan jaminan kepada pemakai kapal.
- d. Bagi Pemilik barang (*shipper*), dimana sertifikat klasifikasi adalah salah satu jaminan bahwa barangnya diangkut dengan kapal yang aman dan memenuhi persyaratan keselamatan.
- e. Bagi galangan kapal/dok, dimana Perusahaan memberikan standar minimum bagi pembangunan, perawatan dan perbaikan kapal serta kualitas kerjanya demi meningkatkan citra galangan terhadap para rekanannya.
- f. Bagi Industri mesin, material, komponen kapal dan industri penunjang lainnya, dimana Perusahaan memberikan standar teknis dari produknya berkaitan dengan keselamatan dan citra dari produsennya; dan

III. Besides the major business activities as mentioned, the Company may carry out business activities in order to optimize the utilization of the Company's resources of properties, offices, apartments, and hospitality.

The Company has obtained authorization from the Government of the Republic of Indonesia and foreign governments to conduct evaluation and certification in the field of statutory certifications, including *Loadline Certification*, *Safety Construction Certification*, *Fitness Chemical/Gas Carrier in Bulk Certification*, *International Safety Management (ISM) Code certification*, *International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code Certification*, *Condition Assessment Scheme (CAS) Certification* as well as *Annexes IV and VI and of Marpol 73/78 Certifications*.

As the classification agency and a service provider, the Company conducts the evaluation in compliance with the *Rules & Regulation* in an objective, professional and independent manner over the interests of the stakeholders and shareholders as well as gives the results of the Company's technical evaluation, namely:

- a. For the Government—in this case, *the Ministry of Transportation*, the Company participates to play an active role in ensuring the seaworthiness of the vessels in Indonesia and serves as a basis for the Port Masters to issue a vessel clearance.
- b. For the Government—in this case, *the Ministry of SoE (the major shareholder)*, the Company as an SoE is managed fairly and profitable. However, in accordance with the Company's business nature, this targeted profit does not limit the Company's role and missions as the classification agency which is mandated for safety mission.
- c. For the Vessel Owner, the survey results are prepared to be a vessel maintenance program and its classification certificate serves as a basis for vessel insurance and guarantee for vessel user.
- d. For Shipper, the classification certificate is one of the guarantees that his goods are transported by a safe vessel and he complies with safety requirements.
- e. For drydock, the Company sets minimum standards for the building, maintenance and repair of the vessels as well as its work quality in order to improve image of the drydock against its partners.
- f. For industries of vessel machinery, materials, components and other supporting industries, the Company gives the technical standards of its products related to the safety and image of its producers; and

- g. Bagi perusahaan asuransi/lembaga keuangan, dimana hasil penilaian Perusahaan dijadikan pegangan yang obyektif atas kondisi teknis kapal sebagai dasar penentuan premi asuransi dan persetujuan kredit bagi lembaga keuangan.

Pihak *stakeholder* yang secara langsung mengajukan permohonan jasa (*customer application/request*) kepada Perusahaan adalah Pemilik kapal, Galangan Kapal dan Industri mesin/material/komponen yang membutuhkan sertifikasi terhadap kapal atau mesin/komponen/material terkait. Surveyor Perusahaan secara profesional akan melaksanakan survei dan pengujian sesuai dengan persyaratan *Rules & Regulation* Perusahaan. Jika memenuhi persyaratan, maka Perusahaan akan menerbitkan sertifikat dan laporan survei.

Selanjutnya pemohon tersebut menggunakan Sertifikat dan Laporan Survei yang diterbitkan Perusahaan dijadikan dasar atau referensi bagi *stakeholder* lainnya, yaitu:

- a. Syahbandar sebagai dasar salah satu unsur kelaikan kapal dan ijin berlayar/*clearance* di pelabuhan.
- b. Asuransi/institusi perbankan sebagai dasar dasar penentuan premi asuransi/klaim asuransi dan persetujuan kredit bagi lembaga keuangan.

Perusahaan memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan penangguhan (*suspend*) atau mencabut (*withdrawn*) status klasifikasi sebuah kapal berdasarkan referensi persyaratan klasifikasi. Kapal mungkin akan kehilangan status klasifikasinya untuk sementara atau secara permanen. Demikian juga, kapal yang tidak melaksanakan survei periodik tepat waktu sesuai dengan peraturan klasifikasi, maka Perusahaan sebagai Badan Klasifikasi akan menangguhkan (*suspend*) status klasifikasinya secara otomatis. Perusahaan sepenuhnya berperan sebagai badan sertifikasi dan bukan sebagai *law enforcer*. Perusahaan melakukan survei dan sertifikasi karena ada permintaan dari *stakeholder* dan Perusahaan tidak dapat melakukan penahanan kapal (*detained*). Fungsi *Law Enforcement* sepenuhnya menjadi otoritas Pemerintah, dalam hal ini adalah Syahbandar atau *Port State Control Officer* (PSCO).

Unit kerja Perusahaan terdiri dari 1 (satu) Kantor Pusat, 4 (empat) Kantor Cabang Utama, 5 (lima) Unit Usaha Marine & Industrial, 6 (enam) Kantor Cabang Madya dan 8 (delapan) Kantor Cabang dengan rincian:

1. Kantor Pusat Jakarta;
2. Cabang Utama Tanjung Priok, Batam, Balikpapan dan Surabaya;
3. Marine & Industrial Jakarta, Balikpapan, Surabaya,

- g. For insurance companies/financial institutions, the Company's evaluation results serve as objective reference for technical conditions of the vessel as a basis for determining insurance premiums and credit extension approvals by financial institutions.

The stakeholder who directly submits a customer application/request to the Company is the Vessel Owner, Drydock and Machinery/Material/Component Industry requiring a certification of the vessel or related Machinery/Component/Material. The Company's surveyor will conduct the survey and examination in a professional manner in compliance with the requirements of the Company's Rules & Regulation. In case of being compliance with the requirements, the Company will issue a certificate and a survey report.

The applicant subsequently uses the Certificate and Survey Report issued by the Company to be used as a basis or reference for other stakeholders, namely:

- a. For the Port Master, as a basis for one of elements of seaworthiness of the vessel and vessel clearance at the port.
- b. For the insurance companies/financial institutions, as a basis for determining insurance premiums/claims and credit extension approvals by financial institutions.

The Company has duties and authority to suspend or withdraw the classification status of a vessel based on classification requirements reference. The vessel may lose its classification status, either temporarily or permanently. Similarly, for the vessel failing to conduct periodical survey on time in accordance with the Classification Regulation, the Company as the Classification Agency will suspend the classification status of the vessel automatically. The Company fully plays a role as the Certification Agency, and not as a law enforcer. The Company conducts the survey and certification at the request of the stakeholder and the Company cannot detain the vessel. The function of Law Enforcement is the Government's full authority, in this case, Port Master or Port State Control Officer (PSCO).

The Company's business units consist of 1 (one) Headquarters, 4 (four) Main Branch Offices, 5 (five) Marine & Industrial Business Units, 6 (six) Middle Branch Offices and 8 (eight) Branch Offices with the details as follows:

1. Jakarta Headquarters;
2. Tanjung Priok, Batam, Balikpapan and Surabaya Main Branch Offices;
3. Jakarta, Balikpapan, Surabaya, Batam and



- Batam dan Pekanbaru;
4. Cabang Madya Palembang, Semarang, Belawan, Banjarmasin, Cilegon dan Singapura; dan
 5. Cabang Ambon, Bitung, Cirebon, Dumai, Pontianak, Makassar, Sorong dan Jambi.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. DU.046/LT.101/KI-13 tanggal 20 Maret 2013, tentang Struktur Organisasi baru terjadi perubahan status dari Cabang ke Cabang Madya yaitu Cilegon dan Singapura. Seluruh Cabang Utama menangani pekerjaan segmen Klasifikasi (Klas), Unit *Marine & Industrial* menangani pekerjaan segmen Konsultasi & Supervisi (KS), untuk Cabang Madya dan Cabang menangani pekerjaan segmen Klas dan segmen Konsultasi & Supervisi (KS), kecuali Cabang Madya Singapura dan Cabang Dumai hanya menangani segmen Klas.

- Pekanbaru Marine & Industrial Business Units;*
4. *Palembang, Semarang, Belawan, Banjarmasin, Cilegon and Singapore Middle Branch Offices; and*
 5. *Ambon, Bitung, Cirebon, Dumai, Pontianak, Makassar, Sorong and Jambi Branch Offices.*

That based on Decision of the Board of Directors No. DU.046/LT.101/KI-13 of 20 March 2013 regarding New Organizational Structure, there was a change in the status from Branches to Middle Branches, namely for Cilegon and Singapore Branches. All Main Branches handle the works of the Classification segment, the Marine & Industrial Units handle the works of the Consultancy & Supervision segment, the Middle Branches and Branches handle the works of the Classification segment and the Consultancy & Supervision segment, except for the Singapore Middle Branch and Dumai Branch which only handle the works of the Classification segment.



Struktur Organisasi

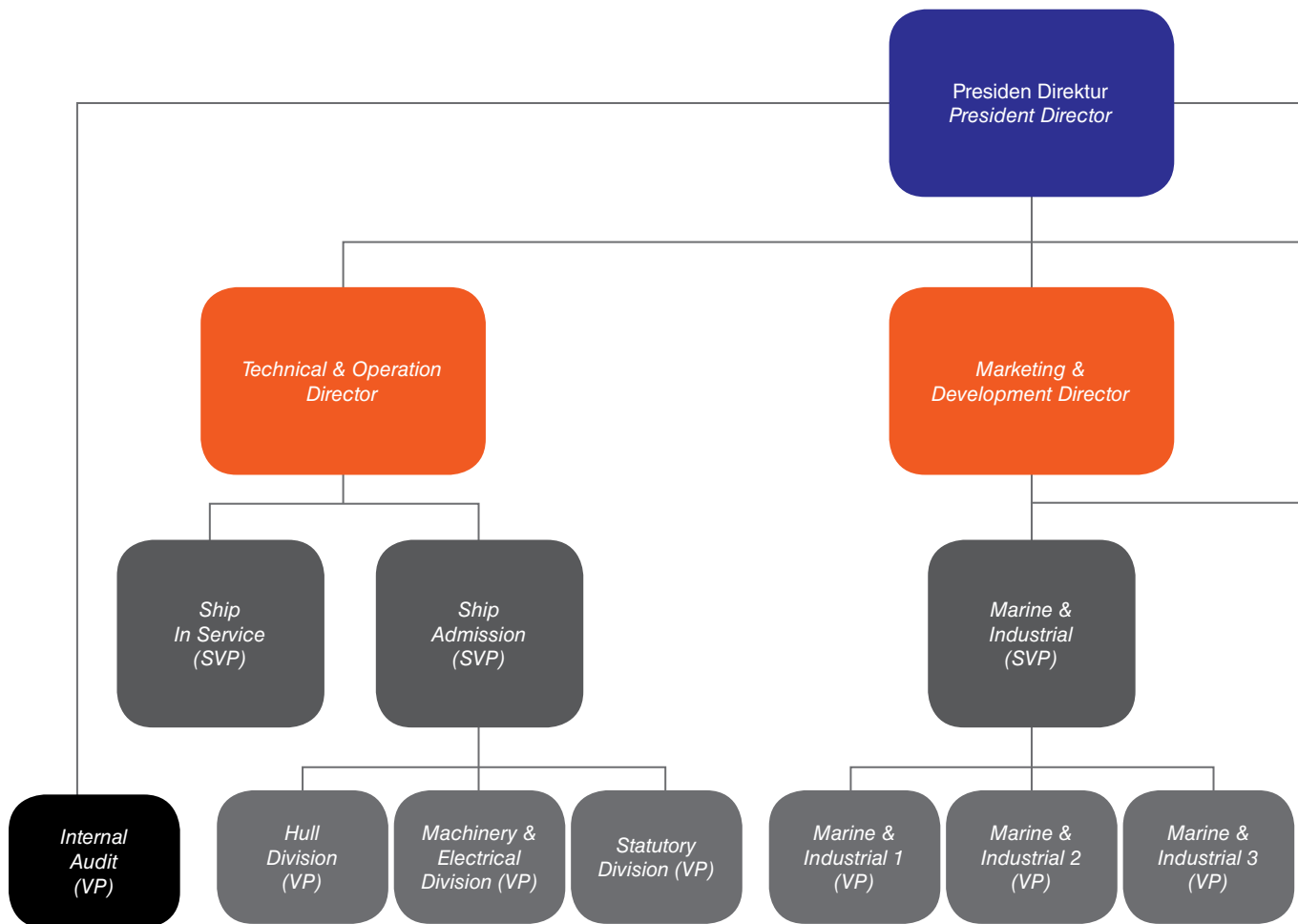
Organizational Structures

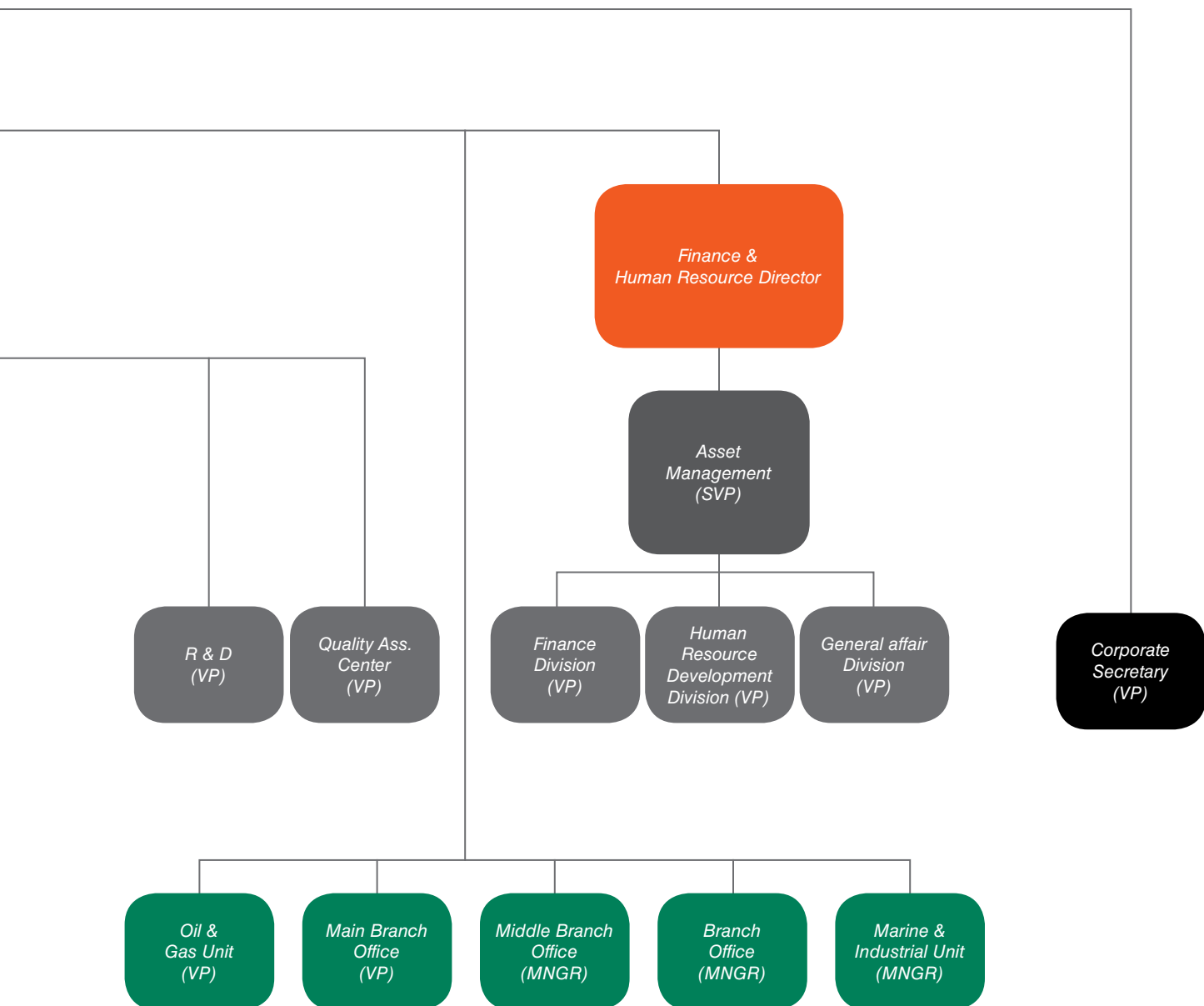
Kilas Kinerja 2013
Performance Highlight 2013

Laporan Manajemen
Management Report

Profil Perusahaan
Corporate Profile

Analisa dan Pembahasan Manajemen
Management discussion and Analysis







Pemegang Saham Dan Modal Saham

Shareholders And Share Capital



100% Pemerintah Republik Indonesia
100% of the Government of the Republic of Indonesia

Kepemilikan saham PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) 100% dimiliki sepenuhnya oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui the *Ministry of Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Republik Indonesia*. Berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan No. 14 tanggal 11 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan H. Umaran Mansjur, S.H., Notaris di Jakarta, yang kemudian mendapat pengesahan dari Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-03102AH.01.02 tahun 2009 tanggal 14 Januari 2009, komposisi Modal Saham Perusahaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini,

The shares of PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) were 100% fully owned by the Government of the Republic of Indonesia through the State Ministry of the State-owned Enterprise (SoE) of the Republic of Indonesia. Based on Deed of Change in the Articles of Association No. 14 of August 11, 2008, made before H. Umaran Mansjur, S.H., a Notary in Jakarta, which was then legalized by Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-03102AH.01.02 Year 2009 of January 14, 2009, the composition of the Company's Share Capital can be seen on the table below,

Modal Saham Perusahaan

Company's Share Capital

Keterangan Description	Jumlah Saham Amount of Shares	Nominal Nominal	%
Modal Dasar <i>Authorized Capital</i>	180.000	Rp180.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh oleh Pemerintah Republik Indonesia <i>Issued and Fully-paid Capital by the Government of the Republic of Indonesia</i>	45.000	Rp45.000.000.000,-	100%



Penghargaan Dan Sertifikasi

Awards And Certificates



Sertifikat ISO 9001 : 2008 dari BSI untuk bidang klasifikasi dan statutori

ISO 9001: 2008 certification from BSI for the field of classification and statutory



Sertifikat ISO 9001 : 2008 dari BSI untuk bidang marine dan jasa industri

ISO 9001: 2008 certification from BSI to the field of marine and industrial services

Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility

Informasi Perusahaan
Corporate Information

Laporan Keuangan
Financial Statement

Alamat Kantor Pusat, Kantor Cabang Dan Unit Usaha *Addresses Of Headquarters, Branch Offices And Business Unit*

KANTOR PUSAT

Jl. Yos Sudarso Kav.38-40
Jakarta - 14320
Phone: 62-21-4301017
Fax: 62-21-43936175
Email: bki@bki.co.id
Website: www.bki.co.id

KANTOR CABANG UTAMA

CABANG UTAMA BATAM

Graha BKI, Jl. Yos Sudarso Kav.5
Batam - 29421
Phone: 62-778-433388, 429023, 429024, 451288
Fax: 62-778-429020, 429021
Email: bm@bki.co.id

CABANG UTAMA SAMARINDA

Jl. Cipto Mangunkusumo Ruko Rapak Indah No.10
Samarinda Seberang, Samarinda-75132
Phone: 62-541-261423
Fax: 62-541-261425
Email: sd@bki.co.id

CABANG UTAMA SURABAYA

Jl. Kalianget No.14
Surabaya - 60165
Phone: 62-31-3295448, 3295449, 3295450, 3295451,
3295456
Fax: 62-31-3294520, 3205451
Email: sb@bki.co.id

CABANG UTAMA TANJUNG PRIOK

Jl. Yos Sudarso 38-39-40 Tanjung Priok
Jakarta - 14320
Phone: 62-21-4301017-18-19, 4301703, 430099,
4353291-92
Fax: 62-21-4301702
Email: tp@bki.co.id

KANTOR CABANG MADYA

CABANG MADYA BANJARMASIN

Jl. Skip Lama No. 19
Banjarmasin - 70117
Phone: 62-511-3358311, 3350893
Fax: 62-511-3350175
Email: bj@bki.co.id

CABANG MADYA BELAWAN

Jl. Veteran No.218 Belawan
Medan - 20411
Phone: 62-61-6941025, 6941157
Fax: 62-61-6941276
Email: bn@bki.co.id

HEAD OFFICE

Jl. Yos Sudarso Kav.38-40
Jakarta - 14320
Phone: 62-21-4301017
Fax: 62-21-43936175
Email: bki@klasifikasiindonesia.com
Website: www.klasifikasiindonesia.com

MAIN BRANCH OFFICES

BATAM MAIN BRANCH

Graha BKI, Jl. Yos Sudarso Kav.5
Batam - 29421
Phone: 62-778-433388, 429023, 429024, 451288
Fax: 62-778-429020, 429021
Email: bm@bki.co.id

SAMARINDA MAIN BRANCH

Jl. Cipto Mangunkusumo Ruko Rapak Indah No.10
Samarinda Seberang, Samarinda-75132
Phone: 62-541-261423
Fax: 62-541-261425
Email: sd@bki.co.id

SURABAYA MAIN BRANCH

Jl. Kalianget No.14
Surabaya - 60165
Phone: 62-31-3295448, 3295449, 3295450, 3295451,
3295456
Fax: 62-31-3294520, 3205451
Email: sb@bki.co.id

TANJUNG PRIOK MAIN BRANCH

Jl. Yos Sudarso 38-39-40 Tanjung Priok
Jakarta - 14320
Phone: 62-21-4301017-18-19, 4301703, 430099,
4353291-92
Fax: 62-21-4301702
Email: tp@bki.co.id

MIDDLE BRANCH OFFICES

BANJARMASIN MIDDLE BRANCH

Jl. Skip Lama No. 19
Banjarmasin - 70117
Phone: 62-511-3358311, 3350893
Fax: 62-511-3350175
Email: bj@bki.co.id

BELAWAN MIDDLE BRANCH

Jl. Veteran No.218 Belawan
Medan - 20411
Phone: 62-61-6941025, 6941157
Fax: 62-61-6941276
Email: bn@bki.co.id

CABANG MADYA CILEGON

Jl. Raya Bojonegara KM.2
Ds. Karang Tengah, Kec. Cibeber
Cilegon, Banten - 42422
Phone: 62-254-5751683, 8488692
Fax: 62-254-5751682
Email: cg@bki.co.id

CABANG MADYA PALEMBANG

Jl. Perintis Kemerdekaan, 5 Ilir
Palembang - 30115
Phone: 62-711-713171, 713172, 713680, 717151
Fax: 62-711-713173
Email: pb@bki.co.id

CABANG MADYA SEMARANG

Jl. Pamularsih No.12
Semarang - 50148
Phone: 62-24-7610399, 7610744
Fax: 62-24-7610422
Email: sm@bki.co.id

CABANG MADYA SINGAPURA

371 Beach Road # 02-24 Keypoint
Singapore - 199597
Phone: 65-68830651, 68830634, 68830643
Fax: 65-63393631
Email: sg@bki.co.id

KANTOR CABANG**CABANG AMBON**

Jl. Laksda Lea Wattimena lorong RRI Pemancar
Passo Ambon
Phone : 62-911-362805, 362806
Email: ab@bki.co.id

CABANG BITUNG

Jl. Babe Palar No. 53, Madidir Unet
Bitung - 95516
Phone: 62-438-38720, 38721, 38722
Fax: 62-438-21282
Email: bt@bki.co.id

CABANG CIREBON

Jl. Tuparev KM.3
Cirebon - 45153
Phone: 62-231-205266
Fax: 62-231-205266
Email: cn@bki.co.id

CILEGON MIDDLE BRANCH

Jl. Raya Bojonegara KM.2
Ds. Karang Tengah, Kec. Cibeber
Cilegon, Banten - 42422
Phone: 62-254-5751683, 8488692
Fax: 62-254-5751682
Email: cg@bki.co.id

PALEMBANG MIDDLE BRANCH

Jl. Perintis Kemerdekaan, 5 Ilir
Palembang - 30115
Phone: 62-711-713171, 713172, 713680, 717151
Fax: 62-711-713173
Email: pb@bki.co.id

SEMARANG MIDDLE BRANCH

Jl. Pamularsih No.12
Semarang - 50148
Phone: 62-24-7610399, 7610744
Fax: 62-24-7610422
Email: sm@bki.co.id

SINGAPORE MIDDLE BRANCH

371 Beach Road # 02-24 Keypoint
Singapore - 199597
Phone: 65-68830651, 68830634, 68830643
Fax: 65-63393631
Email: sg@bki.co.id

BRANCH OFFICES**AMBON BRANCH**

Jl. Laksda Lea Wattimena lorong RRI Pemancar
Passo Ambon
Phone : 62-911-362805, 362806
Email: ab@bki.co.id

BITUNG BRANCH

Jl. Babe Palar No. 53, Madidir Unet
Bitung - 95516
Phone: 62-438-38720, 38721, 38722
Fax: 62-438-21282
Email: bt@bki.co.id

CIREBON BRANCH

Jl. Tuparev KM.3
Cirebon - 45153
Phone: 62-231-205266
Fax: 62-231-205266
Email: cn@bki.co.id

CABANG JAMBI

Jl. Raden Bahrun No.E 11Rt.11/Rw.04
Kel. Sungai Putri, Kec. Telanaipura
Jambi
Phone: 62-741-671107
Fax: 62-741-671108
Email: jb@bki.co.id

CABANG MAKASSAR

Jl. Sungai Cerekang No.28
Makassar - 90115
Phone: 62-411-311993, 315460
Fax: 62-411-315460
Email: ms@bki.co.id

CABANG PEKANBARU

Jl. Arifin Achmad No.40, Samping Gedung DPRD
Pekanbaru
Phone: 62-761-7622329, 7622384
Fax: 62-761-7622520
Email: dm@bki.co.id

CABANG PONTIANAK

Jl. Gusti Hamzah No.211
Pontianak - 78116
Phone: 62-561-739579, 743107
Fax: 62-561-739579, 743107
Email: pk@bki.co.id

CABANG SORONG

Jl. Jend. Sudirman No.140
Sorong - 98414
Phone: 62-951-322600
Fax: 62-951-323870
Email: sr@bki.co.id

KANTOR UNIT USAHA

UNIT USAHA KELAUTAN dan INDUSTRI

BALIKPAPAN
Jl. M.T Haryono No.8 Ring Road
Balikpapan-76111
Phone: 62-542-876637, 876641, 876642, 876643
Fax: 62-542-876639, 876645
Email: bp@bki.co.id

UNIT USAHA KELAUTAN dan INDUSTRI BATAM

Graha BKi, Jl.Yos Sudarso Kav.5
Batam - 29421
Phone: 62-778-433388, 429023, 429024, 451288
Fax: 62-778-429020, 429021
Email: mibm@bki.co.id

JAMBI BRANCH

Jl. Raden Bahrun No.E 11Rt.11/Rw.04
Kel. Sungai Putri, Kec. Telanaipura
Jambi
Phone: 62-741-671107
Fax: 62-741-671108
Email: jb@bki.co.id

MAKASSAR BRANCH

Jl. Sungai Cerekang No.28
Makassar - 90115
Phone: 62-411-311993, 315460
Fax: 62-411-315460
Email: ms@bki.co.id

PEKANBARU BRANCH

Jl. Arifin Achmad No.40, Samping Gedung DPRD
Pekanbaru
Phone: 62-761-7622329, 7622384
Fax: 62-761-7622520
Email: dm@bki.co.id

PONTIANAK BRANCH

Jl. Gusti Hamzah No.211
Pontianak - 78116
Phone: 62-561-739579, 743107
Fax: 62-561-739579, 743107
Email: pk@bki.co.id

SORONG BRANCH

Jl. Jend. Sudirman No.140
Sorong - 98414
Phone: 62-951-322600
Fax: 62-951-323870
Email: sr@bki.co.id

BUSINESS UNITS

BALIKPAPAN MARINE and INDUSTRIAL UNIT

Jl. M.T Haryono No.8 Ring Road
Balikpapan-76111
Phone: 62-542-876637, 876641, 876642, 876643
Fax: 62-542-876639, 876645
Email: bp@bki.co.id

BATAM MARINE and INDUSTRIAL UNIT

Graha BKi, Jl.Yos Sudarso Kav.5
Batam - 29421
Phone: 62-778-433388, 429023, 429024, 451288
Fax: 62-778-429020, 429021
Email: mibm@bki.co.id

UNIT USAHA KELAUTAN dan INDUSTRI JAKARTA
Jl.Yos Sudarso 38-40 Tanjung Priok
Jakarta-14320
Phone: 61-21-4301017
Fax: 61-21-43936175
Email: mijk@bki.co.id

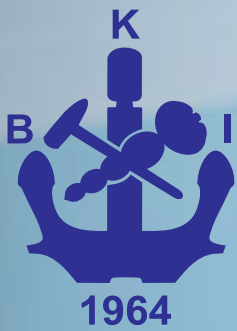
UNIT USAHA KELAUTAN dan INDUSTRI
PEKANBARU
Jl. Arifin Ahmad No.40
Kel.Tangkerang Tengah, Kec.Marpoyan Damai
Pekanbaru - 28282
Phone: 62-761-7662160, 7662170
Fax: 62-761-7662180
Email: mipr@bki.co.id

UNIT USAHA KELAUTAN dan INDUSTRI
SURABAYA
Jl. Kalianget No.14
Surabaya - 60165
Phone: 62-31-3295448, 3295449, 3295450, 3295451,
3295456
Fax: 62-31-3294520, 3205451
Email: misb@bki.co.id

JAKARTA MARINE and INDUSTRIAL UNIT
Jl.Yos Sudarso 38-40 Tanjung Priok
Jakarta-14320
Phone: 61-21-4301017
Fax: 61-21-43936175
Email: mijk@bki.co.id

PEKANBARU MARINE and INDUSTRIAL UNIT
Jl. Arifin Ahmad No.40
Kel.Tangkerang Tengah, Kec.Marpoyan Damai
Pekanbaru - 28282
Phone: 62-761-7662160, 7662170
Fax: 62-761-7662180
Email: mipr@bki.co.id

SURABAYA MARINE and INDUSTRIAL UNIT
Jl. Kalianget No.14
Surabaya - 60165
Phone: 62-31-3295448, 3295449, 3295450, 3295451,
3295456
Fax: 62-31-3294520, 3205451
Email: misb@bki.co.id





Analisa dan Pembahasan Manajemen

Management Discussion and Analysis



Kelautan, Transportasi dan Pertumbuhan Ekonomi

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan potensi ekonomi maritim cukup besar. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki wilayah laut seluas 5,8 juta km² yang terdiri dari wilayah teritorial sebesar 3,2 juta km² dan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) 2,7 juta km². Selain itu, terdapat 17.840 pulau di Indonesia dengan garis pantai sepanjang 95.181 km. Dengan cakupan yang demikian besar dan luas, tentu saja maritim Indonesia mengandung keanekaragaman alam laut yang potensial, baik hayati dan nonhayati. Potensi total nilai keekonomian sektor kelautan per tahunnya diperkirakan lebih dari tujuh kali lipat APBN 2013 dan satu setengah kali PDB saat ini. Angka estimasi potensi ekonomi maritim tersebut bisa mendatangkan kesempatan kerja mencapai 40 juta orang.

Terutama ekonomi kelautan dinilai semakin strategis bagi Indonesia seiring pergeseran pusat ekonomi dunia dari poros Atlantik ke Asia Pasifik. Terbukti, saat ini 70% perdagangan dunia berlangsung di kawasan Asia Pasifik. Lebih kurang 75% dari seluruh produk dan komoditas yang diperdagangkan di kawasan ini ditransportasikan melalui laut Indonesia dengan nilai sekitar USD1.300 triliun per tahunnya.

Sementara dari aspek populasi, Indonesia tercatat sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Data World Bank menyebutkan, Indonesia berada di urutan ke-4 sebagai negara dengan jumlah populasi terbesar setelah Cina, India dan Amerika Serikat. Dengan jumlah mencapai lebih dari 240 juta jiwa dengan perpaduan tingkat daya beli masyarakat yang sedang berkembang, Indonesia memiliki potensi sebagai pasar konsumsi untuk berbagai produk dunia. Inilah sebagian besar faktor yang memberikan dampak pertumbuhan signifikan dalam perekonomian Indonesia. Perekonomian Indonesia pada tahun 2013 mengalami pertumbuhan sebesar 5,7%, sedikit lebih rendah dibanding tahun 2012. Nilai Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga konstan pada tahun 2013 mencapai hampir Rp2.41 triliun, sedangkan pada tahun 2012 dan 2013 masing-masing sebesar Rp2.17 triliun dan Rp2.3 triliun.

Sepanjang tahun 2013, hampir seluruh sektor ekonomi mengalami pertumbuhan, dimana pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor pengangkutan dan komunikasi yang mencapai 12,4%, diikuti oleh sektor perdagangan.

Undang-Undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 secara khusus mengamanatkan perwujudan Indonesia sebagai negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.

Pertumbuhan dan optimisme inilah yang kemudian berimbas langsung terhadap arus barang dan transportasi kelautan. Armada kapal nasional bertambah sekitar 50% dalam

Marine Affairs, Transport and Economic Growth

Indonesia is an archipelago with a fairly large maritime economic potential. As the world's largest archipelago, Indonesia has marine area of 5,8 million km² which consists of a territorial area of 3,2 million km² and Indonesian Exclusive Economic Zone (ZEEI) 2,7 million km². Other than that, there are 17,840 islands in Indonesia, with a coastline of 95,181 km. With such a large and spacious coverage, Indonesian maritime surely contains potential marine natural diversity, both biological and non-biological. The potential economic value of the marine sector in total per year is estimated at more than seven times the 2013 national budget (APBN) and one and a half times the current GDP. The estimated number of the maritime economic potential could bring employment opportunities up to 40 million people.

Especially the marine economy is considered to be more strategic for Indonesia, as the economic center of the world shifts from the Atlantic to the Asia Pacific. Evidently, currently 70% of the world trade takes place in the Asia Pacific region. Approximately 75% of all products and commodities which are traded in this region are being transported through Indonesian sea with a value of approximately USD1,300 trillion per year.

Meanwhile from the population aspect, Indonesia is the country with the largest population in the world. Data from the World Bank states, Indonesia ranks as the 4th most populous country after China, India and the United States. With the amount that reaches more than 240 million people with a mix of purchasing power a growing community, Indonesia has the potential to be a consumer market for various products the world. These are the factors that most significantly impact the growth of the Indonesian economy. The Indonesian economy in 2013 grew by 5,7%, slightly lower than in 2012. Value of Gross Domestic Product (GDP) at constant prices in 2013 reached nearly Rp2.41 trillion, whereas in 2012 and 2013 amounting to Rp2.17 trillion and Rp2.3 trillion.

Throughout the year 2013, almost all economic sectors experienced growth, with the highest growth in the transport and communications sector reached 12.4%, followed by the trade sector.

Law no. 17 year 2007 about The National Long-Term Development Plan (RPJPN) 2005-2025 specifically mandates the embodiment of Indonesia as an independent, advanced, powerful archipelago nation which is based on national interests.

This growth and optimism then become a direct impact on the flow of goods and marine transportation. The national ship fleet increased by about 50% within the



kurun waktu lima tahun terakhir. Pada 2008, jumlah armada kapal nasional sekitar 7.856 unit, dan pada 2013 meningkat menjadi 12.231 unit, sehingga dalam kurun waktu lima tahun telah terjadi peningkatan jumlah armada kapal nasional sekitar 5.375 unit. Peningkatan jumlah armada kapal nasional masih merupakan efek dari penerapan dari Instruksi Presiden No. 5 tahun 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional dengan asas *cabotage* dan akan dilanjutkan dengan prinsip *beyond cabotage* untuk angkutan ekspor/impor terutama untuk komoditi unggulan Indonesia dengan skema angkutan komoditi dari sistem FOB menjadi CIF. Selain itu, data statistik transportasi yang dirilis Departemen Perhubungan RI menyebutkan, hingga Juli 2013 total armada pelayaran niaga nasional mencapai 12.536 unit atau setara dengan 17.897.435 *Gross Tonnage* (GT). Dari jumlah tersebut yang dimiliki perusahaan angkutan laut nasional pemegang SIUPAL mencapai 10.861 unit atau setara dengan 17.281.162 GT, dan yang dimiliki oleh perusahaan angkutan laut khusus pemegang SIOPSUS sebanyak 1.675 unit atau setara dengan 616.273 GT. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 107,5% dibandingkan tahun 2005, sebelum terbitnya Instruksi Presiden No.5 tahun 2005 pertumbuhan armada niaga nasional berjumlah 6.041 unit.

last five years. In 2008, the number of national fleet was around 7856 units, and in 2013 it increased to 12.231 units, so in five years there have been an increasing number of national fleet of approximately 5.375 units. The increasing number of national fleet is still an effect of the implementation of Presidential Instruction no. 5 of 2005 about The Empowerment of National Shipping Industry with cabotage principle and will be proceed with the principle of beyond cabotage for export/import transport especially for Indonesia's leading commodities with the transport commodity scheme from FOB system to CIF. Moreover, transportation statistics released by the Department of Transportation stated that until July 2013 the total national merchant marine fleet reached 12.536 units or is equal to 17,897,435 Gross Tonnage (GT). Of this amount, the ones owned by national marine transport companies that hold SIUPAL reaches 10.861 units or equal to 17281.162 GT, and the ones that are owned by special marine transport companies that hold SIOPSUS reaches 1.675 units or equal to 616.273 GT. This figure increased by 107.5% compared to 2005, before the issuance of Presidential Instruction No. 5 of 2005 the growth of national commercial fleet amounted to 6,041 units.

Paska penerbitan Inpres No. 5/2005 tersebut, kebutuhan sarana kapal dan produk industri manufaktur maritim dalam negeri lainnya meningkat secara signifikan yang dibarengi dengan peningkatan kebutuhan produk dan jasa industri maritim pendukung lain seperti perlengkapan peralatan maritim yang aman, komponen maritim dan mesin maritim. Selain itu jumlah pelabuhan bertaraf internasional di negeri ini akan dirampingkan. Dengan perampingan jumlah pelabuhan bertaraf internasional dapat menghidupkan transportasi domestik dan mengantisipasi maraknya penyelundupan beragam komoditas dari luar negeri.

Peran Perusahaan dalam Meningkatkan Kapabilitas Transportasi Kelautan Indonesia

Di tengah pesatnya pertumbuhan penggunaan armada niaga laut, situasi pada perkapalan justru mengharuskan kewaspadaan dari seluruh pemangku kepentingan. Lebih dari 48% kondisi teknis armada pelayaran niaga nasional saat ini berumur di atas 25 tahun, dan bahkan 13%nya berumur di atas 35 tahun. Usia rata-rata kapal kontainer yang dioperasikan pelayaran nasional saat ini mencapai 22 tahun, untuk kapal general kargo 24 tahun, tanker 22 tahun, Ro-ro 23 tahun, dan kapal curah (*bulk*) 26 tahun.

Sementara data Ditjen Hubla Kementerian Perhubungan RI menyebutkan, berdasarkan asumsi, pertumbuhan muatan angkutan laut domestik akan meningkat dari sekitar 300 juta ton pada tahun 2011 menjadi 700 juta ton pada 2024. Prediksi muatan 2024 tersebut berasal dari komoditi *breakbulk*/kontainer dari sebelumnya 94 juta ton akan menjadi 275 juta ton; *drybulk* dari sebelumnya 106 juta ton akan menjadi 266 juta ton; dan muatan kargo jenis *liquid bulk* akan menjadi 156 juta ton pada 2024 dari sebelumnya 108 juta ton pada tahun 2011.

Sebagai perusahaan yang ditunjuk menjadi badan klasifikasi perkapalan, peran PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) erat kaitannya dengan perihal keselamatan kapal (*safety*). Perusahaan mengemban tugas menjadi satu-satunya badan klasifikasi nasional untuk mengklaskan kapal-kapal niaga berbendera Indonesia dan kapal berbendera asing yang secara reguler beroperasi di perairan Indonesia. Tak hanya kapal niaga, klas-klas ini dilakukan melalui penerapan standar teknik dalam melakukan kegiatan desain, konstruksi dan survei *marine* terkait fasilitas terapung, termasuk konstruksi *offshore*.

Standar ini disusun dan dikeluarkan Perusahaan sebagai publikasi teknik dan tidak memiliki kepentingan terhadap aspek komersial terkait dengan desain kapal, pembangunan kapal, kepemilikan kapal, operasional kapal, manajemen kapal, perawatan/perbaikan kapal, asuransi atau persewaan. Perusahaan juga melakukan penelitian dan pengembangan dalam rangka peningkatan mutu dan standar teknik yang dipublikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan jasa klasifikasi kapal.

After the issuance of Presidential Instruction no. 5/2005, the need of ship facilities and other domestic maritime manufacturing industry products increased significantly accompanied by the increase of the need of other supporting maritime industry products and services such as safe maritime equipment supplies, maritime components and machinery. In addition, the number of international port in the country will be downsized. Downsizing the number of international port can turn on the domestic transport and anticipate the widespread smuggling of a variety of commodities from abroad.

The Corporate Role in Improving Indonesian Maritime Transport Capability

Among the rapid growth of the use of commercial marine fleet, the situation on shipping requires vigilance from all stakeholders. More than 48% of the technical condition of the national merchant marine fleet currently aged over 25 years, and even 13% of it aged over 35 years. The average age of container ships which are operating under national shipping is 22 years, general cargo ships 24 years, tankers 22 years, Ro-ro 23 years, and bulk ships 26 years.

While the data from The Directorate General of Sea Transportation Ministry states, based on the assumption, the growth of domestic sea transport cargo will increase from about 300 million tonnes in 2011 to 700 million tons in 2024. The 2024 cargo prediction comes from breakbulk commodities/containers, from the previous 94 million tonnes will be 275 million tonnes; drybulk from the previous 106 million tons will be 266 million tons; and liquid bulk cargo will be 156 million tonnes in 2024 from the previous 108 million tonnes in 2011.

As a Company that is designated to the shipping classification agency, the role of PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) is closely related with the subject of ship safety. The Corporate took on the task to be the only national classification agency to classify commercial ships with an Indonesian flag and foreign-flagged ships that are regularly operating in Indonesian waters. Not only commercial ships, these classes are conducted through the application of standard techniques in conducting design, construction and survey of marine related to floating facilities, including offshore construction.

This standard is prepared and issued by the Company to be a technical publication and do not have an interest in the commercial aspects associated with ship design, shipbuilding, ship ownership, ship operations, ship management, ship maintenance / repair, insurance or rental. The Company also conducts research and development in order to improve the quality and technical standards that are published to the parties with an interest in ship classification services.

Selain itu, Perusahaan berpengalaman membuat *rule* atau peraturan sendiri, dimana era globalisasi menuntut pelayaran nasional dapat bersaing tanpa hambatan dengan pelayaran asing. Peraturan ini akan mendorong perebutan pangsa pasar yang tersedia terutama pengangkutan barang/ penumpang dalam negeri, komoditi ekspor/impur dan kegiatan pertambangan di lepas pantai. Kebanggaan nasional kemudian dilakukan melalui persaingan menggunakan standar peraturan dan kemudahan yang sama. Dengan pengalaman menghasilkan peraturan yang produktif, Perusahaan membantu tugas *Port State Control* dari pemerintah yang masih mengandalkan tenaga *Marine Inspector* (MI) atau Inspektur Pemerintah/Syahbandar. Perusahaan dapat membantu keterbatasan tenaga MI untuk memeriksa secara bertanggungjawab dari berbagai jenis kapal yang masuk dan keluar pelabuhan di Indonesia. Tugas utama Pemerintah untuk menjaga dan mengawasi keselamatan pelayaran domestik menjadi lebih terfokus dan diperhatikan.

Bagi pelaku perkapalan, sertifikasi yang diberikan Perusahaan memberikan dampak positif terhadap aktivitas usahanya. Selain membantu klaim asuransi, sertifikasi dari Perusahaan memaparkan profil teknis kapal menjadi lebih terbuka dan memungkinkan celah investasi baru bagi bisnis; baik investasi melalui pemberian kredit maupun penanaman modal. Sertifikasi Perusahaan kemudian memberikan nilai tambah pada efisiensi pelaku usaha, sekaligus memungkinkan efek domino terhadap kestabilan harga komoditi akibat terliputnya profil risiko usaha transportasi kelautan.

In addition, the Company is experienced in making its own rules or regulations, where the era of globalization requires national shipping to compete with foreign shipping without a hitch. This regulations will encourage the seizure of the available market share especially the domestic transport of goods / passengers, export/import commodity, and offshore mining activities. The national pride is then performed through the competition using the standard regulations and equal facilities. With the experience creating productive regulations, the Company helps Port State Control tasks from the government which still relies on the Marine Inspector (MI) or Government Inspector / Syahbandar. The Company can help with the limited power of MI to responsibly examine various types of ships entering and leaving ports in Indonesia. The main task of the Government is to maintain and oversee the safety of domestic shipping to be more focused and given attention.

For shipping perpetrators, the certification granted by the Company gives a positive impact on their business activities. In addition to helping insurance claims, the certification from the Company exposes the ship's technical profile to be more open and allow new investment opportunities for businesses; both investment through lending and capital investment. The Company certification will add value to the efficiency of entrepreneurs, while allowing a domino effect on the stability of commodity prices due to the coverage of marine transportation business risk profile.



Tinjauan Operasional Per Segmen Usaha

Operational Overview Per Business Segment

Perusahaan merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan dengan tugas mulia untuk mendukung kemandirian industri perkapalan dan pelayaran nasional melalui pelayanan jasa klasifikasi dan jasa-jasa terkait. Dalam pelayanan jasanya, Perusahaan melakukan kegiatan riset dan mempublikasikan serta menerapkan standar teknik (*Rules & Regulation*) dengan melakukan kegiatan desain, konstruksi dan survei maritim terkait dengan kapal termasuk fasilitas terapung. Standar ini disusun dan dikeluarkan oleh Perusahaan sebagai Publikasi Teknik. *Rules & Regulation* yang dikembangkan tidak hanya struktur konstruksi lambung, namun juga meliputi peralatan keselamatan, instalasi permesinan dan kelistrikan.

Dalam pencapaian produksi, Perusahaan mampu meningkatkan produksi Klas Tunggal BKI sebesar 69,69 juta poin (134,63%) dari 201,20 juta poin di tahun 2012 menjadi 270,89 juta poin; Kerjasama dengan Klas Asing tumbuh 5,98 juta poin (128,77%) dari 20,79 juta poin di tahun 2012 menjadi 26,77 juta poin; dan Konsultasi & Supervisi meningkat 46,56 juta *mandays* (132,08%) dari 145,16 juta *mandays* di tahun 2012 menjadi 191,73 juta *mandays* di tahun 2013.

Segmen Usaha Perusahaan

Sebagai Badan Klasifikasi, Perusahaan membagi kegiatan operasional ke dalam dua kategori jasa, yaitu layanan Jasa Klasifikasi, termasuk di dalamnya Penerimaan Klas dan Mempertahankan Klas, Jasa Statutoria, dan Sertifikasi Material/Komponen; serta Jasa Non Klasifikasi—Konsultasi dan Supervisi untuk tiga sektor, yaitu *marine*, industri dan energi.

I. JASA KLASIFIKASI

- a. Kegiatan Klasifikasi Kapal
Klasifikasi kapal merupakan kewajiban para pemilik kapal berbendera Indonesia untuk melakukan klas bagi kapalnya. Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan RI No. PM. 7 tahun 2013 tentang Kewajiban Klasifikasi Bagi Kapal Berbendera Indonesia Pada Badan Klasifikasi, menyatakan bahwa kapal-kapal yang wajib diklasifikasikan pada Perusahaan sebagai Badan Klasifikasi adalah kapal-kapal dengan ketentuan:
 - Ukuran panjang antara garis tegak depan dan belakang 20 (dua puluh) meter atau lebih;
 - Tonase kotor GI 100 (seratus *Gross Tonnage*) atau lebih; dan atau
 - Yang digerakkan dengan tenaga penggerak utama 250 PK atau lebih.

Klasifikasi kapal adalah salah satu elemen di dalam jaringan maritim sebagai mitra dalam hal keselamatan kapal. Elemen-elemen lain, seperti pemilik kapal, awak kapal, *shipper*, galangan kapal, *Flag State*, *Port State*

The Company is a State Owned Enterprise (SOE) in the form of Limited Company, which was founded with a noble mission to support the independence of the shipping industry and national shipping through classification and related services. In its service, the Company conducts research activities and publishes as well as implements the technical standards (Rules & Regulations) by doing activities of design, construction, and related maritime surveys with ships including floating facilities. This standard is prepared and issued by the Company to be a technical publication. The developed rules & regulations are not only the structure of hull construction, but also safety equipment, machinery and electrical installations.

In production achievement, the Company is able to increase the production of BKI Single Class in the amount of 69.69 million points (134.63%) from 201.20 million points in 2012 to 270.89 million points; Cooperation with Foreign Class grew 5.98 million points (128.77%) from 20.79 million points in 2012 to 26.77 million points; and Consultation & Supervision increased 46.56 million mandays (132.08%) from 145.16 million mandays in 2012 to 191.73 million mandays in 2013.

Business Segments

As a Classification Board, the Company divided its operational activities into two service categories, which are Classification Services, including Class Admission and Class Maintenance, Statutory Services and Material/Components Certification; and Non-Classification Services—Consultation and Supervision for the three sectors, namely marine, industrial, and energy.

I. CLASSIFICATION SERVICES

- a. Ship Classification Activities
Ship classification is a responsibility of the Indonesian flagged ship owners to do on their ships. In line with the Indonesian Ministry of Transportation Regulation No. PM. 7 / 2013 about the classification obligation for Indonesian fleet on the classification agency, states that the ships that are required to be classified by the Company as a Classification Board are the ships with the terms:
 - *The length between the front and rear vertical line 20 (twenty) meters or more;*
 - *Gross tonnage GT of 100 (one hundred Gross Tonnage) or more; and or*
 - *Driven by main propulsion of 250 PK or more.*

Ship Classification is one of the elements inside maritime network as a partner in ship safety. Other elements, such as the ship owners, the crew, the shipper, shipyards, flag state, port state control, insurance, financial institutions

Control, asuransi, Institusi finansial dan penyewa adalah pihak-pihak terlibat dan memiliki andil dalam jaminan keselamatan kapal. Klasifikasi kapal dilakukan berdasarkan pengertian bahwa kapal dimuati, dioperasikan dan dirawat dengan cara yang benar oleh awak kapal yang kompeten dan berkualifikasi. Menjadi tanggung jawab pemilik kapal untuk menjamin bahwa perawatan kapal dilakukan dengan cara yang benar hingga survei periodik berikutnya sesuai persyaratan. Juga menjadi kewajiban pemilik kapal atau yang mewakilinya untuk menginformasikan kepada surveyor klasifikasi saat survei di atas kapal, semua kejadian atau kondisi yang berpengaruh terhadap status klasifikasi.

Ketika kondisi mempertahankan klasifikasi ini tidak dipenuhi, maka Perusahaan sebagai Badan Klasifikasi akan menangguhkan (*suspend*) atau mencabut (*withdrawn*) status klasifikasinya berdasarkan referensi persyaratan klasifikasi. Kapal mungkin akan kehilangan status klasifikasinya untuk sementara atau secara permanen. Demikian juga, kapal yang tidak melaksanakan survei periodik tepat waktu sesuai dengan peraturan klasifikasi, maka Perusahaan sebagai Badan Klasifikasi akan menangguhkan (*suspend*) status klasifikasinya secara otomatis.

Dalam mengimplementasikan Peraturan Teknik, Perusahaan melakukan proses klasifikasi kapal, meliputi:

- Evaluasi teknis terhadap rencana desain dan dokumen terkait terhadap kapal yang akan dibangun untuk memeriksa pemenuhan persyaratan terhadap peraturan yang berlaku;
- Melakukan survei dan pemeriksaan proses konstruksi kapal di galangan kapal oleh surveyor klasifikasi dan juga pemeriksaan pada fasilitas produksi yang menghasilkan komponen utama kapal, seperti plat baja, permesinan, generator, *propeler*, dan lain-lain, untuk menjamin bahwa kapal dan komponennya dibangun sesuai dengan persyaratan klasifikasi;
- Pada saat selesainya pembangunan tersebut di atas, pemilik kapal meminta penerbitan sertifikat klasifikasi yang dipertimbangkan oleh Perusahaan dengan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan selama pembangunan. Jika memuaskan, maka Perusahaan sebagai Badan Klasifikasi akan menyetujui dan menerbitkan sertifikat klasifikasi; dan
- Pada saat kapal tersebut beroperasi/berlayar, pemilik kapal harus mengikuti program survei periodik untuk memeriksa kondisi kapal tersebut tetap sesuai dengan kondisi dan persyaratan untuk mempertahankan sertifikat klasifikasinya.

Untuk kapal yang dibangun sesuai dengan persyaratan peraturan klasifikasi akan ditetapkan notasi klasifikasi atas kapal tersebut oleh Perusahaan sebagai Badan Klasifikasi pada saat selesainya pemeriksaan secara keseluruhan melalui survei klasifikasi dengan hasil yang memuaskan. Untuk kapal yang sudah dioperasikan, Badan Klasifikasi juga melakukan survei periodik untuk

and tenants are the parties involved and have a stake in ship safety assurance. Ship classification is done based on the understanding that the ship is loaded, operated and maintained in the correct manner by a competent and qualified crew. It is the responsibility of the owner of the ship to ensure that the maintenance of the ship is done in the right way until the next periodic survey as per requirements. It is also the duty of the owner or his representative to inform the classification surveyor during the survey on board, all events or conditions that affect the classification status.

When the condition of maintaining classification is not fulfilled, then the Company as a Classification Board will suspend or withdraw the classification status based on the classification requirements reference. The ship might lose its classification status temporarily or permanently. Likewise, for ships that do not carry out periodic surveys on time in accordance with the classification rules, the Company as a Classification Board will suspend its classification status automatically.

In implementing Technical Rules, the Company conducts the ship classification process, including:

- Technical evaluation on the design plan and documents related to the ships to be built to check the compliance with current regulations.*
- Conducting a survey and an inspection of ship construction process at the shipyard by the classification surveyor, and also an inspection on production facilities which produce the ship major components, such as steel plates, machinery, generators, propellers, etc. to ensure that the ship and its components are built according to classification requirements;*
- At the completion of the above, ship owners request the issuance of a certificate of classification that is considered by the Company based on the report of the inspection results during construction. If satisfactory, then the Company as a Classification Board will approve and issue a classification certificate; and*
- At the time the ship is operating / sailing, the owner of the ship must follow the periodic survey program to check if the ship condition is still in accordance with the conditions and requirements to maintain the classification certificate.*

For ships built in accordance with classification regulatory requirements, there will be classification notation of the ship by the Company as a Classification Board upon completion of the whole inspection through a classification survey with excellent results. For ships that have already been operated, a Classification Board also conducts a periodic survey to ensure that the ships still meet

menjamin bahwa kapal masih memenuhi persyaratan klasifikasi untuk mempertahankan klasnya. Seandainya terjadi kerusakan yang mungkin berpengaruh terhadap kondisi klasifikasi diantara masa survei periodik, maka pemilik kapal dan/atau operatornya dipersyaratkan untuk menginformasikan kepada Perusahaan sebagai Badan Klasifikasi terhadap kerusakan tersebut.

Kapal yang sudah memiliki klasifikasi, diwajibkan untuk terus melaksanakan survei yang dipersyaratkan untuk mempertahankan status klasifikasinya. Jenis-jenis survei periodik ini antara lain:

- Survei pembaruan klas (*class renewal*);
- Survei tahunan (*annual survey*);
- Survei antara (*intermediate survey*);
- Survei dok (*docking/bottom survey*); dan
- Survei poros baling-baling, *boiler*, permesinan dan survei khusus lainnya sesuai dengan persyaratan klasifikasi.

Perusahaan sebagai Badan Klasifikasi kemudian akan menerbitkan *survey status* dan diinformasikan kepada pemilik. Semua status klasifikasi kapal, berupa sertifikat dan laporan survei yang dikeluarkan oleh Perusahaan sebagai Badan Klasifikasi dijadikan referensi dalam pengambilan keputusan pihak-pihak yang terlibat dalam operasional kapal tersebut. Pihak asuransi mempergunakan untuk menetapkan premi asuransi dan klaim asuransi; pihak pemilik kargo mempergunakan untuk jaminan bahwa kargonya diangkut oleh kapal yang laik; pihak pemilik kapal mempergunakan untuk mengetahui status kondisi kapal dan perawatannya serta untuk kepentingan komersial memasarkan jasa angkutannya; dan pihak Pemerintah sebagai *law enforcement* untuk memberikan *clearance* atau surat ijin berlayar.

Surveyor klasifikasi dalam melaksanakan survei meliputi:

- Keseluruhan pemeriksaan item survei sesuai dengan daftar isian yang didesain sesuai dengan persyaratan klasifikasi;
- Pemeriksaan yang lebih mendetail terhadap bagian-bagian tertentu;
- Menyaksikan (*witness*) proses pengujian (*testing*), pengukuran (*measurement*) dan percobaan (*trial*) untuk meyakinkan pemenuhan terhadap persyaratan klasifikasi.

Bilamana surveyor menemukan korosi, kerusakan struktur atau kerusakan lambung kapal, permesinan dan peralatan terkait dimana menurut opini surveyor akan mempengaruhi status klasifikasi kapal tersebut, maka surveyor akan mengeluarkan rekomendasi untuk mengatasi ketidak-sesuaian tersebut di atas. Rekomendasi tersebut wajib dilaksanakan oleh pemilik kapal untuk melakukan tindakan perbaikan dan *repair* pada periode waktu tertentu dalam rangka mempertahankan klasifikasinya.

the classification requirements to maintain its class. If any damage occurs and might affect the classification conditions in between survey periods, the ship owners and / or operators are required to inform the Company as a Classification Board about the damage.

The ships that have already had classification, are required to continue to carry out the required surveys to maintain its classification status. The types of periodic surveys include:

- *Class renewal;*
- *Annual survey;*
- *Intermediate survey;*
- *Docking/bottom survey; and*
- *Propeller shaft, boilers, machinery survey and other special surveys according to the classification requirements.*

The Company as a Classification Board will then publish the survey status and inform it to the owner. All ship classification status, in the form of certificates and survey reports issued by the Company as a Classification Board will be used as a reference in decision making of the stakeholders involved in the ships operations. The insurance companies use it to set insurance premiums and claims; the cargo owners use it to ensure that their cargo is being transported by decent ships; the ship owners use it to know the condition status of the ships and ship maintenance, and also for commercial purposes on marketing their transport services; and the government use it as law enforcements to give clearance or sailing permits.

Classification surveyors in conducting surveys include:

- *Overall inspection survey items according to a questionnaire designed according to the classification requirements;*
- *A more detailed inspection on specific parts;*
- *Witness the testing, measurement, and trial process to ensure compliance with the classification requirements.*

When surveyors find corrosion, structural damage or damage on the hull of the ship, related machinery and equipment if in the opinion of the surveyor will affect the classification status of the ship, then the surveyor will issue a recommendation to resolve the discrepancy. This recommendation is obligatory for the ship owner to do corrective actions and repair at a specific time period in order to maintain its classification.

Sebagai Badan Klasifikasi yang harus independen dan mandiri, Perusahaan tidak memiliki kepentingan terhadap aspek komersial terkait dengan desain kapal, pembangunan kapal, kepemilikan kapal, operasional kapal, manajemen kapal, perawatan/perbaikan kapal, asuransi atau persewaan. Perusahaan sebagai Badan Klasifikasi juga melakukan penelitian dan pengembangan dalam rangka peningkatan mutu dan standar teknis yang dipublikasikan kepada pihak yang berkepentingan dengan jasa klasifikasi kapal.

Beberapa kegiatan klasifikasi kapal yang dilakukan oleh Perusahaan sebagai Badan Klasifikasi adalah:

i. Notasi Klas

Setiap kapal yang diklasifikasikan ke Perusahaan memiliki notasi klas yang tercantum dalam sertifikat klas. Penetapan tanda klas tergantung pada pembuktian terpenuhinya peraturan konstruksi Perusahaan yang berlaku pada tanggal permohonan. Perusahaan berhak menambahkan tanda khusus dalam sertifikat klas. Dalam jangkauan klasifikasi, ciri-ciri lambung, mesin dan perlengkapan jangkar ditunjukkan dalam tanda klas dan notasi yang dibubuhkan pada tanda klas.

ii. Penerimaan Klas Bangunan Baru

Penerimaan klas bangunan baru mempunyai pengertian bahwa kapal baru diklasifikasikan ke dalam klas dan dibangun dengan pengawasan Perusahaan sebagai Badan Klasifikasi. Prosedur klasifikasi kapal bangunan baru meliputi persetujuan dan penetapan notasi klas atas gambar lambung, gambar mesin, dan gambar lambung timbul. Gambar yang telah disetujui oleh Perusahaan sebagai badan klasifikasi dijadikan sebagai referensi dalam pemeriksaan kapal oleh surveyor dan pembangunan oleh galangan.

Perusahaan sebagai Badan Klasifikasi juga bertanggung jawab dalam pemeriksaan pemeriksaan NDT (*Radiography*) sesuai dengan instruksi surveyor Perusahaan setelah seluruh konstruksi lambung selesai dibangun. Kemudian dilaksanakan *inclining test* sesuai dengan peraturan Perusahaan sebagai badan klasifikasi.

Surveyor Perusahaan menerbitkan sertifikat klasifikasi sementara yang berlaku 1 (satu) tahun dan sertifikat Garis Muat Sementara yang berlaku 3 (tiga) bulan untuk PGMI dan 5 (lima) bulan untuk ILLC. Sertifikat klasifikasi permanen diterbitkan oleh Perusahaan sebagai Badan Klasifikasi setelah menerima seluruh laporan survei.

As a Classification Board which must be independent and self-sufficient, the Company does not have interests on commercial aspects relating to ship design, ship building, ship ownership, ship operations, ship management, ship maintenance / repair, insurance or rental. The Company as a Classification Board also conducts research and development in order to improve quality and technical standard published to interested parties by ship classification services.

Some of the ship classification activities undertaken by the Company as a Classification Board are:

i. Class Notation

Each ship classified to the Company has class notation that is listed in the class certificate. Determination of class mark depends on the proof of fulfilment of the Company construction regulation prevailing on the date of application. The Company reserves the right to add special marks in class certificate. In the range of classification, hull characteristics, machinery and anchor equipments indicated in class mark and the notation affixed on the class mark.

ii. Class Admission of New Building

The class admission of new building has a sense that the new ships are classified into class and built with the supervision of the Company as a Classification Board. The new ship building classification procedure includes an approval and establishment of class notation on drawing of the hull, machine, and arised hull. The image that has been approved by the Company as a Classification Board will be used as a reference in the inspection of ships by surveyors and construction by the shipyard.

The Company as a Classification Board is also responsible on NDT (radiography) inspections according to the instruction of the Company's surveyor after the completion of the hull construction. Then an inclining test will be conducted in accordance to the Company regulation as a Classification Board.

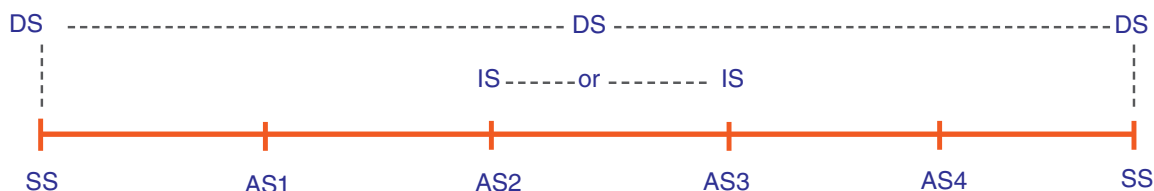
The Company surveyor issues temporary classification certificates which is valid for 1 (one) year and Temporary Load Line certificate valid for 3 (three) months for PGMI and 5 (five) months for ILLC. Permanent classification certificate published by the Company as a Classification Board after.

- iii. **Penerimaan Klas Bangunan Kapal Sudah Jadi**
Penerimaan Klas bangunan kapal sudah jadi memiliki pengertian kapal lama yang akan diklasifikasikan ke dalam klas oleh Perusahaan sebagai Badan Klasifikasi. Seluruh survei akan dilakukan meliputi surat ukur, *gross akte*, *builder certificate*/IMO Number (untuk kapal berbendera Indonesia), *Tonnage Measurement Certificate* 1969, *bill of sale/nationality registry*, *builder certificate*/IMO Number (untuk kapal berbendera asing), lambung, dan mesin.

Penerimaan Klas bangunan sudah jadi juga dilakukan untuk kapal tanki dengan tujuan memberikan sertifikasi kelayakan; termasuk juga kapal dengan “*unattended machinery space*” (Notasi OT). Surveyor Perusahaan menerbitkan sertifikat klasifikasi sementara yang berlaku 1 (satu) tahun dan sertifikat Garis Muat Sementara yang berlaku 3 (tiga) bulan untuk PGMI dan 5 (lima) bulan untuk ILLC.

- iv. **Pindah Klas**
Sebagai badan klasifikasi, Perusahaan sebagai Badan Klasifikasi juga memberikan layanan pindah Klas dari anggota *International Association of Classification Societies* (IACS) ke Biro Klasifikasi Indonesia dengan pelaksanaan minimum survei tergantung pada status Klas kapal, sesuai dengan yang diinformasikan oleh Klas sebelumnya, umur dan jenis kapal.
- v. **Mempertahankan Klas**
Sebuah kapal yang telah diklaskan di Perusahaan sebagai Badan Klasifikasi harus melaksanakan survei mempertahankan klas sesuai waktu yang ditentukan. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari proses pengawasan kondisi kapal dalam menentukan kelayakan beroperasi. Dalam rangka mempertahankan klas, survei periodik dan survei khusus untuk lambung, instalasi mesin dan instalasi listrik, dan setiap perlengkapan khusus yang diklaskan harus dilaksanakan.

Diagram Survei Periodik Dalam Rangka Mempertahankan Klas



Keterangan:

SS (Survei Pembaruan Klas)

- Survei pembaruan klas untuk lambung, instalasi mesin termasuk instalasi listrik dan perlengkapan khusus yang diklaskan harus dilaksanakan pada akhir periode klas.

- iii. **Class Admission of Completed Ship Building**
The class admission of completed ship building means old ships that are going to be classified by the Company as a Classification Board. All surveys will be conducted on the measurement certificate, gross certificates, builder certificates / IMO Number (for Indonesian fleet), Tonnage Measurement Certificate 1969, bill of sale/nationality registry, builder certificates / IMO Number (for foreign-flagged ships), hull, and machinery.

The class admission of completed ship building is also done for tanker ships for the purpose of providing eligibility certification; including ships with unattended machinery space (OT Notation). The Company surveyor issues temporary classification certificates which is valid for 1 (one) year and Temporary Load Line certificate valid for 3 (three) months for PGMI and 5 (five) months for ILLC.

- iv. **Class Move**
As a Classification Board, the Company also gives class move service from International Association of Classification Societies (IACS) to Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) with minimum implementation of survey depending on the class status of the ship, according to the information by previous class, ship age and type.

- v. **Maintaining Class**
A ship that has been classified to the Company as a Classification Board must perform the survey to maintain class according to the specified time. This matter is done as a part of a surveillance process of the ship condition in determining feasibility of operation. In order to maintain class, periodic surveys and special surveys for hull, installation of machinery and electrical installations, and any special equipment that have been classified should be implemented.

Diagram of Periodic Survey In Order to Maintain Class

Information:

SS (Class Renewal Survey)

- Class renewal survey for the hull, installations of machinery including electrical installations and classified special equipment must be conducted at the end of class period.

- Pembaruan klas untuk lambung dinomori dalam urutan I, II, III dan seterusnya.
- Pembaruan klas IV dan seterusnya disamakan dengan Pembaruan klas III.

AS (Survei Tahunan)

- Survei tahunan dilaksanakan untuk lambung, instalasi mesin termasuk instalasi listrik dan perlengkapan khusus yang diklasikan harus dilaksanakan pada selang waktu 12 bulan, terhitung dari tanggal dimulai periode klas seperti yang tercantum dalam sertifikat klas.
- Survei bisa dilaksanakan dalam jendela waktu ± 3 bulan dihitung dari hari terakhir dari bulan kalender dimana periode klas yang sedang berjalan akan genap berumur satu tahun.
- Untuk kapal dengan akomodasi lebih dari 12 penumpang survei tahunan harus dilaksanakan tidak lebih lambat dari tanggal jatuh temponya.

IS (Survei Antara)

- Survey antara adalah survei tahunan yang diperluas.
- Jatuh tempo survei antara secara nominal pada tahunan kedua atau tahunan ketiga sejak selesai survei Penerimaan/Pembaruan klas.

DS (Survei Penedokan)

- Survei penedokan dilaksanakan sebagai pemeriksaan berkala terhadap kondisi lambung di bawah air, bukaan dan perlengkapan penutupan pada pelat kulit yang berhubungan dengan instalasi mesin dan komponen bagian luar dari sistem penggerak dan kemudi.
- Kapal dengan tanda klas A100 harus menjalani survei penedokan dua kali dalam satu periode klas lima tahun. Survei penedokan yang pertama dilaksanakan pada survei tahunan ke-2 atau paling lambat survei tahunan ke-3.
- Selang waktu maksimum antara survei penedokan yang berurutan tidak boleh lebih dari 36 bulan. Survei penedokan berikutnya harus dilaksanakan paling lambat setelah 24 bulan.
- Kapal dengan tanda klas A90 harus menjalani survei penedokan pada selang waktu 18 bulan.
- Kapal dengan akomodasi untuk lebih dari 12 penumpang harus menjalani survei penedokan pada selang waktu satu tahun.

PS (Survey pencabutan poros baling- baling)

- Poros baling-baling ditentukan periode pencabutannya seperti yang tercantum pada sertifikat klasifikasi mesin.
- Poros baling-baling harus dicabut untuk pemeriksaan kondisi poros dari keausan/bengkok/kerusakan lainnya.
- Pelaksanaan pencabutan poros biasanya dilakukan bersamaan dengan survei penedokan.

- *Class renewal for the hull numbered in the order of I, II, III, and so on.*
- *Class renewal IV and so on to be like class renewal III.*

AS (Annual Survey)

- *The annual survey conducted for the hull, installations of machinery including electrical installations and classified special equipment must be conducted at an interval of 12 months, commencing from the starting date of the class period as listed in the class certificate.*
- *The survey can be done in time window of ± 3 months counted from the last day of the calendar month in which the period of the ongoing class will turn one year old.*
- *For ships with the accommodation of more than 12 passengers, annual surveys should be carried out no later than the due date.*

IS (In-between Survey)

- *In-between Survey is an expanded annual survey.*
- *The due date of in-between survey nominally on the second or third year since the completion of the class admission / renewal survey.*

DS (Docking Survey)

- *Docking survey is conducted as periodic inspections of the condition of the hull below water, opening and closing fixtures on the leather plate that are connected with the installation of machinery and outer components of the propulsion and steering systems.*
- *Ships with class mark A100 must undergo the docking survey twice in one class period of five years. The first docking survey is done on the 2nd annual survey or at the latest on the 3rd annual survey.*
- *The maximum interval between consecutive docking surveys may not be more than 36 months. The next docking survey has to be done at the latest after 24 months.*
- *Ships with class mark A90 must undergo the docking surveys at an interval of 18 months.*
- *Ships with the accommodation of more than 12 passengers must undergo docking surveys at an interval of one year.*

PS (Propeller revocation survey)

- *The propeller shaft revocation period is set as listed in the classification certificate of machinery.*
- *The propeller has to be revoked for an inspection on the condition of wearing-out/bent/other damage.*
- *The execution of propeller revocation is usually done concurrently with docking survey.*

Selain survei periodik, terdapat pula jenis survei khusus yang berupa:

- Survei kerusakan dan perbaikan. Survei kerusakan dan survei perbaikan berlaku bila lambung kapal, instalasi mesin dan listrik dan perlengkapan khusus yang diklasikan mengalami kerusakan yang mungkin mempengaruhi berlakunya klas, atau apabila kerusakan diperkirakan dapat mengakibatkan kecelakaan atau kejadian lain.
- Survei perombakan. Dalam hal perombakan lambung atau mesin kapal, survei harus dilaksanakan sesuai dengan data terkait yang telah disetujui, sama halnya dengan bangunan baru.
- Survei khusus. Perusahaan berhak mensyaratkan pelaksanaan survei khusus di luar dari survei periodik yang ada. Survei tersebut diperlukan untuk pemeriksaan kondisi teknis kapal dan dipahami merupakan bagian dari Sistem Jaminan Mutu Perusahaan.

b. Kegiatan Sertifikasi Statutoria

Konvensi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut (UNCLOS) merupakan payung konvensi yang terkait dengan banyak aspek di laut dan kegunaannya, termasuk jaminan registrasi kapal oleh suatu negara. Jika kapal telah diregistrasi, bendera negara mempunyai tugas tertentu seperti ditetapkan dalam UNCLOS. Konvensi internasional telah sepakat mengedepankan standar yang seragam untuk memudahkan penerimaan suatu kapal terdaftar di suatu negara dalam wilayah perairan dan pelabuhan negara lain dan standar terhadap keselamatan di laut (SOLAS) dan perlindungan lingkungan (MARPOL). Standar ini biasanya dikenal dengan persyaratan "statutory". Dalam pelaksanaannya, SOLAS mengizinkan bendera negara (*Flag State*) untuk mendelegasikan pemeriksaan dan survei statutoria kapal kepada *Recognized Organization* (RO) yang biasanya adalah Badan Klasifikasi. RO yang diberi otoritas akan melakukan survei dan sertifikasi kapal atas nama Pemerintah (*Flag State*). RO ini dapat juga melakukan pemeriksaan dan survei jika diminta oleh otoritas *port state*.

Sebagaimana lazimnya negara lain yang memiliki industri maritim dan pelayaran yang maju, mereka hanya memiliki satu badan klasifikasi nasional yang mendapat kepercayaan penuh dan memperoleh pelimpahan wewenang dari Pemerintah negaranya masing-masing bahkan juga dari negara lainnya untuk melaksanakan survei dan penerbitan sertifikat statutoria. Perusahaan sebagai Badan Klasifikasi telah memenuhi persyaratan teknis dan kriteria sesuai dengan Resolusi *International Maritime Organization* (IMO) A.739 (18) dan A.789 (19) sebagai *Recognized Organization* (RO) untuk ditunjuk melaksanakan survei kapal-kapal berbendera Indonesia atas nama

Besides periodic surveys, there are also special type of surveys in the form of:

- *Damage and repair survey. The damage and repair survey applies if the ship hulls, machinery and electrical installations and classified special equipments suffered damage which may affect the class validity, or if the damage is estimated to cause an accident or other incidents.*
- *Renovation survey. In the ship hull or machinery renovation, a survey must be conducted according to related and approved data, same with new building.*
- *Special survey. The Company reserves the right to require the implementation of special surveys outside of the existing periodic surveys. The surveys are necessary for inspection of the technical condition of the ship and understood to be a part of the Company's Quality Assurance System.*

b. Statutory Certification Activities

The United Nations (UN) Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) is a convention umbrella that is associated with many aspects of the ocean and its usefulness, including ship registration warranty to a state. If the ship is registered, the state flag have certain tasks as defined in UNCLOS. International convention have agreed to promote a unified standard to facilitate the admission of ships registered to a state inside other country's territorial waters and ports and standards on Safety of Life at Sea (SOLAS) and environmental protection (MARPOL). These standards are usually known as statutory requirements. In its execution, SOLAS allows the state flag to delegate statutory inspection and survey of the ship to Recognized Organization (RO) which is usually a Classification Board. RO is given the authority to conduct the survey and certification of the ship on behalf of the Government (Flag State). The RO may also conduct inspections and surveys if requested by the state port authority.

Countries with advanced maritime and shipping industry usually only have one national classification board that has full trust and obtain a delegation of authority from the Government of each country and even from other countries to conduct surveys and issuance of statutory certificates. The Company as a Classification Board has met the technical requirements and criteria in accordance with the Resolution of the International Maritime Organization (IMO) A.739 (18) and A.789 (19) as a Recognized Organization (RO) to be appointed to carry out the survey of Indonesian-flagged ships on behalf of the Government of Indonesia, through Directorate

Pemerintah Indonesia cq Ditjen Perhubungan Laut. Hingga saat ini, Perusahaan telah memiliki jumlah 71 *safety auditor* yang berkualifikasi untuk melaksanakan audit *International Safety Management (ISM) Code* dan 80 auditor untuk melaksanakan audit *International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code*. BKI juga menerbitkan Register *ISM Code* dan *ISPS Code* yang dipublikasikan melalui media cetak maupun akses melalui website Perusahaan.

General of Sea Transportation. To date, the Company has had a number of 71 qualified safety auditors to audit the International Safety Management (ISM) Code and 80 auditors to audit the International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code. BKI also publishes Registers ISM Code and ISPS Code, which are published through printed media as well as can be accessed via the Company's website.

Terdapat beberapa sertifikasi statutoria yang dilakukan Perusahaan sebagai Badan Klasifikasi. Hingga saat ini, Perusahaan memiliki otorisasi penuh dari Pemerintah Indonesia dalam hal Sertifikat Garis Muat/*Loadline*, sementara otorisasi statutoria lainnya masih bersifat sementara.

There are some statutory certification made by the Company as a Classification Board. To date, the Company has full authorization from the Government of Indonesia in terms of Load Line Certificates, while other statutory authorization is still tentative.
Information:

Tabel Otorisasi Statutoria dari Pemerintah Republik Indonesia Sampai Dengan Tahun 2013
Table of Statutory Authorization from the Government of the Republic of Indonesia Until the Year 2013

No	Penugasan Statutoria <i>Statutory Assignment</i>	Bentuk Penugasan <i>Form of Assignment</i>
1	LOADLINE (LAMBUNG TIMBUL) Dasar Penugasan : SK DIRJEN HUBLA No.DKP/46/43/12 TGL.12.6.1976 (ILLC) & No.PY.66/1/1-93 Tgl. 28-8-1993 (PGMI). Lingkup Penugasan : Survey dan Sertifikasi dilakukan oleh BKI. LOADLINE (Raised Hull) Basis of Assignment : SK DIRJEN HUBLA No.DKP/46/43/12 TGL.12.6.1976 (ILLC) & No.PY.66/1/1-93 Tgl 28-8-1993 (PGMI). Assignment Scope: Survey and Certification conducted by BKI	Penugasan Penuh <i>Full Assignment</i>
2	SAFETY CONSTRUCTION Dasar Penugasan : SK DIRJEN HUBLA No.PY.68/1/3-95 Tgl. 6-4-1995 Lingkup Penugasan : Survey & Sertifikasi untuk kapal klas BKI tonase > 500GT dapat dilaksanakan oleh BKI. Sertifikat sementara oleh BKI (3 bulan), sertifikat permanen oleh Ditjen Hubla. SAFETY CONSTRUCTION <i>Basis of Assignment : SK DIRJEN HUBLA No.PY.68/1/3-95 Tgl. 6-4-1995</i> <i>Assignment Scope : Survey & Certification for BKI tonnage class ship > 500GT may be conducted by BKI. Temporary certificate by BKI (3 months), permanent certificate by the Directorate General of Sea Transport.</i>	Penugasan Parsial <i>Partial Assignment</i>
3	MARINE POLLUTION ANNEX II Dasar Penugasan : SK DIRJEN HUBLA No.PY.68/1/3-95 Tgl. 6-4-1995. Lingkup Penugasan : Survey & Sertifikasi untuk kapal klas BKI tonase > 500GT dapat dilaksanakan oleh BKI. Sertifikat sementara oleh BKI (3 bulan), sertifikat permanen oleh Ditjen Hubla MARINE POLLUTION ANNEX II <i>Basis of Assignment : SK DIRJEN HUBLA No.PY.68/1/3-95 Tgl. 6-4-1995.</i> <i>Assignment Scope : Survey & Certification for BKI tonnage class ship > 500GT may be</i>	Penugasan Parsial <i>Partial Assignment</i>
4	FITNESS OF CHEMICAL CARRIER & GAS CARRIER IN BULK Dasar Penugasan : SK DIRJEN HUBLA No.PY.68/1/3-95 Tgl. 6-4-1995. Lingkup Penugasan : Survey & Sertifikasi untuk kapal klas BKI tonase > 500GT dapat dilaksanakan oleh BKI. Sertifikat sementara oleh BKI (3 bulan), sertifikat permanen oleh Ditjen Hubla. FITNESS OF CHEMICAL CARRIER & GAS CARRIER IN BULK <i>Basis of Assignment : SK DIRJEN HUBLA No.PY.68/1/3-95 Tgl. 6-4-1995.</i> <i>Assignment Scope : Survey & Certification for BKI tonnage class ship > 500GT may be conducted by BKI. Temporary certificate by BKI (3 months), permanent certificate by the Directorate General of Sea Transport.</i>	Penugasan Parsial <i>Partial Assignment</i>

Tabel Otorisasi Statutoria dari Pemerintah Republik Indonesia Sampai Dengan Tahun 2013
Table of Statutory Authorization from the Government of the Republic of Indonesia Until the Year 2013

No	Penugasan Statutoria Statutory Assignment	Bentuk Penugasan Form of Assignment
5	ISM CODE Dasar Penugasan : SK DIRJEN HUBLA No.PY/1/7-96 Tgl. 12-7-1996. Lingkup Penugasan : Audit awal oleh BKI & audit berkala oleh BKI. Sertifikat sementara oleh BKI (5 bulan), sertifikat permanen oleh Ditjen Hubla. Audit disaksikan oleh wakil dari Ditjen.Hubla. <i>ISM CODE</i> <i>Basis of Assignment : SK DIRJEN HUBLA No.PY/1/7-96 Tgl. 12-7-1996.</i> <i>Assignment Scope : Initial audit by BKI & periodic audits by BKI. Temporary certificate by BKI (5 months), a permanent certificate by Directorate General of Sea Transport. Audit witnessed by representatives from Directorate General of Sea Transport.</i>	Penugasan Parsial <i>Partial Assignment</i>
6	ISPS CODE Dasar Penugasan : SK DIRJEN HUBLA No.KL.93/1/9-04 tanggal 3 Maret 2004 dan No.KL.93/2/2-04 tanggal 14 Mei 2004. Lingkup Penugasan : Audit awal oleh BKI & audit berkala oleh BKI. Sertifikat sementara oleh BKI (5 bulan), sertifikat permanen oleh Ditjen Hubla. Audit disaksikan oleh wakil dari Ditjen.Hubla. <i>ISPS CODE</i> <i>Basis of Assignment : SK DIRJEN HUBLA No.KL.93/1/9-04 tanggal 3 Maret 2004 dan No.KL.93/2/2-04 tanggal 14 Mei 2004.</i> <i>Assignment Scope : Initial audit by BKI & periodic audits by BKI. Temporary certificate by BKI (5 months), a permanent certificate by Directorate General of Sea Transport. Audit witnessed by representatives from Directorate General of Sea Transport.</i>	Penugasan Parsial <i>Partial Assignment</i>
7	MARINE POLLUTION ANNEX VI Dasar Penugasan : Surat Direktur Perkapalan dan Kepelautan No. PY.67/1/7.05 tanggal 6 April 2005. Lingkup Penugasan : Survey & Sertifikasi untuk kapal tonase > 500GT dilaksanakan oleh BKI. Sertifikat sementara oleh BKI (3 bulan), sertifikat permanen oleh Ditjen Hubla <i>MARINE POLLUTION ANNEX VI</i> <i>Basis of Assignment : Surat Direktur Perkapalan dan Kepelautan No. PY.67/1/7.05 tanggal 6 April 2005.</i> <i>Assignment Scope : Survey & Certification for BKI tonnage class ship > 500GT may be conducted by BKI. Temporary certificate by BKI (3 months), permanent certificate by the Directorate General of Sea Transport.</i>	Penugasan Parsial <i>Partial Assignment</i>
8	MARINE POLLUTION ANNEX I - CONDITION ASSESSMENT SCHEME (CAS) Dasar Penugasan : Surat Direktur Perkapalan dan Kepelautan No. UM.485/3/13/DII-05 tanggal 27 Juni 2005 Lingkup Penugasan : Survey & Sertifikasi untuk kapal tonase > 500GT dilaksanakan oleh BKI. Sertifikat sementara oleh BKI (3 bulan), sertifikat permanen oleh Ditjen Hubla <i>MARINE POLLUTION ANNEX I - CONDITION ASSESSMENT SCHEME (CAS)</i> <i>Basis of Assignment : Surat Direktur Perkapalan dan Kepelautan No. UM.485/3/13/DII-05 tanggal 27 Juni 2005</i> <i>Assignment Scope : Survey & Certification for BKI tonnage class ship > 500GT may be conducted by BKI. Temporary certificate by BKI (3 months), permanent certificate by the Directorate General of Sea Transport.</i>	Penugasan Parsial <i>Partial Assignment</i>

Keterangan:

Pengertian kata "dapat" dalam penugasan *Safety Construction* (butir 2), *Marine Pollution Annex II* (butir 3) dan *Fitness Certificate* (butir 4 di atas) adalah survei dan sertifikasi sementara dapat diterbitkan oleh Perusahaan, namun pemilik kapal tetap melakukan pengurusan sertifikat permanen ke Ditkapel. Berbeda dengan penugasan *ISM Code* atau *ISPS Code* dimana audit dan sertifikasi sementara dilakukan oleh Perusahaan dan pengurusan sertifikat permanen ke Ditkapel/Dit.KPLP dilakukan oleh Perusahaan, sedangkan pemilik kapal hanya berurusan dengan Perusahaan sebagai Badan Klasifikasi.

Definition of the word "may" in the assignment Safety Construction (item 2), Marine Pollution Annex II (point 3) and Fitness Certificate (point 4 above) is that survey and temporary certification can be issued by the Company, but the ship owner still have to arrange to get permanent certificate to the Directorate of Shipping Services (Ditkapel). In contrast to the assignment of the ISM Code or the ISPS Code in which the audit and certification is being made by the Company and obtaining a permanent certificate to Ditkapel / Dit.KPLP conducted by the Company, while the ship owners only deal with the Company as Classification Board.

c. Kegiatan Sertifikasi Industri Terkait dan Komponen Pendukung Kapal

Dalam menjalankan tugasnya secara menyeluruh terkait keselamatan dan kondisi kapal yang diklasifikasikan oleh Perusahaan, Perusahaan sebagai Badan Klasifikasi memberikan sertifikasi kepada komponen pendukung kapal, seperti sertifikasi atas perusahaan teknik, sertifikasi material/komponen kapal, dan sertifikasi juru las kapal.

i. Kegiatan Sertifikasi Perusahaan Teknik

Terdapat dua jenis perusahaan teknik yang dapat disertifikasi oleh Perusahaan sebagai Badan Klasifikasi, yaitu: perusahaan penyedia jasa teknik, dan perusahaan yang memproduksi material/komponen kapal. Perusahaan penyedia jasa teknik bidang perkapalan yang mengerjakan pekerjaan teknis di kapal yang diklasifikasikan pada Perusahaan harus mendapatkan sertifikasi/uji kelayakan terhadap pekerjaannya, untuk menjamin bahwa pekerjaan yang dilaksanakan memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku di Perusahaan sebagai Badan Klasifikasi.

Jenis-jenis jasa teknik yang disertifikasi antara lain:

- Pengukuran Ketebalan Pelat.
- Pengujian Merusak/Tidak Merusak.
- Survei bawah air.

ii. Kegiatan Sertifikasi Material/Komponen

Badan usaha yang memproduksi material/komponen kapal juga diwajibkan untuk melakukan sertifikasi atas material/komponen produk yang dihasilkan agar Perusahaan sebagai Badan Klasifikasi dapat menjamin mutu kualifikasi sebuah kapal yang diklasifikasikan di Perusahaan, baik secara komposisi material maupun kinerja dari komponen. Perusahaan sebagai Badan Klasifikasi akan menerbitkan sertifikat *Material Approval* dan *Component Approval* untuk setiap material/komponen yang akan digunakan.

iii. Kegiatan Sertifikasi Juru Las

Selain badan usaha dan material/komponen, Perusahaan sebagai Badan Klasifikasi juga mewajibkan setiap tenaga juru las yang bekerja saat perbaikan/pembangunan kapal yang diklasifikasikan di Perusahaan harus memiliki sertifikat juru las yang dikeluarkan oleh Perusahaan sebagai Badan Klasifikasi. Hal ini untuk menjamin bahwa hasil pekerjaan pengelasan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan sebagai Badan Klasifikasi. Penerbitan sertifikat juru las diberikan dan berlaku untuk dua tahun.

c. Related Industry Certification Activities and Ship Supporting Components

In performing its overall duties related to the safety and condition of the ship which is classified by the Company, the Company as Classification Board certify the ship supporting components, such as the certification of the engineering Company, certification of materials / components, and the ship welder certification.

i. Engineering Company Certification

There are two kinds of engineering Company that can be certified by the Company as a Classification Board, which are: engineering services Company, and the Company that manufactures the material / components of the ship. Engineering service Company of shipping which doing technical work on the ship classified by the Company must obtain certification/ test of feasibility on the job, to ensure that the work performed meets the terms in the Company as a Classification Board.

The types of certified engineering services include:

- *Plate thickness measurements.*
- *Destructive/Non Destructive Testing.*
- *Underwater survey.*

ii. Materials/Components Certification

Business entities which produce the ship materials/ components are also required to undertake certification of materials / components produced products so that the Company as a Classification Board can guarantee the quality of the qualifications of a ship classified in the Company, both material composition and performance of the components. The Company as a Classification Board will issue a certificate of Materials and Component Approval for each material / components that is going to be used.

iii. Ship Welder Certification

In addition to business entities and materials / components, the Company as a Classification Board also requires any welder who work during repair / construction of ships classified in the Company must have welder certificate issued by the Company as a Classification Board. This is to ensure that the results of the welding work is performed in accordance with the applicable terms in the Company as a Classification Board. Issuance of the ship welder certificate will be given and is valid for two years.

II. JASA NON KLASIFIKASI/KONSULTANSI DAN SUPERVISI

Tahun 1982, Perusahaan melakukan diversifikasi usaha non klasifikasi dan merintis bidang usaha jasa konsultasi & supervisi. Jasa konsultasi & supervisi ini dilakukan untuk tiga sektor yaitu maritim, industri dan energi. Secara spesifik, jasa konsultasi & supervisi Perusahaan memberikan studi kelayakan, konsultasi dan supervisi di bidang teknologi maritim dan industri lainnya; melakukan jasa inspeksi dan sertifikasi di bidang migas, minerabapabum, naker dan perhubungan; melakukan rekayasa teknik dan supervisi di bidang migas; melakukan pengujian *Destructive Testing* (DT) dan *Non Destructive Testing* (NDT); melaksanakan konsultasi sesuai standar nasional dan Internasional; melaksanakan pelatihan keahlian di bidang teknik; dan kegiatan jasa pemborongan konstruksi dan non konstruksi di bidang instalasi fasilitas minyak dan gas, panas bumi dan industri pertambangan pada umumnya.

Di bawah ini pemaparan jenis layanan non klasifikasi/konsultasi & supervisi dari Perusahaan.

II. NON CLASSIFICATION/CONSULTATION SERVICE AND SUPERVISION

In 1982, the Company diversified non classification businesses and started the business of consultation & supervision services. The consultation & supervision services is carried out for the three sectors, maritime, industrial, and energy. Specifically, the Company's consultation & supervision services provide feasibility studies, consultation and supervision in the field of maritime technology and other industries; conduct inspection and certification services in oil and gas, Geothermal, labour and transportation; conduct *Destructive Testing* (DT) and *Non Destructive Testing* (NDT); provide consultations based on national and international standards; conduct expertise training in the field of engineering; and contracting services of construction and non construction in the installations of oil and gas, geothermal facilities and other mining industries in general.

Below is the types of non classification/consultation & supervision services of the Company.

Tabel Jenis Layanan Non Klasifikasi
Table of Non Classification Services

Kompetensi Competition	Maritim Marine	Industri Industry	Energi Energy
Identifikasi & Survey Identification & Survey	Ship condition survey, dll Ship condition survey, etc	Lashing survey, dll Lashing survey, etc	Petroleum survey, dll Petroleum survey, etc
Mapping Mapping	Marine mapping Marine mapping	Pembuatan peta dasar Create base map	Studi potensi sumber daya MIGAS, dll Study of potential Oil and Gas resource, etc
Inspection Inspection	Floating object inspection, dll Floating object inspection, etc	Crane, forklit, loader, truck, dll Crane, forklit, loader, truck, etc	Storage tank inspection, dll Storage tank inspection, etc
Test Test	WPS and welder test, dll WPS and welder test, etc	Wich load testing, dll Wich load testing, etc	WPS and welder test, dll WPS and welder test, etc
Laboratory Analisis Laboratory Analisis	Analisa air laut, dll Analysis of sea water, etc	Mechanical testing laboratory, dll Mechanical testing laboratory, etc	Analisa batubara, minyak, material Analysis of coal, oil, material
Assesment Assesment	Port assesment, dll Port assesment, etc	Remaining life assesment, dll Remaining life assesment, etc	Facilities audit, dll Facilities audit, etc
Verification and Evaluation Verification and Evaluation	Evaluasi kenaikan sarat kapal, dll Evaluation of increase in ship draft, etc	Verifikasi harga, dll Verification of price, etc	Verifikasi penjualan batubara, dll Verification of coal sales, etc
Monitoring Monitoring	Project monitoring, dll Project monitoring, etc	Monitoring corrosion, dll Monitoring corrosion, etc	Monitoring penjualan LNG, dll Monitoring LNG sales, etc
Consultancy Consultancy	New building design, dll New building design, etc	Konsultan K-3, dll Consultant OHS, etc	Sistem pemantauan lifting MIGAS, dll Oil and Gas lifting monitoring system, etc

Tabel Jenis Layanan Non Klasifikasi
Table of Non Classification Services

Kompetensi Competition	Maritim Marine	Industri Industry	Energi Energy
<i>Project Management</i> Project Management	<i>Planned maintenance system, dll</i> Planned maintenance system, etc	<i>Project supervision and management, dll</i> Project supervision and management, etc	Studi potensi sumber daya MIGAS, dll Study of potential Oil and Gas resource , etc
<i>Certification</i> Certification	<i>Workshop certification, dll</i> Workshop certification, etc	<i>Lifting gear inspection & certification</i> Lifting gear inspection & certification	<i>Pipeline inspection & certification</i> Pipeline inspection & certification
<i>Training</i> Training	<i>Marine inspector training, dll</i> Marine inspector training, etc	<i>Welding inspector, dll</i> Welding inspector, etc	<i>Rigging and signalman, dll</i> Rigging and signalman, etc
<i>Investigation</i> Investigation	<i>Insurance survey, dll</i> Insurance survey, etc	<i>Failure analysis, dll</i> Failure analysis, etc	<i>Soil investigation, dll</i> Soil investigation, etc
<i>Supervision</i> Supervision	<i>New building supervision, dll</i> New building supervision, etc	<i>Project supervision and management, dll</i> Project supervision and management, etc	Penyaksian inspeksi batubara, dll Witnessing coal inspections, etc
<i>Man power Supply</i> Man power Supply	<i>Operating and maintenance, dll</i> Operating and maintenance, etc	<i>Industrial inspector, dll</i> Industrial inspector, etc	<i>Project management team, dll</i> Project management team, etc

Pencapaian Operasional Per Segmen Usaha

Produksi Perusahaan dalam lima tahun terakhir untuk masing-masing segmen usaha, baik klasifikasi dan usaha jasa konsultansi & supervisi selama periode 2009-2013 dipaparkan dalam data-data di bawah ini.

I. PENCAPAIAN BIDANG JASA KLASIFIKASI

- a. Pertumbuhan Produksi
Pencapaian produksi periode tahun 2009-2013 secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Posisi Registrasi Kapal Klas Perusahaan (dalam satuan Unit)
The Position of Company Class Ship Registration (in Units)

Uraian Description	2009				2010			
	RJPP	Real.	%H1	%H2	RJPP	Real.	%H3	%H4
Kapal Terdaftar Registered Ships	11.974	12.436	120,95	110,24	12.596	13.257	105,19	106,60
Klas Ditangguhkan Suspended Class	5.317	6.685	259,37	135,30	5.801	6.857	109,10	102,57
Klas Berlaku Valid Class	6.657	5.751	84,80	90,71	6.795	6.400	102,07	111,28

Uraian Description	2011				2012			
	RJPP	Real.	%H5	%H6	RJPP	Real.	%H7	%H8
Kapal Terdaftar Registered Ships	14.051	14.754	111,55	111,29	14.800	16.167	105,33	109,58
Klas Ditangguhkan Suspended Class	7.417	7.226	127,86	105,38	7.800	6.661	105,16	92,18
Klas Berlaku Valid Class	6.634	7.528	97,63	117,63	7.000	9.506	105,52	126,28

Operational Achievement Per Business Segment

The Company production in the last five years for each business segments, both classification and consultation & supervision service during the period of 2009-2013 is presented in the data below.

I. ACHIEVEMENT OF CLASSIFICATION SERVICE

- a. Production Growth
The achievement of production period of the year 2009-2013 can be clearly seen in the following table:

Uraian Description	2013				Rata-Rata Average	
	RJPP	Real.	%H9	%H10	%H11	%H12
Kapal Terdaftar Registered Ships	16.167	17.622	105,41	109,00	109,69	109,34
Klas Ditangguhkan Suspended Class	6.661	7.070	105,13	106,15	141,32	108,32
Klas Berlaku Valid Class	9.506	10.552	105,71	111,00	99,15	111,38

Tolok ukur produksi di bidang usaha klasifikasi adalah realisasi jumlah unit kapal yang diklaskan dari kapal yang terdaftar. Apabila dilihat secara keseluruhan, maka rata-rata pertumbuhan kapal yang terdaftar selama tahun 2009-2013 adalah sebesar 9,34%. Pertumbuhan yang relatif tinggi ini sangat dipengaruhi adanya Inpres No. 5 tahun 2005 dan Permenhub No. KM.20 tahun 2006. Dengan diterapkannya *Automatic Class Suspension*—sesuai persyaratan *International Association of Classification Societies (IACS)*—dan sistem *reminder* jatuh tempo survei periodik, maka jumlah kapal klas berlaku (*valid class*) tumbuh rata-rata 11,38%.

Production benchmark in the field of classification is the realization of the classified ship total unit from the registered ships. All and all, the average registered ship growth during the year 2009-2013 amounted to 9.34%. Relatively high growth is greatly influenced by the presence of Presidential Instruction No. 5 of 2005 and Minister of Transportation regulations No. KM.20 / 2006. With the application of Automatic Class Suspension—according to the requirements of International Association of Classification Societies (IACS)—and reminder system of periodic survey due date, so the number of valid class ships grew at an average of 11,38%.

Posisi Registrasi Kapal Klas Perusahaan (dalam Ribuan GT)

The Position of Company Class Ship Registration (in Thousand GT)

Uraian Description	2009				2010			
	RJPP	Real.	%H1	%H2	RJPP	Real.	%H3	%H4
Kapal Terdaftar Registered Ships	12,604	13,652	132.67	118.09	13,100	15,588	116.33	114.18
Klas Ditangguhkan Suspended Class	4,612	5,417	279.52	136.24	4,772	5,994	132.09	110.65
Klas Berlaku Valid Class	7,992	8,235	101.81	108.57	8,328	9,594	107.23	116.50

Uraian Description	2011				2012			
	RJPP	Real.	%H5	%H6	RJPP	Real.	%H7	%H8
Kapal Terdaftar Registered Ships	15.047	18.776	114,86	120,45	16.000	21.069	106,33	112,21
Klas Ditangguhkan Suspended Class	5.988	6.828	125,48	113,91	6.200	6.446	103,54	94,41
Klas Berlaku Valid Class	9.059	11.948	108,78	124,54	9.800	14.622	108,18	122,38

Uraian Description	2013				Rata-Rata Average	
	RJPP	Real.	%H9	%H10	%H11	%H12
Kapal Terdaftar Registered Ships	16.800	24.440	105,00	116,00	112,56	116,19
Klas Ditangguhkan Suspended Class	6.500	7.284	104,84	113,00	143,37	113,64
Klas Berlaku Valid Class	10.300	17.155	105,10	117,32	105,61	117,86

Sedangkan tolak ukur produksi di bidang usaha klasifikasi dari pertumbuhan GT (*gross tonnage*) dari kapal yang diklaskan tersebut, maka rata-rata pertumbuhan kapal yang terdaftar selama tahun 2009-2013 adalah sebesar 16,19% dengan klas yang ditangguhkan sebesar 13,64%;

Meanwhile the production benchmark in classification business from the GT (gross tonnage) growth of the classified ships, then the average of registered ships growth during 2009-2013 is 16,19% with suspended class of 13,64%; so that the growth of valid class ships

sehingga pertumbuhan kapal klas berlaku (kapal terdaftar dikurangi klas yang ditangguhkan) adalah sebesar 17,86%.

Pencapaian tingkat pertumbuhan produksi segmen klasifikasi dan statutoria dalam poin rata-rata sebesar 30,56% per tahun, sedangkan tingkat pertumbuhan yang ditargetkan dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan periode 2009-2013 adalah sebesar 12,06% per tahun.

Namun demikian produksi atas kerjasama dengan badan klasifikasi asing mengalami penurunan antara lain disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- Berkurangnya produksi atas kerjasama dengan badan klasifikasi asing karena badan-badan klasifikasi asing tersebut telah membuka badan usahanya di Indonesia;
- Ketentuan baru IACS yang tidak memungkinkan *Non Exclusive Surveyor* (NES) melaksanakan survei periodik dan statutoria.

(registered ships reduced by suspended class) amounts to 17,86%.

The achievement of production growth rate of classification and statutory segments is in an average points of 30,56% per year, while the targeted growth rate in the Company's Long Term Plan 2009-2013 is 12,06% per year.

However the production on cooperation with the foreign classification board suffered a decrease partly due to the following matters:

- Decreased production on cooperation with foreign classification board because these foreign classification entities opened businesses in Indonesia;
- New terms of IACS restricts *Non Exclusive Surveyor* (NES) to conduct periodic and statutory surveys.

Realisasi Produksi 2009-2013, Segmen Klasifikasi & Statutoria (dalam satuan Ribuan Poin)

Production Realization 2009-2013 Classification & Statutory Segments (in Thousand Points)

Uraian Description	2009				2010			
	RJPP	Real.	%H1	%H2	RJPP	Real.	%H3	%H4
Klasifikasi& Statutoria								
Klas Tunggal Single class	103.850	111.888	149,21	109,42	119.686	136.714	115,25	122,19
Kerjasama dengan asing Cooperation with foreign	6.530	9.695	145,11	114,03	7.966	10.700	121,99	110,37
Total	110.380	121.583	148,96	109,77	127.652	147.414	115,65	121,25
Uraian Description	2011				2012			
	RJPP	Real.	%H5	%H6	RJPP	Real.	%H7	%H8
Klasifikasi& Statutoria								
Klas Tunggal Single class	166.765	162.903	139,34	119,16	201.000	201.205	120,53	123,51
Kerjasama dengan asing Cooperation with foreign	7.765	11.737	97,48	109,69	8.000	20.790	103,03	177,13
Total	174.530	174.640	136,72	118,47	209.000	221.995	119,75	127,12
Uraian Description	2013					Rata-Rata Average		
	RJPP	Real.	%H9	%H10	RJPP	Real.		
Klasifikasi& Statutoria								
Klas Tunggal Single class	239.326	360.901	119,07	179,37	128,68	130,73		
Kerjasama dengan asing Cooperation with foreign	8.500	30.244	106,25	145,47	114,77	131,34		
Total	247.826	391.145	118,58	176,20	127,93	130,56		

Untuk tingkat produktivitas per surveyor dihitung berdasarkan jumlah pendapatan dibagi jumlah surveyor. Dalam kurun waktu lima tahun terjadi peningkatan produktivitas pendapatan yang dihasilkan per surveyor, baik terhadap RJPP maupun terhadap tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan efektifitas produksi per surveyor.

The productivity per surveyor is counted based on total revenue divided by total surveyors. In a period of five years an increase occurred in the productivity of the revenue generated per surveyor, both on RJPP and the previous year. This indicates an increase in the effectiveness of production per surveyor.

Produktivitas Surveyor/Inspektor/Tenaga Kerja (Jutaan Rupiah/Surveyor (Inspektor))
Productivity of Surveyors/Inspectors/Labor (Million Rupiah/Surveyor (Inspector))

Uraian Description	2009	2010	2011	2012	2013
Klasifikasi * Classification*	1.875	1.962	2.342	2.537	2.691
Perusahaan** Company**	429	465	542	563	713

* Tenaga Kerja Langsung

* Direct Labor

** Total Tenaga Kerja

** Total Labor

b. Operasional

Dengan semakin meningkatnya jumlah kapal diregister, maka juga terjadi peningkatan jumlah permintaan jasa survei klasifikasi & statutoria, baik permintaan untuk survei penerimaan klas maupun survei mempertahankan klas. Dibandingkan dengan posisi 2009, maka jumlah permintaan survei meningkat 121,29% pada tahun 2013 atau rata-rata naik 5,32% per tahunnya.

b. Operations

With the increasing number of registered ships, also occurred an increase of demand of classification & statutory survey services, that is the demands of class admission and class extension survey. Compared with that of 2009, the number of survey requests increased 121.29% in 2013 or an average increase of 5.32% per year.

Permintaan Jasa Survei Klasifikasi
Demand of Classification Survey Services

Jenis Survey Type of Survey	Real. 2009	Real. 2010	Real. 2011	Real. 2012	Real. 2013
Renewal Survey	878	913	1.028	1.013	1.130
Annual Survey	3,660	3,855	4.409	5.224	6.482
Intermediate Survey	748	766	831	987	1.141
Docking Survey	2,439	2,525	2.786	3.190	3.250
Shaft Propeller Survey	1,158	1,216	1.226	1.289	1.241
Boiler Survey	167	180	183	209	243
Automation Survey	17	20	17	18	20
Class Extension Survey	202	231	369	378	243
Condition Survey	5,824	6,807	4.346	7.834	3.578
Continuous Survey	284	320	275	255	437
New Building Admission Class Survey	219	430	695	794	769
Existing Ship Admission Class Survey	735	759	850	995	1.255
Re-class Survey	123	173	218	320	255
Total	16,454	18,195	17.233	22.506	20.044

Sejalan dengan meningkatnya permintaan survei dan produktivitas surveyor, maka dalam tahun mendatang tetap diperlukan penambahan jumlah surveyor lapangan dan staf teknik di Kantor Pusat agar tidak terjadi stagnasi dalam pelayanan jasa survei. Selain itu, langkah ini akan mencegah terjadi keluhan karena keterbatasan jumlah surveyor. Mengingat dalam menjadikan seorang surveyor dan staf teknik yang berkompeten memerlukan waktu minimal 1,5 tahun, maka rekrutmen lebih awal perlu dilaksanakan pada periode mendatang.

In line with the increasing demand of survey and surveyors productivity, the next year still need an addition to the number of field surveyors and technical staff in the Head Office in order to avoid stagnation in survey services. Other than that, this step could prevent complaints due to the limited numbers of surveyors. Considering the making of competent surveyors and technical staff takes up at least 1,5 years, an early recruitment needs to be done in the next period.

Sedangkan untuk permintaan *Drawing Approval* dalam rangka penerimaan klas juga meningkat dimana dalam lima tahun terakhir terjadi kenaikan permintaan yang cukup signifikan sejalan dengan adanya Inpres No. 5 tahun 2005 dan Permenhub KM.20 tahun 2006.

Meanwhile the demand of drawing approval in class admission also increased where in the last five years occurred a significant increase of demand in line with Presidential Instruction No. 5 / 2005 and Ministry of Transportation Regulations KM.20 / 2006.

Permintaan Drawing Approval dalam rangka Penerimaan Klas
Demand of Drawing Approval in Class Admission

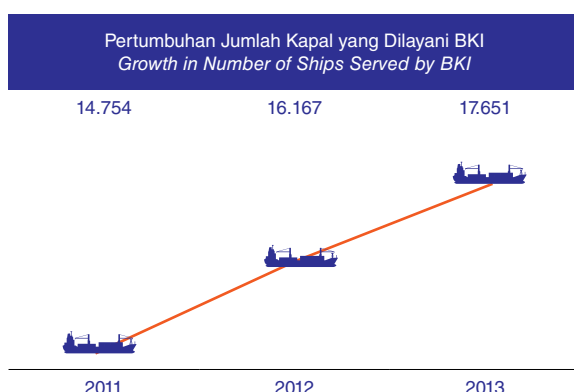
Tahun Year	Real. 2009	Real. 2010	Real. 2011	Real. 2012	Real. 2013	Rata-rata Pertumbuhan Average Growth
Hull & Material	14,682	17,666	28.837	20.964	20.019	122,17%
Machinery & Electrical	11,245	12,352	14.685	17.154	17.624	115,53%
Statutory	3,408	4,598	6.453	5.645	4.573	117,28%
Total	29,335	34,616	49.975	43.763	42.216	118,29%

Dalam proses *Drawing Approval* melibatkan *Technical Staff* yang ada di Kantor Pusat, dimana dalam kurun tiga tahun terakhir juga telah dilakukan penambahan tenaga *Technical Staff* pada masing-masing Divisi teknik. Namun tren permintaan akan terus meningkat, sehingga dalam periode mendatang tetap diperlukan penambahan jumlah *Technical Staff* agar proses produksi tidak terhambat, mengingat proses *Drawing Approval* adalah bagian dari proses penerimaan klas.

The Drawing Approval process involves technical staff in the head office, whereas in the last three years addition to technical staff in each technical Division had also been done. However, the demand trend will continually increases, so that the next period needs an addition to the number of technical staff to avoid hampering on the production process, considering the drawing approval process is a part of class admission class.

Pertumbuhan jumlah kapal yang dilayani Perusahaan sebagai Badan Klasifikasi dapat dijelaskan pada gambar berikut:

Growth in the number of ships served by the Company as a Classification Board can be explained in the following figure:



Uraian Description	2011	2012	2013
Kapal Terdaftar Registered Ships	14.754	16.167	17.651
Klas Ditangguhkan Deferred Class	7.226	6.661	7.138
Klas Berlaku Applicable Class	7.528	9.506	10.513

Jumlah Fisik Kapal / Total Ships

Pertumbuhan rata-rata kapal terdaftar selama tiga tahun sebesar
The average growth of registered ships in three years is

9,2%

per tahun (Ditlala tahun 2010)
per year (Ditlala year 2010)

x 10%

Pertumbuhan rata-rata kapal di Indonesia sebesar
The average growth of ships in Indonesian is

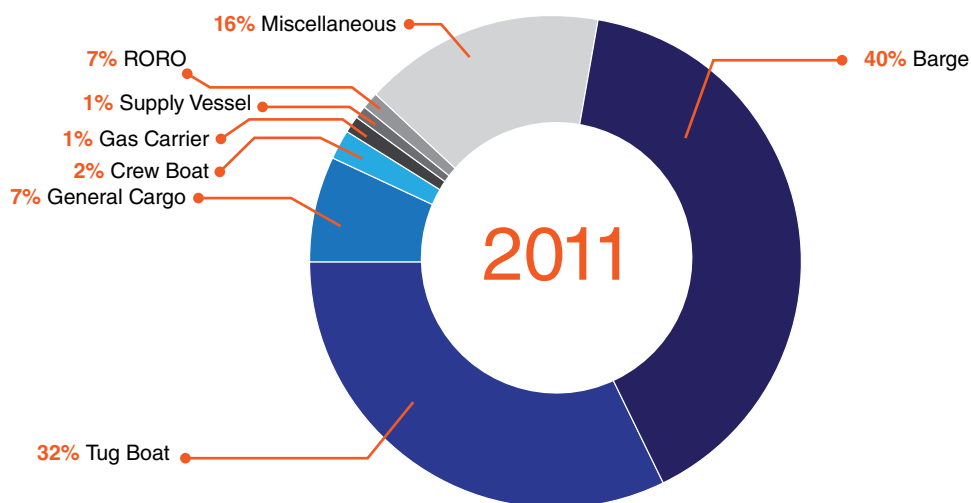
per tahun (Ditlala tahun 2010)
per year (Ditlala year 2010)

Komposisi jenis kapal dalam perkembangan Penerimaan Klas dan tabel pertumbuhan Penerimaan Klas dalam tiga tahun terakhir sebagai berikut:

The composition of ship types in the development of class admission and the table of class admission Growth in the last three years is as the following:

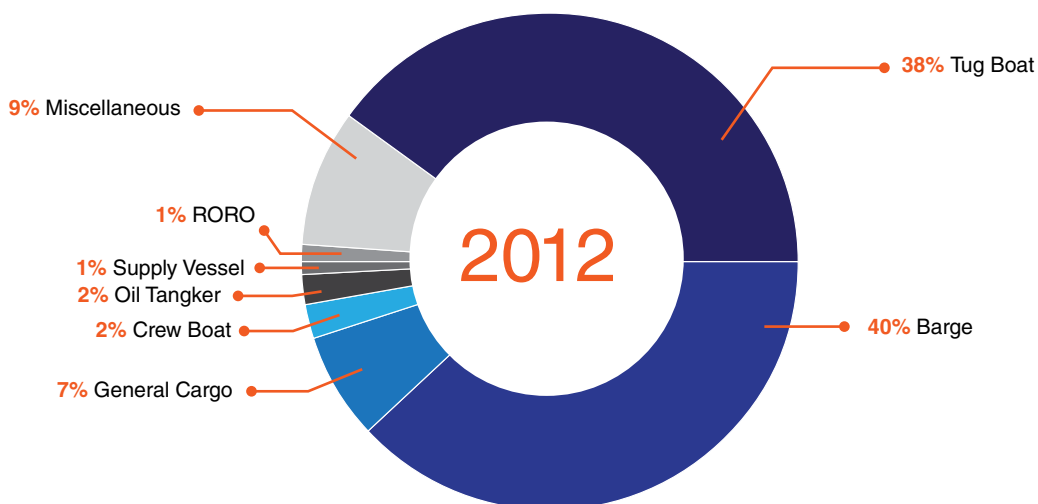
Komposisi Penerimaan Klas Kapal Berdasarkan Jenisnya
Tahun 2011

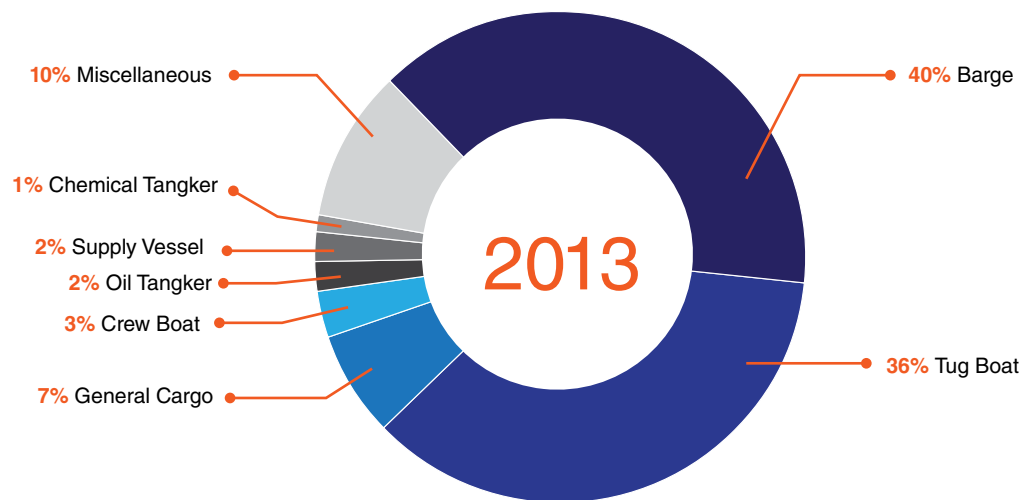
Composition of Class Admission by Ship Type – Year 2011



Komposisi Penerimaan Klas Kapal Berdasarkan Jenisnya
Tahun 2012

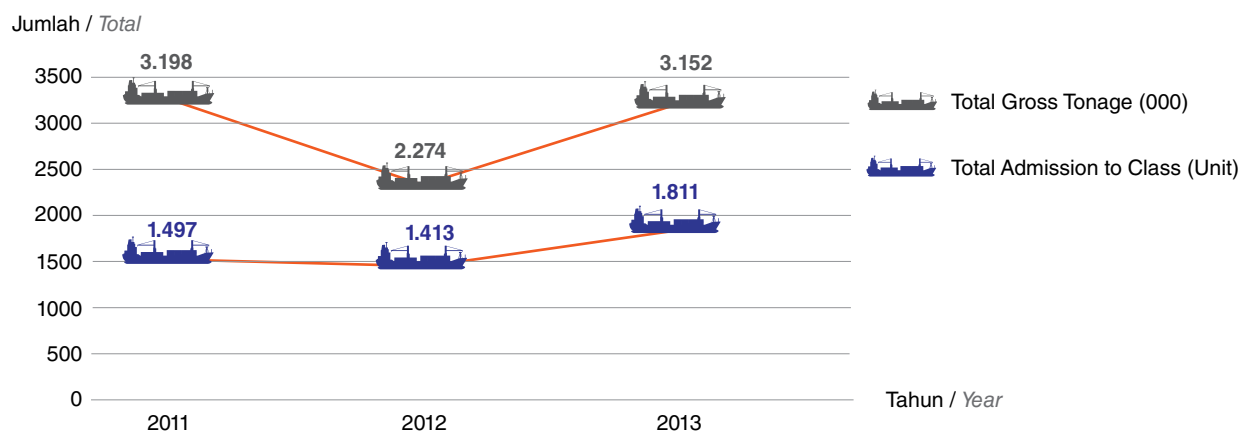
Composition of Class Admission by Ship Type – Year 2012





Tabel Pertumbuhan Penerimaan Klas 2011-2013

Table Of Class Admission Growth 2011-2013



II. PENCAPAIAN BIDANG JASA NON KLASIFIKASI/ KONSULTANSI DAN SUPERVISI

Pertumbuhan tingkat produksi di segmen konsultasi dan supervisi (sekarang Marine & Industrial) tahun 2009-2013 rata-rata sebesar 23,31%. Salah satu kunci keberhasilan bidang usaha ini adalah gencarnya upaya pendekatan dengan pemilik proyek, di samping upaya efisiensi biaya sehingga penawaran (tender) harga jasa menjadi lebih kompetitif, dengan tetap menjaga mutu dan profitabilitas.

II. ACHIEVEMENT OF NON CLASSIFICATION/ CONSULTANCY AND SUPERVISION SERVICES

The growth of production rate in consultancy and supervision segments (now Marine & Industrial) in 2009-2013 by an average of 23.31%. One key to the success of this business is vigorous approach to the project owner, in addition to cost efficiency efforts so the tender of service price becomes more competitive, by still maintaining quality and profitability.

Realisasi Produksi 2009-2013, Segmen Konsultasi & Supervisi (dalam satuan Mandays)
Production Realization 2009-2013, Consultancy & Supervision Sergments (in Mandays)

Uraian Description	2009				2010			
	RJPP	Real.	%H1	%H2	RJPP	Real.	%H3	%H4
Jasa Pengujian Testing Services	27.880	30.445	24,18	123,70	43.760	35.086	156,96	115,24
Jasa Inspeksi Inspection Services	40.090	33.270	59,21	93,86	26.070	37.473	65,03	112,63
Jasa Inkamar & Umum Communication and public services	19.100	20.393	37,86	134,35	16.535	24.209	86,57	118,71
Jasa Rekayasa Industri Industrial Engineering Services	5.490	2.489	28,82	122,73	5.775	2.466	105,19	99,08
Jasa Lain-lain Other services	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
Total	92.560	86.597	36,66	112,08	92.140	99.234	99,55	114,59

Uraian Description	2011				2012			
	RJPP	Real.	%H5	%H6	RJPP	Real.	%H7	%H8
Jasa Pengujian Testing Services	52.060	43.080	118,97	122,78	67.750	50.621	130,14	117,50
Jasa Inspeksi Inspection Services	39.200	46.842	150,36	125,00	44.050	52.577	112,37	112,24
Jasa Inkamar & Umum Communication and public services	33.555	25.403	202,93	104,93	40.000	30.262	119,21	119,13
Jasa Rekayasa Industri Industrial Engineering Services	5.150	2.929	89,18	118,78	5.800	6.206	112,62	211,88
Jasa Lain-lain Other services	3.050	1.267	0,00	0,00	3.400	5.499	111,48	434,02
Total	133.015	119.521	144,36	120,44	161.000	145.165	121,04	121,46

Uraian Description	2013				Rata-Rata Average	
	RJPP	Real.	%H9	%H10	RJPP	Real.
Jasa Pengujian Testing Services	83.000	62.487	122,51	123,44	110,55	120,54
Jasa Inspeksi Inspection Services	54.200	72.139	123,04	137,21	102,00	116,19
Jasa Inkamar & Umum Communication and public services	45.800	67.677	114,50	223,64	112,21	140,15
Jasa Rekayasa Industri Industrial Engineering Services	7.000	8.586	120,69	138,35	91,30	138,16
Jasa Lain-lain Other services	4.000	3.943	117,65	71,70	114,56	252,86
Total	194.000	214.832	120,50	147,99	104,42	123,31

Produktivitas Surveyor/Inspektor/Tenaga Kerja (Jutaan Rupiah/Surveyor (Inspektor))
Productivity of Surveyors/Inspectors/Labor (Million Rupiah/Surveyor (Inspector))

Uraian Description	2009	2010	2011	2012	2013
Konsultasi & Supervisi* Consultancy & Supervision*	849	793	949	802	1.137
Perusahaan** Company**	429	465	542	563	713

* Tenaga Kerja Langsung

** Total Tenaga Kerja

* Direct Labour

** Total Labour

Untuk segmen konsultansi dan supervisi, produktivitas inspektor berfluktuatif antara satu tahun dengan tahun yang lain. Untuk meningkatkan efektifitas produksi per inspektor, perlu dilakukan optimalisasi pengembangan usaha yang fokus terhadap kompetensi inspektor melalui intensifikasi pasar yang sudah diraih Perusahaan. Untuk itu dalam periode mendatang penambahan pegawai lebih diprioritaskan kepada tenaga profesi teknik yang diharapkan dapat meningkatkan produksi sedangkan tenaga non teknik yang sifatnya administratif penambahannya akan disesuaikan dengan peningkatan produksi dan kebutuhan perusahaan.

Riset & Penelitian

Sebagai Badan Klasifikasi yang ditugaskan secara khusus oleh pemerintah, Perusahaan tidak hanya mengembangkan aktivitas bisnis sebagai badan usaha perseroan, namun juga melakukan fungsi riset dan penelitian. Fungsi ini dilakukan dengan mengikuti perkembangan teknologi, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk *Rules & Regulation* atau Standar Teknik yang dipublikasikan sebagai acuan atau referensi bagi para pemangku kepentingan, khususnya pengguna jasa Perusahaan.

Perusahaan secara khusus membentuk *Department of Research & Technical (Restech) Development* untuk melakukan serangkaian pengembangan riset dan penelitian di bidang teknologi maritim dan pengembangan peraturan (*rules*), petunjuk (*guidelines*) dan standar teknik lainnya yang menjamin keselamatan selama pembangunan dan pengoperasian kapal. Perusahaan telah melakukan investasi yang sangat besar di bidang penelitian dan pengembangan aturan teknik dalam kaitannya dengan SDM, fasilitas dan biaya penelitian dan pengembangan. Manfaat penelitian dan pengembangan aturan teknik diharapkan mampu memberikan solusi bagi permasalahan yang dihadapi oleh pengguna jasa Perusahaan.

Penelitian Perusahaan difokuskan untuk mengatasi persoalan teknik yang dihadapi oleh kapal klas Perusahaan sebagai Badan Klasifikasi yang beroperasi di wilayah Indonesia serta penelitian di bidang teknologi maritim terkini. Penelitian tersebut dilakukan baik secara mandiri oleh personil Perusahaan maupun kerjasama dengan pihak lain baik dari kalangan institusi penelitian, perguruan tinggi dan industri. Beberapa penelitian telah dan akan dilakukan untuk beberapa tahun ke depan.

Untuk menjalankan program penelitian yang terencana berdasarkan tema penelitian, maka Riset & Penelitian Perusahaan telah memiliki personil yang dibagi dalam beberapa kelompok peneliti yaitu:

- Kelompok Peneliti Struktur;
- Kelompok Peneliti Sistem Kapal; dan
- Kelompok Peneliti Stabilitas dan Hidrodinamika.

For consultancy and supervision segments, the productivity of inspectors fluctuated from one year to another year. To increase the production effectivity per inspector, the Company needs to optimize the business development focusing on inspector competence through market intensification already achieved by the Company. For that reason in the next period the addition in employees needs to be prioritized to the technical professionals that are expected to increase production, while the addition in non technical professional (administrative) will be adjusted to the increase of production and the Company needs.

Research & Study

As a classification board specifically assigned by the government, the Company not only develops business activity as a business entity, but also performs a research and study function. This function is performed by following the development of technology, which is then manifested in the form of Rules & Regulations or Technical Standards which will be published as a reference tool for stakeholders, particularly the Company's service users.

The Company specifically formed Department of Research & Technical (Restech) Development to conduct a series of research, development and research in the field of maritime technology and regulations (rules) development, instructions (guidelines) and other technical standards that ensure safety during construction and operation of ships. The Company has made huge investments in research and development of technical rules in relation to human resources, facilities and research and development costs. The benefits of research and development of technical rules are expected to provide solutions to the problems faced by service users of the Company.

Company research is focused to overcome the technical problems faced by ship class of the Company as a Classification Board which operates in Indonesia and maritime research of the latest technology. The study is conducted independently by both Company personnel as well as cooperation with other parties both from the research institutions, universities and industry. Several studies have been and will be done for the next few years.

To carry out a planned research program based on the theme of the research, the Company's Research & Study has had personnel who were divided into several groups of researchers that are:

- *Structure Research Group;*
- *Ship Systems Research Group; and*
- *Stability and Hydrodynamics Research Group.*

Personil Riset & Penelitian Perusahaan tidak hanya terlibat dalam penelitian dan pengembangan aturan teknik bagi pengguna jasa, tetapi juga terlibat dalam kerjasama grup atau *Working Group (WG) Asian Classification Society (ACS)* guna membahas kontribusi ACS dalam meningkatkan keselamatan maritim dan perlindungan lingkungan di Asia; termasuk membantu industri maritim di Asia dalam mengantisipasi penerapan aturan klas dan statutoria. Terdapat tujuh WG yang diikuti oleh personil Riset & Penelitian Perusahaan yaitu :

- *WG Green House Gas;*
- *WG Risk Based Design;*
- *WG Ship Recycle;*
- *WG Ballast Water Management;*
- *WG Machinery Seaworthiness;*
- *WG Port State Control;* dan
- *WG Goal Based Standard.*

Di sepanjang tahun 2013, Riset & Penelitian Perusahaan telah melakukan berbagai program dan kegiatan, yaitu:

- a. Menerbitkan 23 *Rules* edisi 2013 dan 16 *Rules* edisi 2014.
- b. Poses pembahasan penyusunan *updating* beberapa *Rules & Regulation*.
- c. Penelitian dan pengembangan perangkat lunak yang sedang dilaksanakan, yaitu :
 1. Studi penentuan *Bow Hight Minimum* untuk perairan Indonesia.
 2. Studi pengembangan kriteria Stabilitas Kapal Domestik.
 3. Penelitian dan pembuktian terbalik formula *Rules BKI Seagoing Steel Ship Vol. II (Rules for Hull)*
 4. Pengembangan "*BKI Dewaruci Project*" direncanakan terdiri dari:
 - Pembuatan *software* kalkulasi *BKI Scantling* yang direncanakan menggantikan *GL Rules*;
 - Pembuatan *software* kalkulasi untuk Bagian Permesinan;
 - Pembuatan *software* kalkulasi untuk Bagian Elektrikal;
 - Pembuatan *software* kalkulasi untuk Bagian Statutoria; dan
 - Pembuatan *BKI Finite Element Method Analysis* yang direncanakan menggantikan *GL Poseidon*.

The Company's Research & Study Personnels are not only engaged in the research and development of technical rules for service users, but also engage in cooperative group or Working Group (WG) Asian Classification Society (ACS) to discuss the contribution of ACS in improving maritime safety and environmental protection in Asia; including helping the maritime industry in Asia in anticipating the implementation of the class and statutory rules. There are seven WG followed by The Company's Research & Study Personnel, that are:

- *WG Green House Gas;*
- *WG Risk Based Design;*
- *WG Ship Recycle;*
- *WG Ballast Water Management;*
- *WG Machinery Seaworthiness;*
- *WG Port State Control;* and
- *WG Goal Based Standard.*

Throughout the year 2013, the Company's Research & Study has conducted a variety of programs and activities, namely:

- a. *Publish 23 Rules of edition 2013 and 16 Rules of edition 2014.*
- b. *Discussion of the preparation process of updating some of the Rules & Regulations.*
- c. *Research and development software that is being implemented, namely:*
 1. *Studies to determine the Minimum Bow Height of Indonesian waters.*
 2. *Studies of developing Domestic Ship Stability criteria.*
 3. *Research and reversed evidence of Rules formula of BKI Seagoing Steel Ship Vol. II (Rules for Hull)*
 4. *Development of "BKI Dewaruci Project" planned to consist of:*
 - *The making of calculation software for BKI scantling to replace GL Rules;*
 - *The making of calculation software for machinery division;*
 - *The making of calculation software for electrical division;*
 - *The making of calculation software for statutory division;*
 - *The making of BKI Finite Element Method Analysis to replace GL Poseidon.*



Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Human Resources Management

Sebagai Badan Klasifikasi, sebagian besar aktivitas Perusahaan ditentukan oleh kapasitas, kapabilitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM). Perusahaan berupaya mendorong kinerja SDM melalui berbagai aspek; mulai dari pengembangan nilai dan budaya korporasi yang diharapkan dapat menciptakan etika kerja dalam setiap insan Perusahaan, hingga pengembangan potensi dan kompetensi melalui serangkaian diklat dan pelatihan.

As a Classification Board, the majority of the Company's activities is determined by the capacity, capability and competence of the Human Resources (HR). The Company seeks to encourage the performance of human resources through various aspects; ranging from the development of corporate values and culture which is expected to create a work ethic in every member of the Company, to develop the potential and competence through a series of training activities.

Komposisi dan Data Kepegawaian

Perkembangan jumlah pegawai keseluruhan dalam Perusahaan dapat terlihat pada tabel di bawah ini,

Composition and Employment Data

The development of the Company's total number of employees can be seen in the table below,

Jumlah Pegawai Tetap dan Pegawai Kontrak Tahun 2009-2013 (tidak termasuk Direksi)
Number of Permanent Employees and Contract Employees Year 2009-2013 (not including Board of Directors)

Uraian Description	2009		2010		2011		2012		2013	
	RJPP	Real.	RJPP	Real.	RJPP	Real.	RJPP	Real.	RJPP	Real.
Awal Tahun Beginning of Year	545	537	583	551	640	607	712	616	746	744
Rekrutmen Recruitment	75	61	30	136	118	66	45	212	55	48
Berhenti/Alih Status Quit/Transfer Status	37	47	6	80	46	57	11	84	10	54
Akhir Tahun End of Year	583	551	607	607	712	616	746	744	791	738

Jumlah pegawai dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, sejalan dengan meningkatnya permintaan jasa dan perkembangan usaha, dimana dibandingkan posisi 2009 terjadi peningkatan jumlah pegawai sebesar 145,74% pada 2013. Pada periode mendatang tetap diperlukan rekrutmen dalam mengantisipasi kebutuhan permintaan jasa dan regenerasi pegawai yang memasuki masa purna bakti.

The number of employees from year to year has increased, in line with the increasing demand for services and business development. Compared to that of 2009, the number of employees increased 145.74% in 2013. In the coming period, recruitment is still required to anticipate the demand for services and the need for regeneration of full-time employees who entered their retirement.

Posisi Pegawai Terhadap RJPP
Employee Position on RJPP

Uraian Description	2009		2010		2011		2012		2013	
	RJPP	Real.	RJPP	Real.	RJPP	Real.	RJPP	Real.	RJPP	Real.
Pegawai Tetap					Permanent Employees					
1. Teknik / Technical										
Klasifikasi / Classification	130	80	145	92	108	92	108	108	133	120
K&S / K&S	105	70	110	92	109	93	109	109	121	106
Kantor Pusat / Head Office	75	97	80	95	131	112	131	131	129	112
2. Administrasi / Administration	140	184	130	200	161	193	195	195	196	197
3. Penunjang / Support	10	16	10	20	14	19	14	14	13	13
Total	460	447	475	499	557	509	557	557	604	548

Posisi Pegawai Terhadap RJPP
Employee Position on RJPP

Uraian Description	2009		2010		2011		2012		2013	
	RJPP	Real.	RJPP	Real.	RJPP	Real.	RJPP	Real.	RJPP	Real.
Kontrak Kerja					Work Contract					
1. Teknik / Technical										
Klasifikasi / Classification	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K&S / K&S	60	32	70	36	72	32	72	72	68	68
Kantor Pusat / Head Office	5	2	5	3	9	2	9	9	8	8
2. Administrasi / Administration	28	37	27	35	74	40	74	72	74	70
3. Penunjang / Support	30	33	30	34	34	33	34	34	49	44
Total	123	104	132	108	187	107	187	187	199	190
Total	583	551	607	607	712	616	746	744	791	738

Terhadap komposisi pegawai tetap dan pegawai kontrak, terjadi perubahan komposisi yang signifikan dimana pada posisi 2009 adalah 79% : 21% dan pada tahun 2013 menjadi 75% : 25%. Komposisi ini sudah cukup ideal dan tetap dipertahankan.

In the composition of permanent employees and contract employees, there is significant changes in the composition whereby the position of 2009 was 79% : 21% and by 2013 to 75%:25%. This composition is quite ideal and to be maintained.

Proses alih status harus dilakukan secara selektif, dimana pegawai kontrak yang produktif, berkompeten dan loyal menjadi prioritas alih status. Namun yang harus dicermati adalah Peraturan Tenaga Kerja yang mewajibkan mengangkat pegawai kontrak yang sudah bekerja selama tiga tahun, dimana penambahan tenaga organik akan membebani biaya pegawai bagi Perusahaan. Sehingga kebijakan alih status harus dilakukan secara selektif yang ketat dan bebas dari kepentingan-kepentingan.

The process of status transfer must be done selectively, where productive, competent and loyal contract employees become the priority of status transfer. But it must be observed that Labour Regulations require to promote a contract employee who has worked for three years, where the addition of organic labour will add to the Company's employee costs. So the status transfer policy should be done selectively, strictly and free of interests.

Komposisi Pegawai Teknik dan Non Teknik Antara Pegawai Tetap dan Pegawai Kontrak
Composition of Technical and Non Technical Employees Between Permanent and Contract Employees

Uraian Description	Real. 2009		Real. 2010		Real. 2011		Real. 2012		Real. 2013	
	Juml/Total	%	Juml/Total	%	Juml/Total	%	Juml/Total	%	Juml/Total	%
Pegawai Tetap					Permanent Employees					
1. Teknik / Technical	247	45	279	46	297	48	348	47	336	45
2. Non-Teknik / Non Technical	200	36	220	36	212	34	209	28	212	30
Total	447	81	499	82	509	83	557	75	548	75
Kontrak Kerja					Work Contract					
1. Teknik / Technical	34	6	39	6	34	5	81	11	76	10
2. Non-Teknik / Non Technical	70	13	69	12	73	12	106	14	114	15
Total	104	19	108	18	107	17	187	25	190	25
Total	551	100	607	100	616	100	744	100	738	100

Total Komposisi Pegawai Teknik dan Non Teknik
Total Composition of Technical and Non Technical Employees

Uraian Description	Real. 2009		Real. 2010		Real. 2011		Real. 2012		Real. 2013	
	Juml/Total	%	Juml/Total	%	Juml/Total	%	Juml/Total	%	Juml/Total	%
1. Teknik / <i>Technical</i>	281	281	318	52	331	54	429	58	412	56
2. Non-Teknik / <i>Non Technical</i>	270	270	289	48	285	46	315	42	326	44
Total	551	100	607	100	616	100	744	100	738	100

Terhadap komposisi pegawai teknik dan pegawai non teknik, terjadi perubahan komposisi dimana pada posisi 2009 adalah 51% : 49% dan pada tahun 2013 menjadi 56% : 44%. Terjadi peningkatan komposisi pegawai teknik dibandingkan pegawai non teknik. Namun komposisi ini belum ideal, mengingat aktivitas Perusahaan adalah jasa teknik, dimana seharusnya komposisi ideal adalah 65% : 35%. Untuk itu dalam periode mendatang diprioritaskan merekrut tenaga teknik dan sejalan dengan evaluasi aspek produksi dan operasional, dimana masih diperlukan penambahan tenaga teknik, baik di kantor pusat maupun unit produksi. Sedangkan untuk pegawai non teknik dilakukan secara selektif, dimana rekrutmen hanya dilakukan untuk menggantikan pegawai yang purna bakti dan sesuai kebutuhan Perusahaan. Selain itu di masa mendatang akan terus dioptimalkan pemanfaatan teknologi informasi yang terpadu menggantikan pekerjaan administratif yang dilakukan secara manual.

Tingkat pendidikan dan kompetensi pegawai merupakan hal yang sangat prioritas dalam melakukan kegiatan usaha, baik di segmen klasifikasi & statutoria maupun segmen konsultasi & supervisi. Berkembangnya tingkat pendidikan pegawai sejalan dengan kebijakan Perusahaan dalam pengembangan SDM, yaitu dengan memberikan beasiswa (tugas belajar) pendidikan profesi dan atau memberikan izin kepada pegawai yang melaksanakan pendidikan formal yang sesuai di bidang tugasnya dengan biaya sendiri. Di samping itu terjadinya perbedaan angka pada kolom RJPP dan Realisasi adalah karena disesuaikan dengan kebutuhan/permintaan pasar pada periode dimaksud.

There are changes in the composition of technical and non technical employees, where the position in 2009 was 51%: 49% and by 2013 was 56%: 44%. There is an increase in the composition of technical employees compared to the non technical employees. However, this composition is not ideal, given the activity of the Company is technical services, the ideal composition should be 65%: 35%. For that, in the coming period recruiting technical employees will be prioritized and in line with the evaluation of production and operation aspects, where addition of technical labour is still needed, both in the head office and the production units. Meanwhile recruitment of non technical employees will be carried out selectively, only to replace retired employees and adjusted to the Company needs. Moreover in the coming period the utilization of integrated information technology will be optimized, replacing the manual administrative work.

The level of education and competence of employees is a priority in conducting business activities, both in the classification & statutory segment and consultation & supervision segment. The development of education level of employee is in accordance with Company policy in the development of human resources, namely by providing scholarships (learning task) for professional education and or giving permission to the employees who get the appropriate formal education in the field of duty at their own expense. Moreover, the difference between the numbers on RJPP and Realization column was due to adjustment to the market needs/demands on the referred period.

Secara konkrit perkembangan tingkat pendidikan pegawai tetap tahun 2009- 2013 adalah sebagai berikut:

Concretely, the development of permanent employees education level of year 2009-2013 is as follows:

Komposisi Pegawai Berdasarkan Strata Pendidikan
Composition of Employees Based on Education Level

Uraian Description	2009		2010		2011		2012		2013	
	RJPP	Real.	RJPP	Real.	RJPP	Real.	RJPP	Real.	RJPP	Real.
S3 / Doctorate	-	-	-	-	1	-	2	1	2	1
S2 / Master	13	14	15	14	13	13	20	23	25	21
S1 / Bachelor	302	271	312	289	365	305	384	363	419	388
D3 / Diploma 3	44	37	50	51	67	51	70	71	75	53
SD - SLTA / Primary - Highschool	224	254	230	253	266	247	270	286	270	275
Total	583	551	607	607	712	616	746	744	791	738

Pegawai dengan strata SD dan SMP dalam lima tahun tidak terjadi perubahan dan hal ini sejalan dengan kebijakan Perusahaan dalam menerapkan minimal pendidikan untuk rekrutmen adalah SLTA atau setara. Posisi strata ini akan berkurang sejalan dengan masa purna bakti yang bersangkutan. Sedangkan untuk strata SLTA, D3, S1 dan S2 mengalami peningkatan jumlah sesuai dengan kebutuhan Perusahaan. Khusus untuk strata S2 atau S3 di masa mendatang sangat diperlukan, khususnya untuk bidang studi teknik dimana sesuai kebutuhan Perusahaan untuk melakukan riset dan penelitian berkaitan dengan pengembangan *Rules & Regulation* secara mandiri. Untuk itu perusahaan akan terus melakukan upaya mengirimkan tenaga teknik yang potensial untuk mengikuti program belajar S2 dan S3 pada universitas terpilih baik di luar negeri atau dalam negeri serta mengupayakan memperoleh bea siswa dari institusi/negara donor.

Employees with level of primary and secondary school have no change in five years and this is in line with the Company policy in applying requirements for recruitment of at least high school level or equivalent. This level position will decrease in line with the related retirement period. Meanwhile for level high school, diploma 3, Bachelor's Degree, and Master's Degree will experience an addition to the total number according to the Company's needs. The master's degree and doctorate level in particular are very necessary in the coming period, especially for technical studies where according to the Company's needs will do research and studies relating to the development of *Rules & Regulations* independently. For this reason the Company will continue to make efforts to transmit the potential labour to post-graduate and doctorate learning programs in selected universities either abroad or in the country and to obtain scholarships from institutions/donor.

Posisi Pegawai Berdasarkan Usia
Employees Position Based on Age

Uraian / Description	2009	2010	2011	2012	2013
20 - 29 Tahun / Years Old	101	106	110	169	152
30 - 39 Tahun / Years Old	188	195	222	274	281
40 - 49 Tahun / Years Old	184	186	193	208	207
50 - 60 Tahun / Years Old	78	83	91	93	98
Total	551	570	616	744	738

Pada posisi 2013, rata-rata usia pegawai berada pada usia produktif, sedangkan tenaga muda yang sudah direkrut sedang mengikuti proses orientasi dan magang yang pada saatnya akan siap berproduksi secara efektif. Namun demikian beberapa tenaga senior di periode mendatang akan memasuki usia purna bakti dan harus disiapkan regenerasi serta proses alih pengalaman yang berkesinambungan.

In 2013 position, the average age of employees are in the productive age, while young workers who have been recruited are following the orientation process and internships that will be ready for production in time effectively. However, some senior employees will enter retirement in the coming period and regeneration and the process of continuous experience transfer must be prepared.

Pengembangan Sistem Manajemen SDM dan Peningkatan Kesejahteraan SDM

Upaya Perusahaan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM dilakukan melalui berbagai cara. Peningkatan ini sedianya menjadi bagian dari strategi Perusahaan sebagai Badan Klasifikasi untuk memenuhi kompetensinya, sekaligus memenuhi berbagai prasyarat yang dibutuhkan dalam kerjasama dan keanggotaan komunitas klasifikasi dunia. Rekrutmen, penyempurnaan sistem hingga peningkatan kesejahteraan terus dilakukan dalam mencapai hal-hal di atas.

Beberapa langkah peningkatan kompetensi Perusahaan melalui strategi pengembangan adalah:

1. Perusahaan melakukan kegiatan rekrutmen terutama untuk tenaga surveyor dan inspektor, dalam rangka memenuhi persyaratan IACS, peningkatan kegiatan statutoria dan pengembangan kegiatan jasa konsultasi & supervisi dengan menggunakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
2. Penyempurnaan *Human Resources Manajemen System* dengan melibatkan konsultan manajemen, sehingga diharapkan menjadi landasan pengembangan SDM yang mampu mengantarkan Perusahaan menjadi badan klasifikasi yang diterima secara internasional.
3. Melakukan peningkatan kesejahteraan pegawai baik pada masa tugas maupun purna karya melalui penyesuaian penghasilan, jaminan kesehatan dan jaminan hari tua.

Saat laporan ini dibuat, Perusahaan bekerjasama dengan konsultan manajemen sedang menyusun *master plan* pengembangan SDM dan analisa beban kerja. Sementara implementasi program peningkatan kesejahteraan pegawai tetap menjadi prioritas manajemen dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan.

Development of Human Resources Management System and Human Resources Welfare Improvement

The Company's efforts to improve the capacity and capability of human resources is done through various means. This improvement originally is a part of the Company strategy as a Classification Board to fulfil its competence, while meeting the various requirements needed on cooperation and membership in the world classification community. Recruitments, system improvements, and welfare improvements are continuously done to achieve the above matters.

Some of the steps to improve the Company competence through development strategy are:

- 1. The Company does the recruitment activity primarily for surveyor and inspector labour, in order to complete the IACS requirements, the improvement on statutory activities and the development of consultancy & supervision services by using the principles of Good Corporate Governance.*
- 2. Improvement of Human Resources management system involving management consultants, so that it can become the cornerstone of the development of human resources that is capable of delivering the Company to become internationally accepted as a Classification Board.*
- 3. Improving the employees welfare both in duty and in retirement through adjustments on income, health insurance and retirement benefits.*

When this report was made, the Company cooperated with management consultants working on a master plan for the development of human resources and workload analysis. The implementation of the program to improve employees welfare remains a priority of the management by giving attention to the Company's capability.

Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi SDM

Perusahaan menyadari, SDM menjadi alat produksi terpenting dalam aktivitas bisnis Perusahaan. Pengembangan kompetensi SDM menjadi sesuatu yang mutlak dan menjadi keharusan, baik pengembangan kompetensi di bidang teknik maupun non-teknik yang bertindak sebagai *supporting unit* Perusahaan dalam menerapkan seluruh aspek kinerja. Perkembangan kompetensi pegawai sepanjang lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Perkembangan Kompetensi Pegawai Tahun 2009-2013
Development of Employee Competencies Year 2009-2013

Uraian	2009	2010	2011	2012	2013	Description
Bidang Klasifikasi						Classification
1. Principal Surveyor	17	18	19	16	16	1. Principal Surveyor
2. Senior Surveyor	66	71	74	74	76	2. Senior Surveyor
3. Surveyor	47	63	71	75	80	3. Surveyor
4. Asisten Surveyor	37	28	37	66	83	4. Asistent Surveyor
Bidang K&S						C&S
1. Ahli Radiography Level 1	3	3	3	26	26	1. Radiography Expert Level 1
2. Ahli Radiography Level 2	2	4	8	8	8	2. Radiography Expert Level 2
3. NDT Level 1	23	23	26	27	30	3. NDT Level 1
4. NDT Level 2	57	57	59	69	70	4. NDT Level 2
5. Welding Inspector	158	178	182	198	202	5. Welding Inspector
6. Welding Inspector - AWS	4	4	4	4	4	6. Welding Inspector - AWS
7. Welding Engineer	2	2	2	2	2	7. Welding Engineer
8. AK3 Umum	1	2	2	2	2	8. General AK3
9. Crane Inspector Depnaker	79	79	79	79	79	9. Crane Inspector Depnaker
10. Crane Inspector Migas	37	53	68	83	85	10. Crane Inspector Oil&Gas
11. Inspektor Pesawat Uap Depnaker	NA	NA	25	31	31	11. Steamboat Inspector Depnaker
12. Inspektor Bejana Tekan Migas	NA	NA	24	24	24	12. Pressure Ship Inspector Oil&Gas
13. Inspektor Perpipaian	21	23	42	60	62	13. Pipeline Inspector
14. Inspektor Cashing & Tubing	24	24	4	4	4	14. Cashing & Tubing Inspector
15. Inspektor Tangki Timbun	29	42	5	5	7	15. Shore tank inspector
16. Petugas Proteksi Radiasi	4	4	24	24	24	16. Radiation Protection Officer
17. Offshore Pipeline	5	5	38	56	56	17. Offshore Pipeline
18. Cathodic/Corrosion Inspector	24	24	11	16	16	18. Cathodic/Corrosion Inspector
19. Accident Investigation	NA	NA	48	48	48	19. Accident Investigation
20. Sea Survival	7	31	58	68	68	20. Sea Survival
Bidang Sertifikasi						Certification
1. Safety Auditor	151	69	71	77	85	1. Safety Auditor
2. Quality Auditor	65	99	102	104	104	2. Quality Auditor
3. ISPS Code	97	79	80	81	81	3. ISPS Code
Sistem Informasi	50	56	63	78	78	Information System
Akuntan	6	16	37	41	43	Accountant

Kompetensi tenaga teknik segmen klasifikasi & statutoria terus mengalami peningkatan melalui proses training Surveyor secara terpadu sesuai dengan persyaratan *International Association of Classification Societies (IACS)-Quality System Certification Scheme (QSCS)*. Di samping itu dalam rangkaantisipasi pelimpahan survei statutoria atas nama Pemerintah Indonesia ataupun negara lain, di periode mendatang perlu ditingkatkan pelatihan/training berkaitan dengan peraturan IMO/ILO baik secara *in-house training* maupun *training* di luar negeri. Terhadap personil inspektor dalam menangani pekerjaan segmen Konsultansi & Supervisi, *training* yang telah diadakan sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan kompetensi personil.

Training and Improvement of Human Resources Competencies

The Company realize that HR is the most important means of production in the Company's business activities. Development of HR competencies becomes something that is absolute and imperative, either in the development of technical and non technical competencies which acts as a supporting unit of the Company in implementing all performance aspects. The development of employee competencies throughout the last five years can be seen in the table below.

Technical competencies of classification & statutory segments keep experiencing an increase through the integrated surveyors training process according to the requirements of *International Association of Classification Societies (IACS)-Quality System Certification Scheme (QSCS)*. In addition, in order to anticipate the delegation of statutory surveys on behalf of the Government of Indonesia or other countries, the next period needs to improve trainings related to IMO/ILO regulations both *in-house training* and the trainings abroad. Inspection personnels in handling the work of Consultancy & Supervision segments, the existing training is in line with the needs and requirements of personnels competencies.

Namun demikian masih diperlukan kompetensi lain yang diperlukan dalam menghadapi kompetisi yang semakin ketat, antara lain *Welding Engineer*, *NDT Level III* dan sebagainya.

However other competencies are still necessary to face a gradually tighter competition, such as Welding Engineer, NDT Level III, etc.

Di tahun 2013, Perusahaan telah melakukan serangkaian program diklat dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi SDM dan mendorong kinerja Perusahaan hingga ke level yang lebih tinggi. Program-program diklat tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

In 2013, the Company has conducted a series of training programs to improve the competence of human resources and encouraging the Company performance to a higher level. The training programs can be seen in the table below.

Jenis Program Diklat dan Kepesertaan Tahun 2013
Type of Training Programs and Participation Year 2013

No	Jenis Program Diklat <i>Type of Training Programs</i>	Jumlah Peserta <i>Number of Participants</i>
1	<i>Orientation for New Joining Employee / Orientation for New Joining Employee</i>	35
2	<i>Assistant Surveyor Training Level / Assistant Surveyor Training Level</i>	10
3	<i>Surveyor Training / Surveyor Training</i>	15
4	<i>Senior Surveyor Training / Senior Surveyor Training</i>	0
5	<i>Crane Migas / Oil&Gas Crane</i>	0
6	<i>Job Training BKI Singapore 3 (three) months / Job Training BKI Singapore 3 (three) months</i>	0
7	<i>Marine Surveyor / Marine Surveyor</i>	4
8	<i>MT Level - II / MT Level - II</i>	0
9	<i>PT Level - II / PT Level - II</i>	0
10	<i>UT Level - II / UT Level - II</i>	0
11	<i>RT Level - II / RT Level - II</i>	0
12	<i>Rotating Migas / Oil&Gas Rotating</i>	0
13	<i>Pipeline Migas / Oil&Gas Pipeline</i>	0
14	<i>Pressure Vessel Migas / Oil&Gas Pressure Vessel</i>	6
15	<i>Sea Survival, HUET, T-Bosiet / Sea Survival, HUET, T-Bosiet</i>	0
16	<i>Electrical Migas / Oil&Gas Electrical</i>	3
17	<i>AK3 DEPNAKER / AK3 DEPNAKER</i>	4
18	<i>Storage Tank Migas / Oil&Gas Storage Tank</i>	8
19	<i>Pressure Safety Valve Migas / Oil&Gas Pressure Safety Valve</i>	10
20	<i>Welding Inspector / Welding Inspector</i>	0
21	<i>Auditor ISM & ISPS Code / Auditor ISM & ISPS Code</i>	0
22	<i>Auditor ISM Code / Auditor ISM Code</i>	27
23	<i>Auditor ISPS Code / Auditor ISPS Code</i>	0
24	<i>Manajemen Perkantoran / Office Management</i>	9
25	<i>Manajemen SDM / Human Resources Management</i>	7
26	<i>Manajemen Pemasaran / Marketing Management</i>	0
27	<i>Manajemen Proyek / Project Management</i>	4
28	<i>Risk Management + Leadership Training / Risk Management + Leadership Training</i>	0
29	<i>Perpajakan + Akuntansi + FinOpS (In House Training) / Taxes + Accounting+ FinOpS (In House Training)</i>	51
30	<i>ISO/IEC-17025 Overview and Analysis / ISO/IEC-17025 Overview and Analysis</i>	2
31	<i>ISO/IEC-17020 Overview and Analysis / ISO/IEC-17020 Overview and Analysis</i>	8

Jenis Program Diklat dan Kepesertaan Tahun 2013
Type of Training Programs and Participation Year 2013

No	Jenis Program Diklat Type of Training Programs	Jumlah Peserta Number of Participants
31	ISO 9001:2008 / ISO 9001:2008	14
32	Tugas Belajar S2 dan S3 di Luar Negeri / Learning Task Master&Doctorate Abroad	3
33	Workshop/Seminar Dalam Negeri / Workshop/In-house Seminar	261
34	Workshop/Seminar Luar Negeri / Workshop/Overseas Seminar	5
35	Metodologi Riset Klas & Statutoria / Class&Statutory Research Metodology	0
36	In-House Training Inspector (HAKIT) / In-House Training Inspector (HAKIT)	9
37	HSE Training / HSE Training	2
38	Sea Survival Course / HSE Training	0
39	IT Training / IT Training	4
40	Auditor Training (Internal Audit) / Auditor Training (Internal Audit)	3
Total		504

Hubungan Industrial

Perusahaan telah mengembangkan kualitas sumber daya manusianya, sesuai dengan kebutuhan, visi dan misi, serta program jangka panjang Perusahaan. Perusahaan mempunyai unit bisnis yang beroperasi di berbagai daerah dengan agama, budaya, tradisi, adat istiadat, kondisi karyawan serta peraturan setempat yang berbeda-beda. Meskipun peka terhadap perbedaan tersebut, Perusahaan tetap menerapkan prinsip-prinsip yang didasarkan pada ketentuan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Direksi memperlakukan pegawai secara adil dan bebas dari bias karena perbedaan suku, asal-usul, kelompok, jenis kelamin, agama dan asal kelahiran serta hal-hal yang tidak terkait dengan kinerja dan indikator lain yang bersifat objektif. Perusahaan telah menetapkan beberapa kebijakan mengenai pegawai dan hubungan industrial, antara lain:

- Memberikan kondisi kerja yang baik dan aman bagi pegawai;
- Melindungi pegawai dari segala bentuk kemungkinan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan di tempat kerja;
- Memberikan hak kepada pegawai untuk berkumpul dan bersekutu sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- Memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mengikuti pendidikan, pelatihan, dan pengembangan diri lebih lanjut yang sejalan dengan kompetensi yang bersangkutan serta sesuai dengan kebutuhan Perusahaan baik saat ini maupun pada masa yang akan datang;
- Mengusahakan agar skema remunerasi yang diterima pegawai, secara umum mengikuti peraturan/ketentuan yang berlaku dan sesuai kemampuan Perusahaan;
- Memberikan bonus dan insentif prestasi kepada pegawai sesuai kinerjanya; serta
- Direksi memiliki kewenangan penuh untuk bertindak tegas berdasarkan ketentuan dan peraturan yang

Industrial Relations

The Company have developed the quality of its human resources, in line with the needs, vision and mission, and the long term program of the Company. The Company has a business unit operating in many areas with different religion, culture, tradition, and custom, employee condition and local regulations. Although still sensitive to these differences, the Company still apply the Good Corporate Governance principles. The Board of Directors treat the employees fairly, unbiased, and free from discrimination of tribes, origins, groups, gender, religion and birth place and other aspects that are not relevant to performance and other objective indicators. The Company has implemented a few policies regarding employees and industrial relations, such as:

- Giving decent and safe work conditions for employees;
- Protecting employees from all kind of possible situation that endangers the safety and health in work place;
- Entitles the employee to build groups or associations according to the existing rules and regulations;
- Giving chances to employees to participate in education, training, and further self-development in line with the related competencies and in line with the Company needs now and in the future;
- Ensuring that employee remuneration schemes, generally follow the rules / regulations in force and in accordance with the ability of the Company;
- Giving bonus and incentives to employees based on their performance; and
- Board of Directors has a full authority to act decisively based on the valid rules and regulations by following

berlaku dengan menjunjung prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik terhadap pegawai yang terbukti menimbulkan keresahan, melanggar norma disiplin pegawai, dan merusak suasana kerja yang kondusif.

Pegawai juga memiliki berbagai kewajiban yang harus dipenuhi terhadap Perusahaan. Kewajiban pegawai terhadap Perusahaan antara lain:

- Setiap pegawai wajib mentaati Peraturan Pokok Kepegawaian (Perpok), nilai-nilai Perusahaan dan semua peraturan yang dikeluarkan Perusahaan;
- Setiap pegawai wajib mendahulukan kepentingan Perusahaan yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan tanggung jawabnya;
- Setiap pegawai wajib mengerahkan segala daya dan upaya dalam melaksanakan tugas pekerjaan yang diserahkan kepadanya;
- Setiap pegawai wajib menjaga harta milik dan nama baik Perusahaan; dan
- Setiap pegawai yang menjadi atasan wajib membina dan memberikan teladan pada pegawai di lingkungan kerjanya.

the principles of Good Corporate Governance to the employees that are found to cause restlessness, break the disciplinary norm of employees, and ruin a conducive working atmosphere.

The employees also have a range of obligations that must be met to the Company. Employee obligations to the Company are:

- *Each employee shall comply with Employment Principle Rules (Perpok), the values of the Company and all regulations issued by the Company;*
- *Each employee required to put the interests of the Company that relate directly or indirectly to his responsibilities;*
- *Each employee shall mobilize all resources and efforts in carrying out his assigned work duties;*
- *Each employee must maintain the property and reputation of the Company; and*
- *Each employee who is also an employer shall develop and become an example to the employees in his work environment.*



Dalam meningkatkan pelayanan jasanya, Perusahaan berupaya mengembangkan sistem Teknologi Informasi (TI) yang dapat menunjang aktivitas usaha dan operasi. Perusahaan telah menyempurnakan sistem pelaporan survei secara *online* dari aplikasi sebelumnya yaitu aplikasi 'Terpadu' menjadi aplikasi "*Classification and Statutory Reporting System*" (CSRS). Penyempurnaan ini memberikan dampak positif, antara lain sistem TI yang lebih fleksibel sesuai kebutuhan surveyor, lampiran dari laporan survei yang telah terintegrasi, aplikasi yang lebih mempermudah (*user friendly, what you see is what you get*), *update form* laporan survei lebih mudah dan seragam, *update* versi secara otomatis di masing-masing unit komputer surveyor, dan beberapa dampak positif lainnya.

Perubahan aplikasi ini diharapkan menciptakan percepatan pembuatan laporan survei termasuk pengiriman ke Kantor Pusat secara *online*. Dengan demikian, Kantor Pusat dapat segera memproses laporan survei tersebut tanpa harus menunggu salinan *hard copy* dari surveyor lapangan.

Selain itu, di sepanjang tahun 2013 Perusahaan melakukan berbagai upaya pengembangan sistem IT, yaitu:

- Dimulainya pemberlakuan *Electronic Drawing Approval*;
- Melanjutkan pengembangan dan penyempurnaan *Financial Operation System* (FinOps) versi 2.00 dengan mengintegrasikan anggaran eksploitasi, rugi-laba, neraca dan rasio keuangan dengan referensi *International Financial Reporting Standards* (IFRS);
- Mengembangkan program pelaporan survei *Classification & Statutory Report System* (CSRS) dan sosialisasi penggunaan form laporan survei versi baru;
- Melakukan upaya dengan mengintegrasikan seluruh sistem aplikasi TI yang sudah ada; dan
- Dimulainya penyusunan master plan TI dan *IT Governance* melalui kerjasama dengan PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk.

In improving its services, the Company seeks to develop an Information Technology (IT) system to support the business activities and operations. The Company has perfected the online survey reporting system from the previous application which is 'Integrated' application into "Classification and Statutory Reporting System" (CSRS) application. These improvements have a positive impact, such as a more flexible IT systems that suit the needs of surveyors, the attachment of a survey report which has been integrated, simpler application (user friendly, what you see is what you get), update form of survey reports is easier and uniform, automatic version update at each surveyor's computer station, and several other positive impacts.

This application change is expected to create an acceleration in survey reports preparation including online delivery to Head Office. Thus, the Head Office can process the survey reports without having to wait for a hard copy from the field surveyors.

In addition, throughout the year 2013 the Company made various efforts to develop an IT system, which are:

- The implementation of the Electronic Drawing Approval;*
- Continuing the development and refinement of Financial Operation System (FinOps) version 2.0 by integrating budget exploitation, profit and loss, balance sheet and financial ratios with reference to International Financial Reporting Standards (IFRS);*
- Develop a reporting program of Classification & Statutory Report System (CSRS) surveys and the socialization of new versions survey report form;*
- Make an effort to integrate the whole system of existing IT applications; and*
- The preparation of IT master plan and IT Governance through cooperation with the PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.*



I. POTENSI PASAR DARI AKTIVITAS USAHA PERUSAHAAN

1. Potensi Pasar Jasa Klasifikasi

Mengingat kapal laut merupakan sarana angkutan perairan yang utama di Indonesia, maka pasar dalam negeri masih merupakan sumber pendapatan utama bagi Perusahaan. Pertumbuhan rata-rata industri pelayaran nasional adalah sekitar 3,5% per tahun. Dengan nilai tukar rupiah terhadap beberapa mata uang utama dunia yang relatif stabil, maka terdapat kecenderungan kapal-kapal nasional *dual class* yang berlayar di luar negeri untuk mengklaskan kepada klas tunggal/*single class*.

Pemberlakuan Instruksi Presiden No. 5 tahun 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional dengan azas *cabotage* dan efektif berlaku mulai tahun 2011 memberi dampak positif bagi emiten transportasi laut nasional. Bagi korporasi yang bergerak di bidang jasa pelayaran, aturan ini jelas akan membuka peluang emas bagi mereka untuk dapat menguasai perairan Indonesia. Menurut data di 2013, sebanyak 60% dari total pangsa pasar pelayaran lepas pantai (*off shore*) dengan pencapaian USD2,1 miliar berhasil dikuasai kapal asing. Artinya, lebih dari USD1,2 miliar atau setara Rp1,3 triliun pendapatan dari hasil bisnis pelayaran ini jatuh ke tangan asing. Kini, setelah asas *cabotage* diberlakukan, 60% pangsa pasar yang ditinggal pihak asing itu secara berangsur diambil alih sepenuhnya oleh perusahaan-perusahaan pelayaran nasional.

Kementerian Perhubungan memastikan pangsa muatan kapal berbendera Indonesia meningkat drastis berkat penerapan asas *cabotage* mulai tahun 2005. Sementara itu, jumlah muatan yang diangkut kapal berbendera asing melorot drastis. Sama seperti angkutan dalam negeri, juga diharapkan akan terus terjadi peningkatan sehingga visi untuk bisa meraih pangsa pasar pada tahun 2020 menjadi 80% untuk angkutan dalam negeri dan 30% untuk angkutan luar negeri bisa menjadi kenyataan.

Sementara dalam proses peralihan dari kapal asing ke kapal nasional, diperlukan penambahan jumlah armada berbendera Indonesia. Peningkatan jumlah armada itu sebagian besar berasal dari pengalihan bendera kapal-kapal milik perusahaan angkutan laut nasional dari bendera asing menjadi bendera Indonesia, serta pembangunan kapal baru dan pengadaan kapal bekas dari luar negeri. Namun masih terdapat banyak tantangan yang dihadapi sehingga pelaksanaan Inpres No. 5 Tahun 2005 belum maksimal. Dampak lain dari Inpres tersebut adalah investasi industri galangan kapal. Galangan nasional mulai banjir pesanan. Empat investor dalam negeri

I. MARKET POTENTIAL OF THE COMPANY'S BUSINESS ACTIVITIES

1. Market Potential of Classification Services

Considering that ships are the main means of transportation in Indonesian waters, the domestic market is still the main source of income for the Company. The average growth of the national shipping industry is about 3.5% per year. With the exchange rate against a several major currencies that is relatively stable, there is a tendency for dual class national ships that sail abroad to classify to single class.

Enforcement of Presidential Instruction No. 5 of 2005 on the Empowerment of National Shipping Industry with the cabotage principle which was effective since 2011 has brought a positive impact on the national sea transportation. For corporations engaged in shipping services, this rule will obviously open up golden opportunity for them to be able to control the Indonesian waters. According to data in 2013, 60% of the total market share of offshore sailing with the total of USD 2.1 billion was controlled by foreign ships. It means that more than USD 1.2 billion or equivalent to Rp1.3 trillion income from shipping business fall into foreign hands. Now, after the cabotage principle is in effect, 60% of the market share left by foreign parties was gradually taken over entirely by the national shipping companies.

Ministry of Transportation makes sure the share of Indonesian-flagged cargo ship has increased dramatically thanks to the implementation of cabotage since 2005. Meanwhile, the amount of cargo carried aboard by foreign flagged ships dropped drastically. Domestic transportation is also expected to improve continuously so that the vision to gain 80% market share in 2020 for domestic transportation and 30% for international transportation could become a reality.

Meanwhile in the process of transition from foreign ships to national ships, the number of Indonesian-flagged fleet needs to be increased. The increase in number of fleets mostly comes from the flag transfer of ships owned by national sea transportation companies from foreign flagged into Indonesian flagged, as well as the construction of new ships and the procurement of used ships from abroad. But we still face many challenges so the implementation of Presidential Instruction No. 5 Year 2005 is not yet maximized. Another impact of the Instruction is the investment of shipbuilding industry. National shipbuilding starts to be flooded by orders. Four

dan empat investor asing siap membangun galangan kapal di empat wilayah Nusantara. Investasi tahap awal yang dibutuhkan untuk membangun galangan kapal sekitar USD20 juta untuk kapasitas 30 ribu DWT. Pemerintah akan memberikan insentif pajak penghasilan (PPH) untuk pembangunan galangan kapal di atas kapasitas 50 ribu DWT.

Untuk mendorong pengembangan industri galangan kapal di dalam negeri tersebut, Pemerintah memberikan insentif dalam rangka investasi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Bidang-bidang dan Daerah Tertentu yang memberikan potongan PPH sebesar 30% dari nilai investasi selama masa enam tahun. Selain itu, Pemerintah juga menerapkan bea masuk 0% untuk bahan baku plat di atas 25 mm. Pertumbuhan industri galangan kapal untuk masa lima tahun ke depan diperkirakan tumbuh rata-rata 10-20% per tahun untuk kapasitas 40 ribu-50 ribu DWT.

Selain itu, pemberlakuan PP tersebut mengakibatkan peningkatan yang cukup signifikan jumlah kapal yang mengajukan permohonan klasifikasi ke Perusahaan sebagai Badan Klasifikasi dalam tiga tahun terakhir. Peningkatan ini didominasi adanya beberapa kapal yang berganti bendera Indonesia sebagai dampak dari Inpres No. 5 tahun 2005 dan adanya PM.20 tahun 2006 yang sekarang direvisi menjadi PM.07 tahun 2013. Sejalan dengan pertumbuhan pangsa pasar distribusi muatan baik di dalam negeri maupun di luar negeri, naiknya kebutuhan ruang muat kapal serta tumbuhnya industri galangan kapal, memberikan harapan yang positif terhadap perkembangan usaha Perusahaan di masa mendatang.

Namun pelaksanaan Permenhub tersebut mengalami beberapa kendala, diantaranya:

1. Hanya beberapa kapal yang mengajukan registrasi dengan konstruksi bangunan baru. Sebagian besar kapal yang mengajukan permohonan registrasi adalah kapal bangunan sudah jadi dan sudah berumur di atas 10 tahun. Terjadi kesulitan dalam memenuhi peraturan klasifikasi sebagai persyaratan terbitnya sertifikat klasifikasi.
2. Belum optimalnya koordinasi Perusahaan dengan instansi terkait dalam menjaring kapal-kapal yang belum memiliki klasifikasi.
3. Di sisi lain juga masih banyak kapal yang sudah memiliki klasifikasi Perusahaan sebagai Badan Klasifikasi, namun tidak secara rutin melakukan survei periodik dalam rangka memenuhi persyaratan klasifikasi. Posisi Perusahaan adalah sebagai badan sertifikasi dan tidak bisa menahan kapal untuk tidak boleh berlayar.

domestic investors and four foreign investors are ready to build shipyards in four regions of the archipelago. The initial investment required to build shipyards around USD20 million for a capacity of 30 thousand DWT. The government will provide tax incentives (income tax) for the construction of the shipyard over the capacity of 50 thousand DWT.

To encourage the development of shipbuilding industry in the country, the Government provides incentives on the investments set out in Government Regulation (PP) No. 1 of 2007 on Income Tax Facilities for Investment in Specific Fields and Regions which gives 30% income tax deduction of the investment value for six years. In addition, the Government also apply 0% import duty for plate materials over 25 mm. The growth of shipbuilding industry for the next five years is expected to grow an average of 10-20% per year for the capacity of 40 thousand to 50 thousand DWT.

Other than that, the application of the Government Regulation resulted in a significant increase in the number of ships that apply classification requests to the Company as a Classification Board in the last three years. This increase is dominated with several ships that changed their flag into Indonesian flag as an impact of Presidential Instruction No. 5 of 2005 and Ministerial Regulation No. 20 of 2006 which is revised to Ministerial Regulation No. 07 of 2013. The growing market share in cargo distribution both domestically and abroad, the increase in needs of cargo hold, as well as the growth in shipbuilding industry provide a positive expectation on the development of the Company's business in the future.

However, there are problems in the implementation of the Minister of Transportation Regulations, including:

1. *Only a few ships register for the construction of new building. Most of the ships that apply for registration are completed ships and already over 10 years old. There is difficulty in meeting the classification rules as the issuance requirements of a classification certificate.*
2. *The Company's coordination with related institute has not been optimized in finding ships that do not have a classification.*
3. *On the other hand there are many ships that already classified by the Company as a Classification Board, but do not conduct periodic surveys to meet classification requirements routinely. The Company's position is as a certification board and can not hold ships from sailing.*

4. Dalam hal peningkatan pelayanan jasa, diperlukan pembukaan kantor cabang yang berpotensi berkembang sesuai dengan pertumbuhan industri di wilayah tersebut. Beberapa kota yang dapat dipertimbangkan adalah Samarinda, Kalimantan Timur dan Shanghai, Cina. Perusahaan masih melakukan kajian secara mendalam untuk langkah tersebut.

2. Posisi dan Potensi Pasar Jasa Statutoria

Kegiatan Jasa Statutoria Perusahaan merupakan pendelegasian survei dan penerbitan sertifikat statutoria terhadap keselamatan di laut (SOLAS) dan perlindungan lingkungan (MARPOL) oleh Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara lainnya atas kapal berbendera yang beroperasi di perairan Indonesia kepada Perusahaan sebagai Badan Klasifikasi. Pelimpahan wewenang statutoria ini membawa arti sangat penting bagi peningkatan standar keselamatan kapal-kapal bendera Indonesia, mengingat Perusahaan sebagai Badan Klasifikasi bertindak secara profesional, kompeten dan independen.

Saat ini, pelimpahan wewenang sertifikasi statutoria yang dilakukan Perusahaan sebagai Badan Klasifikasi diberikan Pemerintah Indonesia hanya pada Sertifikat Garis Muat/*Loadline*, sementara otorisasi statutori lainnya masih bersifat sementara. Pelimpahan otoritas penuh pada seluruh aspek statutoria telah menjadi kebutuhan perindustrian di kelautan, dimana *Indonesian National Shipowners Association (INSA)* atau Asosiasi Pelayaran Niaga Indonesia bersama Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau dan Ferry (GAPASDAF) sebagai asosiasi pemilik kapal mengharapkan Pemerintah Indonesia dapat memberikan pelimpahan wewenang statutoria secara penuh kepada Perusahaan sebagai Badan Klasifikasi. Kebutuhan ini muncul sejalan dengan pertimbangan atas efektifitas dan efisiensi pemeriksaan dan sertifikasi statutoria bila dilakukan sejalan dengan survei klas dari Perusahaan sebagai Badan Klasifikasi. Sedangkan Komite BKI—komite independen yang memberikan konsultasi, masukan, dan saran kepada Perusahaan sebagai Badan Klasifikasi dalam bidang teknis dan operasional yang keanggotaannya terdiri dari para *stakeholders* yang mencakup antara lain wakil dari asosiasi pemilik kapal, asosiasi perusahaan asuransi, galangan kapal, industri penunjang, pemerintah, akademisi, dan para pakar yang mewakili bidang keilmuannya masing-masing—telah menyatakan bahwa pelimpahan wewenang statutoria secara penuh selain merupakan wujud nyata upaya pemberdayaan badan klasifikasi nasional juga merupakan wujud kepercayaan Pemerintah Indonesia yang tentunya akan dapat meningkatkan kredibilitas Perusahaan sebagai Badan Klasifikasi di mata para pengguna jasanya.

4. *In terms of improving services, we need to establish branch office that has the potential to develop in accordance with the growth of industry in the region. Some cities that could be considered is Samarinda, East Kalimantan and Shanghai, China. The Company is still conducting an in-depth study for this action.*

2. Position and Potential of Statutory Services Market

The Company's statutory service activities is the delegation of surveys and the publication of statutory certificates on Safety of Life at Sea (SOLAS) and environmental protection (MARPOL) by the government of Indonesia and other countries on the flagged ships operating in Indonesian waters to the Company as a Classification Board. The delegation of statutory authority carries significant meanings to the improvement of safety standards of Indonesian flagged ships, considering the Company as a Classification Board acts professionally, competently and independently.

Currently, the authority delegation of statutory certification done by the Company as a Classification Board is given by the government of Indonesia only on Loadline certificate, while the other statutory authorizations are still temporary. Full delegation of authority in all statutory aspects has been a requirement in the marine industry, where the Indonesian National Shipowners Association (INSA) or the Association of Indonesian Commerce Shipping with the Association of River, Lakes and Ferry transportation (GAPASDAF) as an association of the ship owners expecting the government of Indonesia can fully delegate the statutory authority to the Company as a Classification Board. This need arises in line with the consideration of the effectiveness and efficiency of inspection and statutory certification when it is done accordingly with the class survey by the Company as a Classification Board. Meanwhile the BKI Committee—an independent committee that provide consultancy, input, and suggestions to the Company as a Classification Board in the field of technical and operational whose membership consists of the stakeholders that include representatives of the ship owners association, association of insurance companies, shipyards, supporting industry, government, academia, and the experts representing each scientific field—stated that a full delegation of statutory authority is also a realization of the national classification board empowerment and a form of trust from the Government of Indonesia which would also increase the Company's credibility as a Classification Board in the eyes of its service users.

Permasalahan di atas menjadi hambatan serius bagi upaya Perusahaan sebagai Badan Klasifikasi mendapatkan pelimpahan wewenang statutoria dari negara lain, termasuk dari negara-negara tetangga di lingkungan ASEAN. Demikian pula dukungan dari Kementerian BUMN mengusulkan kepada Kementerian Perhubungan untuk memberikan pelimpahan statutoria secara penuh kepada Perusahaan sebagai Badan Klasifikasi dalam rangka meningkatkan eksistensi dan pengembangan Perusahaan secara internasional. Perusahaan sebagai Badan Klasifikasi dapat memenuhi persyaratan teknis dan kriteria sesuai dengan IMO Resolusi A.739 (18) dan A.789 (19), sehingga Perusahaan sebagai Badan Klasifikasi memenuhi sebagai *Recognized Organization (RO)* untuk ditunjuk melaksanakan survei dan sertifikasi kapal-kapal berbendera Indonesia atas nama Pemerintah Indonesia cq Ditjen Perhubungan Laut.

The problems above become obstacles to the Company's efforts as a Classification Board to obtain statutory delegation of authority from other countries, including from neighbouring countries within ASEAN. The Ministry of SOE also proposed to the Ministry of Transportation to provide full statutory delegation to the Company as a Classification Board in order to improve the existence and development of the Company internationally. The Company as a Classification Board can meet the technical requirements and criteria in accordance with the IMO Resolution A.739 (18) and A.789 (19), so the Company as a Classification Board can be a Recognized Organization (RO) designated to conduct surveys and certification of Indonesian flagged ships on behalf of the Government of Indonesia through the Directorate General of Sea Transportation.

Adapun usulan penugasan survei statutoria secara penuh yang dilimpahkan kepada Perusahaan sebagai Badan Klasifikasi, yaitu:

The proposed assignment of the full statutory survey that is delegated to the Company as a Classification Board, as follow:

Dari penugasan parsial ke penugasan penuh	From partial assignments to full assignments
Survei & sertifikasi <i>Cargo Ship Safety Construction</i> .	Survey & Certification of <i>Cargo Ship Safety Construction</i> .
Survei & sertifikasi Marpol Annex I, II & VI.	Survey & Certification of <i>Marpol Annex I, II & VI</i> .
Survei & sertifikasi <i>Fitness Certificate</i> .	Survey & Certification of <i>Fitness Certificate</i> .
Survei & sertifikasi <i>ISM Code</i> .	Survey & Certification of <i>ISM Code</i> .
Survei & sertifikasi <i>ISPS Code</i> .	Survey & Certification of <i>ISPS Code</i> .
Tambahan penugasan penuh	Additional full assignments
Survei & sertifikasi <i>Cargo Ship Safety Equipment</i> .	Survey & Certification of <i>Cargo Ship Safety Equipment</i> .
Survei & sertifikasi <i>Cargo Ship Safety Radio</i> .	Survey & Certification of <i>Cargo Ship Safety Radio</i> .
Survei & sertifikasi <i>Passenger Ship Safety</i> .	Survey & Certification of <i>Passenger Ship Safety</i> .
Survei & sertifikasi <i>International Tonnage Certification 1969</i> .	Survey & Certification of <i>International Tonnage Certification 1969</i> .

Dengan harapan penugasan statutoria secara penuh kepada Perusahaan, alur birokrasi terhadap pengurusan sertifikat kapal oleh pemilik kapal akan menjadi efisien, dimana Perusahaan sebagai Badan Klasifikasi menjadi layanan satu pintu (*one stop service*) bagi pihak-pihak yang membutuhkan sertifikasi kapal.

With the hope of a full statutory assignment to the Company, bureaucratic flow towards the application of the ship certificate by the ship owners will be efficient, where the Company as a Classification Board can be a one stop service for those who need ship certification.

Sesuai permohonan, maka Perusahaan mengupayakan dilakukan harmonisasi *Survey System*, dimana pelaksanaan survei klasifikasi & statutoria diharmonisasikan pelaksanaannya.

As requested, the Company seeks to harmonize the survey system, where the implementation of classification and statutory survey will be harmonized in its practice.

3. Potensi Pasar Konsultansi & Supervisi (Marine & Industrial)

Peluang penyerapan produk lokal dalam proyek minyak dan gas bumi (migas) semakin terbuka luas. Bahkan, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) memperkirakan

3. Market Potential of Consultancy & Supervision (Marine & Industrial)

The opportunities of local products absorption in the oil and gas projects are wide open. In fact, the Special Unit of Upstream Oil and Gas (SKK Migas) estimates the local products and services were

produk dan jasa lokal mampu merebut Rp50 triliun dari total nilai investasi di sektor migas yang berkisar Rp110 triliun hingga Rp150 triliun per tahun. Angka ini naik dari sekitar Rp10-Rp15 triliun atau 10% dari total nilai investasi proyek migas beberapa tahun belakangan.

Keyakinan ini, salah satunya terdorong keberadaan nota kesepakatan antara SKK Migas dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tentang penggunaan alat berat dan permesinan serta penggunaan kapal dan bangunan lepas pantai dalam kegiatan industri hulu migas. Hal ini memberikan peluang mengingat komitmen para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) di Indonesia. Saat ini, total K3S tercatat 216. Dari jumlah itu, 68 K3S sudah produksi, sisanya merupakan eksplorasi. Potensi semakin terbuka lebar dengan masuknya proyek besar seperti Blok Cepu, Tangguh, Abadi dsb. Bahkan, dalam beberapa tahun ke depan, terdapat proyek sangat besar yang membuka peluang penyerapan produk lokal, yakni proyek Floating Liquefied Natural Gas (FLNG) Masela yang bernilai USD8 miliar hingga USD12 miliar.

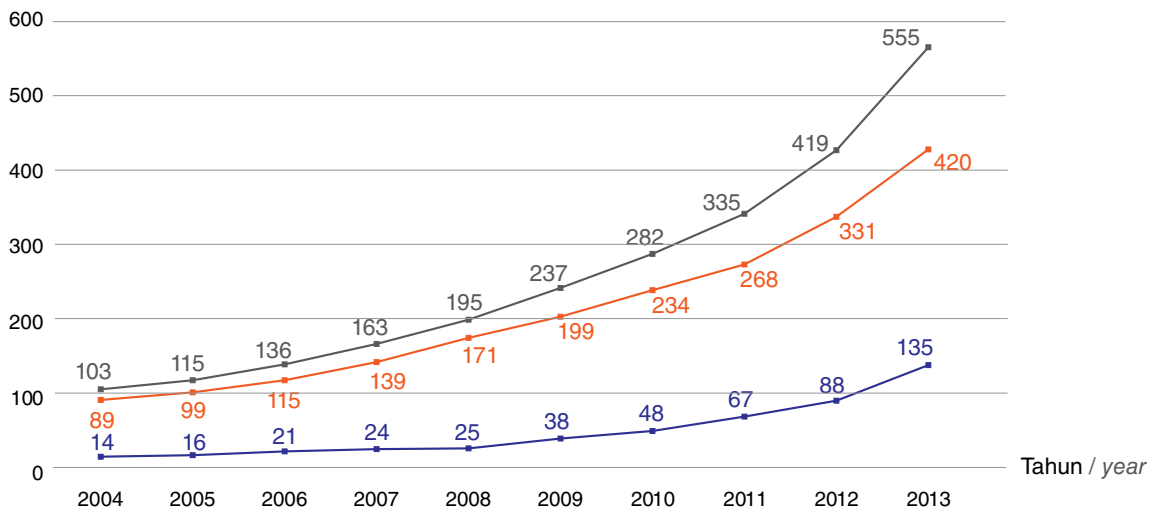
able to seize Rp50 trillion of the total value of the investment in oil and gas sector that ranges from Rp110 trillion to Rp150 trillion per year. This figure has increased from about Rp10 to Rp15 trillion, or 10% of the total investment value of oil and gas projects in recent years.

This confidence is encouraged by the existence of a memorandum of understanding between the Ministry of Industry SKK Migas (Ministry of Industry) on the use of heavy equipment and machinery as well as the use of ships and offshore construction in the upstream oil and gas industry activities. This provides an opportunity given the commitment of Contractor of Cooperation Contract (K3S) in Indonesia. Currently, there are 216. Of that amount, 68 K3S are already in production, the rest is in exploration. The potential is more wide open with the entry of large projects such as the Cepu, Tangguh, Abadi Blocks, etc. In fact, in the next few years, there is a huge project which opens opportunities for the absorption of local products, which is the Masela Floating Liquefied Natural Gas (FLNG) project which worth USD 8 billion to USD 12 billion.

Trend Eksploitasi 2004-2013

Exploitation Trend 2004-2013

Milyar Rupiah / billion rupiahs



Skala bisnis yang dikuasai saat ini dari migas diprediksikan diperoleh pendapatan dalam tahun 2011-2013 sebesar USD1,2 juta hanya untuk proyek FLNG Masela (review design), dan diperkirakan pendapatan tahun 2013 untuk proyek yang sama sebesar USD1,2 juta; belum termasuk proyek lainnya yang kemungkinan dapat diperoleh di bidang migas. Selanjutnya potensi pasar yang dapat diraih akan lebih besar lagi setelah pembangunan proyek FLNG selesai dilaksanakan.

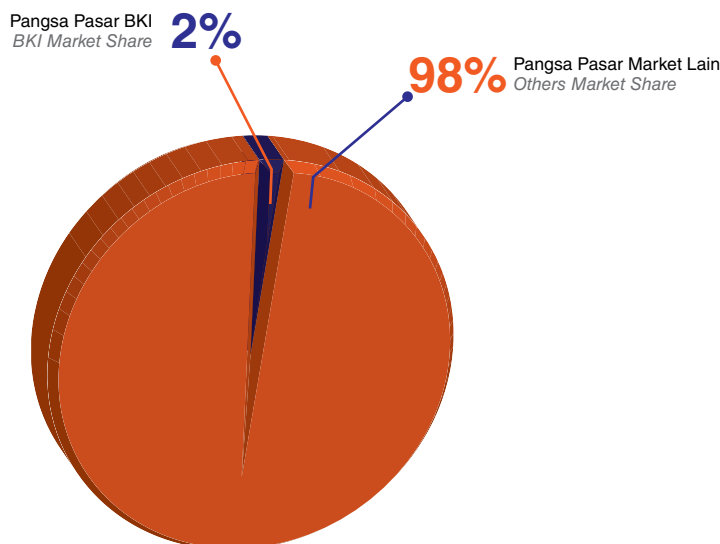
The scale of the currently controlled business of oil and gas is predicted to earn revenue in 2011-2013 of USD 1.2 million just for Masela FLNG project (review design), and estimated earnings in 2013 for the same project is USD 1.2 million; not including other projects that may be obtained in the field of oil and gas. Furthermore the market potential that can be achieved will be greater after the construction of the FLNG project is completed.

Komponen produk lokal seperti permesinan, alat berat dan galangan kapal dapat terlibat dalam proyek nasional tersebut. Produk-produk tersebut selama ini menjadi penunjang kegiatan operasional industri migas; mulai dari kegiatan eksplorasi sampai produksi, khususnya kegiatan yang berada di daerah terpencil baik *on-shore* maupun *off-shore*. Sedangkan dalam bidang perkapalan, jumlah armada kapal yang dipergunakan seluruh K3S sebanyak 631 unit, dimana sebanyak 90 unit masih berbendera asing. Jenis kapal yang dipergunakan antara lain *tugboat*, *crew boat*, AHT, AHTS, barge dan lainnya. Berdasarkan pemantauan pasar yang dilakukan, setiap tahun besarnya kegiatan inspeksi dan sertifikasi serta pengujian (*destructive testing* dan *non destructive testing*) di bidang migas dan minerbapabum mencapai lebih dari Rp200 milyar rupiah dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 10% per tahun. Perusahaan pesaing saat ini berjumlah $\pm$ 26 perusahaan.

Melihat potensi sumber daya Perusahaan yang tidak kalah dari segi mutu dibanding perusahaan pesaing, maka apabila ditunjang oleh kegiatan pemasaran yang lebih ofensif dengan standar kualitas pelayanan yang baku dan peralatan pengujian yang memadai, Perusahaan diharapkan akan dapat memperoleh pangsa pasar yang lebih besar sekaligus meningkatkan pendapatan dari kegiatan ini.

Perolehan pangsa pasar Perusahaan di bidang migas dapat terlihat pada diagram di bawah ini.

Diagram Pangsa Pasar Perusahaan Bidang Migas



Skala bisnis yang dikuasai saat ini dari kegiatan *Industrial Services* umumnya dari sektor industri manufaktur, dimana pengelolaan kegiatan ini belum optimal. Sedangkan potensi pasar di sektor ini yang dapat diraih diprediksikan mencapai Rp10 milyar per tahun.

Components of the local products such as machinery, heavy equipment and shipyards can be involved in the national project. These products have been the supporting oil and gas industry operations; from exploration to production activities, particularly activities in remote areas both on-shore and off-shore. While in the field of shipping, the number of fleet used for K3S is 631 units, in which 90 units are still foreign flagged ships. The types of ship used, among others, are tugboat, crew boat, AHT, AHTS, barges, etc. Based on market monitoring, every year the amount of inspection and certification activities and testing (destructive testing and non-destructive testing) in the field of oil and gas and geothermal reach more than Rp200 billion with an average growth of about 10% per year. The current competitors consist of + 26 companies.

Seeing the potential of the Company's resources which are not inferior in quality compared to competitors, then if supported by more offensive marketing activities with standard service quality and adequate testing equipment, The Company is expected to gain greater market share and increase revenues from this activity.

The acquisition of the Company's market share in the field of oil and gas can be seen in the diagram below.

*Diagram of Company Market Share in the Field of Oil & Gas
The scale of the currently controlled business of Industrial*

Services activities are generally from the manufacturing industry, where the management activities have not yet been optimal. Whereas the market potential that can be achieved is predicted to reach Rp10 billion per year.

II. KEGIATAN PEMASARAN TAHUN 2013

Tercatat beberapa kegiatan pemasaran yang telah diupayakan Perusahaan pada tahun 2013, antara lain:

- a. Sosialisasi standar *welding shop* dan edukasi juru las pada galangan kapal di wilayah Samarinda, Batam, Banjarmasin, Pontianak dan Palembang.
- b. Pemasaran jasa Perusahaan sebagai Badan Klasifikasi terkait pembangunan kapal milik BASARNAS, BAKORKAMLA dan PELINDO.
- c. Pemasaran jasa Perusahaan sebagai Badan Klasifikasi di Kementerian Pertahanan dalam rangka pembangunan kapal.
- d. Pemasaran jasa Perusahaan sebagai Badan Klasifikasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui pertemuan dengan Wakil Menteri ESDM dalam rangka kesiapan Perusahaan dalam menangani proyek-proyek ESDM.
- e. Pemasaran jasa Perusahaan sebagai Badan Klasifikasi terkait pengembangan kapal berbahan bakar LPG & CNG di Ditjen, Migas dan K3S (TOTAL).
- f. Pemasaran jasa Perusahaan sebagai Badan Klasifikasi dalam forum Indonesia Maritime Advocation Forum 2013-5th INFACO.
- g. Presentasi jasa Perusahaan sebagai Badan Klasifikasi di instansi perbankan; antara lain BRI, BRI Syariah, dsb.
- h. Pemasaran jasa Perusahaan sebagai Badan Klasifikasi di Perusahaan Listrik Negara (PLN) Jawa Bali dan Perusahaan Gas Negara (PGN) terkait dengan CNG/ LNG Carrier.
- i. Mengadakan pameran dalam forum SKK Migas- Penunjang Operasi dan lingkungan K3S.
- j. Mengadakan peningkatan kerja sama dengan badan klasifikasi asing di Indonesia terkait dengan terbitnya PM.07/2013; antara lain ABS, DnV, KR, NK, GL dan RINA (memperbaharui perjanjian kerjasama yang memperkuat posisi Perusahaan).

II. MARKETING ACTIVITIES IN 2013

Some of the Company's marketing activities in 2013 are:

- a. Socialization of welding shop standard and welder education at shipyards in the region of Samarinda, Batam, Banjarmasin, Pontianak and Palembang.*
- b. Marketing of the Company services as a Classification Board related to the construction of ships which are owned by BASARNAS, BAKORKAMLA and PELINDO.*
- c. Marketing of the Company services as a Classification Board in shipbuilding in the Ministry of Defense.*
- d. Marketing of the Company services as a Classification Board in the Ministry of Energy and Mineral Resources (EMR) through the meeting with the Deputy Minister of Energy and Mineral Resources in preparation for the Company in handling EMR projects.*
- e. Marketing of the Company services as a Classification Board related to development of LPG & CNG fueled ships in Directorate General, Oil and Gas and K3S (TOTAL).*
- f. Marketing of the Company services as a Classification Board in Indonesia Maritime Advocation Forum 2013-5th INFACO.*
- g. Presentation of Company services as a Classification Board in banking institutions; such as BRI, BRI Syariah, etc.*
- h. Marketing of Company services as a Classification Board in Java Bali State Electricity Company (PLN) and Gas Company (PGN) related to CNG / LNG Carrier.*
- i. Hold an exhibition in the forum of SKKMigas-Operation Support and K3S environment.*
- j. Increase cooperation with foreign classification board in Indonesia associated with the issuance of PM.07/2013; among others ABS, DnV, KR, NK, GL and RINA (renewing cooperation agreements to strengthen the position of the Company).*



Strategi Dan Fokus Manajemen Tahun 2013

Strategies And Management Focus In 2013

Strategi Korporasi

Perusahaan melakukan upaya korporasi dengan mensejajarkan pelayanan setara dengan klasifikasi asing anggota *International Association of Classification Societies* (IACS). Dengan upaya tersebut, korporasi Perusahaan memperoleh pengakuan dan pencitraan/reputasi dari semua pemangku kepentingan sehingga para pemangku kepentingan yang memerlukan jasa klasifikasi Perusahaan menjadi sebuah "kebutuhan" dan bukan sekedar "keharusan" akibat peraturan perundang-undangan. Selain itu, Perusahaan melakukan upaya korporasi untuk memperbesar dan memperkuat segmen Konsultasi & Supervisi dan menciptakan kemandirian; baik dari sisi operasional, SDM maupun aspek finansial.

Strategi Jasa Klasifikasi

Sebagai badan klasifikasi, Perusahaan memberikan penugasan yang terukur dan terarah terhadap setiap fungsi organisasi yang diwujudkan dalam kontrak manajemen serta sebagai alat ukur penilaian kinerja dalam pemberian *reward & punishment*. Selain itu, Perusahaan melakukan *benchmarking* kualitas dan layanan terhadap badan klasifikasi asing *International Association of Classification Societies* (IACS) serta melakukan upaya penyetaraan kualitas dan layanan Perusahaan, serta mengoptimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai penunjang kegiatan operasional sekaligus penyebaran informasi layanan kepada *stakeholder* terkait.

Perusahaan juga memperkuat jumlah dan kemampuan *technical staff* di Kantor Pusat sebagai *think-tank* pengembangan jasa klasifikasi yang diharapkan dapat mensejajarkan dengan klasifikasi asing anggota IACS. Perusahaan juga mengirimkan para *technical staff* dan Surveyor ke badan klasifikasi asing/IACS dan menghadiri pertemuan *International Maritime Organization* (IMO) untuk mempelajari sistem operasional dan pelaksanaan survei di lapangan serta peraturan keselamatan. Tak lupa, Perusahaan mengupayakan kerjasama dengan lembaga penelitian seperti Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Perguruan Tinggi untuk melakukan riset bersama dalam menyusun dan mengembangkan *Rules & Regulation* secara mandiri.

Strategi Jasa Statutoria

Di bidang jasa statutoria, Perusahaan mengupayakan strategi khusus terkait otorisasi sertifikat statutoria. Dalam memperoleh pelimpahan statutoria, Perusahaan sebagai Badan Klasifikasi tidak secara langsung mengajukan kepada pemerintah, namun Perusahaan mendorong para pemangku kepentingan lainnya untuk mendorong diberikannya statutoria kepada Perusahaan sebagai Badan Klasifikasi. Para pemangku kepentingan seperti Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan, asuransi, perbankan, *Indonesian National Shipowners Association* (INSA) atau Asosiasi Pelayaran Niaga Indonesia, serta Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau dan

Corporation Strategies

The Company made corporate efforts by aligning services equivalent to the foreign classification board of the International Association of Classification Societies (IACS). With these efforts, the Company's corporation gained recognition and reputation from all stakeholders so the stakeholders who need the Company's classification will see it as a "necessity" instead of a "requirement" because of the rules and regulations. Additionally, the Company made corporate efforts to enlarge and strengthen the Consultancy & Supervision segments and create independence; either from operational, Human Resources and financial aspects.

Classification Service Strategies

As a Classification Board, the Company provides measurable and targeted assignments to each function of the organization embodied in the management contract and as a measurement on the performance appraisal in giving reward and punishment. Beside that, the Company conducts a quality and service benchmarking to the foreign classification board of International Association of Classification Societies (IACS) and conducts quality and services equalization efforts, also optimizes the utilization of Information Technology as an operational support as well as to spread service information to relevant stakeholders.

The Company also increase the number of staff and technical capabilities in the Head Office as a think-tank for classification service development that is expected to align the Company with foreign classification board of IACS. The Company also sends the technical staff and surveyors to the foreign classification board / IACS and attend the meeting of the International Maritime Organization (IMO) to study the operational systems and the implementation of field surveys and safety regulations. Moreover, the Company seeks cooperation with research institutes such as the Agency for the Assessment and Application of Technology (BPPT) and Universities to conduct collaborative research in preparing and developing the Rules & Regulations independently.

Statutory Service Strategies

In the field of statutory services, the Company seeks specific strategies related to the statutory certificate authorization. In obtaining the statutory delegation, the Company as a Classification Board does not directly apply to the government, but the Company encourages other stakeholders to encourage the statutory to be granted to the Company as a Classification Board. Stakeholders such as the the Ministry of SOE, Ministry of Transportation, insurance, banking, Indonesian National Shipowners Association (INSA) or Indonesian Commercial Shipping Association, and Association of River, Lake and Ferry Transportation (GAPASDAF) also provide insights for

Ferry (GAPASDAF) turut memberikan pandangan bagi pemerintah dalam pelimpahan kewenangan statutoria kepada Perusahaan.

Untuk itu, program kerja Perusahaan diarahkan dengan membentuk *image* kesiapan dan kemampuan Perusahaan di bidang statutoria; antara lain menginformasikan persyaratan statutoria dari IMO secara *up to date*, merespon kapal klas yang terkena detensi/defisiensi PSC, memberikan edukasi tentang persyaratan statutoria, dsbnya. Dalam mengajukan pelimpahan statutoria secara penuh, dilakukan secara bertahap yaitu kapal klas Perusahaan sebagai Badan Klasifikasi dengan tonase > 2000 GT terlebih dahulu (bukan > 500 GT). Strategi ini dilakukan untuk menunjukkan terlebih dahulu kelebihan layanan Perusahaan sebagai Badan Klasifikasi dan mempertimbangkan seandainya diberikan keseluruhan penugasan yang akan berpengaruh terhadap kesiapan Perusahaan yang dapat mengakibatkan timbulnya keluhan pengguna jasa.

Di samping itu, Perusahaan melakukan *Harmonizes Survey System* (HSS) dan optimalisasi pelayanan atap (*one stop service*) terhadap pelaksanaan survei klasifikasi dan statutoria. Perusahaan juga memperkuat *technical staff* di bidang Statutoria yang memahami produk-produk peraturan IMO yang selanjutnya melakukan edukasi secara internal kepada surveyor di lapangan, sekaligus melakukan sosialisasi persyaratan statutoria kepada para *stakeholder* terkait.

Strategi Jasa Konsultansi & Supervisi

Dalam memenangkan persaingan dan kontinuitas permintaan jasa, adanya nilai tambah yang diperoleh pengguna jasa terhadap layanan Perusahaan diantaranya kecepatan layanan inspeksi, kecepatan penerbitan pelaporan dan sertifikasi, informasi status inspeksi terhadap *equipment* yang diinspeksi oleh Perusahaan melalui website Perusahaan, dan sebagainya. Selain itu diterapkan harga yang kompetitif dengan penekanan efektivitas penggunaan sumber daya dan efisiensi biaya. Mengingat bisnis Konsultansi & Supervisi memiliki kecenderungan biaya tinggi dan profit margin rendah, maka diterapkan strategi pengendalian penggunaan biaya melalui *Cost Control System* yang terpadu untuk setiap pekerjaan.

Perusahaan juga mengoptimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai penunjang operasional sekaligus penyebaran informasi layanan kepada *stakeholder* terkait. Selain itu, Perusahaan melakukan pemetaan bisnis per unit produksi untuk menentukan potensi pasar, kebutuhan tenaga inspektor, kompetensi yang diperlukan, serta peralatan pengujian yang diperlukan sehingga masing masing area/unit produksi mampu melakukan pemasaran secara efektif. Perusahaan juga memperkuat jumlah dan kemampuan Inspektor/Operator sesuai kebutuhan pasar.

the government in the delegation of statutory authority to the Company.

To that end, the Company's work program is directed to form the image of the Company's readiness and capability in the field of statutory; such as inform the up-to-date statutory requirements from IMO, respond to class ships in PSC detention/deficiency, give an education about statutory requirements, etc. The application for full statutory delegation is done gradually, first is the class ships of the Company as a Classification Board with a tonnage > 2000 GT (not > 500 GT). This strategy is to show the advantages of the Company as a Classification Board and consider the case where given the entire assignment which will impact the readiness of the Company that will cause complaints from service users.

Other than that, the Company uses Harmonizes Survey System (HSS) and one stop service on the implementation of classification and statutory survey. The Company also strengthen the technical staff in the statutory field who understand the regulation products of IMO who will educate the surveyors in the field internally, as well as disseminate the statutory requirements to the relevant stakeholders.

Consultancy & Supervision Service Strategies

To win the competition and continuity of service requests, there is an added value obtained by service users of the Company, among others, the inspection services speed, reporting and publishing certification speed, information of inspection status of the equipments inspected by the Company through the Company's website, etc. Additionally, competitive pricing is applied with the emphasis on effectiveness of the use of resource and cost efficiency. Given the Consultation & Supervision businesses have a tendency to high costs and low profit margins, the strategy of cost control is implemented through integrated Cost Control System for each work.

The Company also optimize the utilization of Information Technology as an operational support and to spread service information to relevant stakeholders. Moreover, the Company do a mapping of business per unit of production to determine the market potential, the needs of inspectors, competencies required, as well as the necessary testing equipment so that each area / production unit is capable in conducting an effective marketing. The Company also increase the number and ability of inspectors / operators according to market needs.

Dalam melakukan diversifikasi usaha pada segmen yang belum dikuasai secara teknis namun pasarnya cukup berpotensi, Perusahaan melakukan strategi kerjasama bisnis dengan mitra strategis yang memiliki reputasi, kemampuan teknologi dan berkualitas global. Perusahaan juga menerapkan sistem pemasaran yang *ofensif* dan promotif serta dengan memanfaatkan sarana sistem teknologi informasi, serta menerapkan standar SNI 19-17020 sebagai perusahaan jasa inspeksi teknik dan standar SNI 19-17025 untuk kegiatan pengujian di Laboratorium milik Perusahaan.

Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

Perusahaan melakukan strategi optimalisasi sumber daya dengan menitikberatkan pada SDM, baik manajerial maupun operasional yang mengarah ke spesialis. Mengingat alat produksi utama Perusahaan adalah SDM yang memiliki kompetensi, maka strategi Perusahaan dilakukan dengan membentuk *Training Center* yang mampu memfasilitasi peningkatan kompetensi SDM. Dengan meningkatkan kompetensi SDM, pembentukan pusat diklat ini diharapkan mendorong reputasi Perusahaan sebagai Badan Klasifikasi yang memiliki standar dan kualitas setara dengan badan klasifikasi asing.

Perusahaan juga melakukan *benchmarking* prosedur *training* surveyor dan *technical staff* pada badan klasifikasi asing anggota IACS serta melakukan upaya penyetaraan program *training*. Perusahaan berupaya meningkatkan kualifikasi inspektor, baik dari segi jumlah maupun kompetensi inspektor.

Strategi Bidang Organisasi, Manajemen dan Keuangan

Dalam bidang organisasi, manajemen dan keuangan, Perusahaan melakukan penyempurnaan struktur organisasi dengan mengoptimalkan fungsi dan penyesuaian organisasi sesuai kebutuhan. Perusahaan juga menerapkan budaya penggunaan Teknologi Informasi kepada seluruh lapisan manajemen dan mengoptimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai penunjang kegiatan operasional sekaligus penyebaran informasi layanan kepada *stakeholder* terkait.

In conducting business diversification on segments that have not been controlled technically but have potential markets, the Company is pursuing a strategy of business cooperation with strategic partners that have a reputation, technological capabilities and global quality. The Company also implement offensive and promotive marketing system, utilize the information technology systems, as well as implement SNI 19-17020 standard as a technical inspection service company and SNI 19-17025 standard for testing activities in the Company's laboratory.

Human Resources (HR) Development Strategies

The Company is pursuing a strategy to optimize resources with emphasis on human resources, both managerial and operational leading to specialists. Given that the Company's main production tool is competent human resources, the Company's strategy is to establish a Training Center that is capable of facilitating the improvement of HR competencies. By improving the competence of human resources, the establishment of this training center is expected to boost the company's reputation as a Classification Board which has the equivalent quality and standards with foreign classification board.

The Company also conducts a benchmarking of surveyors and technical staff training procedures to foreign classification boards of IACS and puts efforts on training program equalization. The Company seeks to improve the qualifications of inspectors, both in terms of the number of inspectors and competence.

Organizational, Management and Financial Strategies

In organization, management and finance aspects, the Company conducts a refinement of organizational structure by optimizing organizational functions and adjustments as needed. The company also implemented a of culture of Information Technology utilization to all levels of management and optimized the utilization of Information Technology as an operational support and to spread service information to relevant stakeholders.



Tahun 2013 Perusahaan berhasil meningkatkan pendapatan sebesar Rp555,20 miliar atau naik 132,45% dari pencapaian tahun 2012 sebesar Rp419,18 miliar. Dengan peningkatan pendapatan tersebut, Perusahaan mampu meningkatkan laba komprehensif sebesar Rp106,35 miliar atau naik 157,7% dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp67,44 miliar. Pencapaian ini sebagian besar disebabkan kenaikan pendapatan klasifikasi sebesar Rp363,47 miliar dibandingkan tahun 2012 yang sebesar Rp274,01 miliar serta kenaikan pendapatan dari konsultansi dan supervisi sebesar Rp191,73 miliar dibandingkan tahun 2012 yang sebesar Rp145,17 miliar.

Analisa Neraca Keuangan

Laporan Neraca Teraudit

A. Perbandingan Laporan Neraca Tahun 2013 dengan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2013

I. Aset

Total realisasi Aset Perusahaan per 31 Desember 2013 sebesar Rp405,46 miliar, lebih tinggi Rp3,4 miliar (100,85%) dari RKAP tahun 2013 sebesar Rp402,06 miliar, terdiri dari:

1. Aset Lancar
Jumlah realisasi Aset Lancar per 31 Desember 2013 sebesar Rp274,46 miliar, lebih tinggi Rp37,08 miliar (115,62%) dari RKAP tahun 2013 sebesar Rp237,38 miliar.
2. Aset Tetap
Jumlah realisasi Aset Tetap per 31 Desember 2013 sebesar Rp127,71 miliar, lebih rendah Rp31,59 miliar (80,17%) dari RKAP tahun 2013 sebesar Rp159,31 miliar.
3. Aset Lain-lain
Jumlah realisasi Aset Lain-lain per 31 Desember 2013 sebesar Rp3,28 miliar, lebih rendah Rp2,09 miliar (61,11%) dari RKAP tahun 2013 sebesar Rp5,37 miliar.

II. Liabilitas dan Ekuitas

Total Liabilitas dan Ekuitas Perusahaan pada 31 Desember 2013 sebesar Rp405,46 miliar, lebih tinggi Rp3,4 miliar (100,85%) dari RKAP tahun 2013 sebesar Rp402,06, terdiri dari:

1. Liabilitas Jangka Pendek
Jumlah realisasi Liabilitas Jangka Pendek per 31 Desember 2013 sebesar Rp62,85 miliar, lebih rendah Rp7,16 miliar (89,77%) dari RKAP tahun 2013 sebesar Rp70 miliar.
2. Liabilitas Jangka Panjang
Jumlah realisasi Liabilitas Jangka Panjang per

In 2013 the Company managed to increase the income of Rp555.20 billion, or increase 132.45% from the figure in 2012 of Rp419.18 billion. With the increased revenue, the Company is able to improve comprehensive income amounted to Rp106,35 billion, or increase 157.7% from the previous year which amounted to Rp67.44 billion. This achievement is largely due to the increase in classification revenue of Rp363.47 billion compared to the year 2012 which amounted to Rp274.01 billion and the increase in revenue from consultancy and supervision of Rp191.73 billion compared to Rp145.17 billion in 2012.

Balance Sheet Analysis

Audited Balance Report

A. Comparison of 2013 Balance Sheet and 2013 Budget Plan (RKAP)

I. Assets

Total realization of Company's Assets per December 31, 2013 amounted to Rp405.46 billion, which is Rp3.4 billion (100.85%) higher than the 2013 RKAP which was Rp402.06 billion, consist of:

1. Current Assets
Total Current Asset per December 31, 2013 is Rp274.46 billion, which is 37.08 billion (115.62%) higher than 2013 RKAP of Rp.237.38 billion.
2. Fixed Assets
Total Fixed Asset per December 31, 2013 is Rp127.71 billion, Rp31.59 billion (80.17%) lower than 2013 RKAP of Rp159.31 billion.
3. Other Assets
Total Others Asset per December 31, 2013 is Rp3.28 billion, Rp2.09 billion (61.11%) lower than 2013 RKAP of Rp5.37 billion.

II. Liabilities and Equity

The Company's total Liability and Equity in December 31, 2013 is Rp405.46 billion, Rp3.4 billion (100.85%) higher than 2013 RKAP of Rp402.06, consist of:

1. Current Liabilities
Total Current Liabilities per December 31, 2013 is Rp62.85 billion, Rp7.16 billion (89.77%) lower than 2013 RKAP of Rp70 billion.
2. Non-Current Liabilities
Total Non-Current Liabilities per December

31 Desember 2013 sebesar Rp14,02 miliar, lebih tinggi Rp5,82 miliar (171,06%) dari RKAP tahun 2013 sebesar Rp8,19 miliar.

3. Ekuitas

Jumlah realisasi Ekuitas Perusahaan per 31 Desember 2013 sebesar Rp328,60 miliar, lebih tinggi Rp4,74 miliar (101,46%) dari RKAP tahun 2013 sebesar Rp323,86 miliar.

31, 2013 is Rp14.02 billion, Rp5.82 billion (171.06%) higher than 2013 RKAP 2013 of Rp8.19 billion.

3. Equity

The Company's total Equity per December 31, 2013 is Rp328.60 billion, Rp4.74 billion (101.46%) higher than 2013 RKAP of Rp323.86 billion.

B. Perbandingan Laporan Neraca Teraudit Tahun 2013 dengan Tahun 2012

I. Aset

Total Aset Perusahaan naik sebesar Rp101,28 miliar (133,3%) dari Rp304,18 miliar di 31 Desember 2012 menjadi Rp405,46 miliar per 31 Desember 2013. Kenaikan ini disebabkan oleh:

1. Aset Lancar

Kenaikan Aset Lancar Perusahaan sebesar Rp88,46 miliar (147,56%) dari Rp186,00 miliar di 31 Desember 2012 menjadi Rp274,46 miliar pada 31 Desember 2013, dengan kenaikan yaitu:

- Kenaikan Kas dan Setara Kas sebesar Rp38,51 miliar (156,29%).
- Kenaikan Piutang Usaha sebesar Rp54,74 miliar (145,51%).
- Kenaikan Akumulasi Penyisihan Piutang sebesar negatif Rp7,44 miliar (179,27%).
- Kenaikan Piutang Bersih sebesar Rp47,29 miliar (142,65%).
- Penurunan Tagihan Bruto sebesar Rp1,79 miliar (59,33%).
- Kenaikan Aset Dimiliki Untuk Dijual sebesar Rp297 juta (100%).
- Kenaikan Aset Lancar Lainnya sebesar Rp4,14 miliar (280,01%).

2. Aset Tetap

Kenaikan Aset Tetap sebesar Rp12,68 miliar (111,02%) dari Rp115,04 miliar di 31 Desember 2012 menjadi Rp127,71 miliar pada 31 Desember 2013, dengan kenaikan yaitu:

- Kenaikan Tanah sebesar Rp370 juta (102,60%).
- Kenaikan Bangunan sebesar Rp44,04 miliar (217,25%).
- Penurunan Kendaraan Bermotor sebesar Rp12,96 miliar (62,95%).
- Kenaikan Inventaris: Golongan I sebesar Rp7,86 miliar (134,26%).
- Penurunan Inventaris: Golongan II sebesar Rp2,15 miliar (80,51%).
- Kenaikan Inventaris: Golongan III sebesar Rp318 juta (101,27%).

B. Comparison between Audited Balance Report of 2013 and 2012

I. Assets

Total Company Assets increased by Rp101.28 billion (133.3%) from Rp304.18 billion in December 31, 2012 to Rp405.46 billion in December 31, 2013. This increase was due to:

1. Current Assets

Company's Current Asset increased by Rp88.46 billion (147.56%) from Rp186.00 billion in December 31, 2012 to Rp274.46 billion in December 31, 2013, with the increase in:

- Increase in Cash and Cash Equivalent amounted to Rp38.51 billion (156.29%).
- Increase in Account Receivable amounted to Rp54.74 billion (145.51%).
- Increase in Accumulation of Allowance for Doubtful Account amounted to negative Rp7.44 billion (179.27%).
- Increase in Net Account Receivable amounted to Rp47.29 billion (142.65%).
- Decrease in Gross Billing amounted to Rp1.79 billion (59.33%).
- Increase in Assets Held to be Sold amounted to Rp297 billion (100%).
- Increase in Other Current Assets amounted to Rp4.14 billion (280.01%).

2. Fixed Assets

Increase in Fixed Assets amounted to Rp12.68 billion (111.02%) from Rp115.04 billion in December 31, 2012 to Rp127.71 billion in December 31, 2013, with the increase in:

- Increase in Lands amounted to Rp370 billion (102.60%).
- Increase in Buildings amounted to Rp44.04 billion (217.25%).
- Decrease in Vehicles amounted to Rp12.96 billion (62.95%).
- Increase in Inventory: Group I amounted to Rp7.86 billion (134.26%).
- Decrease in Inventory: Group II amounted to Rp2.15 billion (80.51%).
- Increase in Inventory: Group III amounted to Rp318 million (101.27%).

- Kenaikan Jumlah Nilai Perolehan sebesar Rp59,30 miliar (140,69%).
 - Kenaikan Akumulasi Penyusutan sebesar negatif Rp9,10 miliar (113,06%).
 - Kenaikan Nilai Buku sebesar Rp50,19 miliar (166%).
 - Penurunan Aset Dalam Pembangunan sebesar Rp37,52 miliar (3,78%).
3. Aset Lain-lain
Kenaikan Aset Lain-lain sebesar Rp142 juta (104,52%) dari Rp3,14 miliar di 31 Desember 2012 menjadi Rp3,28 miliar pada 31 Desember 2013, dengan kenaikan yaitu:
- Penurunan Aset Pajak Tangguhan sebesar Rp303 juta (89,84%).
 - Kenaikan Uang Jaminan sebesar Rp445 juta (379,87%).

II. Liabilitas dan Ekuitas

Total Liabilitas dan Ekuitas Perusahaan naik sebesar Rp101,28 miliar (133,30%) dari Rp304,18 miliar di 31 Desember 2012 menjadi Rp405,46 miliar pada 31 Desember 2013. Kenaikan ini disebabkan oleh:

1. Liabilitas Jangka Pendek
Kenaikan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp2,64 miliar (104,38%) dari Rp60,21 miliar di 31 Desember 2012 menjadi Rp62,85 miliar pada 31 Desember 2013, dengan kenaikan yaitu:
- Penurunan Utang Usaha sebesar Rp1,75 miliar (54,54%).
 - Penurunan Utang Lain-lain sebesar Rp2,95 miliar (77,45%).
 - Penurunan Utang Biaya sebesar Rp3,20 miliar (82,36%).
 - Kenaikan Utang Pajak sebesar Rp8,98 miliar (140,66%).
 - Kenaikan Utang Bruto sebesar Rp1,56 miliar (150,95%).
 - Penurunan Liabilitas Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp4 juta (33,33%).
2. Liabilitas Jangka Panjang
Kenaikan Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp2,41 miliar (120,74%) dari Rp11,61 miliar di 31 Desember 2012 menjadi Rp14,02 miliar pada 31 Desember 2013, dengan kenaikan yaitu:
- Kenaikan Provisi Imbalan Jangka Panjang Karyawan sebesar Rp2,41 miliar (120,74%).
3. Ekuitas
Kenaikan Ekuitas Perusahaan sebesar Rp96,23 miliar (141,42%) dari Rp232,37 miliar di 31 Desember 2012 menjadi Rp328,60 miliar pada 31 Desember 2013, dengan kenaikan yaitu:
- Kenaikan Saldo Laba Yang Dicadangkan

- Increase in Total Acquisition amounted to Rp59.30 billion (140.69%).
- Increase in Depreciation Accumulation amounted to negative Rp9.10 billion (113.06%).
- Increase in Book Value amounted to Rp50.19 billion (166%).
- Decrease in Assets in Development amounted to Rp37.52 billion (3.78%).

3. Other Assets

Increase in Other Assets amounted to Rp142 million (104.52%) from Rp3.14 billion in December 31, 2012 to Rp3.28 billion in December 31, 2013, with increase in:

- Decrease in Deferred Tax Assets amounted to Rp303 million (89.84%).
- Increase in Deposit amounted to Rp445 million (379.87%).

II. Liabilities and Equity

The Company's total Liabilities and Equity rose Rp101.28 billion (133.30%) from Rp304.18 billion in December 31, 2012 to Rp405.56 billion in December 31, 2013. The increase was due to:

1. Current Liabilities

Increase in Current Liabilities amounted to Rp2.64 billion (104.38%) from Rp60.21 billion in December 31, 2012 to Rp62.85 billion in December 31, 2013, with increase in:

- Decrease in Account Payable amounted to Rp1.75 billion (54.54%).
- Decrease in Other Payable amounted to Rp2.95 billion (77.45%).
- Decrease in Debt Cost amounted to Rp3.20 billion (82.36%).
- Increase in Tax Payable amounted to Rp8.98 billion (140.66%).
- Increase in Gross Debt amounted to Rp1.56 billion (150.95%).
- Decrease in Other Current Liabilities amounted to Rp4 million (33.33%).

2. Non-Current Liabilities

Increase in Non-Current Liabilities amounted to Rp2.41 billion (120.74%) from Rp11.61 billion in December 31, 2012 to Rp14.02 billion in December 31, 2013, with increase in:

- Increase in Employee Long-Term Benefits Provisions of Rp2,41 billion (120.74%).

3. Equity

Increase in Company Equity amounted to Rp96.23 billion (141.42%) from Rp232.37 billion in December 31, 2012 to Rp328.60 billion in December 31, 2013, with increase in:

- Increase in Appropriated Retained Earnings

sebesar Rp57,32 miliar (147,80%).

- Kenaikan Saldo Laba Yang Belum Dicapangkan sebesar Rp37,68 miliar (155,87%).
- Kenaikan Saldo Laba Dari Pendapatan Komprehensif sebesar Rp1,23 miliar (100%).

amounted to Rp57.32 billion (147.80%).

- Increase in Unappropriated Retained Earnings amounted to Rp57.32 billion (147.80%).
- Increase in Retained Earnings from Comprehensive Income amounted to Rp1.23 billion (100%)

Analisa Laba Rugi

A. Pendapatan

- Total Realisasi Pendapatan tahun 2013 sebesar Rp555,20 miliar, atau Rp36,38 miliar (93,85%) di bawah target RKAP tahun 2013 yang sebesar Rp591,57 miliar, terutama disebabkan:
 - Tercapainya realisasi Pendapatan dari Jasa Klasifikasi, lebih tinggi Rp22,20 miliar (106,95%) dari target RKAP tahun 2013 yang terutama disebabkan oleh dampak kapal-kapal yang beroperasi di lingkungan migas yang baru masuk klas BKI dan pemberlakuan ketentuan wajib klas BKI sesuai dengan keputusan Kementerian Perhubungan No. KM.07 tahun 2013.
 - Tidak tercapainya realisasi Pendapatan dari Jasa Konsultansi dan Supervisi, lebih rendah Rp58,57 miliar (76,60%) dari target RKAP tahun 2013 yang disebabkan oleh belum adanya proyek yang nilainya besar dalam supervisi pembangunan kapal bangunan baru. Adanya kecenderungan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) memecah nilai pekerjaan menjadi proyek kecil membuat Perusahaan sulit memenangkan tender karena harus bersaing dengan kompetitor kategori kecil yang sangat banyak. Perusahaan acap kali tidak diundang dalam tender karena dikategorikan sebagai perusahaan besar.

- Total Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2013 sebesar Rp555,20 miliar, naik sebesar Rp136,02 miliar (132,45%) dari realisasi Pendapatan tahun 2012 sebesar Rp419,18 miliar, terutama disebabkan:
 - Peningkatan realisasi Pendapatan dari Jasa Klasifikasi sebesar Rp89,46 miliar (132,65%) dibandingkan periode tahun 2012 yang terutama disebabkan oleh adanya azas *cabotage* dimana perusahaan swasta minyak membeli kapal-kapal bekas sehingga pemilik kecenderungan masuk menjadi klas BKI.
 - Peningkatan realisasi Pendapatan dari Jasa Konsultansi dan Supervisi sebesar Rp46,56 miliar (132,08%) dibandingkan periode tahun 2012 yang disebabkan oleh adanya proyek yang nilainya besar dalam supervisi pembangunan kapal bangunan baru, di samping adanya beberapa pekerjaan di lingkungan migas yang sudah diperoleh tahun 2011 ditunda pelaksanaannya pada tahun 2012 sebagai dampak berlanjutnya krisis ekonomi Eropa dan Amerika.

Income Statement Analysis

A. Revenue

- Total Income realized in year 2013 amounted to Rp555.20 billion, or Rp36.38 billion (93.85%) below the target of 2013 RKAP of Rp591.57 billion, especially because of:
 - The achievement of Classification Service Revenue, which is Rp22.20 billion (106.95%) higher than the target of 2013 RKAP, primarily caused by the impact of ships operating in new oil and gas environment entering BKI Class and the enactment of BKI class mandatory provision in accordance with the decree of Ministry of Transportation No. KM.07 of 2013.
 - Revenue from Consultation and Supervision service was not achieved, which is Rp58.57 billion (76.60%) lower than the target of 2013 RKAP because of no high value project in supervision of new ship building. There is a tendency of Contractor of Cooperation Agreement (K3S) to split the work value into small projects, so it was hard for the Company to win the bid because it had to compete with many small category competitors. The Company is often not invited to the bidding because it is categorized as big company.
- Total Revenue Realization per December 31, 2013 amounted to Rp555.20 billion, increase Rp136.02 billion (132.45%) from Revenue in 2012 of Rp419.18 billion, especially because of:
 - Increase in Revenue from Classification Service amounted to Rp89.46 billion (132.65%) compare to year 2012 especially because of cabotage principle that private oil companies bought used ships so the owner tend to become BKI Class.
 - Increase in Revenue from Consultation and Supervision Service amounted to Rp46.56 billion (132.08%) compare to 2012 due to big value project of new ship building supervision, in addition there were some works in oil and gas environment obtained in year 2011 but the implementation was postponed to 2012 as the impact of continuous economic crisis in Europe and America.

B. Beban Usaha

- I. Realisasi Beban Usaha tahun 2013 sebesar Rp419,03 miliar, atau Rp35,88 miliar (92,11%) di bawah RKAP tahun 2013 yang sebesar Rp454,91 miliar, terutama disebabkan:
 - Realisasi Beban Jasa di atas RKAP tahun 2013 sebesar Rp651 juta (100,63%). Hal ini disebabkan antara lain karena melampauinya Beban Tenaga Kerja Proyek (132,68%), yang mana disebabkan adanya proyek *man power supply* yang sebelumnya tidak dianggarkan di RKAP 2013, serta Beban Asistensi Proyek (111,09%).
 - Realisasi Beban Pemasaran dan Kehumasan di bawah RKAP tahun 2013 sebesar Rp2,61 miliar (71,31%). Namun Beban Humas melampaui RKAP sebesar Rp681 juta (168,98%).
 - Realisasi Beban Administrasi dan Umum di bawah RKAP tahun 2013 sebesar Rp33,92 miliar (90,11%). Namun demikian terdapat beban yang melampaui anggarannya, antara lain Beban Audit (165,43%), Beban Pemeliharaan (103,60%) dan Beban Biaya Piutang (295,01%).
- II. Total Realisasi Beban Usaha naik sebesar Rp88,17 miliar (126,65%) dari realisasi tahun 2012 sebesar Rp330,87 miliar menjadi Rp419,03 miliar di tahun 2013, terutama disebabkan:
 - Kenaikan Beban Jasa sebesar Rp27,05 miliar (135,34%).
 - Kenaikan Beban Pemasaran dan Kehumasan sebesar Rp498 juta (108,30%).
 - Kenaikan Beban Administrasi dan Umum sebesar Rp60,62 miliar (124,41%).

C. Pendapatan dan Beban Di Luar Usaha

- I. Realisasi Pendapatan dan Beban Di Luar Usaha tahun 2013 sebesar Rp8,82 miliar, di bawah Rp7,22 miliar (549,88%) dari RKAP tahun 2013 sebesar Rp1,60 miliar, terutama disebabkan dampak dari peningkatan pendapatan di luar usaha, terutama berasal dari laba kurs sebagai akibat menguatnya nilai mata uang asing (USD dan SGD) terhadap Rupiah yaitu sebesar Rp8,07 miliar dan pendapatan bunga deposito sebesar Rp2,72 miliar.
- II. Jumlah Realisasi Pendapatan dan Beban Di Luar Usaha naik sebesar Rp2,67 miliar (143,48%) dari realisasi tahun 2012 sebesar negatif Rp6,15 miliar menjadi Rp8,82 miliar di tahun 2013, terutama disebabkan selisih kurs rugi, pengeluaran kas dan beban bank, beban denda, revisi pendapatan jasa klasifikasi serta konsultasi & supervisi, dan denda pajak kurang bayar.

B. Operating Expenses

- I. *Operating Expenses realization in year 2013 amounted to Rp419.03 billion, or Rp35.88 billion (92.11%) below RKAP 2013 of Rp454.91 billion, especially because of:*
 - *Service Expense realization is above 2013 RKAP amounted to Rp651 million (100.63%). This is due to, among others, the exceeding Project Labour Expense (132.68%), caused by man power supply project that was not budgeted in RKAP 2013, and Project Assistance Expense (111.09%).*
 - *Marketing and Public Relation Expenses realization is below RKAP 2013 amounted to Rp2.61 billion (71.31%). However, Public Relation Expenses exceed the RKAP amounted to Rp681 million (168.98%).*
 - *Administration and General Expenses realization is below RKAP 2013 amounted to Rp33.92 billion (90.11%). However there are expenses which exceed the budget, such as Audit Expenses (165.43%), Maintenance Expenses (103.60%), and Receivable Cost Expenses (295.01%).*
- II. *Total Operating Expense realization increase Rp88.17 billion from realization in 2012 of Rp330.87 billion to Rp419.03 in 2013, especially because of:*
 - *Increase in Service Expenses amounted to Rp27.05 billion (135.34%).*
 - *Increase in Marketing and Public Relation Expenses amounted to Rp498 million (108.30%).*
 - *Increase in Administration and General Expenses amounted to Rp60.62 (124.41%).*

C. Revenue and Expense Outside the Business

- I. *Revenue and Expense Outside the Business in 2013 amounted to Rp8.82 billion, Rp7.22 million lower than RKAP 2013 of Rp1.6 billion (549.88%), primarily due to the impact of the increase in revenues outside the business, mainly derived from profit of foreign exchange due to the strengthening of foreign currencies (USD and SGD) against Rupiah amounted to Rp8.07 billion and revenue from deposit interest of Rp2.72 billion.*
- II. *Total Revenue and Expense Outside the Business realization increase by Rp2.67 billion (143.48%) from realization in 2012 amounted to negative Rp6.15 billion to Rp8.82 billion in 2013, mainly due to foreign exchange loss rate, cash disbursement and bank charges, fines charges, revision of the classification as well as consultancy and supervision service revenue, and penalty for tax underpayment.*

D. Pajak Penghasilan

- I. Realisasi Pajak Penghasilan tahun 2013 sebesar negatif Rp39,87 miliar, di atas Rp6,68 miliar (120,14%) dari RKAP tahun 2013 sebesar Rp33,19 miliar, disebabkan oleh meningkatnya pajak badan yang cukup signifikan akibat lebih tingginya realisasi laba sebelum pajak tahun 2013 dengan laba sebelum pajak dalam RKAP 2013 yang kemudian berimbas pada kenaikan pajak badan.
- II. Jumlah Realisasi Pajak Penghasilan tahun 2013 naik sebesar Rp12,85 miliar (147,56%) dari realisasi tahun 2012 sebesar negatif Rp27,02 miliar menjadi negatif Rp39,87 miliar di tahun 2013, terutama disebabkan karena pencapaian kinerja Perusahaan selama tahun 2013 meningkat secara signifikan sehingga mendorong kenaikan laba perusahaan dan mengakibatkan pajak penghasilan meningkat.

Perbandingan Pencapaian dengan Target RKAP**A. Pendapatan**

Per 31 Desember 2013, Realisasi Pendapatan Perusahaan tercatat sebesar Rp555,20 miliar, di bawah Rp36,38 miliar atau mencapai 93,85% dibandingkan dengan RKAP tahun 2013 yang sebesar Rp591,57 miliar.

B. Laba

- **Laba Usaha**
Laba Usaha Perusahaan tercatat sebesar Rp136,17 miliar, di bawah sebesar Rp499 juta atau pencapaian 99,63% dibandingkan dengan RKAP tahun 2013 sebesar Rp136,66 miliar.
- **Laba Bersih**
Laba Bersih Setelah PPh Badan dari Perusahaan tercatat sebesar Rp105,12 miliar, di atas sebesar Rp33 juta atau pencapaian 100,03% dibandingkan dengan RKAP tahun 2013 sebesar Rp105,08 miliar.
- **Laba Komprehensif**
Laba Komprehensif Perusahaan tercatat sebesar Rp106,35 miliar, di atas sebesar Rp1,27 miliar atau pencapaian 101,21% dibandingkan dengan RKAP tahun 2013 sebesar Rp105,08 miliar.

D. Income Tax

- I. *Income Tax realization in year 2013 amounted to negative Rp39.87 billion, Rp6.68 billion higher than 2013 RKAP of Rp33.19 billion, due to the increase in corporate tax which is quite significant as result of profit before tax realized in 2013 higher than profit before tax in 2013 RKAP which then increase the corporate tax.*
- II. *Total Income Tax realization in year 2013 increase Rp12.85 billion (147.56%) from realization in 2012 of negative Rp27.02 billion to negative Rp39.87 billion in 2013, mainly because the Company's achievement in 2013 increase significantly thus increasing the company profit, which then result in the increase in income tax.*

Comparison between Achievement and RKAP Target**A. Revenue**

As of December 31, 2013, Company recorded Revenue Realization of Rp555.20 billion, Rp36.38 billion lower than RKAP 2013 of Rp591.57 billion, or 93.85% achievement.

B. Profit

- **Operating Profit**
Company recorded Operating Profit at Rp136.17 billion, achieved 99.63% or Rp499 million lower than RKAP 2013 amounted to Rp136.66 billion.
- **Net Profit**
Net Profit after Corporate Income Tax was recorded at Rp105.12 billion, achieved 100.03% or Rp33 million higher than RKAP 2013 amounted to Rp105.08 billion.
- **Comprehensive Profit**
Company recorded Comprehensive Profit at Rp106.35 billion, achieved 101.21% or Rp1.27 billion higher than RKAP 2013 amounted to Rp105.08 billion

Tabel Perbandingan Antara Target RKAP tahun 2013 dan Pencapaian atau Realisasi tahun 2013
Comparison Table Between 2013 RKAP Target and 2013 Achievement or Realization

(dalam juta Rupiah)
(in million Rupiah)

	RKAP	Realisasi Realization	%
Pendapatan Revenue	591.574	555.197	93,85
Laba / Profit			
Laba Usaha Operating Profit	136.664	136.165	99,63
Laba Bersih Setelah PPh Badan Net Profit after Corporate Income Tax	105.082	105.115	100,03
Laba Komprehensif Comprehensive Profit	105.082	106.349	101,21

Komponen Substansial, Pendapatan, dan Beban Lainnya
Dalam Tiga Tahun Pembukuan Terakhir

Substantial Component, Revenue, and Other Expenses
in the Last Three Fiscal Year

Laporan Laba Rugi
Income Statement

(dalam juta Rupiah)
(in million Rupiah)

Labarugi	2013	2012	2011	Income Statement
Pendapatan	555.197	419.176	334.085	Revenue
Beban Jasa	103.574	76.527	67.968	Service Expense
Labar Kotor	451.623	342.649	266.118	Gross profit
Beban Usaha	315.458	254.338	199.330	Operating Expense
Labar Usaha	136.165	88.312	66.788	Operating profit
Pendapatan/(Beban) Lain-lain - Bersih	8.820	6.147	1.555	Other Revenue/(Expense) - Nett
Labar/(Rugi) sebelum Pajak Penghasilan	144.985	94.458	68.343	Profit/(Loss) before Income Tax
Beban Pajak Penghasilan	(39.870)	(27.020)	(16.983)	Income Tax Expense
Labar Bersih Setelah Pajak	105.115	67.438	51.360	Net Profit after Tax
Pendapatan komprehensif lainnya	1.234	-	-	Other comprehensive revenue
Labar (Rugi) Komprehensif	106.349	67.438	51.360	Comprehensive Profit (Loss)

Laporan Arus Kas
Cash Flow Statement

(dalam juta Rupiah)
(in million Rupiah)

Uraian	2013	2012	2011	Description
Arus kas diperoleh dari aktivitas operasi	68.654	71.207	43.478	Cash flow from operating activity
Arus kas dipergunakan untuk aktivitas investasi	(16.636)	(43.511)	(19.629)	Cash flow for investment activity
Arus kas dipergunakan untuk pendanaan	(13.505)	(9.758)	(8.694)	Cash flow for financing
Kenaikan Kas & Setara Kas	38.513	17.938	15.155	Increase in Cash and Cash Equivalent
Kas dan Setara Kas 1 Januari 2013	68.423	50.485	35.330	Cash and Cash Equivalent Januari 1, 2013
Kas dan Setara Kas 31 Desember 2013	106.936	68.423	50.485	Cash and Cash Equivalent December 31, 2013

Dari tabel di atas terlihat bahwa sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 posisi kas dan setara kas Perusahaan menunjukkan tren yang relatif meningkat.

The table above shows that from 2011 to 2013 Company's cash and cash equivalent showed a relatively increasing trend.

Perubahan Ekuitas
Changes in Equity

(dalam juta Rupiah)
(in million Rupiah)

Uraian	2013	2012	2011	Description
Modal Disetor	45.000	45.000	45.000	Modal Disetor
Tambahan Modal Disetor	-	-	-	Tambahan Modal Disetor
Selisih Revaluasi	-	-	-	Selisih Revaluasi
Cadangan Modal	177.249	119.927	78.325	Cadangan Modal
Jumlah Labar	105.115	67.438	51.360	Jumlah Labar
Selisih Kurs Penjabaran Laporan Keuangan Entitas Luar Negeri	-	-	1.234	Selisih Kurs Penjabaran Laporan Keuangan Entitas Luar Negeri
Jumlah				Total

Dari tabel di atas terlihat bahwa sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 jumlah ekuitas Perusahaan menunjukkan peningkatan. Hal ini sejalan dengan trend peningkatan laba dan sebagian besar dicadangkan untuk menambah modal.

The table above shows that since 2011 until 2013 there is an increase in the Company's equity. This is in line with the increase in profit and mostly was reserved for capital addition.

Rasio-rasio Keuangan Teraudit
Financial Ratio

Rasio Keuangan / Financial Ratio		2013	2012	2011
Likuiditas / Liquidity				
Rasio Lancar Current Ratio	%	436,73	308,94	293,33
Rasio Cepat Acid Test Ratio	%	436,73	308,94	293,33
Rasio Kas Cash Ratio	%	170,16	113,65	97,30
Rasio Modal Kerja terhadap Total Aset Working Capital to Total Asset Ratio	%	52,19	41,36	43,13
Solvabilitas / Solvency				
Rasio Hutang terhadap Ekuitas Total Debt to Equity Ratio	%	23,35	30,91	32,98
Rasio Beban Operasi Operating Ratio	%	75,47	78,93	80,01
Rasio Marjin Laba Bersih Net Profit Margin (NPM)	%	26,11	22,53	15,37
Rasio Imbalan Investasi Return on Investment (ROI)	%	38,19	37,88	36,04
Rasio Imbalan Kepada Pemegang Saham Return on Equity (ROE)	%	32,11	40,89	41,65
Aktivitas / Activities				
Perputaran Total Aset Total Assets Turn Over (TATO)	kali times	1,37	1,61	1,52
Perputaran Piutang Receivable Turn Over	kali times	5,01	5,14	4,73
Jangka Waktu Penagihan Collection Period (CP)	hari day	104	96	89
Rasio Total Modal Sendiri terhadap Total Aset Equity To Total Assets (ETTA)	%	81,04	76,39	75,20

Dari rasio-rasio keuangan di atas terlihat bahwa likuiditas Perusahaan tahun 2013 meningkat dibandingkan tahun 2012, hal ini disebabkan Perusahaan melakukan efisiensi dalam menggunakan dana terutama terhadap biaya operasional.

Financial ratio above shows that Company's liquidity in 2013 increase compared to 2012, this is because Company's efficiency in using funds especially in operational cost.

Likuiditas

Liquidity

Tabel Rasio Likuiditas untuk tahun 2011 - 2013
Liquidity Ratio Table for the year 2011 - 2013

Rasio Likuiditas / Liquidity Ratio		2013	2012	2011
Rasio Lancar Current Ratio	%	436,73	308,94	293,33
Rasio Cepat Acid Test Ratio	%	436,73	308,94	293,33
Rasio Kas Cash Ratio	%	170,16	113,65	97,30
Rasio Modal Kerja terhadap Total Aset Working Capital to Total Asset Ratio	%	52,19	41,36	43,13

Semua rasio likuiditas Perusahaan mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Tingkat likuiditas Perusahaan tahun 2013 dilihat dari *current ratio* mengalami peningkatan sebesar 41,36% dibandingkan dengan

All Company's liquidity ratio increased compared to previous year. Company's liquidity level in 2013 viewed from current ratio has increased by 41.36% compared to 2012, this increase is mainly because of Company's

tahun 2012, peningkatan ini terutama disebabkan kondisi keuangan Perusahaan cukup aman dengan hutang-hutang jangka pendek yang dijamin ± lima kali oleh aset lancar Perusahaan jika dibandingkan tahun 2012.

Acid test ratio mengalami peningkatan sebesar 41,36% dibandingkan dengan tahun 2012, terutama disebabkan current ratio Perusahaan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap modal Perusahaan ke depan. Hal ini mengindikasikan bahwa modal Perusahaan akan tumbuh lebih tinggi jika kemampuan Perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya semakin tinggi. Cash ratio juga mengalami peningkatan sebesar 49,72% dibandingkan dengan tahun 2012. Peningkatan ini terutama disebabkan .cash ratio mencapai 170,16% dengan saldo kas dan setara kas mencapai Rp. 106.936 juta masih dapat membiayai lebih dari 3 bulan operasional perusahaan.

Sementara *working capital to total asset ratio* juga mengalami kenaikan sebesar 26,18% dibandingkan tahun 2012. Kenaikan ini disebabkan *cash ratio* Perusahaan mencapai 170,16% dengan saldo kas dan setara kas mencapai lebih dari 3 bulan operasional Perusahaan jika dibandingkan tahun 2012.

Kondisi finansial Perusahaan cukup aman dengan hutang jangka pendek Perusahaan dijamin lebih dari empat kali oleh aset Perusahaan dan masih dapat membiayai operasional Perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi likuiditas Perusahaan secara umum relatif baik.

financial condition relatively secured with short term debt guaranteed by ± five times by Company's current assets compared to 2012.

Acid test ratio increased by 41.36% compared to 2012, mainly because the Company's current ratio has positive and significant influence to Company's capital in the future. This indicates that Company's capital will grow higher if Company's ability to fulfill its Current Liabilities is getting higher. Cash Ratio also increased by 49.72% compared to 2012. The increase is mainly due to cash ratio reached 170.16% with cash and cash equivalent balance reached Rp106.936 million which can fund the company operations for more than 3 months.

While working capital to total asset ratio also increased by 26.18% compared to 2012. The increase is mainly because Company's cash ratio reached 170.16% with cash and cash equivalent balance reached Rp106.936 million which can fund the company operations for more than 3 months compared to 2012.

Company's financial condition relatively secured with short term debt guaranteed by more than four times of Company's assets and still can fund the company operations. This shows that Company's liquidity condition in general is relatively good.

Kemampuan Membayar Utang (Solvabilitas)

Tabel Rasio Solvabilitas untuk tahun 2011 - 2013
Company Solvency Ratio Table for year 2011 - 2013

Rasio Solvabilitas / Solvency Ratio		2013	2012	2011
Rasio Hutang terhadap Aset <i>Total Debt to Assets Ratio</i>	%	18,96	23,61	24,80
Rasio Hutang terhadap Ekuitas <i>Total Debt to Equity Ratio</i>	%	23,39	30,91	32,98

Solvabilitas Perusahaan tahun 2013 secara umum meningkat dibandingkan tahun 2012 yang menunjukkan bahwa kemampuan menghasilkan laba yang semakin meningkat.

The Ability To Pay Debt (Solvency)

In general Company's Solvency for year 2013 increase compared to 2012 which shows that the ability to earn profit is improved.

Tingkat Kolektabilitas Piutang

Tabel Perbandingan Kolektibilitas Piutang untuk tahun 2011 - 2013
Collectability of Account Receivable Comparison Table for year 2011 - 2013

(dalam hari / in days)	2013	2012	2011
Collection Period	104	96	89

Kemampuan Perusahaan dalam menagih piutang di tahun 2013 menurun dibandingkan tahun 2012. Hal ini terjadi karena perlunya waktu yang cukup lama untuk penerbitan

Collectability Level Of Account Receivable

Company's ability to collect account receivable in 2013 decrease compared to 2012. This is happened because it takes time to issue certificate of Oil and Gas and

sertifikasi Migas dan Depnaker dalam pekerjaan konsultansi dan supervisi, dimana penerbitan sertifikat tersebut akan digunakan oleh beberapa perusahaan pelat merah dalam melakukan pelunasan piutang kepada Perusahaan. Selain itu, banyaknya tagihan yang diterbitkan pada akhir tahun mempengaruhi lambatnya penagihan.

Struktur Modal Dan Kebijakan Manajemen Atas Permodalan Tersebut

Selama tahun 2013, Perusahaan tidak memiliki Struktur Modal dan Kebijakan Manajemen Atas Struktur Modal yang berubah signifikan bagi Perusahaan.

Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Akuisisi, Atau Restrukturisasi Utang/ Modal

Investasi

Perbandingan investasi antara realisasi pencapaian dan RKAP tahun 2013 adalah sebagai berikut:

Ministry of Labour for consultation and supervision jobs, the issued certificate will be used by some SOE to make the payment of account receivable to the Company. Moreover, there are many invoices issued by end of year affecting the collection period.

Capital Structure And Management Policy For The Capital Structure

In 2013, there are no significant changes in Capital Structure and Management Policy for the Capital Structure.

Material Information On Investment, Expansion, Divestment, Acquisition, Or Debt/Capital Restructuring

Investment

Comparison between investment realization achievement and RKAP 2013 as follow:

Tabel Investasi Komparatif Antara Realisasi dan RKAP Tahun 2013
Comparative Investment Table Between Realization and RKAP 2013

(dalam juta Rupiah)
(in million Rupiah)

Uraian Description	2013			
	RKAP RKAP	Realisasi Realization	Variance Variance	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
Tanah & Bangunan / Land and Building	36.460	1.340	(35.120)	(96,32)
Kendaraan Bermotor / Vehicle	123	561	438	356.10
Inventaris Golongan I / Inventory Group I	16.878	11.775	(5.103)	(30,23)
Inventaris Golongan II / Inventory Group II	1.005	370	(636)	(63,18)
Inventaris Golongan III / Inventory Group III	4.906	2.482	(2.424)	(49,41)
Aset Dalam Proses / Assets in-Process	-	5.549	5.549	-
Jumlah / Total	59.372	22.077	(37.295)	(62,82)

Realisasi investasi tahun 2013 sebesar Rp22,08 miliar atau 62,82% di bawah RKAP sebesar Rp59,37 miliar. Hal ini disebabkan antara lain karena belum terealisirnya pembelian tanah (gedung) untuk pembangunan kantor di Samarinda yang dianggarkan sebesar Rp4,5 miliar, pembangunan/pembelian kantor di Singapura yang dianggarkan sebesar Rp15 miliar, serta pengadaan alat laboratorium yang baru terealisasi sebesar 50,59% dari anggarannya sebesar Rp4,91 miliar.

Selisih realisasi tanah dan bangunan dengan yang terdapat di dalam laporan keuangan sebesar Rp43,07 miliar, merupakan reklasifikasi dari aset dalam proses yang telah selesai dan diakui sebagai tanah dan bangunan.

Realization of investment for year 2013 amounted to Rp22.08 billion or 62.82% lower than RKAP amounted to Rp59.37 billion. This is due partly because of the realization of the purchase of land (building) for office building in Samarinda which is budgeted at Rp4.5 billion, purchase/construction of office in Singapore which is budgeted at Rp15 billion, and procurement of new laboratory equipment which is only realized 50.59% from the budget of Rp4.91 billion.

The difference between land and building realization to the financial statement is Rp43.07 billion, which is a reclassification of assets in-process which has been completed and recognized as land and building.

Sumber Modal dan Pendanaan

Dalam melaksanakan investasi di tahun 2013, manajemen Perusahaan menggunakan pembiayaan yang bersumber dari dana internal yang berasal dari cadangan atas pembagian laba perusahaan tahun buku 2012 dan biaya penyusutan tahun 2012. Investasi diarahkan pada upaya untuk meningkatkan produktivitas Perusahaan.

Source of Capital and Fund

In making investment in 2013, Company's management use internal fund for financing, which derived from company's profit-sharing provision of the financial year 2012 and depreciation cost of the year 2012. Investment is focused to improve Company's productivity.

Tingkat Kesehatan Perusahaan

Dasar penilaian bobot kinerja Perusahaan yang digunakan untuk menilai tingkat kesehatan dan kinerja adalah Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) RI Nomor Kep-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara. Tingkat kesehatan Perusahaan selama dua tahun terakhir (2012 – 2013) adalah sebagai berikut:

Company's Soundness Level

To assess the level of soundness and performance, the Company's performance is appraised based on the SOE Ministerial Decree No. Kep-100/MBU/2002 dated June 4, 2002 on Rating System of State Owned Enterprises. Company's Soundness Level for last two years (2012 – 2013) is as follow:

Uraian	Skor / Score		Description
	2013	2012	
Aspek Keuangan	66,00	66,50	Financial Aspect
Aspek Operasional	15,00	15,00	Operational Aspect
Aspek Administrasi	15,00	15,00	Administration Aspect
Jumlah Skor	96,00	96,50	Total Score
Kondisi Perusahaan	Sehat "AAA" Healthy "AAA"	Sehat "AAA" Healthy "AAA"	Condition of the Company

Pencapaian Key Performance Indicator Tahun 2013

Dasar pencapaian Key Performance Indicator (KPI) tahun 2013 ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan Kementerian Negara BUMN selaku Pemegang Saham.

The achievement of Key Performance Indicator (KPI) for year 2013

The achievement of Key Performance Indicator (KPI) for year 2013 determined by agreement between Board of Commissioners, Board of Directors, and Ministry of SOE as Shareholders.

Tabel Key Performance Indicator (KPI) Tahun 2013
Key Performance Indicator (KPI) Table for Year 2013

No.	Indikator Indicator	Formula Formula	Satuan Unit	Bobot Weight	Target Target	Realisasi Realization	Skor Score
A Perspektif Keuangan dan Pasar				Financial and Market Perspective			
1	Pertumbuhan Pendapatan Usaha Revenue Growth	Pendapatan usaha 2013 Pendapatan usaha 2012 Revenue 2013 Revenue 2012	%	4	Min. 143,59	132,45	3,38
2	Net Profit Margin Net Profit Margin	Laba sebelum Pajak 2013 Pendapatan usaha 2013 Profit before Tax 2013 Revenue 2013	%	4	Min. 23,37	26,11	5,17

Tabel Key Performance Indicator (KPI) Tahun 2013
Key Performance Indicator (KPI) Table for Year 2013

No.	Indikator Indicator	Formula Formula	Satuan Unit	Bobot Weight	Target Target	Realisasi Realization	Skor Score
3	Collecting Period	Piutang usaha x 365 hari Pendapatan <i>Account Receivable x 365 hari Revenue</i>	hari day	4	Maks. 66	104	1,41
4	Operating Ratio (BOPO)	Biaya Usaha Pendapatan Usaha <i>Operating Cost Revenue</i>	%	4	Maks. 76,90	75,47	3,85
5	ROE	Laba setelah Pajak Ekuitas <i>Profit after Tax Equity</i>	%	4	Min. 32,15	32,11	3,99
Sub Total				20			17,80
B Perspektif Fokus Pelanggan					<i>Customer Focus Perspective</i>		
1	Index Kepuasan Pelanggan <i>Customer Satisfaction Index</i>	Jumlah hasil customer survey <i>Number of customer survey</i>	%	12	Min. 80	123,08	24,00
2	Penanganan Keluhan Pelanggan <i>Handling Customer Complaints</i>	Jumlah Keluhan yang telah diselesaikan Jumlah Keluhan yang masuk <i>Number of Complaint that have been settled Number of Incoming Complaint</i>	%	12	Min. 90	82	9,87
Sub Total				24			33,87
C Perspektif Produk dan Proses					<i>Product and Process Perspective</i>		
1	Tindak lanjut Internal Control (internal control & QA) <i>Follow up of Internal Control (internal control & QA)</i>	Tindak lanjut selesai Jumlah temuan <i>Follow up completed Number of finding</i>	%	3	Min. 90	65,41	1,47
2	Kecepatan Penerbitan Sertifikat <i>Certificate Issuance Speed</i>		hari day	3	Maks. 45	49	2,51
3	Kesesuaian Realisasi & Anggaran CAPEX <i>Actual Suitability and CAPEX Budget</i>	Realisasi 2013 Anggaran 2013 <i>Actual 2013 Budget 2013</i>	%	4	Min. 70	37,18	0,98
4	Penyelesaian Dokumen IACS-QSCS Level 2 & 3 <i>Settlement Document IACS-QSCS Level 2 & 3</i>		bulan month	4	Maks. 12	14	2,86
5	Pengembangan Rules/ Regulation <i>Development of Rules/ Regulation</i>		Rules Rules	4	Min. 7	15	8,00
Sub Total				18			15,82

Tabel Key Performance Indicator (KPI) Tahun 2013
Key Performance Indicator (KPI) Table for Year 2013

No.	Indikator Indicator	Formula Formula	Satuan Unit	Bobot Weight	Target Target	Realisasi Realization	Skor Score
D Perspektif Fokus Tenaga Kerja				Manpower Focus Perspective			
1	Produktivitas Tenaga Kerja Manpower Productivity	Pendapatan Jumlah pegawai tetap + PKWT>1 tahun Revenue Number of Full time employees + PKWT>1 tahun	Juta/ Pegawai million/ employee	6	Min. 788	746,23	5,36
2	Komposisi Pegawai Teknik & Non Teknik Composition of Technical and Non-technical Employees	Jumlah Pegawai Teknik Total Pegawai Certificate of Employee Competence	%	7	Min. 65	56,10	5,06
3	Jumlah Peningkatan Kompetensi Total Increase of Competence	Sertifikat Kompetensi Pegawai Certificate of Employee Competence	Orang Person	7	106	154	13,67
Sub Total				20			24,10
E Perspektif Kepemimpinan				Leadership Perspective			
1	Skor GCG GCG Score	Sesuai penilaian independen berdasarkan penilaian BUMN As per independent assessment based on SOE assessment	Skor Score	4	Min. 83	87,67	4,56
2	Terlaksananya Penilaian Mandiri terhadap skor KPKU Implementation of Self Assessment to KPKU scores		bulan month	4	September September	Desember *) December *)	4,00
3	Pemenuhan Portal-Portal BUMN Fulfillment of SOE Portals	Pemenuhan pengisian portal-portal BUMN Fulfillment of SOE portals		4	Terpenuhi Fulfilled	Terpenuhi Fulfilled	4,00
4	PK atau BL PK or BL	Tingkat penyaluran dan tingkat pengembalian sesuai SK 101/MBU/2012 Distribution rate and return rate as per SK101/MBU/2012	Terpenuhi Fulfilled	3	100%	35% **)	3,00
5	Keberhasilan Pencapaian Kinerja cabang/unit produksi Branch/production unit performance achievement	Target kinerja cabang tercapai minimal 100% Branch performance targets achieved at least 100%	Unit Produksi Production Unit	3	7	11	6,00
Sub Total				18			21,56
Total				100			113,15

*) Realisasi KPKU dilaksanakan pada bulan Desember berdasarkan Surat Forum Ekselen BUMN No. 2-006/ST/FEB/XII/2013. Namun secara internal, Evaluasi/Penilaian Mandiri terhadap skor KPKU telah siap pada bulan September 2013.

**) Berdasarkan surat Kementerian BUMN No. S-723/MBU/2013, skor atas penyaluran PKBL pada tahun 2013 adalah 3 (tiga), meskipun realisasi penyaluran PKBL tidak optimal.

*) Realization KPKU held in December based on SOE Excellence Forum Letter No. 2-006/ST/FEB/XII/2013. But internally, Self evaluation/assessment to KPKU Score was ready in September 2013.

**) Based on the letter of the Ministry of SOE No. S-723/MBU/2013, score of PKBL distribution in 2013 is 3 (three), although the actual distribution of PKBL is not optimal.

Pembagian Dividen

Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan pada tanggal 4 Januari 2013 dan Keputusan RUPS No. RIS-01/D4.MBU/2013 tanggal 25 April 2013 Pemegang Saham telah menetapkan penggunaan laba bersih tahun 2012 dan 2011 sebagai berikut:

Tabel Pembagian Dividen Perusahaan Tahun 2011-2012
Company's Dividend Distribution Table Year 2011 – 2012

Uraian	Pembagian laba tahun buku 2012	Pembagian laba tahun buku 2011	Description
Pembagian dividen	10.115.732.970	7.704.022.000	Dividend Distribution
Penyisihan dana kemitraan dan bina lingkungan	-	2.054.406.000	Provision for Partnership and Community Development Program Funds
Penyisihan cadangan umum	57.322.486.832	41.601.716.521	Provision for general reserves
Jumlah	67.438.219.802	51.360.144.521	Total

Saldo cadangan umum per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

General reserves balance as per December 31, 2013 and 2012 are as follow:

Tabel Pembagian Saldo Cadangan Umum per 31 Desember 2012 dan 2013
General Reserves Balance Distribution Table per December 31, 2012 and 2013

Uraian	Pembagian laba tahun buku 2012 <i>Profit distribution of fiscal year 2012</i>	Pembagian laba tahun buku 2011 <i>Profit distribution of fiscal year 2011</i>	Description
Saldo awal	119.927.106.309	78.325.389.788	Opening Balance
Pemindahan dari laba	57.322.486.832	41.601.716.521	Transfer of profits
Saldo akhir	177.249.593.141	119.927.106.309	Closing Balance

Pemegang Saham akan melakukan persetujuan penetapan penggunaan laba bersih untuk tahun buku 2013 yang nilainya akan ditetapkan kemudian dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Shareholders will decide and set the use of net profit for fiscal year 2013, the amount will be stipulated later in General Meeting of Share Holders.

Kebijakan Akuntansi

Sebagaimana Catatan atas Laporan Keuangan No. 3 tentang Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan dalam Laporan Auditor Independen Tahun Buku 2013 oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Husni, Mucharam & Rasidi.

Accounting Policy

As Notes of the Financial Statements No. 3 on Summary of Significant Accounting Policies in Independent Auditor's Report for Fiscal Year 2013 by the Public Accountant Office Husni, Mucharam & Rasidi.

Perjanjian Signifikan

Perusahaan memperoleh fasilitas garansi bank dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kantor Pusat berdasarkan Perjanjian Pemberian Fasilitas Garansi Bank dengan No. KP-COD/011/PGB/2004 tanggal 23 Juni 2004. Perjanjian ini telah diperbaharui beberapa kali dan terakhir dengan *Addendum X* tentang Perpanjangan Jangka Waktu dan Peningkatan *Plafond* Fasilitas Garansi Bank sesuai surat Bank Mandiri No. TOP.CRO/CLA.275/ADD/2013 tanggal 21 Juni 2013 dan mengacu pada surat Bank Mandiri No. IBG.IB.1/SPPK/D04.002/2013 tanggal 20 Juni 2013.

Significant Agreements

The Company obtained a bank guarantee facility from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Head Office based of Bank Guarantee Facility Agreement No. KP-COD/011/PGB/2004 dated June 23, 2004. This agreement has been renewed several times and the latest with Addendum X about Term Extension and Increase in Limit of Bank Guarantee Facility as of Letter of Bank Mandiri No. TOP.CRO/CLA.275/ADD/2013 dated 21 June 2013 and referred to letter of Bank Mandiri No. IBG.IB.1/SPPK/D04.002/2013 dated 20 June 2013. This addendum is valid for one year

Addendum ini berlaku selama satu tahun sampai dengan tanggal 23 Juni 2014. Dengan perjanjian ini Perusahaan tidak perlu mengeluarkan uang tunai untuk penerbitan Garansi Bank. Besarnya *plafond* sebesar Rp15 miliar dari *plafond* sebelumnya sebesar Rp8 miliar.

Fasilitas ini dijamin oleh piutang usaha dan sebidang tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat No. 2131/Kebon Bawang yang terletak di Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok. Bidang tanah dan bangunan ini telah dibebani dengan Hak Tanggungan dengan nilai total sebesar Rp24 miliar.

Fasilitas ini digunakan Perusahaan dengan tujuan antara lain: penerbitan *tender bond* (untuk mengikuti tender), *advance payment bond*, *performance bond* (atas dasar kontrak kerja atau SPK), *retensi bond* (surat penegasan dari *bowheer* bahwa proyek telah memasuki masa retensi).

Jumlah fasilitas Bank Garansi yang dipergunakan sampai dengan 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp10.883.254.645,-.

Informasi Transaksi Dengan Pihak-Pihak Yang Berelasi

Pengungkapan pihak-pihak yang berelasi berdasarkan PSAK 7 (Revisi 2010) menyatakan bahwa karyawan kunci adalah termasuk pihak-pihak yang berelasi, pada paragraph 16 mensyaratkan pengungkapan Kompensasi terhadap manajemen kunci. Berdasarkan definisi pada paragraf 9 menyatakan sebagai berikut, "Personil manajemen kunci adalah orang-orang yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan aktivitas entitas, secara langsung atau tidak langsung, termasuk direktur dan komisaris (baik eksekutif maupun bukan eksekutif) dari entitas".

Dengan ketaatan kepada PSAK tersebut, pengungkapan kompensasi terhadap manajemen kunci menjadi kewajiban untuk dipaparkan sebagaimana disajikan pada bagian organ tata kelola Perusahaan sub-bab Dewan Komisaris dan Direksi dalam laporan tahunan tahun buku 2013 ini.

Definisi terkait lainnya adalah, "Entitas yang berelasi dengan pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi secara signifikan oleh pemerintah". Pengungkapan transaksi dengan BUMN berupa rekening bank dan deposito, piutang dan utang kepada BUMN dapat dilihat pada tabel pihak berelasi di bawah ini.

until June 23, 2014. With this agreement the Company does not need to spend the cash for the issuance of Bank Guarantee. The current limit is Rp15 billion while the previous was Rp8 billion.

The facility is secured by accounts receivable and a plot of land and building with proof of ownership in the form of Certificate No. 2131/Kebon Bawang which is located in Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok. This plot of land and building has been encumbered with Mortgage with total value of Rp24 billion.

This facility is used for the Company's objectives including: issuance of tender bond (to join biddings), advance payment bond, performance bond (on the basis of employment contract), retention bond (letter of confirmation from bowheer that project has entered retention period).

Total utilization of Bank Guarantee facility until December 31, 2013 is Rp10,883,254,645,-

Information of Transaction With Related Parties

Disclosure of related parties based on PSAK 7 (Revised 2010) states that key employee is included as related parties, as paragraph 16 requires disclosure of the compensation of key management. Based on definition in paragraph 9 stated as follow: "Key management personnels are persons with authority and responsibility to plan, lead and control the activities of entity, directly or indirectly, including director and commissioner (both executive and non-excecutive) of the entity".

With the adherence to the PSAK, the disclosure of compensation to key management become mandatory to be presented as in the organs of corporate governance sub-chapter of the Board of Commissioners and Board of Directors in the annual report of fiscal year 2013.

Other related definition is, "Entity related to government is entity controlled, jointly controlled, or significantly influenced by the government". Disclosure of transaction with SOE is in form of bank account and term deposit, account receivable and account payable to SOE can be seen in related parties table below.

Tabel Pihak Berelasi
Table of Related Parties

Pihak yang Bertransaksi Transaction Parties	Sifat Hubungan Nature of Relationship	Transaksi yang Signifikan Significant Transaction
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	Di bawah Pengendalian Bersama <i>Under common control</i>	Bank penyimpan kas/rekening dan deposito berjangka, pemberian fasilitas Bank Garansi <i>Cash/account and term deposit/depository bank, provision of Bank Guarantee</i>
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	Di bawah Pengendalian Bersama <i>Under common control</i>	Bank penyimpan kas dan deposito berjangka <i>Cash and term deposit/depository bank</i>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	Di bawah Pengendalian Bersama <i>Under common control</i>	Bank penyimpan kas dan deposito berjangka <i>Cash and term deposit/depository bank</i>
PT Bank Jabar Banten Tbk.	Di bawah Pengendalian Bersama <i>Under common control</i>	Bank penyimpan kas dan deposito berjangka <i>Cash and term deposit/depository bank</i>
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (SBU Syariah)	Di bawah Pengendalian Bersama <i>Under common control</i>	Bank penyimpan deposito berjangka <i>Term deposit/depository bank</i>
PT Bank Syariah Mandiri	Di bawah Pengendalian Bersama <i>Under common control</i>	Bank penyimpan deposito berjangka <i>Term deposit/depository bank</i>
PT Bank BRISyariah	Di bawah Pengendalian Bersama <i>Under common control</i>	Bank penyimpan deposito berjangka <i>Term deposit/depository bank</i>
Koperasi BKI	Entitas afiliasi <i>Affiliated Entities</i>	Vendor <i>Vendor</i>

Transaksi antar pihak yang berelasi didasarkan pada kesepakatan atau perjanjian antar pihak yang pada umumnya mengacu kepada harga pasar dengan margin keuntungan tertentu.

Transaction between related parties based on deal or agreement between the parties which generally refer to market price with certain profit margin.

Informasi Keuangan Yang Mengandung Kejadian Yang Bersifat Luar Biasa Dan Jarang Terjadi

Selama tahun 2013, Perusahaan tidak memiliki informasi keuangan yang mengandung kejadian yang bersifat luar biasa dan jarang terjadi yang penting untuk diketahui oleh masyarakat luas.

Financial Information Containing Extraordinary And Rareevent

In 2013, Company did not have financial information containing extraordinary and rare event to be known by the public.

Peristiwa Setelah Tanggal Neraca

Sampai dengan laporan keuangan ini diterbitkan, tidak terdapat peristiwa tanggal neraca yang dapat mempengaruhi laporan keuangan secara signifikan.

Event After Balance Sheet Date

Until this annual report is published, there is no event after balance sheet date that may significantly affect the financial statements.

Perubahan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Perusahaan

Selama tahun 2013 Perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perubahan peraturan perundang-undangan yang harus diketahui publik.

Amendment Of Laws And Regulationswhich Significantly Affect The Company

In 2013, there was no amendment of laws and regulations that significantly affect the Company that should be known by the public.



Prospek Usaha Tahun 2014

Business Outlook 2014

Memasuki tahun 2014, Perusahaan optimis untuk dapat tumbuh melebihi pencapaian kinerja tahun 2013. Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas pertumbuhan tahun 2013, situasi keamanan dan perekonomian nasional pasca Pemilihan Umum (Pemilu) yang stabil, harga BBM dan *lifting* gas yang tidak mengalami gejolak, serta tidak adanya perubahan kebijakan pemerintah di sektor migas yang berpengaruh terhadap penugasan Perusahaan sebagai Badan Klasifikasi, Perusahaan percaya untuk dapat melakukan aktivitas usaha sesuai dengan harapan para pemegang saham.

Perusahaan memproyeksikan RKAP tahun 2014 dengan pencapaian pertumbuhan penerimaan klas ± 15% dari kapal register Perusahaan sebagai Badan Klasifikasi. Pertumbuhan pendapatan bersih untuk tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp754,24 miliar atau naik 131,68% dari taksiran realisasi tahun 2013, terdiri dari bidang klasifikasi Rp473,49 miliar naik 127,23 % dan bidang konsultasi & supervisi sebesar Rp280,75 miliar atau naik 139,93%. Di samping itu, beban Perusahaan terkait SDM diproyeksikan melalui kenaikan gaji pegawai rata-rata 10%, bonus dibebankan pada biaya usaha Rp28,75 miliar, biaya balas jasa Purna Tugas 60% dari THP, dan beban riset dan pengembangan serta diklat dalam rangka menuju QSCS-IACS.

Untuk mencapai RKAP tahun 2014, Perusahaan menyelaraskan strategi pada beberapa pertimbangan, diantaranya:

1. Misi yang diemban di bidang klasifikasi adalah tetap mengutamakan aspek keselamatan. sehingga target pertumbuhan pendapatan diselaraskan dengan rencana dan upaya Perusahaan mensejajarkan kualitas layanan setara dengan badan klasifikasi anggota IACS, dalam rangka pemenuhan terhadap IACS-QSCS Requirement. Hal ini untuk meningkatkan peran Perusahaan sebagai Badan Klasifikasi yang memiliki misi aspek keselamatan yang tidak semata-mata mengejar aspek komersial/bisnis dan dalam upaya meningkatkan reputasi Perusahaan dimata para *stakeholder*.
2. Efektifitas Keputusan Menhub No. PM.07 tahun 2013 untuk registrasi kapal bendera Indonesia yang beroperasi dalam perairan domestik.
3. Diterapkannya penyesuaian tarif klasifikasi per Januari 2014.
4. Terlaksananya restrukturisasi organisasi dengan memperkuat aspek pemasaran dalam rangka intensifikasi penguasaan pasar.
5. Peningkatan pangsa pasar pekerjaan inspeksi di lingkungan Migas, GSDM dan Depnaker.
6. Peningkatan pekerjaan pengujian DT dan NDT serta dikembangkannya Laboratorium di Balikpapan.
7. Peningkatan pekerjaan inspeksi dan supervisi marine dan optimalisasi kegiatan turunan dari klasifikasi serta jasa pelatihan. dan
8. Pekerjaan jasa survei *underwater* yang merupakan pengembangan jasa bagi Perusahaan.

Entering 2014, the Company is optimistic to be able to grow beyond the achievement of performance in 2013. With the assumption of Indonesian economic growth to be above the growth in 2013, the stable national security and economy situation after General Election, fuel and gas lifting price not experiencing a turmoil, also the absence of changes in government policy in the oil and gas sector that impacts the assignment of the Company as a Classification Board, the Company is confident to be able to perform business activities in accordance with the shareholders' expectations.

The 2014 RKAP (Work Plan and Budget) is projected based on the achievement of ± 15% revenue growth from registered ships of the Company as a Classification Board. Net income growth for 2014 is budgeted at Rp754.24 billion or increased by 131.68% from the estimated realization in 2013, consisting of classification field Rp473.49 billion (increase by 127.23%) and consultancy and supervision field Rp280.75 billion (increase by 139.93%). In addition, the Company's expenses related to human resources are projected through employee salary increase by an average of 10%, bonus charged to business costs Rp28.75 billion, retirement remuneration costs at 60% of THP, and the expenses of research and development and training for QSCS-IACS.

To achieve the 2014 RKAP, the company aligns its strategy with several considerations, including:

1. *The mission in classification field is to prioritize safety aspects so that the revenue growth target is aligned with the Company's plans and efforts to align its service quality with other classification boards of IACS, in order to fulfill IACS-QSCS Requirement. This is to enhance the Company's role as a Classification Board, whose mission is the safety aspect and not merely pursue aspects of commercial / business and in an effort to improve the company's reputation before the stakeholders.*
2. *The effectiveness of Minister of Transportation Decree No. PM.07 of 2013 to register the Indonesian flagged ships operating in domestic waters.*
3. *The implementation of classification rates adjustment as of January 2014.*
4. *Implementation of organizational restructuring by strengthening the marketing aspect to intensify market domination.*
5. *Increased market share in the oil and gas inspection work, ESDM and the Department of Labour.*
6. *Increase of DT and NDT testing work and the development of laboratories in Balikpapan.*
7. *Increased inspection and supervision marine work and optimization activities derived from the classification as well as training services; and*
8. *The Underwater survey service works, which is an expansion of the Company's services.*



Dalam melaksanakan aktivitas usaha dan tugas sebagai Badan Klasifikasi, Perusahaan mengembangkan jaringan dan melakukan berbagai kerjasama, baik dengan sesama BUMN maupun dengan mitra usaha lainnya.

In carrying out business activities and a duty as a Classification Board, the Company develops network and performs a wide range of cooperation, both with fellow state-owned companies and other business partners.

Kerjasama Sesama BUMN

Selain dengan PT Batan Teknologi (Persero), Perusahaan sebagai Badan Klasifikasi juga bekerjasama dengan BUMN pengguna jasa Perusahaan, diantaranya PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Pusri), PT Pelabuhan Indonesia I- IV (Persero) dan PT Pengerukan Indonesia (Persero) di bidang pelaksanaan sertifikasi *crane* dan bejana tekan serta dengan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) di bidang pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, supervisi dan pemeliharaan di bidang maritim. Selain itu, Perusahaan melakukan kerjasama dengan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. dalam bidang inspeksi pipa penyalur, serta kerjasama dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dalam bidang jasa penilai kapal.

Cooperation with Fellow SOEs

In addition to PT Batan Technology (Persero), the Company as a Classification Board also works with SOE service users, such as PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Pusri), PT Pelabuhan Indonesia I- IV (Persero) and PT Pengerukan Indonesia (Persero) in certification of cranes and pressure vessels, as well as with PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) and PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) in the implementation of education and training, supervision and maintenance in maritime sector. Moreover, the Company cooperates with PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk in pipelines inspection, and with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk in ships appraisal services.

Kerjasama dengan Mitra Usaha Lain

Di bidang klasifikasi telah dilakukan kerjasama antara Perusahaan dengan asosiasi terkait, antara lain INSA (pelayaran), GAPASDAP, IPERINDO (galangan) dan asosiasi asuransi dalam meningkatkan industri pelayaran nasional termasuk peran Perusahaan sebagai Badan Klasifikasi.

Cooperation with Other Business Partners

In the classification field, the Company cooperates with related association, such as INSA (shipping), GAPASDAP, IPERINDO (shipyard) and insurance associations in improving the national shipping industry, including the Company's role as a Classification Board.

Di bidang statutoria, telah dilakukan kerjasama dengan *Istmuz Bureau of Shipping (IBS)* untuk melakukan survei statutoria bagi kapal-kapal bendera Panama dan Belize di perairan Indonesia. Di bidang klas, telah dilakukan kerjasama dengan *American Bureau of Shipping (ABS)*, *Korean Register (KR)* dan *Nippon Kaiji Kyokai (NK)* terkait dengan pengembangan *Rules & Regulation*.

In the statutory field, the Company cooperates with Istmuz Bureau of Shipping (IBS) to do statutory surveys for the Panama and Belize flagged ships in the Indonesian waters. In the class field, the Company cooperates with the American Bureau of Shipping (ABS), Korean Register (KR) and Nippon Kaiji Kyokai (NK) in developing Rules & Regulations.

Pada kegiatan konsultasi & supervisi, kerjasama dengan mitra usaha strategis dilakukan dalam beberapa kegiatan usaha, misalnya PT Indospec dan TUV Nord. Kerjasama pertukaran informasi di lingkungan anggota ACS dalam rangka partisipasi aktif terhadap peraturan yang dibahas dalam forum IMO.

In consultancy and supervision activities, the Company cooperates with strategic business partners in several business activities, such as with PT Indospec and TUV Nord. Cooperation in information exchange between ACS members is conducted as active participation in the regulations discussed in the IMO forum.

Selain itu, kerjasama dengan perguruan tinggi ITS dan UNHAS dalam bidang penelitian/pengembangan *rules* Perusahaan. Sementara di bidang statutoria, telah mendapatkan pelimpahan penuh dari Mongolia.

Furthermore, the Company cooperates with universities such as ITS and UNHAS in research/development of the Company's rules. While in the statutory field, the Company has received a full delegation from Mongolia.

Kerjasama Luar Negeri

Hingga saat ini perjanjian kerjasama dengan beberapa badan klasifikasi asing anggota IACS masih berjalan sebagai berikut:

Foreign Cooperation

Until today cooperation agreement with some foreign classification boards of IACS members still runs as follows:

Perjanjian Kerjasama Bidang Kegiatan Klasifikasi & Statutoria Cooperation Agreement Classification & Statutory Activities

No.	Nama Badan Klasifikasi <i>Name of Classification Board</i>	Negara <i>Country</i>	Bentuk Kerjasama <i>Form of Cooperation</i>
1.	American Bureau of Shipping	USA / USA	Dual Class
2.	Bureau Veritas	Prancis / France	Dual Class
3.	China Classification Society	RRC / China	Mutual Representation
4.	Det Norske Veritas	Norwegia / Norway	Dual Class
5.	Germanischer Lloyd	Jerman / Germany	Mutual Representation
6.	Hellenic Register of Shipping	Yunani / Greece	Mutual Representation
7.	Indian Register of Shipping	India / India	Mutual Representation
8.	Korean Register of Shipping	Korea Selatan / South Korea	Mutual Representation
9.	Korean Classification Society	Korea Utara / North Korea	Mutual Representation
10.	Lloyd's Register of Shipping	Inggris / England	Dual Class
11.	Nippon Kaiji Kyokai	Jepang / Japan	Mutual Representation
12.	Registrul Naval Roman	Rumania / Romania	Mutual Representation
13.	Rinave Portugeusa	Portugal / Portugal	Mutual Representation
14.	Ships Classification Malaysia	Malaysia / Malaysia	Mutual Representation
15.	Vietnam Register	Vietnam / Vietnam	Mutual Representation
16.	Polski Rejestr Statko'w	Polandia / Poland	Mutual Representation
17.	Registro Italiano Navale	Italia / Italy	Dual Class
18.	Istmus Bureaw Of Shipping	Panama / Panama	Mutual Representation

Perjanjian Kerjasama Bidang Kegiatan Marine & Industrial Cooperation Agreement Marine & Industrial Activities

No.	Nama Badan Klasifikasi <i>Name of Classification Board</i>	Negara <i>Country</i>	Bentuk Kerjasama <i>Form of Cooperation</i>
1.	Det Norske Veritas	Norwegia / Norway	Offshore
2.	Germanischer Lloyd	Jerman / Germany	Industrial Inspection
3.	TUV Rheinland	Jerman / Germany	Industrial Inspection
4.	Korean Register of Shipping	Korea Selatan / South Korea	Industrial Inspection
5.	TUV Nord	Jerman / Germany	Industrial Inspection



Rencana Strategis 2014-2018

Strategic Plan 2014-2018

Perusahaan telah menetapkan *road map* atau Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) periode 2014-2018 dengan visi 2018 yaitu menjadikan Perusahaan sebagai Badan Klasifikasi yang diakui secara nasional maupun internasional dan sebagai *market leader* di bidang kegiatan jasa marine & industrial. Perusahaan kemudian menetapkan misinya, yaitu mengembangkan dan mengimplementasikan profesionalisme pelayanan jasa klasifikasi dan statutoria ke tingkat standar internasional dalam rangka turut menjamin keselamatan jiwa, kapal, aset, dan lingkungan laut untuk mewujudkan *safer ships, secure ships and cleaner ocean* dan jasa marine & industrial yang memiliki keunggulan bersaing dan diakui baik nasional maupun internasional.

The company has set a road map or Long Term Corporate Plan (RJPP) for the period 2014-2018 with the vision to make the Company a Classification Board which is recognized nationally and internationally and as the market leader in marine & industrial services. The Company then set its mission, which is to develop and implement professionalism in classification and statutory services to the level of international standards in order to guarantee the safety of life, ships, assets, and marine environment to ensure safer ships, secure ships and cleaner ocean and marine & industrial services which has a competitive advantage and is recognized both nationally and internationally.

Secara umum, arah pengembangan Perusahaan dalam lima tahun ke depan meningkatkan reputasi korporasi sebagai badan klasifikasi dan kualitas pelayanan sesuai IACS-QSCS, IACS *Unified Requirement* dan IACS *Procedural Requirement* dalam rangka pemenuhan persyaratan keanggotaan IACS dan terselenggaranya *safer ship, secure ocean and cleaner ocean* di segmen jasa Klasifikasi dan Statutoria; meningkatkan pertumbuhan usaha, pangsa pasar dan kemandirian kegiatan usaha serta memiliki daya saing di pasar domestik dengan fokus pada sektor maritim, industri dan migas pada segmen jasa Marine & Industrial; meningkatkan profesionalisme, kompetensi dan integritas SDM sebagai alat produksi untuk pencapaian tujuan perusahaan; serta meningkatkan sistem manajemen dan organisasi yang mengarah kepada produktifitas dan efektifitas sesuai kebutuhan organisasi dan standar internasional.

In general, the direction of the Company's development in the next five years is to improve the reputation of the Company as a Classification Board and improve service quality according to IACS-QSCS, IACS Unified Requirement and IACS Procedural Requirement in order to meet the requirements of IACS membership and the implementation of safer ship, secure ocean and cleaner ocean in Classification and Statutory services segments; to improve the business growth, market share, and the independence of business activities and also have competitive power in the domestic market with a focus on the maritime, industrial and the oil and gas sector in Marine & Industrial services segments; to enhance professionalism, competence and integrity of HR as a production tool for the achievement of the Company's objectives; and to improve the management and organization system to achieve productivity and effectivity according to the needs of the organization and international standards.

Road Map 2014-2018 Road Map 2014-2018

2014 Konsolidasi <i>Consolidation</i>	2015-2017 Pertumbuhan <i>Growth</i>	2018 Akselerasi & Ekspansi <i>Acceleration & Expansion</i>
• Restrukturisasi pengelolaan organisasi • Revitalisasi organ organisasi • Pelaksanaan Good Corporate Governance • Pengembangan pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) • Penyempurnaan sistem dan prosedur sesuai kebutuhan dan persyaratan IACS-QSCS • <i>Organization management restructuring</i> • <i>Organization's Organ Revitalizing</i> • <i>Implementation of Good Corporate Governance</i> • <i>Information Technology (IT) utilization development</i> • <i>System and procedure improvement according to the needs and requirements of IACS-QSCS</i>	• Peningkatan Stakeholder & Shareholder Value • Peningkatan Operasi & Pelayanan • Didapatnya keanggotaan IACS • Restrukturisasi Unit Produksi • Aliansi bisnis strategis dengan mitra • <i>Enhancement of Stakeholder & Shareholder Value</i> • <i>Operational and service improvement</i> • <i>Obtaining of IACS membership</i> • <i>Production unit restructuring</i> • <i>Strategic business alliance with partners</i>	• Pengembangan/diversifikasi bisnis • Memperkuat market value dan captive market untuk menjadi market leader • Outlook pasar regional/ internasional • <i>Development/ diversification of business</i> • <i>Strengthen market value and captive market to become market leader</i> • <i>Outlooking regional/ international market</i>

Sasaran Strategis 2014-2018 <i>Strategic Target 2014-2018</i>	Sasaran Taktis 2014-2018 <i>Tactical Target 2014-2018</i>
- Tercapainya kualitas pelayanan setara dengan standar IACS dengan tujuan meningkatkan kepercayaan dan pengakuan dari para stakeholder. - Tercapainya pelimpahan survei statutoria secara penuh, baik oleh Pemerintah Indonesia maupun dari negara lain. - Meningkatnya penguasaan pangsa pasar (intensifikasi) usaha marine & industrial, dengan fokus usaha di sektor maritim, industrial dan migas serta kebijakan diversifikasi usaha. - Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) berkompeten, profesional yang memiliki integritas dan mempunyai komitmen yang kuat untuk bersaing di tingkat global. - Tercapainya sistem manajemen dan organisasi yang sehat, mampu meningkatkan produktifitas dan kesejahteraan karyawan. <i>The achievement of service quality on par with the IACS standards with the aim of increasing the trust and recognition from stakeholders.</i> <i>The achievement of full delegation of statutory surveys, either by the Government of Indonesia or from other countries.</i> <i>Increased market share (intensification) in marine & industrial businesses, with a focus on business in the maritime, industrial and oil and gas sector as well as business diversification policy.</i> <i>The availability of competent Human Resources (HR), professionals with strong integrity and commitment to compete at the global level.</i> <i>The achievement of a healthy management and organization system, able to increase employees' productivity and welfare.</i>	- Meningkatnya proporsi pendapatan jasa layanan klasifikasi dibandingkan layanan non-klasifikasi menjadi 54% : 46% pada tahun 2018. - Tingkat pertumbuhan pendapatan klasifikasi rata-rata 31% per tahunnya, dengan pencapaian pendapatan sebesar Rp1,35 triliun pada tahun 2018. - Tingkat pertumbuhan pendapatan non-klasifikasi rata-rata 42% per tahunnya, dengan pencapaian pendapatan sebesar Rp1,16 triliun pada tahun 2018. <i>Increased proportion of classification service revenue compared to the non-classification services to 54%: 46% by 2018.</i> <i>Growth level of classification revenue at an average of 31% per year, with the achievement of revenue amounting to Rp1.35 trillion by 2018.</i> <i>Growth level of non-classification revenue at an average of 42% per year, with the achievement of revenue amounting to Rp1.16 trillion by 2018.</i>

Untuk dapat mencapai tahapan dan sasaran di atas, Perusahaan merumuskan dua strategi besar, yaitu intensifikasi jasa layanan klasifikasi dan peningkatan portofolio jasa layanan non-klasifikasi.

In order to achieve the above stages and objectives, the Company formulated two major strategies, which is the intensification of classification services and improvement of non-classification services portfolio.

Strategi Besar Perusahaan 2014-2018 *Company's Major Strategies 2014-2018*

Intensifikasi Jasa Layanan Klasifikasi <i>Intensification of Classification Services</i>	Peningkatan Portofolio Jasa Layanan Non-Klasifikasi <i>Improvement of Non-Classification Services Portfolio</i>
- Pemberdayaan potensi captive market (data pelanggan terdaftar di Perusahaan) dengan pemberian deferensiasi layanan baru, yaitu sertifikasi komponen dan material. - Pengupayaan meraih potensi pasar kapal yang belum tergarap (dengan standar layanan di bawah kondisi sekarang). - Peningkatan kualitas proses bisnis internal untuk mendapatkan sertifikasi IACS agar Perusahaan mampu berkalah secara internasional. <i>Empowerment of potential captive market (customer data registered in the Company) with the provision of new service differentiation, which is certification of components and materials.</i> <i>The effort to reach potential untapped ships market (with standard services under the present conditions).</i> <i>Improve the quality of internal business processes to obtain IACS certification so the Company is able to thrive internationally.</i>	- Meningkatkan jumlah pekerjaan baru dan konsumen baru layanan independent assurance marine (non-klasifikasi) pada ketiga sektor, yaitu marine, industri dan energi. - Fokus pada jenis layanan bisnis non-klasifikasi tertentu yang memiliki nilai pendapatan tertinggi bagi Perusahaan. <i>Increase the number of new jobs and new consumer of marine independent assurance service (non-classification) in three sectors, i.e. marine, industrial and energy.</i> <i>Focus on the types of non-classification services business that have the highest revenue for the Company.</i>

Action plan untuk Marketing, Operasi, SDM dan Organisasi, serta Keuangan
Action plan for Marketing, Operations, Human Resources and Organization, and Finance

Posisi Perusahaan sebagai Badan Klasifikasi Menjadi Anggota IACS

Ada lebih dari 50 badan klasifikasi di dunia yang melaksanakan kegiatan penyediaan jasa klasifikasi kapal, dimana 13 diantaranya adalah tergabung dalam *International Association of Classification Societies (IACS)*. Diperkirakan bahwa ke-13 anggota ini secara kolektif mengklaskan sekitar 94% dari seluruh tonase kapal yang melakukan perdagangan internasional di seluruh dunia. IACS diakui secara internasional, terutama bagi perusahaan asuransi dan institusi perbankan. Menjadi anggota IACS dan/atau menerapkan ISO 9000 yang setara dengan IACS-QSCS adalah sasaran jangka panjang Perusahaan yang berdampak strategis bagi pengembangan dan eksistensi Perusahaan, terutama pasar dalam negeri yang telah mulai dibuka sejalan dengan pemberlakuan UU No. 17 tahun 2008.

Sebagai Badan Klasifikasi, Perusahaan telah mengupayakan untuk masuk dalam keanggotaan IACS dengan mengajukan permohonan, memenuhi persyaratan keanggotaan, mendapatkan sertifikat ISO 9000 yang setara dengan IACS-QSCS dan meminta dukungan dari Pemerintah Indonesia untuk wajib klas BKI bagi kapal berbendera Indonesia. Walaupun IACS terus merubah peraturan keanggotaan dengan maksud-maksud monopolisasi, Perusahaan sebagai Badan Klasifikasi secara kontinyu terus berusaha memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan agar Perusahaan dapat meningkatkan level aktivitas dalam skala yang lebih tinggi.

Pada Oktober 2009, IACS mengeluarkan piagam dan menetapkan pengertian dari suatu Badan Klasifikasi (*Classification Society/CS*) untuk memperjelas perbedaan antara badan klasifikasi dengan badan survey & sertifikasi pada umumnya. Dari lima poin piagam tersebut, Perusahaan mampu memenuhi empat poin diantaranya dan dapat dinyatakan sebagai badan klasifikasi dan bukan badan survey & sertifikasi pada umumnya. Demikian juga persyaratan keanggotaan IACS yang direvisi pada awal tahun 2010. Persyaratan seperti CS yang harus mempublikasikan *Rules & Regulation* sendiri telah mampu diupayakan Perusahaan melalui pengembangan dan penerbitan *Rules* secara mandiri: *Rules Volume I* (edisi English & Indonesia), *Rules Volume II*, *Rules Volume III*, *Rules Volume IV*, *Rules Volume V* dan *Rules Volume VI* yang terbit di tahun 2013. Atau persyaratan rasio kapal klas + kapal *under construction* dengan surveyor lapangan tidak kurang dari 12:1, dimana jumlah kapal klas (*valid class*) sesuai dengan kriteria kapal sekitar 2.000 unit, maka rasionya adalah $2000:12 = 166$ surveyor lapangan. Posisi jumlah surveyor lapangan yang dimiliki Perusahaan saat ini 110 orang, dan Perusahaan terus melakukan peningkatan kompetensi SDM untuk mencapai persyaratan IACS.

The Company's Position as a Classification Board to Join IACS

There are more than 50 classification boards in the world conducting ship classification services, where 13 of them are members of the International Association of Classification Societies (IACS). It is estimated that the 13 members collectively classify approximately 94% of the total tonnage of ships that do international trade around the world. IACS is recognized internationally, particularly for insurance companies and banking institutions. Becoming a member of IACS and/or implementation of ISO 9000 which is equivalent to IACS-QSCS is the Company's long-term goals which gives strategic impact on the development and existence of the Company, particularly in the domestic market that has been opened in line with the enactment of Law no. 17 of 2008.

As a Classification Board, the Company has sought to join IACS by applying to become its member, meeting the membership requirements, obtaining ISO 9000 certificate which is equivalent to IACS-QSCS and enlisting the support of the Government of Indonesia in BKI mandatory class for Indonesian-flagged ships. Although IACS continues to change the terms of membership with the purposes of monopolization, the Company as a Classification Board continues to meet the required conditions for the Company to increase the level of activity to a higher scale.

In October 2009, the IACS issued a charter and defined the notion of a Classification Board (Classification Society/CS) to clarify the difference between classification board and survey & certification agencies in general. Of the five points of the charter, the Company is able to meet four of them and can be stated as a classification board, not a of survey & certification agency in general. The IACS membership requirements were also revised at the beginning of 2010. Requirements such as CS should publish its own Rules & Regulations has been met by the Company through the development and publication of independent rules: Rules Volume I (English & Indonesian edition), Rules Volume II, Rules Volume III, Rules Volume IV, Rules Volume V and Rules Volume VI, published in 2013. Or the requirement of class ship ratio + under construction ships with field surveyors not less than 12:1, where the number of class ships (valid class) according to the ships criteria is about 2,000 units, so the ratio is $2000:12 = 166$ field surveyors. The Company currently has 110 field surveyors and continues to increase the competence of human resources to achieve the IACS requirements.

Dari persyaratan keanggotaan IACS tersebut, beberapa upaya yang dilakukan Perusahaan adalah:

- Mulai aktif dalam *panel, team, committee* dan *expert group* yang diadakan IACS sebagai *observer*. Kegiatan ini umumnya dilakukan di *permanent secretary* IACS di London. Selain diperlukan biaya yang cukup besar, juga dibutuhkan tenaga ahli yang kompeten di bidangnya sesuai dengan aspek yang dibahas. Di samping itu, Perusahaan sudah terlibat dalam *Working Group* di forum *Asian Classification Society (ACS)*, dimana 4 dari 6 anggotanya adalah juga anggota IACS
- *Rules & Regulation* yang dipublikasikan harus diperoleh secara murni dari kajian Penelitian & Pengembangan (Litbang) sendiri, yang tentunya memerlukan biaya cukup besar. Untuk itu diperlukan tenaga Litbang yang berkualifikasi S2/S3 di bidang teknik struktur, permesinan, material, listrik dan statutoria.
- Berupaya mendapat tambahan survei statutoria dari Pemerintah Indonesia dan juga dari negara lain, terutama di wilayah regional Asia Tenggara dan berperan aktif merubah posisi Bendera Indonesia dari *black list* menjadi *white list* terhadap survei statutoria yang dilimpahkan.
- Melakukan upaya peningkatan mutu pelaksanaan survei dengan sasaran kinerja Perusahaan menjadi *high category* pada laporan tahunan Tokyo MOU.
- Melakukan penambahan jumlah tenaga surveyor lapangan dan tenaga ahli di kantor pusat. Namun hal ini akan sejalan dengan kebutuhan operasional pelayanan jasa serta kemampuan finansial Perusahaan dalam memberikan kesejahteraan pegawai. Hal ini bisa dilakukan sesuai dengan pertumbuhan usaha dan peningkatan jumlah kapal yang diregister.
- Menyelesaikan penyusunan *Quality Manual* Perusahaan sesuai dengan persyaratan IACS-QSCS dan segera mengajukan aplikasi *assessment* untuk mendapatkan *Certificate of Conformity* sesuai IACS-QSCS.

To meet the IACS membership requirements, the Company has made several attempts:

- *Become active in panel, team, committee and expert group held by IACS as the observer. These activities are usually held in IACS permanent secretary in London. Besides incurring substantial cost, the Company also needs competent experts in various fields according to the aspects discussed. The Company has also been involved in the Working Group on the forum of Asian Classification Society (ACS), where 4 of the 6 members are also members of IACS.*
- *The published Rules & Regulations must be obtained purely from the Company's own Research & Development (R & D) studies, which would require considerable cost. For that, the Company needs R&D staff with Master/Doctorate's Degree in structural, mechanical, materials, electrical engineering, and statutory.*
- *Get additional statutory surveys from the Government of Indonesia and also from other countries, especially in the region of Southeast Asia and to actively change the position of the Indonesian Flag from the black list into the white list of the delegated statutory surveys.*
- *Improve the quality of survey implementation with the company performance target to become high category at the Tokyo MOU annual report.*
- *Add the number of field surveyors and experts in the head office. But this would be in line with the operational services needs and the financial ability of the Company to provide employee welfare. This can be done in accordance with business growth and increase in the number of ships registered.*
- *Complete the preparation of the Company Quality Manual in accordance with the requirements of IACS-QSCS and immediately apply for assessment to obtain a Certificate of Conformity according to IACS-QSCS.*



Tata Kelola Perusahaan *Good Corporate Governance*





Prinsip Tata Kelola Perusahaan

The Principles Of Good Corporate Governance

Perusahaan berkeyakinan, konsep penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, atau *Good Corporate Governance* (GCG) dalam praktik organisasi akan mendorong kinerja Perusahaan menuju kesuksesan di masa-masa yang akan datang. Komitmen untuk menciptakan Perusahaan yang transparan, dapat dipertanggung jawabkan (*accountable*), dan terpercaya melalui manajemen bisnis yang dapat dipertanggung jawabkan akan menciptakan sebuah sistem kerja yang tangguh dan berkelanjutan.

Penerapan praktik-praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik, atau *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan salah satu langkah penting bagi Perusahaan untuk meningkatkan dan memaksimalkan nilai Perusahaan (*corporate value*); selain tentunya mendorong pengelolaan Perusahaan yang profesional, transparan dan efisien dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab dan adil. Perusahaan percaya, penerapan praktik GCG dapat memenuhi kewajiban seutuhnya baik kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris, mitra bisnis, serta seluruh pemangku kepentingan.

Mengingat pentingnya GCG maka telah dilakukan bentuk penguatan komitmen manajemen seluruh komisaris dan Direksi menunjukkan kesungguhan Dewan Komisaris dan Direksi BKI untuk memprioritaskan penerapan GCG.

Tahun 2013 merupakan tahun penguatan penerapan GCG di seluruh Unit kerja dan Unit Produksi. Menyikapi transformasi organisasi menuju portfolio bisnis, maka Perusahaan memandang perlu untuk meningkatkan kualitas praktik GCG yang telah ada untuk dikuatkan lagi dalam sebuah komitmen GCG yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Direksi BKI. Penguatan GCG dalam hal ini dimaksudkan agar penerapan GCG senantiasa melekat dan selaras dengan tuntutan bisnis dan kondisi industri saat ini.

Penguatan GCG Perusahaan dibangun melalui fungsi Sekretaris Perusahaan, yang kemudian terus menerus diperbaiki agar dapat selaras menuju diterapkannya pengelolaan Perusahaan yang beretika (GCG as *ethics*). Selain itu, Perusahaan melihat dan menjadikan GCG sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari dalam mengelola bisnisnya (GCG as *knowledge*), dimana Perusahaan mengintegrasikan pengelolaan GCG dalam manajemen risiko usaha.

Company believes, the application concept of principal of Good Corporate Governance (GCG) in the organizational practices will improve the performance of the Company to achieve success in the future. The commitment on creating a transparent, accountable, and reliable company through accountable business management will create a resilient and sustainable working system.

The application of Good Corporate Governance practices is one of the important steps for BKI to increase and maximize the corporate value, besides encouraging a professional, transparent and efficient management of the Company by increasing the principles of openness, accountability, trustworthy, responsible and fair so as to meet obligation either to the Shareholders, the Board of Commissioners, business partners, and stakeholders.

Given the importance of GCG, the management commitment from all of BKI Commissioners and Directors has been strengthened to demonstrate their seriousness in prioritizing the implementation of GCG.

The year 2013 is a year of strengthening the implementation of good corporate governance throughout the Work Unit and Production Unit. Addressing the organizational transformation towards business portfolio, the Company deems it necessary to improve the quality of good corporate governance practices that have been around by restrengthening it in a GCG commitment signed by BKI Board of Commissioners and Directors. The purpose of strengthening good corporate governance is to ensure that GCG implementation is always adhered and aligned with the business demands and current industry conditions.

*The strengthening of Company's GCG is developed through the function of Corporate Secretary and is continuously improved to be aligned with ethical company management (GCG as *ethics*). Besides, the Company considers and places GCG as its inseparable part in daily business management, (GCG as *knowledge*), in which the Company integrates GCG management in business risk management.*

Sebagai perusahaan yang patuh terhadap peraturan, Perusahaan menerapkan dan menjunjung tinggi kebijakan serta nilai-nilai yang terkandung dalam praktik GCG dengan acuan *international best practices* serta Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Indonesia (*Indonesia Code of GCG*) yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) di Indonesia.

Sejauh ini, Perusahaan telah berkomitmen untuk melakukan kajian dan audit menyeluruh untuk menjamin rancangan yang efektif dan terintegrasi dalam laporan keuangan Perusahaan. Laporan ini menghendaki tanggung jawab dari pihak manajemen BKI terhadap pembuatan, pemeliharaan dan pengevaluasian atas efektivitas prosedur dan pengendalian pengungkapan untuk memastikan kesesuaian informasi yang dinyatakan dalam laporan melalui *Exchange Act* dan telah dicatat, diproses, dirangkum dan dilaporkan dalam periode waktu yang tersedia untuk kemudian diakumulasikan dan dikomunikasikan kepada manajemen Perusahaan; termasuk Direktur Utama dan Direktur Keuangan & SDM, untuk kepentingan pengambilan keputusan terkait dengan pengungkapan yang diperlukan. Perusahaan juga mematuhi dan tunduk terhadap ketentuan yang berlaku mengenai independensi anggota Komite Audit.

Asesmen GCG

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik memberikan manfaat besar bagi kinerja Perusahaan secara keseluruhan. Tata Kelola Perusahaan yang baik juga menjadi sarana perusahaan dalam mengembangkan asset dan akuntabilitas kepada para pemangku kepentingan. Untuk itu, Perusahaan menerapkan asesmen dan penilaian penerapan GCG sebagai langkah untuk mengevaluasi proses implementasi GCG dalam Perusahaan. Asesmen eksternal dilakukan pada bulan Maret 2013 oleh asesor independen APB Group untuk tahun buku 2012/2013. Hasil dari asesmen tersebut menunjukkan bahwa Perusahaan mendapatkan total skor sebesar 87,67% dan telah mencapai kualifikasi "Baik" berdasarkan enam aspek pengujian dengan penjabaran yang disajikan sebagai berikut:

1.	Komitment terhadap tata kelola secara berkelanjutan <i>Commitment to sustainable governance</i>	83,49%
2.	Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal <i>Shareholders & GMS/Capital Owners</i>	98,86%
3.	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas <i>Board of commissioners/Board of Trustees</i>	96,75%
4.	Direksi <i>Board of Directors</i>	82,03%
5.	Pengungkapan informasi dan transportasi <i>Disclosure of Information and transportation</i>	74,43%
6.	Aspek lainnya <i>Other aspects</i>	75,00%
Total Persentase <i>Total Percentage</i>		87,67%

To comply with the regulations, the Company applies and upholds policies and values of GCG practices in reference to international best practices and Indonesia Code of GCG issued by the Indonesian National Committee for Governance Policy (KNKG).

So far the Company has committed to conduct a thorough review and audit to ensure that the design is effective and integrated in the Company's financial statements. The report requires the responsibility of BKI management in making, maintaining and evaluating the effectiveness of procedures, and controlling the disclosures to ensure the appropriateness of information disclosed in the report through the Exchange Act, and to ensure that it has been recorded, processed, summarized and reported within the allocated time period to be accumulated and communicated to the Company's management, including President Director and Director of Finance & Human Resources, for the sake of decision making related to disclosures. BKI also complies with and is subject to the applicable provisions regarding the independence of the Audit Committee.

GCG Assessment

Implementation of Good Corporate Governance gives great benefit to the Company's overall performance. Good Corporate Governance is also a means for the company to develop assets, accountability to stakeholders and to maintain long-term value to stakeholders. Based on that reason, the Company adopted GCG implementation assessment and evaluation as a procedure to evaluate the GCG implementation process of the Company. External assessment was conducted on March 2013 by an independent assessor from APB Group for the financial year 2012/2013. Result of the assessment indicates that the Company earned a total score of 87.67% and have acquired "good" qualification, based on six assessment aspects as follows:



Struktur Dan Hubungan Organisasi Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Structure and Organization

I. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

RUPS merupakan organisasi perusahaan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris. RUPS berhak memperoleh seluruh informasi yang relevan tentang Perusahaan dan meminta pertanggungjawaban Komisaris dan Direksi yang berkaitan dengan pengelolaan Perusahaan. Pada tahun 2013, Perusahaan telah mengadakan 2 (dua) kali RUPS dengan rincian sebagai berikut,

Tanggal	Tempat	Perihal
25 April 2013 25 April 2013	Jakarta	RUPS pertanggungjawaban Laporan Manajemen tahun 2012 GMS on Management accountability report for 2012
19 Desember 2013 19 December 2013	Jakarta	RUPS Pengesahan RKAP 2014 GMS on the Ratification of Action Plan and Budget 2014

II. DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris bertugas mengawasi dan memberikan masukan kepada Direksi demi kepentingan Perusahaan, Pemegang Saham serta pihak yang berkepentingan pada umumnya. Dewan Komisaris bertanggung jawab memastikan agar Direksi dalam kondisi apapun memiliki kemampuan menjalankan tugasnya. Dewan Komisaris secara teratur memantau efektivitas pelaksanaan kebijakan dan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Direksi agar selalu sesuai dengan tujuan perusahaan, arahan Pemegang Saham dan anggaran Dasar Perusahaan. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris selalu mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Dewan Komisaris sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dapat menggunakan saran profesional yang mandiri dan atau membentuk Komite-komite bila diperlukan.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, maka Anggota Dewan Komisaris berwenang untuk:

1. Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perusahaan;
2. Memasuki pekarangan, gedung dan kantor yang digunakan Perusahaan;
3. Meminta penjelasan dari anggota Direksi dan atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan;
4. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh anggota Direksi;

I. GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (GMS)

GMS is an organ that holds the ultimate power in the company and holds all the authorities that is not granted to the Board of Directors or Board of Commissioners. GMS is entitled to all relevant information about the company and ask for accountability of Board of Commissioners and Directors relating to the Company's management. In 2013, the Company has held 2 (two) GMS with the following details

II. BOARD OF COMMISSIONERS

Board of Commissioners is responsible for overseeing and advising the Board of Directors for the interest of the Company, Shareholders and stakeholders in general. Board of Commissioners is responsible for ensuring that Board of Directors in any circumstances has the ability to carry out their duties. Board of Commissioners regularly monitor the effectiveness of policy implementation and decision-making process conducted by the Board of Directors to comply with company goals, Shareholders directions as well as article of association. In carrying out their duties, the Board of Commissioners always complies with the articles of association and prevailing laws and regulations. In accordance with the procedure, Board of Commissioners can use advice from independent professionals and or form committees when necessary.

The Duties and Responsibilities of Board of Commissioners

In performing the above mentioned duties, the Board of Commissioners is authorized:

1. To examine books, letters, and other documents, examine cash for verification purpose and other securities and examine Company's wealth;
2. To enter the yards, buildings and offices that the Company uses;
3. To ask explanation from the Directors and/or other officials on anything related to Company management;
4. To be informed on any policy and action that the BOD implemented or will implement;

5. Meminta anggota Direksi dan atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat anggota Dewan Komisaris;
6. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Komisaris, jika dianggap perlu;
7. Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
8. Membentuk komite-komite lain selain Komite Audit, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan;
9. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perusahaan, jika dianggap perlu;
10. Melakukan tindakan pengurusan Perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
11. Menghadiri Rapat anggota Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
12. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan atau keputusan RUPS.

Dewan Komisaris berkewajiban untuk:

1. Memberikan nasihat kepada anggota Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perusahaan;
2. Meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang disiapkan anggota Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
3. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan mengenai alasan anggota Dewan Komisaris menandatangani Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;
4. Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perusahaan;
5. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perusahaan;
6. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan anggota Direksi serta menandatangani laporan tahunan;
7. Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai laporan tahunan, apabila diminta;
8. Menyusun program kerja tahunan dan dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;
9. Membentuk Komite Audit;
10. Mengusulkan Akuntan Publik kepada RUPS;

5. *To send the Directors and/or other officials under BOD with the consent of BOD to attend the meeting of Board of Commissioners;*
6. *To appoint and dismiss Secretary of Board of Commissioners when it is deemed necessary;*
7. *To appoint and to dismiss member the Directors in accordance to the Article of Association;*
8. *To establish committees of Board of Commissioners other than Audit Committee if necessary by taking into accounts Company capability;*
9. *To hire experts on certain occasion and certain period with all the expense covered by Company, when it's necessary;*
10. *To tackle Company management in certain situation for certain period in line with stipulation of Article of Association;*
11. *To attend Board of Directors' meetings and provide insights on issues discussed;*
12. *To exercise other supervisory authorities as far as not contradict the prevailing laws, Articles of Association and/or GMS decisions.*

Board of Commissioners is obliged to:

1. *Advice Board of Directors on Company management*
2. *Review and evaluate as well as to sign the Company Long Term Plan and Company Work Plan and Budget prepared by BOD according to the provisions of Article of Association*
3. *Convey opinion and suggestion to the GMS on Company Long Term Plan as well as Company Work Plan and Budget regarding the reason of Board of Commissioners' member for signing Company long term plan and Company Work Plan and Budget*
4. *Monitor the dynamics of Company management. Convey opinion and suggestion to GMS on any problem considered important for Company management*
5. *Promptly report to GMS should the symptoms of decline in Company Performance occurs*
6. *Examine and review both periodic and annual reports prepared by the Board of Directors, as well as endorsing the annual report*
7. *Convey explanation, opinion, and advice to GMS on annual report, if requested*
8. *Design annual work program and incorporated in Work and Budget Plan*
9. *Form Audit Committee*
10. *Suggest Public accountant to GMS*

11. Membuat risalah rapat anggota Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
12. Melaporkan kepada Perusahaan mengenai kepemilikan sahamnya dan atau keluarganya pada Perusahaan tersebut dan perusahaan lain;
13. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru, lampau kepada RUPS;
14. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan atau keputusan RUPS;
15. Melaksanakan pengawasan dan monitoring terhadap efektivitas penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di Perusahaan.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut setiap anggota Dewan Komisaris harus :

- a. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran;
- b. Beritikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada anggota Direksi untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.

Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perusahaan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Dalam hal anggota Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud di atas berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris. Selain itu anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian apabila dapat membuktikan telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan, tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan anggota Direksi yang mengakibatkan kerugian, dan telah memberikan nasihat kepada anggota Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

11. *Make Minute of Meeting of the Board of the Commissioners and save the copy*
12. *Report to the Company on BOC and/or BOC family's share ownership in the Company or other company*
13. *Provide a report on the monitoring task done over the past financial year to GMS*
14. *Exercise other obligations in the framework of supervision and advice insofar not contradict the prevailing laws, Articles of Association and/or GMS decisions*
15. *Supervise and advise the effectiveness of Good Corporate Governance application*

In carrying out their duties, the member of the Board of Commissioners shall:

- a. *Follow the Article and Association and prevailing laws; and to implement the principles of professionalism, efficiency, transparency, independency, accountability, responsibility, and fairness*
- b. *Act in good faith, prudence and responsible in performing supervision and providing advice to Board of Directors for the sake of Company in accordance with the Company's goals and objectives*

Every member of Board of commissioners shall personally takes responsibility for loss suffered by the Company if the person concerned is guilty or negligent in his duty. Should the member of Board of Commissioners consists of 2 (two) or more people, the liability as above mentioned are borne jointly and severally for every member of Board of commissioners. Besides, Board of commissioners shall not be liable for loss if they can prove that the supervision is exercised in good will and prudence for the sake of company and with regard of the Company's goals and objectives, do not have personal interest, either direct or indirectly, for any BOD management actions that cause loss, and the BOD has been advised to prevent the arise and continuance of the loss.

Susunan dan Pembagian Tugas Dewan Komisaris

Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. SK-322/MBU/2012 tanggal 11 September 2012 dan Keputusan Dewan Komisaris No. KU.001/Dekom.101/III/2013 tanggal 1 Maret 2013, susunan Dewan Komisaris Perusahaan sebagai berikut:

Komisaris Utama / <i>President Commissioner</i>	: Machfud Sidik
Komisaris / <i>Commissioner</i>	: Minto Widodo
Komisaris / <i>Commissioner</i>	: Faisal Halimi
Komisaris / <i>Commissioner</i>	: Erwin Rosmali

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris telah melakukan pembagian tugas anggotanya, yaitu:

Machfud Sidik (Komisaris Utama)

Tugas utama Komisaris Utama yaitu mengkoordinir tugas-tugas Dewan Komisaris dan menangani bidang Komersial. Selain itu, tugas Komisaris Utama Machfud Sidik diantaranya:

- Me-review, memberikan tanggapan dan meminta tanggapan anggota Dewan Komisaris lainnya atas hasil evaluasi, pendapat dan saran yang disampaikan oleh anggota Dewan Komisaris dalam bidang masing-masing.
- Mengintegrasikan hasil evaluasi, pendapat dan saran yang disampaikan oleh anggota Dewan Komisaris dalam bidang masing-masing menjadi kebijakan dan/atau dasar bagi Dewan Komisaris dalam pengambilan keputusan.
- Bersama-sama dengan Komisaris Faisal Halimi menangani bidang komersial sebagaimana rincian pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan.

Minto Widodo (Komisaris)

Komisaris Minto Widodo menangani bidang keuangan, SDM, Hukum dan GCG dengan tugas yaitu:

- Melakukan evaluasi atas kinerja Perusahaan terutama namun tidak terbatas pada bidang keuangan, SDM, Hukum dan penerapan GCG.
- Memberikan tanggapan, pendapat dan saran-saran kepada Direksi terutama namun tidak terbatas pada bidang Keuangan, SDM, Hukum dan GCG.
- Melaksanakan penugasan lain yang disepakati bersama dalam Rapat Internal Dewan Komisaris.

Board of Commissioners Composition and Job Description

Based on SOE Ministerial Decree No. SK-322/MBU/2012 dated September 11, 2012 and the Decision of Board of Commissioners No. KU.001/Dekom.101/III/2013 dated March 1, 2013, the composition of Board of Commissioners is as follows:

In performing the duties and supervisory function, the Board of Commissioners has issued the Job Descriptions of each member, namely:

Machfud Sidik (President Commissioner)

The main task of President Commissioner is to coordinate Board of Commissioners' duties and deals with Commercial Development. In addition, the other tasks of President Commissioner Machfud Sidik include:

- Reviewing, giving and asking for response from other Board of Commissioners on the evaluation results, opinions and advice submitted by members of the Board of Commissioners in their respective fields
- Integrating the evaluation results, opinions and advice submitted by members of the Board of Commissioners in their respective fields into policy and / or basis for the Board of Commissioners in making decision
- Together with Commissioner Faisal Halimi, President Commissioner deals with commercial development as stated in the details of task implementation.

Minto Widodo (Commissioner)

Commissioner Minto Widodo deals with finance, HR, Legal and GCG, in which the tasks are:

- To evaluate the performance of the Company, especially but not limited to finance, human resources, legal and implementation of GCG.
- To give response, opinions and suggestions to the Board of Directors, especially but not limited to Finance, HR, Legal and GCG.
- To carry out other assignments as mutually agreed in the Internal Meeting of the Board of Commissioners.

Erwin Rosmali (Komisaris)

Komisaris Erwin Rosmali menangani bidang Klasifikasi dengan tugas yaitu:

- Melakukan evaluasi atas kinerja Perusahaan terutama namun tidak terbatas pada bidang Klasifikasi, termasuk mencakup evaluasi atas hal investasi dan pengembangan usaha, penelitian dan pengembangan, teknologi dan produk baru.
- Memberikan tanggapan, pendapat dan saran-saran kepada Direksi terutama namun tidak terbatas pada bidang Klasifikasi.
- Melaksanakan penugasan lain yang disepakati bersama dalam Rapat Internal Dewan Komisaris.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Pada tahun 2013, kegiatan Dewan Komisaris Perusahaan secara garis besar sebagai berikut:

- Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan oleh Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan RKAP berdasarkan Anggaran Dasar, Keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain memberikan pendapat, arahan dan saran atas sistem pengendalian internal perusahaan, melakukan *monitoring* dan evaluasi ke cabang-cabang yaitu Batam, Balikpapan, Belawan, Surabaya, Banjarmasin, Jambi, Palembang dan Cigading.
- Memberikan tanggapan, pendapat dan saran kepada Pemegang Saham atas kinerja perusahaan, kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan hal-hal lain yang dimintakan pendapat oleh Pemegang Saham.
- Memberikan tanggapan, pendapat dan arahan atas hal-hal yang bersifat strategis di perusahaan antara lain persetujuan struktur Organisasi PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) yang baru, beserta perubahannya, persetujuan atas usulan pejabat Sekretaris Perusahaan dan Aset Manajemen dan Pejabat Kepala Satuan Pengawas Internal dan memberikan persetujuan perjalanan dinas Direksi ke Amerika Serikat, Singapura dan Jepang, perpanjangan penghapusan buku aset tetap gedung Kantor Pusat, rekomendasi penghapusan buku aset yang terkena proyek pelebaran jalan tol, persetujuan penghapusan buku aset sesuai kewenangan Dewan Komisaris dan memberikan persetujuan perpanjangan fasilitas garansi bank, serta rekomendasi terhadap rencana Penambahan Modal Pemerintah (PMN) yang berasal dari kapitalisasi cadangan Perusahaan.
- Mereview dan menindaklanjuti masukan serta rekomendasi dari Komite Audit diantaranya mengenai RKAP Tahun 2013, Laporan Manajemen Tahun 2012 (*unaudited* dan *audited*), struktur

Erwin Rosmali (Commissioner)

Commissioner Erwin Rosmali deals with the classification, namely:

- Evaluate the Company performance, especially but not limited to the field of classification, including evaluation on investment and business development, research and development, technology and new products.
- Give response, opinions and suggestions to the Board of Directors, especially but not limited to the field of classification.
- Carry out other assignments as mutually agreed in the Internal Meeting of the Board of Commissioners.

Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners

In 2013, the Board of Commissioners duties are outlined as follows:

- Supervise the management policy, management by Board of Directors including supervision of Action Plan and Budget implementation under Article of Association, GMS resolution, as well as the prevailing laws and regulations, including give opinion, direction and suggestion about company's internal control system, monitor and evaluate the branches in Batam, Balikpapan, Belawan, Surabaya, Banjarmasin, Jambi, Palembang and Cigading.
- Give response, opinion, and suggestion to Shareholders about company performance, supervision conducted by the Board of Commissioners and other matters asked by Shareholder.
- Give response, opinion and direction on strategic matters, including give approval on the latest PT.BKI (Persero) organization structure and its amendments, give approval on the proposals from officers of Corporate Secretary and Asset Management and Head of Internal Audit Unit, and give approval on Board of Directors business trips to United States, Singapore and Japan, renew the write off of Headquarters building fixed assets, give recommendation on write-off of assets affected by the highway project, give approval to write off asset in regard with the authority Board of Commissioners and give approval on renewal of bank guarantee facilities, as well as give recommendation on the plan of Government Capital Increase (PMN) derived from the capitalization of the Company reserve.
- Give Review and follow up on input and recommendation from Audit Committee including on 2013 Action Plan and Budget, 2012 Management Report (*unaudited* and *audited*),

organisasi, usulan KAP yang melaksanakan audit laporan keuangan tahun buku 2013, pengendalian internal, penghapusbukuan aset dan penerbitan fasilitas bank garansi.

Efektifitas Kerja Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah melakukan rapat sebanyak 23 kali, dimana 12 merupakan Rapat Internal Dewan Komisaris dan 11 lainnya merupakan Rapat Gabungan dengan mengundang Direksi. Rapat dilakukan dalam rangka pembahasan kinerja Perusahaan dan hal lain terkait kegiatan pengawasan dan kegiatan korporasi lainnya. Hasil rapat dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan sesuai dinamika rapat.

Ke-12 Rapat Internal Dewan Komisaris merupakan rapat 1 (satu) bulan sekali dan sewaktu-waktu apabila dianggap perlu untuk membicarakan berbagai permasalahan dan bisnis Perusahaan serta melakukan evaluasi terhadap kinerja Perusahaan. Panggilan rapat Dewan Komisaris dilakukan secara tertulis oleh Komisaris Utama atau anggota Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama. Dalam panggilan rapat dicantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat. Semua rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Komisaris Utama. Semua keputusan dalam rapat Komisaris diambil dengan musyawarah untuk mufakat. Dalam setiap rapat Dewan Komisaris dibuat risalah rapat yang dapat menggambarkan situasi yang berkembang, proses pengambilan keputusan, argumentasi yang dikemukakan, kesimpulan yang diambil serta pernyataan keberatan terhadap kesimpulan rapat apabila tidak terjadi kebulatan pendapat. Risalah rapat ditanda-tangani Pimpinan rapat Dewan Komisaris dan oleh salah seorang anggota Komisaris yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak menerima salinan risalah rapat Dewan Komisaris, meskipun yang bersangkutan tidak hadir dalam rapat tersebut.

Prosentase kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat internal sebagai berikut:

Nama Name	Jumlah Rapat Number of Meeting	Jumlah Kehadiran Attendance Frequency	% Kehadiran Attendance %
Machfud Sidik Komisaris Utama / <i>President Commissioner</i>	13	13	100%
Minto Widodo Komisaris / <i>Commissioner</i>	13	13	100%
Faisal Halimi Komisaris / <i>Commissioner</i>	13	8	62%
Erwin Rosmali Komisaris / <i>Commissioner</i>	13	10	77%

organizational structure, the proposal of public accounting firm performing the audit of financial statements for fiscal year 2013, internal control, assets write-off, and issuance of bank guarantee facilities.

The Effectiveness of Board of Commissioners

Board of Commissioners held 23 meetings, of which 12 are internal meetings and the 11 are Joint Meetings inviting the Board of Directors. Meetings are held to discuss the Company performance and other matters related to supervisory activities and other corporate activities. The results are outlined in the minutes of meetings, and documented in accordance with meeting dynamics.

The Internal Meetings of the Board of Commissioners is held once a month and whenever deemed necessary to discuss various issues and the Company's business, as well as to evaluate the Company's performance. The call for BOC meeting is made in writing by the President Commissioner or by a member of Board of Commissioners appointed by President Commissioner. The call for meeting contains the agenda, date, time and place. All meetings chaired by the President Commissioner. In case of President Commissioner is absent or unavailable; the meeting is chaired by a Commissioner appointed by the President Commissioner. All decisions at the BOC meeting are taken by consensus. Minutes of meeting is made for each BOC meeting which describe the developing situation, the decision making process, the arguments presented, the conclusions drawn and the statement of objections to the meeting conclusion if there is no consensus. Minutes of meeting is signed by the Chairman of the meeting and one member of the Commissioners appointed by and from those present. Each BOC member is entitled to receive a copy of the minutes of meetings even if they were not present in the meeting.

Below is attendance of Board of Commissioners members in internal meetings:

Remunerasi Dewan Komisaris

Remunerasi adalah imbalan yang diberikan kepada Direksi atas peran yang diberikan untuk pengurusan dan pengelolaan Perusahaan adalah sesuai dengan Keputusan RUPS tanggal 25 April 2013 dan Keputusan Pemegang Saham di luar RUPS No DU.087/KP.310/KI-13 tanggal 24 Mei 2013 tentang penetapan penggunaan laba dan penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris serta Keputusan Direksi No. No DU.087/KP.310/KI-13 tanggal 24 Mei 2013 tentang remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris sebagai berikut :

Nama Name	Honorarium (Rp) Honorarium (Rp)	Tunjangan Transport (Rp) Transportation allowance (Rp)	Honorarium 1 (satu) tahun (Rp) 1 (one) year Honorarium (Rp)	Tunjangan Lain/ Tantiem Other Allowance/ Royalties
Machfud Sidik Komisaris Utama / <i>President Commissioner</i>	30.000.000	0	360.000.000	*)
Minto Widodo Komisaris / <i>Commissioner</i>	27.000.000	0	324.000.000	
Faisal Halimi Komisaris / <i>Commissioner</i>	27.000.000	0	324.000.000	
Erwin Rosmali Komisaris / <i>Commissioner</i>	27.000.000	5.400.000	388.800.000	

*) Tantiem 2013 masih menunggu hasil RUPS.

*) 2013 Royalties is still awaiting the results of the AGM.

Penghasilan Dewan Komisaris, terdiri dari:

- Gaji per bulan.
- Tunjangan;
 - Tunjangan Hari Raya Keagamaan, maksimal 1 (satu) kali Gaji dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan.
 - Asuransi Santunan Purna Jabatan dengan premi per tahun maksimum 25% dari Gaji setahun kali tahun masa jabatan, yang dianggarkan dalam RKAP dan ditetapkan oleh RUPS.
 - Tunjangan Cuti Tahunan diberikan setiap tahun sebanyak 1,35 kali Gaji, setelah Dewan Komisaris bekerja selama minimal (12) bulan berturut-turut.
 - Tunjangan komunikasi yang disesuaikan dengan pemakaian.
- Fasilitas;
 - Diberikan sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan Perusahaan.
 - Fasilitas kendaraan bagi Dewan Komisaris sebanyak 1 (satu) unit kendaraan dinas beserta pemeliharaan dan operasionalnya, kecuali anggota Komisaris Faisal Halimi.
 - Fasilitas kesehatan untuk Dewan Komisaris dan anggota keluarga, sesuai ketentuan yang berlaku di Perusahaan.

Remuneration of Board of Commissioners

Remuneration is a reward given to the Board of Directors for the role given in the maintenance and management of the Company in accordance with the GMS Decision dated 25 April 2013 and Decision of Shareholders outside the GMS No. DU 087/KP-310/KI-13 dated May 24, 2013 regarding the determination of the use of profits and remuneration of Directors and the Board of Commissioners, and BOD Decision No. DU.087/KP.310/KI-13 dated May 24, 2013 on the remuneration of Directors and the Board of Commissioners as follows:

Remuneration of the Board of Commissioners consists of:

- Monthly salary.
- Allowances;
 - Religious holiday allowance given with the maximum amount of 1 (one) month salary by taking into account the capability of Company.
 - Post-employment Insurance with the maximum amount of premium 25% of annual Salary times the term of office, budgeted in the Action Plan and Budget and determined by GMS.
 - Annual leave allowance given every year in the amount of 1.35 times of salary after the BOC works for at least 12 month in a row.
 - Communication allowance according to usage.
- Facilities;
 - Given in accordance with Company condition and financial ability.
 - Vehicles facility given to Directors in the form of 1 (one) unit of service vehicle as well as its maintenance and operational expenses, except for Commissioner Faisal Halimi.
 - Health facilities for the BOC and their family members in accordance with the applicable Company provisions.

- iv. Fasilitas bantuan hukum dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatan yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.
- d. Tantiem/Insentif Kinerja, jumlahnya ditetapkan sesuai RUPS yang disesuaikan dengan pencapaian KPI dan tingkat kesehatan Perusahaan.
- e. Faktor Pajak atas Gaji/Honorarium, Tunjangan, Fasilitas dan Tantiem Dewan Komisaris ditanggung dan menjadi beban Perusahaan.

Di luar hal-hal yang diatur dalam ketentuan ini, Dewan Komisaris tidak diperkenankan untuk membebankan biaya kepada Perusahaan untuk kepentingan pribadi. Ketentuan mengenai gaji/ honorarium dan fasilitas Dewan Komisaris melalui mekanisme RUPS.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris Tahun 2013

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris diukur oleh *Key Performance Indicator* (KPI) Dewan Komisaris sebagai berikut,

iv. *Legal aid in the event of actions / deeds for and on behalf of the position related to the Company's business activities.*

- d. *Tantiem / Performance Incentives, the amount is determined in accordance with the GMS adjusted to KPI achievement and level of Company Soundness.*
- e. *Tax for salary/honorarium, allowances, facilities, and tantiem for BOC is borne by the Company.*

Beyond matter stipulated in this provision, Board of Commissioners shall not incur cost to Company for the sake of personal interest. Decisions on salary/ honorarium and Board of Commissioners facilities are taken through GMS mechanism.

Board of Commissioners Performance Assessment 2013

Performance Assessment of BOC is measured by Key Performance Indicators (KPI) as follows,

No	Aspek Dan Parameter <i>Aspect And Parameter</i>	Periode <i>Period</i>	Satuan Unit	Bobot Weight	Rencana Plan	Realisasi Realization	Skor Score
I. Aspek Pengawasan dan Nasehat				I. Supervision and Advice Aspect			
1.	Memberikan persetujuan/tanggapan kepada Pemegang Saham terhadap : <i>Give approval/response to Shareholder about :</i>						
	- Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PKBL <i>Work Plan and Budget (RKAP) and PKBL Work Plan and Budget (RKA)</i>	Tahunan <i>Annual</i>	Surat <i>Letter</i>	5	1	1	5
	- Laporan Tahunan <i>Annual Report</i>	Tahunan <i>Annual</i>	Surat <i>Letter</i>	3	1	1	3
	- Analisis kinerja triwulanan <i>Quarter Performance Analysis</i>	Triwulanan <i>Quarterly</i>	Surat <i>Letter</i>	2	4	4	2
2.	Memberikan persetujuan atau pendapat atas usulan Direksi yang merupakan wewenang Dewan Komisaris <i>Give Directors approval or opinion on BOD suggestions that are under the authority of BOC</i>	Setahun <i>1 year</i>	%	10	100	100	10
3.	Rapat Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners meeting</i>						
	- Jumlah rapat <i>Number of meeting</i>	Bulanan <i>Monthly</i>	Kali <i>times</i>	2	12	23	3,83
	- Kehadiran Rapat <i>Attendance</i>	Bulanan <i>Monthly</i>	%	2	100	75	1,5
	- Penyelesaian risalah rapat <i>The Completion of Minute of Meeting</i>	Bulanan <i>Monthly</i>	Risalah <i>Minute</i>	1	12	23	1,91
4.	Monitoring tindak lanjut temuan SPI dan Eksternal Audit serta Assessment GCG <i>Monitor the follow up on findings of the Internal Control System and External Audit as well as assessment of GCG</i>	Setahun <i>1 year</i>	Surat <i>Letter</i>	10	3	3	10
5.	Evaluasi pelaksanaan Eksternal Auditor <i>Evaluation of External Auditor Examination</i>	Tahunan <i>Annual</i>	Surat <i>Letter</i>	10	1	1	10

No	Aspek Dan Parameter <i>Aspect And Parameter</i>	Periode <i>Period</i>	Satuan Unit	Bobot Weight	Rencana Plan	Realisasi Realization	Skor Score
6.	Monitoring dan Evaluasi Kantor Cabang <i>Monitor and evaluation of branch office</i>	Setahun <i>1 year</i>	Kunjungan <i>Visit</i>	5	8	8	5
Sub Total I				50			52,24
II. Aspek Pelaporan		II. Monitor and evaluation of branch office					
7.	Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) <i>Annual Action & Budget Plan (RKAT)</i>	Tahunan <i>Annual</i>	Laporan <i>Report</i>	15	1	1	15
8.	Laporan Pengawasan Tahunan <i>Annual Supervisory Report</i>	Tahunan <i>Annual</i>	Laporan <i>Report</i>	15	1	1	15
Sub Total II				30			30
III. Aspek Dinamis		III. Dynamic Aspect					
9.	Peningkatan Kompetensi melalui seminar, workshop dll <i>Competence improvement through seminar, workshop etc</i>	Setahun <i>1 year</i>	Kali <i>times</i>	10	6	4	6,66
10.	Tindak lanjut rekomendasi hasil Assessment GCG <i>Follow up on recommendation of GSG assessment result</i>	Setahun <i>1 year</i>	%	10	100	100	10
Sub Total III				20			16,66
TOTAL (I+II+ III)				100			98,90

Realisasi atas Indikator Pencapaian Kinerja Dewan Komisaris tahun 2013 sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris Tahun 2013 adalah sebesar 98,90 dari nilai 100 poin. Adapun penjelasan atas pencapaian kinerja Dewan Komisaris tahun 2013 dapat disampaikan sebagai berikut:

- Aspek pengawasan dan nasehat dapat melampaui target yaitu sebesar 52,24 poin dari rencana 50 poin. Namun demikian masih ada indikator yang tidak tercapai yaitu kehadiran Dewan Komisaris hanya terealisasi rata-rata sebesar 75%.
- Aspek pelaporan terealisasi 30 poin atau 100% dari rencana.

Aspek dinamis terealisasi 16,66 poin dari rencana 20 poin. Adapun indikator kinerja yang tidak terlaksana secara penuh adalah frekuensi peningkatan kompetensi Dewan Komisaris. Tidak tercapainya target dimaksud dipengaruhi oleh adanya prioritas kegiatan sejalan dengan dinamika korporasi dan pergantian organ-organ Perusahaan.

III. DIREKSI

Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, mengurus dan mengelola bisnis untuk kepentingan Perusahaan yang sebesar-besarnya. Dalam melaksanakan tugasnya Direksi tetap memperhatikan keseimbangan kepentingan seluruh pihak yang terkait dengan aktivitas Perusahaan. Direksi bertindak secara cermat, berhati-hati dan mempertimbangkan berbagai aspek penting yang relevan dalam pelaksanaan tugasnya.

Realization of BOC KPI in 2013 as stipulated in the 2013 Action and Budget Plan was 98.90 point out of 100 point. The explanation of the performance achievement is elaborated as follows:

- Supervisor and advice aspect reached 52.24 point, exceeding the initial target of 50 point. However, the indicator of Board of Commissioners attendance just reached 75%, below the target*
- Reporting aspect achieved 30 point or 1 from the plan*

Dynamic aspect achieved 16.66 points from the initial plan of 20 points. However, the performance indicators not fully implemented is the frequency of BOC competence improvement. The shortfall is due to the presence of priority activities in line with corporate dynamics and the changes of company organs.

III. BOARD OF DIRECTORS

Directors in good faith and responsibly administer and manage the business for the maximum benefits of the Company. In performing their duties, the BOD still considers the balance of interests of all parties related to the Company activities. Board of Directors act diligently, carefully and consider many important aspects relevant in the execution of their duties.

Direksi menggunakan wewenang dan sumber daya yang dimiliki Perusahaan semata-mata hanya untuk kepentingan Perusahaan. Tugas utama Direksi yaitu:

- Memimpin dan mengurus Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.
- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas Perusahaan.
- Menerapkan praktik-praktik Tata Kelola Perusahaan yang sehat (GCG) dalam Perusahaan.
- Bertugas sesuai Anggaran Dasar Perusahaan, keputusan RUPS serta peraturan lainnya.
- Direksi bertanggung jawab kepada Pemegang Saham melalui RUPS.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, maka Direksi berwenang untuk:

1. Menetapkan kebijakan kepengurusan Perusahaan;
2. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi untuk mengambil keputusan atas nama Direksi atau mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan;
3. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang pekerja Perusahaan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain, untuk mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan;
4. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perusahaan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja Perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja yang melampaui kewajiban yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS;
5. Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perusahaan berdasarkan peraturan kepegawaian Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan;
7. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perusahaan, mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan atau pihak lain dengan Perusahaan, serta mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan atau keputusan RUPS.

Board of Directors uses the authority and resources of the Company solely for the sake of Company interest. The main task of the Board of Directors are:

- *To lead and manage the Company in accordance with the purposes and objectives of Company.*
- *To improve the efficiency and effectiveness of the Company.*
- *To implement the GCG practices in the Company.*
- *To exercise duties according to the Articles of Association, GMS resolutions, and other regulations.*
- *The Directors are responsible to the Shareholders through the GMS.*

Directors Duties and Responsibilities

In carrying out the above mentioned duties, the Board of Directors is authorized to :

1. *Determine the Company's management policy*
2. *Arrange the transfer of authority of Board of Directors to one member or several members of the Board of Directors to take decision on behalf of Board of Directors or represent the Company, either inside or outside the Court*
3. *Arrange the transfer of authority of the Board of Directors to one or several Company employees either individually or collectively or to other person, to represent the Company either inside or outside the Court;*
4. *Stipulate provisions on employee affairs including salary, pension or retirement benefits, and other income for the employees under the prevailing law and regulation; stipulation of provisions on employee salary, pension or retirement benefits, and other income that exceeds the obligation set by the prevailing law and regulation shall obtain prior approval of GMS;*
5. *Appoint and dismiss employee of the Company under the HR regulation of the Company and the prevailing laws and regulations;*
6. *Appoint and dismiss the Corporate Secretary;*
7. *Perform any other actions and deeds in connection with management as well as ownership of Company assets, binds the Company to other party and/or other party to the Company, as well as represent the Company inside and outside the Court on any matters and any events, with limitations as set forth in the laws and regulations, Articles of Association and GMS resolutions.*

Kewajiban Direksi diantaranya:

1. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya;
2. Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan dan perubahannya serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan RUPS;
3. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;
4. Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS dan Risalah Rapat Direksi;
5. Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan Perusahaan, serta dokumen keuangan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan;
6. Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit;
7. Menyampaikan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan serta laporan mengenai hak-hak Perusahaan yang tidak tercatat dalam pembukuan antara lain sebagai akibat penghapusan piutang;
8. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan;
9. Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS kepada Menteri yang membidangi Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Menyampaikan laporan perubahan susunan Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris kepada Menteri yang membidangi Hukum dan HAM; Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perusahaan serta dokumen Perusahaan lainnya;
11. Menyimpan di tempat kedudukan Perusahaan : Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perusahaan serta dokumen Perusahaan lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf b butir (11) ayat ini;
12. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengelolaan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan;

Directors' obligations include:

1. *To carry out and ensure the implementation of the Company's business and activities in accordance with its goals and objectives as well as its business activities*
2. *To prepare Company Long-term Plan, Work Plan and Company Budget and its adjustment and submit them to Board of Commissioners and Shareholders to be validated in GMS.*
3. *To offer explanation to GMS on company long term plan and company work plan and budget*
4. *To produce List of Shareholders, Special List, Minutes of GMS and Minutes of Board of Directors Meeting*
5. *To make Annual Report as a form of responsibility for the Company management, and the Company financial documents as stated in the Laws on corporate document.*
6. *To draw up Financial Statement based on Financial Accounting Standard and submit it to Public Accountant to be audited;*
7. *To present Annual Report including Financial Statement to GMS to be approved and validated, as well as report on the Company's rights that are not reordered in the books due to receivables write-off;*
8. *To offer explanation on annual report to GMS;*
9. *To deliver Balance and financial statement validated by GMS to the Minister of Laws and Human Rights under the prevailing Law and Regulations;*
10. *To present the report on changes in the structure of Shareholders, Board of Directors and Board of Commissioners to the Minister of Law and Human Rights; to Maintain the Register of Shareholders, the Special Register, Minutes of GMS, Minutes of BOC and BOD meetings, the Annual Report and the Company's financial statement and other Company documents;*
11. *To keep in the domicile of the Company: Shareholder Register, Special Register, Minutes of AGM, Minutes of BOD and BOC Meeting, the Annual Report and the Company's financial statement and other Company documents as referred to in letter b point (11) of this paragraph;*
12. *To develop an accounting system in accordance with the Financial Accounting Standards and based on the principles of internal control, especially the functions of managing, recording, storage and monitoring;*

13. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan atau Pemegang Saham;
14. Menyiapkan susunan organisasi Perusahaan lengkap dengan perincian dan tugasnya;
15. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham;
16. Menyusun dan menetapkan cetak biru organisasi Perusahaan;
17. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan.
18. Melaksanakan dan mensosialisasikan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG).

13. *To provide regular reports in the manner and time as set in the prevailing regulation, as well as other reports whenever requested by the Board of Commissioners and or Shareholders;*
14. *To prepare the organization structure of the Company, specified by the details and its duties;*
15. *To offer explanation on anything inquired or asked by members of Board of Commissioners and Shareholders*
16. *To draw up and specify the blue print of Company organization*
17. *To exercise other obligations as governed by the Articles of Association and resolved by GMS in reference to the prevailing laws and regulations;*
18. *To exercise and disseminate the implementation of Good Corporate Governance (GCG)*

Susunan dan Pembagian Tugas Direksi

Selama tahun 2013, susunan dan komposisi Direksi Perusahaan mengalami perubahan. Hingga tanggal 18 Desember 2013, susunan Direksi Perusahaan sebagai berikut,

Direktur Utama <i>President Director</i>	: Ibnu Wibowo	(Keputusan Pemegang Saham Diluar RUPS No. SK-203/MBU/2012 tanggal 25 Mei 2012) (Resolution of Shareholder outside GMS No. SK-203/MBU/2012 dated May 25, 2012)
Direktur Teknik & Operasi <i>Direktor of Technical & Operations</i>	: Iman Satria Utama	(Keputusan Menteri BUMN No. SK-284/MBU/2012 tanggal 3 Agustus 2012) (SOE MinisterialDecree No. SK-284/MBU/2012 dated August, 3 2012)
Direktur Pemasaran & Pengembangan <i>Director of Marketing& Development</i>	: Ibrahim Gause	(Keputusan Menteri BUMN No. SK-175/MBU/2013 tanggal 5 Maret 2013) (SOE MinisterialDecree No. SK-175/MBU/2013 dated March 5, 2013)
Direktur Keuangan & SDM <i>Director of Finance & HR</i>	: Anang Sundana	(Keputusan Menteri BUMN No. SK-284/MBU/2012 tanggal 3 Agustus 2012) (SOE MinisterialDecree No. SK-284/MBU/2012 dated August 3, 2012)

Pada tanggal 19 Desember 2013, Direksi Perusahaan mengalami perubahan sehingga susunannya menjadi sebagai berikut,

On December 19, 2013, there was a change in the BOD structure. The recent composition,

Direktur Utama	: Rudiyanto	(Keputusan Menteri BUMN No. SK-.424/MBU/2013 tanggal 19 Desember 2013) SOE MinisterialDecree No. SK-424/MBU/2013 dated December 19, 2013)
Direktur Teknik & Operasi	: Iman Satria Utama	(Keputusan Menteri BUMN No. SK-.424/MBU/2013 tanggal 19 Desember 2013) SOE MinisterialDecree No.SK-424/MBU/2013 dated December 19, 2013)
Direktur Pemasaran & Pengembangan	: Ibrahim Gause	(Keputusan Menteri BUMN No. SK-.424/MBU/2013 tanggal 19 Desember 2013) SOE MinisterialDecree No. SK-424/MBU/2013 dated December 19, 2013)
Plt. Direktur Keuangan & SDM	: Ibrahim Gause (merangkap)	(Keputusan Menteri BUMN No. SK-.424/MBU/2013 tanggal 19 Desember 2013) SOE MinisterialDecree No.SK-424/MBU/2013 dated December 19, 2013)

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direksi telah melakukan pembagian tugas sebagai berikut:

Rudiyanto (Direktur Utama)

1. Menyiapkan pada waktunya program kerja dan rencana pengembangan Perusahaan (jangka panjang dan tahunan).
2. Mengkoordinir Direksi dalam memutuskan dan menetapkan kebijakan- kebijakan Perusahaan.
3. Menjalin dan meningkatkan hubungan kerja dan instalasi lain baik domestik maupun internasional.
4. Bersama anggota Direksi lainnya memelihara dan mengurus kekayaan Perusahaan.
5. Melakukan pembinaan terhadap personil Perusahaan.
6. Bersama anggota Direksi lainnya melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan manajemen oleh seluruh unit kerja Perusahaan.
7. Mempertanggungjawabkan hasil pengelolaan Perusahaan kepada Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan lingkup kewenangannya.

Iman Satria Utama (Direktur Teknik & Operasi)

1. Menyiapkan pada waktunya program kerja dan rencana pengembangan Perusahaan di bidang teknik (jangka panjang dan tahunan).
2. Mengurus Perusahaan utamanya di bidang teknologi, antara lain:
 - a. Penanganan kegiatan pengkajian, penerapan dan pengembangan peraturan teknik yang terkait dengan usaha Perusahaan.
 - b. Penanganan pengkajian, penelitian dan penyusunan *classification rules & regulations, technical information, BKI circular, guidance, standards*, dsbnya, secara rutin dan berkesinambungan.
 - c. Penanganan kegiatan operasional di bidang klasifikasi dan teknik lainnya antara lain:
 - 1.) Kelancaran kegiatan pelayanan jasa *klasifikasi dan statutory*.
 - 2.) Penghitungan teknis dalam rangka *technical approval (drawing, factory, dsb)*.
 - 3.) Pendataan/registrasi dan pemantauan terhadap kapal-kapal klas BKI.
 - 4.) Penjelasan masalah teknis kepada pihak ke-3 dalam kasus tertentu yang berkaitan dengan kegiatan klasifikasi kapal (kapal kecelakaan, tenggelam, kebakaran, dsb).
 - 5.) Penerbitan sertifikat klasifikasi dan *statutory*.
3. Melakukan kegiatan pemasaran antara lain pemeliharaan dan peningkatan mutu kerjasama

In performing their duties and functions, the Board of Directors has made the following division of tasks:

Rudiyanto (President Director)

1. *To prepare the Company work program and development plan in due time (long term and annual)*
2. *To coordinate the Board of Directors to determine and establish company policies*
3. *To establish and improve working relationships with other agency both domestically and internationally*
4. *Together with other Board members, the President Director maintains and manages the Company's assets*
5. *To give guidance to company personnel*
6. *Together with other members of the Board of Directors, the President Director supervises and controls the implementation of management policies by all work units in the Company*
7. *To account for Company management result to the General Meeting of Shareholders in accordance with the scope of its authority.*

Iman Satria Utama (Director of Technical & Operations)

1. *Prepare Company work program and development plan in technical area (long term and annual)*
2. *Manage the Company particularly in technology aspect, including:*
 - a. *Manage the assessment, application and development of technical regulations related to the Company's business.*
 - b. *Regularly and continually manage the assessment, research and preparation of classification rules and regulations, technical information, BKI circular, guidance, standards, etc.*
 - c. *Manage operations in the areas of classification and other technical aspects including:*
 - 1.) *Flawless performance on classification and statutory services.*
 - 2.) *Technical calculation for technical approval (drawing, factory, etc).*
 - 3.) *Data Collection/ registration and monitoring of BKI class ships.*
 - 4.) *Description of technical problems to third party in certain cases related to the classification of the ship (ship accidents, sinking, fires, etc).*
 - 5.) *Issuance of classification and statutory certificates.*
3. *Conduct marketing activities such as maintain and strengthen the partnership with foreign*

dengan badan klas asing dan atau instansi terkait di bidang ekonomi.

4. Peningkatan kemampuan dan keahlian mutu sumber daya manusia Perusahaan khususnya di bidang teknologi.
5. Bersama anggota direksi lainnya melakukan upaya peningkatan mutu pengelolaan Perusahaan, antara lain:
 - a. Pemantauan atas penerapan kebijakan mutu Perusahaan serta melakukan perbaikan/penyempurnaan yang diperlukan.
 - b. Peningkatan mutu sistem informasi manajemen yang diterapkan oleh Perusahaan.
 - c. Evaluasi tarif jasa Perusahaan (termasuk harga penawaran tender proyek-proyek).
 - d. Penyiapan dan penetapan kebijakan Perusahaan termasuk pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi atas penerapannya.
 - e. Bersama anggota Direksi lainnya mempertanggungjawabkan hasil pengelolaan Perusahaan kepada Rapat Umum Pemegang saham sesuai dengan lingkup kewenangannya.

Ibrahim Gause (Direktur Pemasaran & Pengembangan)

1. Menyiapkan pada waktunya program kerja dan rencana pengembangan usaha Perusahaan, baik jangka panjang maupun tahunan.
2. Mengurus Perusahaan utamanya di bidang pengembangan usaha Perusahaan, antara lain:
 - a. Penciptaan pasar baru dan atau unit-unit usaha baru, melakukan penetrasi pasar dan atau meningkatkan penguasaan pangsa pasar yang dikuasai Perusahaan.
 - b. Pelaksanaan penelitian pasar serta penyiapan konsep strategi usaha.
 - c. Penanganan kegiatan operasional di bidang perusahaan, antara lain:
 - 1.) Penyiapan keperluan dalam rangka mendapatkan perijinan usaha, surat penunjukan, penerbitan *government law enforcement*, proposal usaha, perjanjian kerjasama dan keperluan pengembangan usaha lainnya.
 - 2.) Penyelenggaraan *press conference*, *business symposium*/seminar, pameran, dsb.
 - 3.) Pemantauan masa berlakunya perijinan usaha (Ditjen. MIGAS, Depnaker dan instansi lainnya).
 - 4.) Upaya mendapatkan proyek.
 - 5.) *Customer complaint*.
 - 6.) Penyiapan keperluan dalam rangka perluasan jaringan usaha Perusahaan (pembukaan kantor cabang/representatif, upaya menjadi anggota asosiasi, dsb).

classification agencies and or relevant economic institutions

4. *Improve the capability and expertise of Company human resources, especially in technology*
5. *Together with other board members, Director of Technical & Operation make efforts to improve the quality of company management, including:*
 - a. *Monitor the implementation of the Company's quality policy and make necessary corrections / improvements.*
 - b. *Improve the quality of management information system applied by the Company.*
 - c. *Evaluate Company service rate (including the offer price of project tender).*
 - d. *Prepare and determine Company policies including implementation, supervision, control and evaluation of the application.*
 - e. *Together with other members of the Board of Directors, Director of Technical & Operation account for Company management to the General Meeting of Shareholders in accordance with the scope of its authority.*

Ibrahim Gause (Director of Marketing & Development)

1. *Prepare Company work program and development plan in due time (long term and annual)*
2. *Manage the Company, particularly in Company Business development, including:*
 - a. *Create new markets and new business units, penetrate market and/or increase the Company's market share.*
 - b. *Implement market research and prepare business strategy concept.*
 - c. *Manage operations, including:*
 - 1.) *Do necessary preparation in order to obtain business license, a letter of appointment, the issuance of government law enforcement, business proposals, cooperative agreements and other business development requirements.*
 - 2.) *Hold press conference, business symposiums/ seminars, exhibitions, etc.*
 - 3.) *Monitor business license validity period (Director General of Oil and Gas, Ministry of Manpower and other agencies)*
 - 4.) *Efforts to obtain projects.*
 - 5.) *Customer complaints.*
 - 6.) *Do necessary preparation for the Company's business network expansion (open branches/ representative, efforts to become a member of association, etc).*

3. Melakukan kegiatan pemasaran antara lain pengembangan dan peningkatan mutu kerjasama sekaligus melakukan kegiatan sinergi usaha dengan badan klas asing dan atau instansi terkait lainnya.
4. Peningkatan kemampuan dan keahlian mutu sumber daya manusia Perusahaan khususnya di bidang penanganan dan pengembangan usaha.
5. Bersama anggota Direksi lainnya melakukan upaya peningkatan mutu pengelolaan Perusahaan, antara lain:
 - a. Pemantauan atas penerapan kebijakan mutu perusahaan serta melakukan perbaikan/penyempurnaan yang diperlukan.
 - b. Peningkatan mutu sistem informasi manajemen yang diterapkan oleh Perusahaan.
 - c. Evaluasi tarif jasa Perusahaan (termasuk harga penawaran *tender*).
 - d. Penyiapan dan penetapan kebijakan Perusahaan termasuk pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi atas penerapannya.
 - e. Bersama anggota Direksi lainnya mempertanggungjawabkan hasil pengelolaan Perusahaan kepada Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan lingkup kewenangannya.

Ibrahim Gause (Plt. Direktur Keuangan & Sumber Daya Manusia)

1. Menyiapkan pada waktunya program kerja dan rencana pengembangan Perusahaan di bidang keuangan, personalia dan administrasi umum (jangka panjang dan tahunan).
2. Mengurus Perusahaan utamanya di bidang keuangan, personalia dan administrasi umum, antara lain:
 - a. Penanganan kegiatan pengelolaan keuangan Perusahaan, antara lain: akuntansi, verifikasi, perpajakan dan *treasury*.
 - b. Penanganan kegiatan administrasi kepegawaian, rekrutmen dan penerapan program *training* serta pengembangan karier pegawai Perusahaan.
 - c. Penanganan kegiatan ketatausahaan, pengadaan barang dan kerumahtanggaan.
 - d. Penanganan kegiatan kehumasan (*public relation*) dan aspek hukum (*legal matters*).
3. Mendukung dan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan kebijakan Perusahaan di bidang pemasaran.
4. Peningkatkan kemampuan dan keahlian mutu sumber daya manusia Perusahaan khususnya di bidang keuangan, personalia dan administrasi umum.

3. *Perform marketing activities such as develop and strengthen partnerships as well as conduct business synergy with foreign classification agencies and or relevant agencies*
4. *Improve the capability and expertise of Company human resources, especially in business management and development*
5. *Together with other board members, Director of Marketing & Development, make efforts to improve the quality of company management, including:*
 - a. *Monitor the implementation of the Company's quality policy and make necessary corrections / improvements.*
 - b. *Improve the quality of management information system applied by the Company.*
 - c. *Evaluate Company service rate (including the offer price of project tender).*
 - d. *Prepare and determine Company policies including implementation, supervision, control and evaluation of the application.*
 - e. *Together with other members of the Board of Directors, Director of Marketing & Development account for Company management to the General Meeting of Shareholders in accordance with the scope of its authority.*

Ibrahim Gause (Acting Director of Finance & HR)

1. *Prepare Company work program and development plan in Finance, HR, and general administration (long term and annual).*
2. *Manage the Company's Finance, human resources, and general administration, including:*
 - a. *Manage the Company finance, including: accounting, verification, taxation and treasury.*
 - b. *Manage personnel administration, recruitment, implementation of training programs, and career development of Company employees.*
 - c. *Manage administration, procurement of goods and household affairs.*
 - d. *Manage public relations and legal matters.*
3. *Support and participate actively in the implementation of the Company's marketing policies.*
4. *Improve the capability and expertise of Company human resources, especially in finance, HR and general administration.*

5. Bersama anggota Direksi lainnya melakukan upaya peningkatan mutu pengelolaan Perusahaan, antara lain:
 - a. Pemantauan atas penerapan kebijakan mutu Perusahaan serta melakukan perbaikan/penyempurnaan yang diperlukan.
 - b. Peningkatan mutu sistem informasi manajemen yang diterapkan oleh Perusahaan.
 - c. Evaluasi tarif jasa Perusahaan (termasuk harga penawaran *tender* proyek-proyek).
 - d. Penyiapan dan penetapan kebijakan Perusahaan termasuk pelaksanaan pengawasan, pengendalian serta evaluasi atas penerapannya.
 - e. Pemeliharaan dan peningkatan kerjasama dengan badan klas asing dan atau instansi terkait di bidang tugas masing-masing.
6. Mempertanggung jawabkan hasil pengelolaan Perusahaan kepada Rapat Umum Pemegang Saham sesuai ruang lingkup kewenangannya.

Hubungan Kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi

Dalam hal dianggap perlu, Dewan Komisaris dapat berinisiatif menyelenggarakan rapat konsultatif dengan Direksi untuk membicarakan masalah Perusahaan yang relevan. Demikian pula bila dianggap perlu, Direksi dapat berinisiatif menyelenggarakan rapat koordinasi dengan Dewan Komisaris untuk membicarakan masalah Perusahaan yang relevan. Dalam setiap pertemuan, informasi dan data yang penting untuk pemahaman Dewan Komisaris akan diberikan secara tertulis sebelum pertemuan untuk menjamin tersedianya waktu bagi Dewan Komisaris dalam memahami permasalahan yang akan dibahas. Bila perlu Direksi membuat ringkasan bahan tersebut sepanjang tidak mengurangi esensi informasi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Dalam setiap rapat konsultatif tersebut dibuat risalah rapat yang dapat menggambarkan situasi yang berkembang, proses pengambilan keputusan argumentasi yang dikemukakan, kesimpulan yang diambil, serta pernyataan keberatan terhadap kesimpulan rapat apabila tidak terjadi kebulatan pendapat. Selama tahun 2013, Direksi dan Dewan Komisaris telah melakukan rapat konsultatif sebanyak 11 kali.

Selain itu, agar tercapainya keberhasilan penerapan GCG diantaranya sangat bergantung kepada hubungan antar organ Perusahaan, khususnya antara Dewan

5. *Together with the other board members, Director of Finance & HR make efforts to improve the quality of company management, including:*
 - a. *Monitor the implementation of the Company's quality policy and make necessary correction/improvements.*
 - b. *Improve the quality of management information system applied by the Company*
 - c. *Evaluate Company service rate (including the offer price project tender).*
 - d. *Prepare and determine Company policies including implementation, supervision, control and evaluation of the application.*
 - e. *Maintain and strengthen the partnerships with foreign classification agencies and or other relevant agencies in each assignment field.*
6. *Together with other members of the Board of Directors, Director of Finance & HR account for Company management to the General Meeting of Shareholders in accordance with the scope of its authority.*

Working relationship between Board of Commissioners and Directors

Whenever deemed necessary, Board of Commissioners may initiate consultative meeting with Board of Directors to discuss relevant Company issues. Similarly, if deemed necessary, Directors may initiate coordination meeting with Board of Commissioners to discuss relevant Company issues. In each meeting, information and data that is important for the understanding of the Board of Commissioners shall be given in writing before the meeting to ensure the availability of time for the Board of Commissioners in understanding the issues to be discussed. If necessary, Board of Directors can make a summary of material provided as long as they do not reduce the essential information that can influence the decision making. Minutes of meeting will be made in each consultative meeting, describing the situation evolving, decision-making process, arguments presented, conclusions drawn, and statement of objections to meeting conclusion when there is no consensus. In 2013, Board of Directors and Board of Commissioners held 11 consultative meetings.

Moreover, the success of GCG implementation relies heavily on the relationship between company's organs, particularly between the Board of

Komisaris dan Direksi. Untuk itu, Perusahaan telah dengan tegas memisahkan fungsi serta peranan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam susunan dan komposisi antara Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan, tidak terdapat hubungan keluarga maupun hubungan keuangan yang bersifat menghambat penerapan GCG dari Perusahaan.

Efektifitas Kerja Direksi

Secara umum, efektifitas dan kinerja Direksi ditentukan berdasarkan tugas kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar Perusahaan maupun amanat Pemegang Saham. Direksi mengadakan rapat 1 (satu) bulan sekali dan sewaktu-waktu apabila dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi.

Panggilan rapat Direksi dilakukan secara tertulis oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Perusahaan. Dalam panggilan rapat tersebut dicantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. Panggilan rapat terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan apabila semua anggota Direksi hadir dalam rapat.

Pada tahun 2013, Direksi melakukan rapat internal sebanyak 14 kali dan melakukan Rapat Koordinasi Gabungan dengan Dewan Komisaris sebanyak 11 kali. Dari ke-14 rapat internal Direksi, prosentase kehadiran dapat dipaparkan sebagai berikut:

Commissioners and Board of Directors. Based on that reason, Company has firmly separate the function and role of the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners, and the Board of Directors in compliance with the applicable laws and regulations. In the structure and composition of the Shareholders, the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company, there are no family relationships or financial relationships inhibiting the GCG implementation.

Effectiveness of Directors

In general, the effectiveness and performance of the Board of Directors is determined by the duties set forth in the prevailing legislation and Company article of association as well as the mandate of Shareholder. Directors conduct 1 (one) meeting in every month and whenever deemed necessary by one or more members of BOD.

Call for BOD meeting is made in writing by member of the Board of Directors who is entitled to represent the Company. The call for meeting contains the agenda, date, time and place of meeting. Prior call for meeting is not required if all the Directors present at the meeting.

In 2013, the Board of Directors held 14 internal meetings and held 11 Joint Coordination Meetings with the Board of Commissioners. The attendance is described as follows:

Nama Name	Jumlah Rapat Number of Meeting	Jumlah Kehadiran Attendance Frequency	% Kehadiran % Attendance	Alasan ketidakhadiran Reason of Absence
Rudiyanto Direktur Utama-baru / <i>New President Director</i>	1	1	100 %	Baru menjabat pada satu kali rapat terakhir. <i>Just served in the last meeting.</i>
Ibnu Wibowo Direktur Utama-lama / <i>Former President Director</i>	13	13	100%	Tidak lagi menjabat pada satu kali rapat terakhir. <i>No longer serve in the last meeting</i>
Iman Satria Utama Direktur Teknik & Operasi / <i>Director of Technical & Operations</i>	14	13	98%	Mendapatkan tugas untuk menghadiri sidang IMO. <i>Appointed to attend IMO meeting</i>
Ibrahim Gause Direktur Pemasaran & Pengembangan merangkap Plt. Direktur Keuangan & SDM / <i>Director of Marketing & Development, concurrently acting as Director of Finance & HR</i>	14	14	100%	-
Anang Sundana Direktur Keuangan & SDM-lama / <i>former Director of Finance & HR</i>	13	13	100%	Tidak lagi menjabat pada satu kali rapat terakhir. <i>No longer serve in the last meeting</i>

Remunerasi Direksi

Remunerasi adalah imbalan yang diberikan kepada Direksi atas peran yang diberikan untuk pengurusan dan pengelolaan Perusahaan. Jumlah remunerasi Direksi Perusahaan sesuai dengan Keputusan RUPS tanggal 25 April 2013 dan Keputusan Pemegang Saham di luar RUPS tentang penetapan penggunaan laba dan penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris serta Keputusan Direksi tentang remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Name	Honorarium (Rp) Honorarium (Rp)	Tunjangan Transport (Rp) Transportation allowance (Rp)	Honorarium 1 (satu) tahun (Rp) 1 (one) year Honorarium (Rp)	Tunjangan Lain/ Tantiem Other Allowance/ Royalties
Rudiyanto Direktur Utama / <i>New President Director</i>	75.000.000	22.500.000	1.170.000.000	*)
Iman Satria Utama Direktur Teknik & Operasi / <i>Former President Director</i>	67.500.000	20.250.000	1.053.000.000	
Ibrahim Gause Direktur Pemasaran & Pengembangan merangkap Plt. Direktur Keuangan & SDM / <i>Director of Marketing & Development, concurrently acting as Director of Finance & HR</i>	67.500.000	20.250.000	1.053.000.000	

*) Tantiem 2013 masih menunggu hasil RUPS.

*) 2013 Royalties is still awaiting the results of the AGM.

Penghasilan Direksi, terdiri dari:

- a. Gaji per bulan.
- b. Tunjangan;
 - i. Tunjangan Hari Raya Keagamaan, maksimal 1 (satu) kali Gaji dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan.
 - ii. Asuransi Santunan Purna Jabatan dengan premi per tahun maksimum 25% dari Gaji setahun kali tahun masa jabatan, yang dianggarkan dalam RKAP dan ditetapkan oleh RUPS.
 - iii. Tunjangan Cuti Tahunan diberikan setiap tahun sebanyak 1,35 kali Gaji, setelah Direksi bekerja selama minimal (12) bulan berturut-turut.
 - iv. Tunjangan komunikasi yang disesuaikan dengan pemakaian.
- c. Fasilitas;
 - i. Diberikan sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan Perusahaan.
 - ii. Fasilitas kendaraan bagi Direksi sebanyak 1 (satu) unit kendaraan dinas beserta pemeliharaan dan operasionalnya.
 - iii. Fasilitas kesehatan untuk Direksi dan anggota keluarga, sesuai ketentuan yang berlaku di Perusahaan.
 - iv. Fasilitas bantuan hukum dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatan yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.

Remuneration of Board of Commissioners

Remuneration is a reward given to the Board of Directors for the role given in the maintenance and management of the Company in accordance with the GMS Decision dated 25 April 2013 and Decision of Shareholders outside the GMS No. DU 087/KP-310/KI-13 dated May 24, 2013 regarding the determination of the use of profits and remuneration of Directors and the Board of Commissioners, and BOD Decision No. DU.087/KP.310/KI-13 dated May 24, 2013 on the remuneration of Directors and the Board of Commissioners as follows:

Remuneration of the Board of Directors consists of:

- a. Monthly salary
- b. Allowances
 - i. Religious holiday allowance given at maximum amount of 1 (one) month Salary by taking into account the capability of Company
 - ii. Post-employment Insurance with, the maximum amount of premium 25% of annual Salary times the term of office, budgeted in Action and Budget Plan and determined by GMS
 - iii. Annual leave allowance given every year in the amount of 1.35 times of Salary, after BOD works for at least 12 month in a row
 - iv. Communication allowance according to usage.
- c. Facilities
 - i. Given in accordance with Company condition and financial ability
 - ii. Vehicles given to Directors in the form of 1 (one) unit of service vehicle as well as its maintenance and operational expenses
 - iii. Health facilities for the Directors and their family members, in accordance with the applicable Company rules
 - iv. Legal aid in the event of actions/ deeds for and on behalf of the position related to the Company's business activities.

- d. Tantiem/Insentif Kinerja, jumlahnya ditetapkan sesuai RUPS yang disesuaikan dengan pencapaian KPI dan tingkat kesehatan Perusahaan.
- e. Faktor Pajak atas Gaji/Honorarium, Tunjangan, Fasilitas dan Tantiem Direksi ditanggung dan menjadi beban Perusahaan.

Di luar hal-hal yang diatur dalam ketentuan ini, Direksi tidak diperkenankan untuk membebankan biaya kepada Perusahaan untuk kepentingan pribadi. Keputusan mengenai gaji/ honorarium dan fasilitas Direksi melalui mekanisme RUPS.

Penilaian Kinerja Direksi Tahun 2013

Penilaian Kinerja Direksi diukur oleh *Key Performance Indicator* (KPI) Direksi sebagai berikut,

- d. *Tantiem/ Performance Incentives, the amount is determined in accordance with the GMS and adjusted according to KPI achievement and the level of Company Soundness*
- e. *Tax of salary/honorarium, allowances, facilities, and tantiem for Directors is borne by the Company.*

Beyond matter stipulated in this provision, Board of Directors shall not incur cost to Company for the sake of personal interest. Decisions on BOD salary/ honorarium and facilities are taken through GMS mechanism.

2013 Board of Directors Performance Assessment

Performance Assessment of BOC is measured by Key Performance Indicators (KPI) as follows,

No	KPI	SATUAN UNIT	TARGET	REALISASI REALIZATION	% PENCAPAIAN % ACHIEVEMENT	BOBOT WEIGHT	PRESTASI ACCOMPLISHMENT
A. Perspektif Keuangan & Pasar				A. Financial & Market Perspective			
1.	Pertumbuhan Pendapatan Usaha <i>Revenue Growth</i>	%	143,59	132,45	92,24	4	3,69
2.	Net Profit Margin	%	23,37	26,11	111,72	4	4,47
3.	Collecting Period	Hari <i>Day</i>	66	104	100,00	4	4,00
4.	Operating Ratio (BOPO)	%	76,90	75,47	100,00	4	4,00
5.	ROE	%	32,15	32,11	99,88	4	4,00
						20	
B. Perspektif Fokus Pelanggan				B. Customer Focus Perspective			
1.	Index Kepuasan Pelanggan <i>Customer Satisfaction Index</i>	%	80	123,08	105,00	12	12,60
2.	Penanganan Keluhan Pelanggan <i>Customer Complaint Handling</i>	%	90	82	91,11	12	10,93
						24	
C. Perspektif Produk dan proses				C. Product and process perspective			
1.	Tindak lanjut Internal Control (internal control & QA) <i>The follow up of Internal Control (internal control & QA)</i>	%	90	65,41	72,68	3	2,18
2.	Kecepatan Penerbitan Sertifikat <i>Prompt Service of Certificate Issuance</i>	Bulan <i>Month</i>	45	49	100,00	3	3,00
3.	Kesesuaian Realisasi & Anggaran CAPEX <i>Compliance between CAPEX Realization & Budget</i>	%	70	37,18	53,11	4	2,12
4.	Penyelesaian Dokumen IACS-QSCS Level 2 & 3 <i>IACS-QSCS Level 2 & 3 Document Completion</i>	Bulan <i>Month</i>	12	14	105,00	4	4,20

No	KPI	SATUAN UNIT	TARGET	REALISASI REALIZATION	% PENCAPAIAN % ACHIEVEMENT	BOBOT WEIGHT	PRESTASI ACCOMPLISHMENT
5.	Pengembangan Rules/ Regulation <i>Rules/Regulation Development</i>	Rules	7	15	105,00	4	4,20
						18	
D. Perspektif Fokus Tenaga Kerja				D. Manpower Focus Perspective			
1.	Produktivitas Tenaga Kerja <i>Manpower Productivity</i>	Juta/ Pegawai Million/ employee	788	746,23	94,70	6	5,68
2.	Komposisi Pegawai Teknik & Non Teknik <i>Composition of Technical & Non Technical Employees</i>	%	65	56,10	86,31	7	6,04
3.	Jumlah Peningkatan Kompetensi <i>Number of Competence Improvement</i>	Orang Person	106	154	105,00	7	7,35
						20	
E. Perspektif Kepemimpinan				E. Leadership Perspective			
1.	Skor GCG <i>GCG Score</i>	Skor Score	83	87,67	105,00	4	4,20
2.	Terlaksananya Penilaian Mandiri terhadap skor KPKU <i>Implementation of the Self Assessment of KPKU scores</i>	Bulan Month	September	Desember	100,00	4	4,00
3.	Pemenuhan Portal-Portal BUMN <i>Regular Update SOE Portal</i>		Terpenuhi Fulfilled	Terpenuhi Fulfilled	100,00	4	4,00
4.	PK atau BL <i>Partnership and Community Development Program</i>	Terpenuhi Fulfilled	100%	35%	100,00	3	3,00
5.	Keberhasilan Pencapaian Kinerja cabang/unit produksi <i>The Success of Branch Performance Achievement / Production Unit</i>	Unit Produksi Production Unit	7	11	105,00	3	3,15
						18	
	TOTAL					100	96,82

IV. ORGAN PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS

i. Sekretaris Dewan Komisaris

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dewan Komisaris dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris. Adapun tugas dan tanggung jawab Sekretaris Dewan Komisaris sebagai berikut,

1. Menyelenggarakan kegiatan di bidang kesekretariatan dalam lingkungan Dewan Komisaris.
2. Menyediakan informasi untuk kebutuhan Dewan Komisaris dalam rangka pengambilan keputusan.
3. Mengumpulkan bahan-bahan berupa laporan-laporan rutin yang dibuat oleh Direksi dalam mengelola Perusahaan, seperti laporan bulanan, laporan triwulanan dan sebagainya.

IV. BOARD OF COMMISSIONERS SUPPORTING ORGANS

i. The Secretary of Board of Commissioners

In carrying out its duties and functions, the Board of Commissioners is assisted by the Secretary of Board of Commissioners. The duties and responsibilities of the Secretary of Board of Commissioners are:

1. Carry out secretarial works within the BOC.
2. Provide information required by BOC for decision making.
3. Collect materials in the form of regular reports made by the Board of Directors in managing the Company, such as monthly reports, quarterly reports and etc.

4. Berkoordinasi dengan jajaran Direksi dalam menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan berkaitan dengan hal-hal yang harus mendapatkan keputusan dari Dewan Komisaris berkenaan dengan kegiatan pengelolaan Perusahaan.
5. Berkoordinasi dengan jajaran Direksi dalam menyiapkan dan menyelenggarakan rapat-rapat dalam lingkungan Dewan Komisaris, baik yang bersifat rutin maupun non rutin dengan berbagai pihak.
6. Membuat risalah rapat atas rapat-rapat dengan pihak-pihak yang berkepentingan.
7. Menyampaikan risalah rapat kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
8. Mencatat setiap keputusan yang dihasilkan dalam forum-forum pengambilan keputusan serta penanggungjawabnya.
9. Memantau dan mengecek tahapan kemajuan pelaksanaan hasil keputusan rapat/pertimbangan pendapat, saran-saran dan keputusan-keputusan Dewan Komisaris lainnya.

Melalui Keputusan Dewan Komisaris No. KU.001/Dekom.101/III/2013 tanggal 1 Maret 2013, Meriantie ditunjukan untuk mengemban tugas dan fungsi Sekretaris Dewan Komisaris.

ii. Komite Audit

Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan Perusahaan. Adapun tugas dan tanggung jawab Komite Audit yaitu:

1. Melakukan telaah atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan, seperti laporan keuangan, rencana kerja dan anggaran, laporan manajemen dan informasi keuangan lainnya.
2. Melakukan telaah pemilihan Kantor Akuntan Publik yang akan melaksanakan audit atas laporan keuangan perusahaan dan melakukan telaah untuk meyakinkan efektivitas kegiatan dan hasil audit yang dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik.
3. Melakukan telaah untuk meyakinkan efektivitas sistem pengendalian internal Perusahaan.
4. Melakukan telaah untuk meyakinkan efektivitas pelaksanaan kegiatan dan hasil audit yang dilaksanakan oleh Internal Audit Perusahaan.
5. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan khususnya yang berhubungan dengan penyampaian informasi kepada para pemangku kepentingan.
6. Melakukan penelaahan atas pengaduan yang berkaitan dengan Perusahaan dan melaporkan hasil telaahan tersebut kepada Dewan Komisaris disertai dengan rekomendasi yang diperlukan untuk menangani pengaduan.

4. *Coordinate with the Board of Directors in preparing the necessary materials related to the issues that need to be approved by the Board of Commissioners with respect to the Company's management.*
5. *Coordinate with the Board of Directors in preparing and holding meetings in the Board of Commissioners, either routine or non-routine, with various parties.*
6. *Create the minutes of the meeting with stakeholders.*
7. *Deliver minutes of meetings to the parties concerned.*
8. *Record every decision taken in the decision-making forums and the person in charge*
9. *Monitor and examine the implementation progress of the meeting resolution/ consideration on opinions, suggestions and other decisions of the Board of Commissioners.*

Through BOC Decision No. KU.001/Dekom.101/III/2013 dated March 1, 2013, Meriantie is appointed to carry out the duties and functions of the Secretary of Board of Commissioners

ii. Audit Committee

The Audit Committee assists the Board of Commissioners in the oversight of the Company. The duties and responsibilities of the Audit Committee are:

1. *To conduct review on financial information issued by the Company, such as financial reports, work plan and budget, management reports and other financial information.*
2. *To conduct review on the selection of public accounting firm that will audit the Company financial statements and conduct review to ensure the effectiveness of activities and results of the audit conducted by the Public Accounting Firm.*
3. *To conduct a review to ensure the effectiveness of the Company's internal control system.*
4. *Conduct research to ensure effective implementation of the activities and results of audits conducted by the Internal Audit.*
5. *Review the Company's adherence to laws and regulations, especially relating to the delivery of information to stakeholders.*
6. *Review the complaints relating to the Company and report the results to the BOC along with recommendations needed to deal with complaints.*

7. Melakukan koordinasi dalam setiap kegiatan dan atau hasil kajian kepada Sekretaris Dewan Komisaris.
8. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Dewan Komisaris yang sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Keanggotaan Komite Audit

Dalam keanggotaannya, Komite Audit memiliki anggota terdiri dari sekurang-kurangnya 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota lainnya yang berasal dari luar Perusahaan. Sesuai SK Dewan Komisaris No. KU.006/Dekom.101/X/2013 tanggal 1 Oktober 2013, susunan keanggotaan Komite Audit Perusahaan adalah;

Minto Widodo	: Ketua / Chairman
Trisyu Wimarsono	: Anggota / Member
Deni Sulisty	: Anggota / Member

Piagam Komite Audit

- Tujuan
Komite Audit mempunyai misi membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi *oversight* (pengawasan) atas proses pelaporan keuangan, sistem pengendalian internal, proses audit, dan *corporate governance*.
- Wewenang
Komite Audit memiliki wewenang untuk melakukan penelaahan dan evaluasi terhadap berbagai hal yang berada dalam ruang lingkup tanggung jawabnya. Sehubungan dengan tanggung jawab tersebut maka Komite Audit berwenang untuk:
 1. Mendapat asistensi dan nasehat dari akuntan dan tenaga ahli lainnya.
 2. Mendapatkan informasi yang diperlukan dari seluruh karyawan.
 3. Menemui semua pejabat Perusahaan, auditor eksternal, dan konsultan Perusahaan lainnya jika diperlukan.
- Komposisi
Komite Audit mempunyai anggota 3 (tiga) orang, yang terdiri dari Ketua Komite Audit yang juga menjabat sebagai Komisaris Independen dan 2 (dua) orang anggota Komite Audit yang independen dan ditunjuk dari luar Perusahaan. Ketua Komite Audit dijabat oleh anggota yang berasal dari Dewan Komisaris Perusahaan.
Semua anggota komite harus independen, tidak memiliki konflik kepentingan, dan tidak terlibat dengan pengelolaan Perusahaan. Di antara anggota Komite Audit harus ada yang memiliki keahlian di bidang audit dan pelaporan keuangan.

7. Conduct coordination in all activities and or the review results to the Secretary of BOC
8. Carry out other tasks given by the Board of Commissioners in accordance with applicable laws and regulations

Audit Committee Membership

In its membership, the Audit Committee has members consisting of at least 1 (one) member of the Board of Commissioners and at least two (2) other members from outside the company. As per BOC Decision No. KU.006/Dekom.101/X/2013 dated October 1, 2013, the structure of the Audit Committee;

Charter of Audit Committee

- Objectives
The Audit Committee is designed to assist the Board of Commissioners in exercising oversight (supervision) over the financial reporting process, internal control systems, audit process, and corporate governance.
- Authority
The Audit Committee has authority to review and evaluate various things that are within the scope of his responsibilities. In connection with the responsibilities, Audit Committee is authorized to:
 1. Get assistance and advice from accountants and other experts.
 2. Obtain the necessary information from all employees.
 3. Meet all Company officers, external auditors, consultants and other companies if necessary.
- Composition
There are 3 (three) members of Audit Committee, consist of The Chairman of the Audit Committee who also serves as Independent Commissioner, and 2 (two) independent members appointed from outside the Company. Chairman of the Audit Committee is chaired by a member of the Board of Commissioners.
All committee members must be independent, and neither has any conflict of interest, nor involved with the management of the Company. One member of the Audit Committee should has expertise in audit and financial report.

- **Rapat-rapat**
Komite Audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali, dan jika diperlukan dapat menyelenggarakan rapat tambahan. Sesuai dengan kebutuhan dan relevansi permasalahan, Komite Audit melalui Dewan Komisaris dapat mengundang Anggota Direksi untuk hadir dalam rapat-rapat Komite Audit dan memberikan informasi yang diperlukan. Demikian pula, Komite Audit dapat mengundang pejabat Perusahaan, auditor, dan pihak lainnya untuk menghadiri rapat-rapat Komite Audit. Komite Audit akan menentukan agenda, pokok bahasan, serta mendistribusikan bahan rapat kepada seluruh anggota sebelum pelaksanaan rapat, dan membuat notulen rapat.
- **Tanggung Jawab**
Ruang lingkup tanggung jawab Komite Audit mencakup pelaporan keuangan, pengendalian internal, audit internal dan eksternal, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, dan penyiapan laporan kegiatan Komite Audit.
- **Pelaporan Keuangan**
 1. Menilai pelaporan keuangan tahunan, dan meneliti apakah laporan tersebut disusun secara lengkap, konsisten, dan mencerminkan prinsip akuntansi yang sesuai dengan PSAK.
 2. Menilai penjelasan, informasi lainnya, dan lampiran laporan keuangan sebelum diterbitkan untuk memastikan bahwa informasi tersebut akurat, lengkap, dan memenuhi ketentuan pelaporan yang dipersyaratkan.
 3. Melakukan pembahasan dengan manajemen dan auditor eksternal atas hasil audit oleh auditor eksternal, termasuk kesulitan-kesulitan yang dihadapi.
 4. Melakukan pembahasan dengan manajemen dan auditor eksternal mengenai hal-hal yang menurut Pernyataan Standar Akuntan Publik (PSAP) harus dikomunikasikan dengan Komite Audit.
 5. Menilai kebijakan akuntansi dan pelaporan keuangan yang penting, termasuk kebijakan akuntansi atas transaksi yang besar, rumit dan tidak biasa.
 6. Memahami perkembangan peraturan (persyaratan) profesi dan badan yang terkait dengan pelaporan keuangan, dan melihat dampaknya terhadap laporan keuangan Perusahaan.
 7. Menilai laporan keuangan interim sebelum diterbitkan, dan meneliti apakah laporan tersebut lengkap, akurat, dan sesuai dengan informasi yang diketahui oleh Komite Audit.
- **Meetings**
The Audit Committee holds a meeting at least 1 (once) per month, and if necessary can hold additional meetings. In accordance with the requirement and problem relevance, the Audit Committee through the Board of Commissioners may invite members of BOD to attend the Audit Committee meetings and provide necessary information. The Audit Committee may invite officials of companies, auditors, and others to attend meetings of the Audit Committee. The Audit Committee will determine the agenda, subject, and distribute meeting materials to all members prior to the meeting, and make the minutes of the meeting.
- **Responsibility**
The scope of the Audit Committee's responsibilities include financial reporting, internal control, internal and external audits, adherence to prevailing laws and regulations, and preparation of Audit Committee's activity report.
- **Financial Reporting**
 1. *Assess annual financial reporting, and examine whether these reports are prepared in a complete and consistent manner, and reflect the accounting principles in accordance with GAAP.*
 2. *Assess explanation, other information, and attachment of financial statements prior to publication to ensure that the information is accurate, complete, and comply with the reporting requirements.*
 3. *Have discussions with management and the external auditors about the audit results by external auditors, including the difficulties encountered.*
 4. *Hold discussions with management and the external auditors on matters which, according to Statements of Financial Accounting Standards (SFAS) must be communicated to the Audit Committee.*
 5. *Asses the important accounting and financial reporting policies, including the accounting policy on large, complex and unusual transactions.*
 6. *Understand the development of regulation (requirements) of professional agency and agencies related to financial reporting, and consider the impact on the Company's financial statements.*
 7. *Assess interim financial statements prior to publication, and to examine whether the report is complete, accurate, and in accordance with the information known by the Audit Committee.*

8. Memahami bagaimana manajemen menyiapkan informasi keuangan interim, dan memahami sifat dan intensitas keterlibatan Satuan Pengawasan Internal (SPI) dan auditor eksternal dalam proses tersebut.
- Pengendalian Internal
 1. Meneliti kecukupan dan efektivitas Pengendalian Internal Perusahaan, termasuk pengendalian dan pengamanan yang terkait dengan pengolahan informasi secara elektronik.
 2. Memahami ruang lingkup proses penilaian Pengendalian Internal oleh SPI ataupun oleh auditor eksternal, dan mengkaji temuan dan rekomendasi atas kelemahan pengendalian yang signifikan, serta mengkaji tanggapan manajemen atas masalah tersebut.

Audit Internal

1. Menilai piagam, rencana kerja (termasuk anggaran) kegiatan, *staffing*, dan struktur organisasi SPI.
2. Memastikan bahwa tidak terdapat pembatasan terhadap ruang lingkup pekerjaan SPI, kecuali karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Menilai efektivitas fungsi SPI, termasuk ketaatan terhadap standar profesi audit internal, yang mengacu kepada lembaga profesi internal auditor nasional atau internasional.
4. Mengadakan pertemuan baik berkala maupun secara insidental dengan kepala SPI untuk membahas hal-hal yang menurut pertimbangan Komite Audit atau kepala SPI, perlu dibahas secara terbatas.
5. Meminta laporan hasil audit atau hasil pelaksanaan tugas SPI.

Audit Eksternal

1. Menilai dan merekomendasikan auditor eksternal untuk ditunjuk oleh RUPS.
2. Menilai ruang lingkup dan pendekatan audit yang akan dilakukan oleh auditor eksternal dan menilai kerja auditor eksternal maupun audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
3. Melakukan koordinasi pekerjaan audit yang dilakukan oleh SPI dan auditor eksternal dan BPK RI.
4. Menilai, memastikan dan menjaga independensi auditor eksternal dan BPK RI.
5. Mengadakan pertemuan baik berkala maupun secara insidental dengan auditor eksternal dan BPK RI untuk membahas hal-hal yang menurut pertimbangan Komite Audit atau auditor eksternal dan BPK RI, perlu dibahas secara terbatas.

8. *Understand how management prepare interim financial information, and understand the nature and intensity of the involvement of Internal Audit Unit (IAU) and the external auditor in the process.*

Internal Control

1. *Examine the adequacy and effectiveness of the Company's internal control, including controls and protection related to electronic information processing.*
2. *Understand the scope of internal control assessment process by IAU or by external auditors, and review the findings and recommendations on the significant control weaknesses, as well as review the management response to the problem.*

Internal Audit

1. *Assess charter, work plan (including budget), activities, staffing, and organizational structure of IAU.*
2. *Ensure that there are no restrictions on the scope of work of the IAU, except for justifiable reasons.*
3. *Assess the effectiveness of IAU functions, including adherence to professional standards of internal audit, which refers to the national or international internal auditor profession agencies*
4. *Have a periodic and incidental meetings with the head of IAU to discuss matters which, by the consideration of the Audit Committee or the head of IAU, need to be addressed on a limited basis.*
5. *Ask for audit report or results of IAU implementation of duties.*

External Audit

1. *Assess and recommend the external auditors to be appointed by the GMS.*
2. *Assess the scope and approach of the audit to be performed by the external auditor and assess the work of the external auditor and the audit conducted by the Supreme Audit Agency (BPK).*
3. *Coordinate the audit performed by IAU, external auditor, and BPK.*
4. *Assess, ensure and maintain the independence of the external auditors and BPK.*
5. *Hold periodic and incidental meetings with external auditors and BPK to discuss matters that, in the opinion of the Audit Committee or external auditor and BPK, need to be addressed on a limited basis.*

- Ketaatan
 1. Menilai efektivitas sistem dan mekanisme di dalam Perusahaan yang digunakan untuk memonitor ketaatan terhadap peraturan perundangan, penerapan *good corporate governance* serta menilai hasil-hasil investigasi oleh Manajemen terhadap sistem dimaksud serta tindak lanjutnya.
 2. Menilai temuan-temuan pemeriksaan khusus oleh SPI, auditor eksternal, maupun lembaga penyidik lainnya.
 3. Menilai proses sosialisasi kode etik, *whistle blowing system* Perusahaan kepada seluruh karyawan, termasuk proses *monitoring* ketaatannya.
 4. Secara reguler mendapatkan pemutakhiran atas hal-hal yang berkaitan dengan masalah ketaatan terhadap peraturan perundangan dari pihak Manajemen.
- Kewajiban
 1. Secara reguler melaporkan kepada Dewan Komisaris mengenai kegiatan, permasalahan, dan rekomendasi Komite Audit.
 2. Jika diperlukan memfasilitasi komunikasi antara SPI, auditor eksternal, BPK RI, Dewan Komisaris, dan Direksi.
 3. Setiap tahun melaporkan mengenai komposisi dan tanggung jawab Komite Audit serta pelaksanaan tugas Komite Audit.
 4. Menilai laporan lain yang diterbitkan oleh Perusahaan yang terkait dengan tanggung jawab dengan Komite Audit.
- Tanggung Jawab Lainnya
 1. Melakukan kegiatan lain yang terkait dengan piagam ini sesuai dengan permintaan Dewan Komisaris.
 2. Mengembangkan dan mengawasi investigasi khusus yang dianggap perlu.
 3. Menilai dan menilai kecukupan Piagam Komite Audit secara reguler, dan meminta diadakan perubahan seperlunya.
 4. Setiap tahun membuat pernyataan penegasan bahwa semua tanggung jawab yang terdapat dalam piagam telah dilaksanakan.
 5. Secara reguler melakukan evaluasi terhadap kinerja Komite Audit secara keseluruhan dan kinerja masing-masing anggotanya.
 6. Melakukan penelaahan atas informasi mengenai perusahaan serta RJP, RKAP, LM, dan informasi lainnya.
- Compliance
 1. Assess the effectiveness of the systems and mechanisms within the Company that is used for monitoring the adherence of laws and regulations, the implementation of good corporate governance as well as to assess the results of investigation undertaken by the management on the system as well as the follow-up actions.
 2. Assess the specific assessment findings of IAU, external auditors, and other investigators agencies.
 3. Assess the dissemination process of code of ethics, whistle blowing system to all company employees, including the compliance monitoring process
 4. Get regular updates on matters relating to regulatory compliance from the Management.
- Obligations
 1. Regularly report to the BOC on activities, issues, and recommendations of the Audit Committee.
 2. If necessary, facilitate communication between IAU, external auditors, BPK, the Board of Commissioners, and the Board of Directors.
 3. Annually report the composition and responsibilities of the Audit Committee as well as the Audit Committee duties performance.
 4. Assess other reports issued by the Company relating to the responsibilities of the Audit Committee.
- Other Responsibilities
 1. Perform other activities related to this charter as requested by the Board of Commissioners.
 2. Develop and oversee special investigations as deemed necessary.
 3. Assess and evaluate the adequacy of Audit Committee Charter on a regular basis, and request necessary amendment.
 4. Annually make an affirmation that all responsibilities set forth in the charter have been implemented.
 5. Regularly evaluate the overall performance of the Audit Committee and the performance of each of its members.
 6. Review information about the company as well as Long term plan, Action and Budget Plan, Management Report, and other information.

Kinerja Komite Audit Tahun 2013

Adapun program kerja yang telah dilaksanakan Komite Audit di sepanjang tahun 2013 antara lain:

1. Menyusun rencana kerja Komite Audit;
2. Merevisi Piagam Komite Audit dengan menyesuaikan kepada regulasi yang baru;
3. Melakukan Rapat Internal Komite Audit dan Rapat Komite Audit dengan Dewan Komisaris;
4. Melakukan rapat dengan Satuan Pengawas Internal (SPI) yang membahas beberapa permasalahan diantaranya:
 - a. Evaluasi Program Kerja SPI;
 - b. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP);
 - c. Pembahasan hasil Audit SPI; dan
 - d. Pembahasan Audit khusus SPI khususnya untuk kasus yang terjadi di Kantor Cabang Balikpapan.
5. Melakukan kerja ke kantor Cabang untuk mereview sistem pengendalian internal yang ada; dan
6. Memberikan tanggapan atas kegiatan operasional Perusahaan terutama yang terkait dengan pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris diantaranya mengenai:
 - a. Tanggapan atas laporan Manajemen tahun 2012;
 - b. Tanggapan atas Laporan per triwulan;
 - c. Pendapat atas pelaksanaan audit Tahun 2012 oleh KAP;
 - d. Pendapat atas perubahan Struktur Organisasi Perseroan;
 - e. Pendapat atas rencana Penghapusan Aktiva Tetap perseroan; dan
 - f. Pendapat atas penggunaan aset Perusahaan.

iii. Komite Investasi (Pengembangan Usaha)

Komite Investasi (Pengembangan Usaha) bertugas membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi kebijakan investasi. Adapun tugas dan tanggung jawab Komite Investasi (Pengembangan Usaha) sebagai berikut:

1. Membantu Dewan Komisaris dalam menyusun kebijakan investasi.
2. Membantu Dewan Komisaris untuk menelaah dan menganalisis usulan investasi/divestasi tertentu baik terhadap aspek finansial, *legal*, *risk management* dan GCG maupun aspek lainnya dengan memperhatikan faktor-faktor sosial, politik, ekonomi dan lingkungan yang berkembang pada saat usulan investasi/divestasi diajukan.

2013 Audit Committee Performance

The programs carried out by the Audit Committee during 2013 including:

1. *Develop work plan of the Audit Committee;*
2. *Revise the Audit Committee Charter in order to adjust to the new regulations;*
3. *Conduct Internal Audit Committee Meetings and the Audit Committee Meetings with the Board of Commissioners;*
4. *Hold meetings with the Internal Audit Unit (IAU) to discuss several issues such as:*
 - a. *Evaluation of IAU Work Program;*
 - b. *Appointment of Public Accounting Firm (KAP);*
 - c. *Discuss IAU audit results; and*
 - d. *Discuss IAU Special Audits, particularly for the case in Balikpapan Branch Office*
5. *Perform work in the branch office to review the existing internal control system; and*
6. *Provide response on the Company's operation, especially those related to the implementation of BOC monitoring function, including:*
 - a. *Response on the 2012 Management report;*
 - b. *Response on the quarterly report;*
 - c. *Opinion on the 2012 audit by Public Accountant Firm;*
 - d. *Opinion on the changes in the Company's Organization Structure;*
 - e. *Opinion on the Company's plan to write-off Fixed Assets; and*
 - f. *Opinion on the use of Company assets.*

iii. Investment Committee (Business Development)

Investment Committee (Business Development) is designed to assist the Board of Commissioners in the investment policy. Based on such purpose, the duties and responsibilities of the Investment Committee (Business Development) are:

1. *Assist the Board of Commissioners in the formulation of investment policies.*
2. *Assist the Board of Commissioners to examine and analyse certain investment/ divestment proposal, financial, legal, risk management aspect and corporate governance as well as other aspects by taking into account social, political, and economic, and environment factor that develops during the issuance of investment/ divestment proposal.*

3. Memberikan rekomendasi atas hasil analisa yang dilakukannya terhadap usulan investasi/divestasi dimaksud, dengan disertai latar belakang dan alasan-alasan yang jelas tentang diterima atau ditolaknya usulan suatu investasi/divestasi.
4. Memberikan pertimbangan kepada Dewan Komisaris dalam rangka memutuskan pelaksanaan investasi / divestasi sebagaimana dimaksud pada butir 1 dan 2.
5. Membantu Dewan Komisaris dalam membentuk *oversight committee* yang keanggotaannya bersifat *ad-hoc*, profesional dan independen.
6. Melakukan evaluasi kinerja investasi paling sedikit setiap triwulan dan memberikan rekomendasi hasil evaluasi kepada *SVP of Asset Management* dan Manajer *Legal, Risk Management* dan GCG melalui Direksi.

Keanggotaan Komite Investasi (Pengembangan Usaha)

Dalam keanggotaannya, Komite Investasi (Pengembangan Usaha) memiliki anggota terdiri dari sekurang-kurangnya 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota lainnya yang berasal dari luar Perusahaan. Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. KU.003/Dekom.101/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 telah dibentuk dan ditetapkan susunan Komite Investasi (Pengembangan Usaha) dengan susunan keanggotaan adalah;

Faisal Halimi	: Ketua / Chairman
Sahat Lumban Tobing	: Anggota / Member
Win Andriansyah	: Anggota / Member

Piagam Komite Investasi (Pengembangan Usaha)

- Tujuan
Komite Investasi dan Pengembangan Usaha mempunyai misi membantu Dewan Komisaris dalam mengevaluasi kebijakan investasi agar kegiatan investasi dapat berjalan sesuai dengan prinsip GCG, termasuk membantu Dewan Komisaris dalam melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang risiko usaha sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.
- Wewenang
Komite Investasi dan Pengembangan Usaha memiliki wewenang untuk melakukan penelaahan dan evaluasi terhadap berbagai hal yang berada dalam ruang lingkup tanggung jawabnya. Sehubungan dengan tanggung jawab tersebut maka Komite Investasi dan Pengembangan Usaha berwenang untuk:

3. Give recommendations on the analysis results of such investment/ divestment proposal, by specifying clear background and the reasons about the acceptance or rejection of investment/ divestment proposal.
4. Gives consideration to the Board of Commissioners in order to determine the application of investment/ divestment as mentioned in point 1 and 2.
5. Assist the Board of Commissioners in the establishment of oversight committee whose membership is ad-hoc, independent, and professional.
6. Evaluate investment performance at least in quarterly basis and make recommendation on the evaluation result to SVP of Asset Management and Manager of Legal, Risk Management and GCG through the Board of Directors.

Membership of Investment Committee (Business Development)

The Investment Committee (Business Development) members consist of at least 1 (one) member of the Board of Commissioners and at least 2 (two) other members from outside the Company. Based BOC Decision No. KU.003/Dekom.101/V/2013 dated May 10, 2013, the composition of the Investment Committee (Business Development) was determined as follows;

Charter of Investment Committee (Business Development)

- Objectives
Investment and Business Development Committee is designed to assist the Board of Commissioners to evaluate the investment policy so that investment activity can be run in accordance with the principles of good corporate governance, including assist the Board of Commissioners in giving periodic assessment and recommendation on business risks in accordance with the principles of good corporate governance.
- Authority
Investment and Business Development Committee has authority to review and evaluate various matters within the scope of their responsibilities. In connection with the responsibilities, Investment and Business Development Committee is authorized to:



1. Mendapat asistensi dan nasehat dari konsultan investasi serta tenaga ahli lainnya.
2. Mendapatkan informasi yang diperlukan dari seluruh karyawan.
3. Menemui semua pejabat Perusahaan, auditor eksternal, dan konsultan Perusahaan lainnya jika diperlukan.

- **Komposisi**
Komite Investasi dan Pengembangan Usaha mempunyai anggota 3 (tiga) orang, yang terdiri atas 1 (satu) orang atau lebih komisaris dan anggota lain yang ditunjuk dari luar Perusahaan. Ketua Komite Investasi dan Pengembangan Usaha dijabat oleh anggota yang berasal dari Dewan Komisaris Perusahaan.

Semua anggota komite harus independen, tidak memiliki konflik kepentingan, dan tidak terlibat dengan pengelolaan Perusahaan. Di antara anggota Komite Investasi dan Pengembangan Usaha harus

1. Get assistance and advice from accountants and other experts.
2. Obtain the necessary information from all employees.
3. Meet all Company officers, external auditors, consultants and other companies if necessary.

- **Composition**
There are three members of Investment and Business Development Committee. They consist of The Chairman of the Audit Committee who also serves as Independent Commissioner. Two (2) members of the Audit Committee are independent and appointed from outside the Company. Chairman of the Investment and Business Development Committee is chaired by a member of the Board of Commissioners.

All committee members must be independent, and neither has any conflict of interest, nor involved with the management of the Company. One of the members of the Investment and Business

ada yang memiliki keahlian di bidang investasi, manajemen strategi, resiko dan pengembangan usaha.

- **Rapat-rapat**
Komite Investasi dan Pengembangan Usaha mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali, dan jika diperlukan dapat menyelenggarakan rapat tambahan. Sesuai dengan kebutuhan dan relevansi permasalahan, Komite Investasi dan Pengembangan Usaha melalui Dewan Komisaris dapat mengundang Anggota Direksi untuk hadir dalam rapat-rapat Komite Investasi dan Pengembangan Usaha dan memberikan informasi yang diperlukan. Demikian pula, Komite Investasi dan Pengembangan Usaha dapat mengundang pejabat Perusahaan, auditor, konsultan investasi serta pihak lainnya untuk menghadiri rapat-rapat Komite Investasi dan Pengembangan Usaha. Komite Investasi dan Pengembangan Usaha akan menentukan agenda, pokok bahasan, serta mendistribusikan bahan rapat kepada seluruh anggota sebelum pelaksanaan rapat, dan membuat notulen rapat.
- **Tanggung Jawab**
Ruang lingkup tanggung jawab Komite Investasi dan Pengembangan Usaha mencakup:
 1. Membantu Dewan Komisaris mengkaji dan membahas kebijakan Direksi atas investasi atau divestasi yang nilainya material.
 2. Memotivasi tercapainya kegiatan investasi atau divestasi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan prinsip pengelolaan Perusahaan yang sehat.
 3. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan investasi serta melakukan review hasil kegiatan investasi untuk selanjutnya dilaporkan kepada Dewan Komisaris.
 4. Membantu Dewan Komisaris dalam mengidentifikasi risiko usaha.
 5. Memantau pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang terdiri dari risiko pasar, risiko keuangan, risiko operasional, risiko legal dan risiko sumber daya manusia.
 6. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional Perusahaan yang selanjutnya dilaporkan kepada Dewan Komisaris.
 7. Melakukan pendalaman atas potensi resiko yang perlu mendapatkan perhatian Dewan Komisaris dan memberikan saran perbaikan dan tindak lanjut kepada Dewan Komisaris.

Development Committee should have expertise in investment, strategic management, risk management and business development.

- **Meetings**
Investment and Business Development Committee holds meeting at least 1 (once) per month, and if necessary hold additional meetings. In accordance with the requirement and problems relevance, the Investment and Business Development Committee through the Board of Commissioners may invite members of BOD to attend the Investment and Business Development Committee meetings and provide the necessary information. The Investment and Business Development Committee may invite the Company's officers, auditors, investment consultant and other parties to attend meetings of the Investment and Business Development Committee. The Investment and Business Development Committee will determine the agenda, subject, and distribute meeting materials to all members prior to the meeting, and make the minutes of the meeting.
- **Responsibility**
The scope of responsibilities of the Investment and Business Development Committee include:
 1. *To assist the BOC in reviewing and discussing BOD policies on investment or divestment which has material value.*
 2. *To encourage investment or divestment in accordance with the provisions of laws and GCG principles.*
 3. *To evaluate investment and its results to be subsequently reported to the Board of Commissioners.*
 4. *To assist the Board of Commissioners in identifying business risks.*
 5. *To monitor the implementation of risk management policy consisting of market risk, financial risk, operational risk, legal risk and human resource risks.*
 6. *To evaluate the implementation of the Company operation in which the evaluation is subsequently reported to the Board of Commissioners.*
 7. *To explore the potential risks that need the BOC attention and suggest improvements and follow-up to the BOC.*

- Kewajiban
 1. Secara reguler melaporkan kepada Dewan Komisaris mengenai kegiatan, permasalahan, dan rekomendasi Komite Investasi dan Pengembangan Usaha.
 2. Setiap tahun melaporkan mengenai komposisi dan tanggung jawab Komite Investasi dan Pengembangan Usaha serta pelaksanaan tugas Komite.
 3. Menilai laporan lain yang diterbitkan oleh Perusahaan yang terkait dengan tanggung jawab Komite Investasi dan Pengembangan Usaha.
- Tanggung Jawab Lainnya
 1. Melakukan kegiatan lain yang terkait dengan piagam ini sesuai dengan permintaan Dewan Komisaris.
 2. Mengembangkan dan mengawasi investigasi khusus yang dianggap perlu.
 3. Menilai kecukupan Piagam Komite Investasi dan Pengembangan Usaha secara reguler, dan meminta diadakan perubahan seperlunya.
 4. Setiap tahun membuat pernyataan penegasan bahwa semua tanggung jawab yang terdapat dalam piagam telah dilaksanakan
 5. Secara reguler melakukan evaluasi terhadap kinerja Komite Investasi dan Pengembangan Usaha secara keseluruhan dan kinerja masing-masing anggotanya.
 6. Melakukan penelaahan atas informasi mengenai Perusahaan serta RJP, RKAP, LM, dan informasi lainnya.

Kinerja Komite Investasi (Pengembangan Usaha) Tahun 2013

Pencapaian kinerja Komite Investasi (Pengembangan Usaha) di sepanjang tahun 2013 diantaranya:

1. Mengikuti Rapat Internal Bulanan Komite dengan Dewan Komisaris serta Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan;
2. Mengikuti rapat dengan Satuan Pengawasan Internal (SPI) terkait dengan penyusunan rencana kerja Komite Investasi (Pengembangan Usaha); dan
3. Memberikan tanggapan atas kegiatan operasional Perusahaan terutama dengan pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris, diantaranya:
 - Tanggapan atas Surat Direktur Utama Perusahaan perihal persetujuan Dewan Komisaris untuk mengagunkan Aktiva Tetap untuk kepentingan garansi bank;

- Obligations
 1. Regularly report activities, issues, and recommendations of the Investment and Business Development Committee to the BOC.
 2. Annually report the composition and responsibilities of the Investment and Business Development Committee as well as their implementation of duties
 3. Assess other reports issued by the Company relating to the responsibility of Investment and Business Development Committee.
- Other Responsibilities
 1. Perform other activities related to this charter as requested by the Board of Commissioners.
 2. Develop and oversee special investigations if deemed necessary.
 3. Assess and evaluate the adequacy of the Investment and Business Development Committee Charter on a regular basis, and request necessary amendment.
 4. Annually make an affirmation that all responsibilities set forth in the charter have been implemented.
 5. Regularly evaluate overall performance of the Investment and Business Development Committee and the performance of each of its members.
 6. Review information about the company as well as Long Term Plan, Action and Budget Plan, Management Report, and other information.

Performance of Investment Committee (Business Development) in 2013

The performance of Investment Committee (Business Development) in 2013 including:

1. Participate in the Committee Monthly Internal Meetings with the Board of Commissioners and the Joint Meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors;
2. Have meeting with the Internal Audit Unit (IAU) related to the preparation of work plan of Investment Committee (Business Development); and
3. Provide responses to the Company operation, especially with the implementation of BOC monitoring function, including:
 - Give response to the Letter of President Director on the BOC approval to pledge fixed assets for the purpose of bank guarantee;



- Tanggapan atas putusan pengadilan PTUN Jakarta No. 32/B/2013/PTUN.jkt;
- Tanggapan atas somasi untuk pembatalan laporan kajian CMC KM Idola Nusantara dan permintaan penerbitan CMC KM Idola Nusantara;
- Tanggapan atas laporan Manajemen Perusahaan per triwulan; dan
- Tanggapan atas penambahan Penyertaan Modal Negara pada Perusahaan.

- *Give response to the Jakarta Administrative Court decision No. 32/B/2013/PTUN.jkt;*
- *Give response to a subpoena for the cancellation of review report on CMC KM Idola Nusantara and request the issuance of CMC KM Idola Nusantara;*
- *Give response to the Company's quarterly management reports; and*
- *Give response to the addition of Government Capital to the Company*



i. Sekretaris Perusahaan

Direksi mengangkat seorang Sekretaris Perusahaan untuk membantu menjalankan tugas dan fungsi manajemen Perusahaan, khususnya dalam aspek komunikasi dan segala hal yang terkait dengan aspek tersebut. Dalam menjalankan fungsinya, Sekretaris Perusahaan memiliki tugas-tugas sebagai berikut:

1. Sekretaris Perusahaan, adalah juga anggota tim manajemen, bertindak sebagai *liaison officer* (penghubung) dan bertugas sebagai pengelola dokumen-dokumen Perusahaan.
2. Dalam rangka mencegah kemungkinan penyalahgunaan informasi oleh orang dalam (*insider*), maka seluruh dokumen Perusahaan yang terkait dengan kegiatan dan keputusan ketiga organ penting Perusahaan, yaitu RUPS, Direksi dan Komisaris haruslah berada dalam pengawasan dan pengelolaan Sekretaris Perusahaan.
3. Sekretaris Perusahaan juga bertanggung jawab untuk mempersiapkan, menandatangani dan menyimpan risalah-risalah RUPS, rapat Direksi dan mengawasi penyebaran informasi kepada para anggota Direksi, Komisaris, Pemegang Saham, pihak ketiga, pejabat negara dan lain-lain.
4. Sekretaris Perusahaan berkewajiban membantu Komisaris Utama dan Direktur Utama dalam mempersiapkan dan menyelenggarakan rapat-rapat mereka. Sekretaris Perusahaan berkewajiban menyimpan seluruh risalah rapat Komisaris dan Direksi.
5. Sekretaris Perusahaan juga berkewajiban mengawasi persiapan/penyusunan, penyerahan dan penyimpanan berbagai laporan dan dokumen Perusahaan lainnya kepada pejabat Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan fungsi hubungan masyarakat (*public relations*).
7. Memberi masukan kepada Direksi terkait kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perusahaan.
8. Melakukan pembinaan dan pengendalian tata kelola perusahaan yang baik (GCG).
9. Melalui Surat Keputusan No. DU.052/KP.503/KI-13 Direksi menunjuk Ir. Saifuddin Wijaya, MBA., untuk melaksanakan tugas dan fungsi Sekretaris Perusahaan.

ii. Satuan Pengawasan Intern/Audit Internal

Perusahaan telah memelihara sistem pengendalian internal keuangan yang menjamin keandalan sistem akuntansi. Sistem pengendalian internal keuangan diberlakukan untuk memberikan jaminan yang wajar

i. Corporate Secretary

The Board of Directors has appointed a Corporate Secretary to help in performing tasks and functions of the Company's management, especially in the aspect of communication and all things related to this aspect. In performing its duties, the Corporate Secretary has the following tasks:

1. *Corporate Secretary is also a member of the management team, acting as a liaison officer and managing company documents.*
2. *In order to prevent possible misuse of information by insiders, all documents related to the activities and decisions of the Company's three important organs, i.e. GMS, Board of Directors and Commissioners shall be under the supervision and management of the Corporate Secretary.*
3. *Corporate Secretary is also responsible for preparing, signing and storing minutes of the GMS, the Board of Directors meetings and oversees the dissemination of information to the members of the Board of Directors, Commissioners, Shareholders, third parties, government officials, etc.*
4. *Corporate Secretary shall assist President Commissioner and President Director in preparing and organizing their meetings. The Corporate Secretary shall save all minutes of BOC and BOD meetings.*
5. *Corporate Secretary shall supervise the preparation/ compilation, submission, and storage of various reports and other company documents to the Government officials in accordance with the prevailing laws and regulations*
6. *Carry out activities related to the function of public relations.*
7. *Provide feedback to the BOD related to compliance with laws and regulations applicable to the Company.*
8. *Perform development and control of good corporate governance (GCG).*
9. *Through BOD Decision No. DU.052/KP.503/KI-13, Directors appointed Ir. Saifuddin Wijaya, MBA to carry out the duties and functions of the Corporate Secretary.*

ii. Internal Audit Unit

The company has maintained an internal control system that ensures the reliability of the financial accounting system. Financial internal control system is designed to provide reasonable assurance to keep

dalam hubungannya dengan menjaga aset dari penyalahgunaan dan peralihan kepemilikan secara tidak sah, menjaga keabsahan catatan-catatan akuntansi dan keandalan informasi keuangan yang dapat dipercaya yang digunakan dalam Perusahaan maupun yang dipublikasikan.

Perusahaan menetapkan Satuan Pengawasan Intern (SPI) sebagai unit yang bertanggung jawab atas efektivitas sistem pengendalian internal. Selain itu perusahaan juga membentuk Satuan Jaminan Mutu (Satjamtu) sebagai penanggung jawab diterapkan Sistem Manajemen Mutu berdasarkan persyaratan standar ISO 9001:2008 sebagai wujud komitmen manajemen dalam meningkatkan kepuasan pemakai jasa (*customer statisfaction*) dan penyempurnaan yang berkesinambungan (*continuous improvement*). Dalam mendukung aktivitas pengendalian internal, Perusahaan senantiasa menjamin independensi SPI dan Satjamtu dalam melaksanakan audit serta meningkatkan kompetensi para auditornya.

Adapun unit Audit Internal Perusahaan bertugas untuk:

1. Membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perusahaan, menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada Perusahaan serta memberikan saran-saran perbaikannya.
2. Memberi keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Audit Internal kepada Direktur Utama.
3. Memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.
4. Membantu dan bekerjasama baik dengan Komite Audit maupun Komite Investasi dan Pengembangan dalam hal audit internal maupun eksternal.

Atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris, Direksi memberikan keterangan hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Audit Internal. Direksi wajib memerhatikan dan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Audit Internal.

Dalam melaksanakan tugasnya, Audit Internal wajib menjaga kelancaran tugas unit kerja lainnya dalam Perusahaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Audit Internal dipimpin oleh seorang Kepala SPI yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Melalui Surat Keputusan No. DU.194/KP.503/KI-11, Direksi menunjuk Asep Sutrisna S, S.H., sebagai Kepala SPI untuk melaksanakan tugas dan fungsi Audit Internal.

assets from being misused and prevent unauthorized transfer of ownership, maintain the validity of accounting records and reliability of financial information used in the Company or published.

The Company appoints Internal Audit Unit (IAU) as the unit responsible for the effectiveness of the internal control system. In addition, the Company also establishes a Quality Assurance Unit (QAU) as unit responsible for the application of Quality Management System based on ISO 9001:2008 standard requirements as the management's commitment on gaining customer satisfaction and continuous improvement. In supporting internal control activities, the Company always ensures the independence of IAU and QAU in performing audits and improves the competence of auditors.

The Company's Internal Audit Unit is responsible for :

1. *Assisting the President Director in conducting the Company's operational and financial audit, assessing its control, management and implementation in the Company and providing suggestion for improvement*
2. *Providing information on the assessment results or implementation result of Internal Audit duties to the President Director.*
3. *Monitoring the follow-up on reported audit results.*
4. *Assisting and cooperating with the Audit Committee and the Investment and Development Committee in terms of internal and external audit.*

Upon written request from the Board of Commissioners, the Board of Directors give explanation about audit result or Internal Audit implementation result. Board of Directors shall pay attention and immediately take any necessary steps for every issues stated in audit reports made by the Internal Auditor.

In performing its duties, the Internal Auditor shall maintain smooth operation of other work units in the Company in accordance with their respective duties and responsibilities. Internal Audit Unit is led by Head of IAU who is responsible to the President Director. Through Decision No. DU.194/KP.503/KI-11, the Board of Directors appointed Sutrisna Asep S, SH, as Head of IAU to carry out the duties and functions of Internal Audit.

Piagam Audit Internal

- **Visi**
Diakui luas oleh *stakeholder* sebagai auditor internal, mampu memberikan nilai tambah bagi Perusahaan dan membantu terciptanya GCG.
- **Misi**
Melakukan fungsi audit internal melalui *assurance* dan pemberian jasa konsultasi. Fungsi *assurance* SPI dilaksanakan dengan kegiatan: audit operasional, audit kepatuhan, audit keuangan, audit sistem informasi, audit investigasi, audit di belakang meja (*desk audit*), reviu untuk tujuan khusus (*specific review*) dan jenis *assurance* lainnya, yang secara umum kesemuanya disebut juga dengan kegiatan audit. Untuk pemberian jasa konsultasi pelaksanaannya dilakukan dalam batas-batas yang jelas sedemikian rupa sehingga tidak mengurangi independensi dan objektivitas SPI dalam melakukan *assurance* terhadap kegiatan-kegiatan yang menjadi objek konsultasi.
- **Sasaran**
 1. Memperoleh informasi dalam waktu yang layak, dari seluruh karyawan Perusahaan. Dengan wewenang ini, SPI berhak melihat semua dokumen dan catatan, meminta keterangan dari setiap karyawan, dan meninjau seluruh gedung, fasilitas, serta aktiva Perusahaan.
 2. Untuk itu, setiap karyawan Perusahaan berkewajiban memberikan informasi yang diperlukan SPI dalam waktu yang layak, sehingga memungkinkan SPI untuk bekerja secara efektif.
 3. Mengalokasikan sumberdaya audit, menentukan fokus, ruang lingkup dan jadwal audit, serta menerapkan teknik yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan audit.
 4. Jika dipandang perlu, SPI memiliki wewenang untuk mendapatkan saran dan nasehat dari tenaga ahli (profesional).
 5. Menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Direktur Utama, dan berkoordinasi dengan Komisaris, melalui Komite Audit.
- **Kewajiban**
 1. Membantu Direktur Utama dalam memenuhi tanggung jawab pengelolaan Perusahaan dengan memonitor kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian manajemen Perusahaan. Kewajiban untuk mengembangkan sistem pengendalian manajemen dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Perusahaan berada dalam tanggung jawab manajemen.

Internal Audit Charter

- **Visi**
Widely recognized by stakeholders as an internal auditor, able to provide added value to the Company and assist the creation of GCG.
- **Mission**
Conduct internal audit function through assurance and the provision of consulting services. IAU's assurance function is implemented through operational audits, compliance audits, financial audits, information systems audits, investigative audit, desk audits, specific reviews, and other types of assurance, which in general are also called audit activities. For the provision of consulting services, the implementation is done within clear boundaries so as not to reduce the independence and objectivity of IAU in conducting assurance to activities that become the object of consultation.
- **Objective**
 1. *Obtain information in a reasonable time from all employees of the Company. With this authority, IAU reserves the right to see all documents and records, request information from any employee, and review all buildings, facilities, and assets of the Company.*
 2. *To that end, each employee of the Company is obliged to provide the necessary information within a reasonable time to IAU, so as to allow IAU to work effectively.*
 3. *Allocate audit resources, determine the audit's focus, scope and schedule, as well as apply techniques that are necessary to achieve the objectives of the audit.*
 4. *If deemed necessary, IAU has the authority to obtain suggestions and advices from the experts (professionals).*
 5. *Submit a report and consult the President Director, and coordinate with the Commissioners through the Audit Committee.*
- **Duties**
 1. *Assist the President Director in fulfilling the Company's management responsibilities by monitoring the adequacy and effectiveness of the Company's management control system. The duty to develop management control systems in order to achieve the Company's goals and objectives is under the responsibility of management.*

2. Membantu Direktur Utama dalam meningkatkan *corporate governance* Perusahaan dengan memonitor kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian Perusahaan. Kewajiban untuk mengembangkan sistem pengendalian manajemen dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Perusahaan berada dalam tanggung jawab manajemen.
3. Membantu Direktur Utama dalam meningkatkan *corporate governance* Perusahaan terutama dalam mendorong efektivitas organ-organ *corporate governance*, serta efektivitas proses pengendalian manajemen, manajemen risiko, implementasi etika bisnis dan pengukuran kinerja organisasi.
4. Memberikan kajian dan rekomendasi agar kegiatan Perusahaan mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran secara efektif, efisien dan ekonomis.
5. Membantu manajemen dalam memperhatikan perubahan lingkungan, risiko bisnis yang muncul dan hal-hal yang mempengaruhi hasil dan kinerja Perusahaan.
6. Menciptakan nilai tambah dengan mengidentifikasi peluang-peluang untuk meningkatkan kehematan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan di Perusahaan. Menilai kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian intern. Manajemen operasional berkewajiban untuk mengembangkan sistem pengendalian manajemen dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Perusahaan.
7. Berkoordinasi dengan Dewan Komisaris melalui Direktur Utama terkait dalam hal memenuhi tanggung jawab pengelolaan Perusahaan, meningkatkan *corporate governance* dengan memonitor kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian, dan mendorong efektivitas organ-organ *corporate governance*, proses pengendalian manajemen, manajemen risiko, implementasi etika bisnis dan pengukuran kinerja organisasi.

- Ruang Lingkup Pekerjaan

1. Meyakinkan bahwa sistem pengendalian manajemen telah memadai, bekerja secara efisien, dan ekonomis, serta berfungsi secara efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan.
2. Mengevaluasi ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kebijakan serta prosedur Perusahaan.
3. Mengevaluasi kehandalan dan integritas informasi keuangan dan informasi operasional.

2. Assist the President Director in improving the Company's *corporate governance* by monitoring the adequacy and effectiveness of its control system. The duty to develop management control systems in order to achieve the Company's goals and objectives is under the responsibility of management.

3. Assist the President Director in improving the Company's *corporate governance*, especially in boosting the effectiveness of corporate governance organs, as well as the effectiveness of the management control process, risk management, implementation of business ethics, and measurement of organizational performance.

4. Provide review and recommendation so that the Company's activities lead to the achievement of goals and objectives effectively, efficiently and economically.

5. Assist the management in observing environmental changes, emerging business risks and issues that affect the Company's results and performance.

6. Create added value by identifying opportunities to improve the retrenchment, efficiency and effectiveness of the Company's activities. Assess the adequacy and effectiveness of internal control systems. Operational management is obliged to develop a management control system in order to achieve the Company's goals and objectives.

7. Coordinate with the Board of Commissioners through the President Director in fulfilling the responsibility of company management, improving corporate governance by monitoring the adequacy and effectiveness of the control system, and boosting the effectiveness of corporate governance organs, management control process, risk management, implementation of business ethics and measurement of organizational performance.

- Scope of Work

1. Ensure that the management control systems are adequate, work efficiently and economically, as well as functioning effectively to achieve the desired goals and objectives.
2. Evaluate compliance with the applicable laws and regulations, as well as the Company's policies and procedures.
3. Evaluate the reliability and integrity of financial information and operational information.

4. Menilai kecukupan sarana untuk menjaga dan melindungi kekayaan Perusahaan.
 5. Melaksanakan penugasan khusus yang relevan dengan ruang lingkup pekerjaan tersebut di atas, seperti penyelidikan dan pengungkapan atas penyimpangan, kecurangan dan pemborosan.
 6. Menyiapkan laporan *assurance* dan rekomendasi untuk perbaikan.
- **Tanggung Jawab (Akuntabilitas)**
Kepala SPI bertanggungjawab kepada Direktur Utama untuk:
 1. Memberikan kajian dan rekomendasi mengenai kecukupan dan efektivitas proses manajemen Perusahaan dalam mengendalikan kegiatannya dan pengelolaan risiko.
 2. Melaporkan hal-hal penting berkaitan dengan proses pengendalian manajemen, termasuk melaporkan kemungkinan melakukan peningkatan pada proses tersebut.
 3. Memberikan informasi mengenai perkembangan dan hasil-hasil pelaksanaan rencana audit tahunan kepada semua unit produksi (cabang-cabang) dan kecukupan sumber daya audit..
 4. Berkoordinasi dengan Komite Audit dan Auditor Eksternal maupun institusi pengendalian dan *governance* lainnya.
 - **Standar Pelaksanaan Pekerjaan**
Dalam melaksanakan pekerjaannya, SPI mengacu pada standar-standar profesi audit dan kode etik SPI. Standar tersebut telah sesuai dengan kode etik audit internal dari "*The Institute of Internal Auditor Inc.*", sebagaimana telah di-*endorse* oleh Konsorsium Profesi Audit Internal Indonesia.

Pelaksanaan Kegiatan Audit Internal

Selama tahun 2012, Audit Internal Perusahaan telah melakukan audit operasional terhadap 16 unit kerja, sedangkan Satjamtu telah melakukan Audit Internal terhadap 29 unit kerja, meliputi Kantor Pusat dan Unit Produksi; serta Audit Eksternal sebanyak 3 (tiga) kali yang dilakukan di bulan Januari, September dan Desember.

Auditor Eksternal

Sesuai keputusan RUPS tanggal 25 April 2013, RUPS memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan bertindak sebagai auditor independen untuk melaksanakan audit atas laporan tahunan dan perhitungan tahunan Perusahaan tahun buku 2013. Selanjutnya, berdasarkan proses pengadaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan prinsip GCG, Dewan Komisaris telah menunjuk KAP Husni, Mucharam

4. *Assess the adequacy of the means to preserve and protect the Company's assets.*
5. *Carry out special assignments that are relevant to the scope of work mentioned above, such as investigation and disclosure of irregularities, fraud and waste.*
6. *Prepare assurance reports and recommendations for improvement.*

- **Responsibilities (Accountability)**
Head of IAU is responsible to the President Director for:
 1. *Providing review and recommendations on the adequacy and effectiveness of the Company's management process in controlling operations and risk management.*
 2. *Reporting important matters relating to the management control process, including reporting on the possibility to improve the process.*
 3. *Providing information on the development and results of the annual audit plan implementation to all production units (branches) and the adequacy of audit resources.*
 4. *Coordinating with the Audit Committee and External Auditors, as well as other control and governance institutions.*
- **Standard of Work Implementation**
In carrying out its work, IAU refers to the audit professional standards and IAU code of ethics. Those standards are in compliance with the internal audit code of ethics from "The Institute of Internal Auditors Inc.," as endorsed by the Indonesian Consortium of Internal Audit Professionals.

The Implementation of Internal Audit Activities

In 2012, the Company's Internal Audit Unit conducted operational audit to 16 work units, while QAU conducted internal audit to 29 work units, including Head Office and Production Units; and External Audit was conducted 3 (three) times in January, September and December.

External Auditor

Based on GMS resolution on April 25, 2013, the GMS authorized the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant Firm (KAP) that will act as an independent auditor to conduct the audit of the Company's annual report and financial statements for fiscal year 2013. Furthermore, based on the procurement process in accordance with applicable regulations and GCG principles, the BOC has appointed KAP Husni, Mucharam & Rasyidi as

& Rasidi sebagai auditor atas laporan keuangan Perusahaan tahun buku 2013. Auditor eksternal tersebut terbebas dari pengaruh Dewan Komisaris, Direksi dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam Perusahaan, serta perusahaan wajib menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan auditor eksternal sehingga memungkinkan auditor eksternal memberikan pendapatnya tentang kewajaran, ketaatan azasan dan kesesuaian laporan keuangan Perusahaan dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Tugas auditor eksternal untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perusahaan dan memberikan pendapat (opini) secara independen terhadap kewajaran dan kesesuaian laporan keuangan Perusahaan dengan Standar Akuntansi Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan menjamin proses penunjukan auditor eksternal dan pelaksanaan audit dilakukan secara independen tanpa pengaruh Direksi dan pihak-pihak di luar Perusahaan.

Besarnya jasa audit yang dibayarkan Perusahaan untuk laporan keuangan tahun 2013 yaitu Rp214.500.000,- termasuk PPN 10%. KAP Husni, Mucharam & Rasidi tidak memberikan jasa konsultasi lainnya kepada Perusahaan. Hasil audit tahun buku 2013 oleh KAP Husni, Mucharam & Rasidi menyatakan bahwa laporan keuangan Perusahaan telah disajikan secara wajar berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Pada bulan Nopember 2013, Perusahaan telah diaudit oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK) Republik Indonesia dan hingga tahun buku berakhir pelaksanaan belum selesai. Dalam proses yang sedang berjalan, tidak ada temuan yang cukup material yang dapat mempengaruhi secara negatif kinerja Perusahaan.

iii. Manajemen Risiko

Dalam menjalankan aktivitasnya, Perusahaan menyadari risiko sebagai kesatuan yang utuh dan tak terhindarkan. Risiko (*risk*) merupakan efek ketidakpastian yang dapat menghasilkan penyimpangan negatif terhadap tujuan-tujuan perusahaan. Untuk itu, Perusahaan menerapkan manajemen risiko (*risk management*) sebagai serangkaian aktivitas yang terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi dalam menghadapi risiko, dimana prinsip manajemen risiko menjadi nilai-nilai kunci yang diyakini merupakan panduan penerapan proses manajemen risiko.

the auditor of the Company's financial statements for fiscal year 2013. The external auditors are free from the influence of the Board of Commissioners, Directors and stakeholders in the Company, and the company is obliged to provide all accounting records and supporting data necessary for the external auditor to give opinion on the fairness, compliance and appropriateness of the Company's financial statements with the Indonesian Financial Accounting Standard.

External auditor task is to audit the financial statements of the Company and provide independent opinion on the fairness and appropriateness of the Company's financial statements with the Financial Accounting Standard and prevailing legislation. The company ensures the appointment of external auditors and the audit conducted independently without the influence of the Board of Directors and parties outside the company.

The amount of audit services paid by the Company for the 2013 financial statements was Rp214,500,000,- including 10% VAT. Public Accounting Firm Husni, Mucharam & Rasyidi did not provide other consulting services to the Company. The result of 2013 audit by KAP Husni, Mucharam & Rasidi declares that the Company's financial statements were prepared in a proper manner based on generally accepted accounting principles in Indonesia.

In November 2013, the Company was audited by the Supreme Audit Agency (BPK) of the Republic of Indonesia and until the end of the fiscal year the audit has not been completed. In the ongoing process, there is no material finding that can negatively affect the Company's performance.

iii. Risk Management

In carrying out its activities, the Company considers risks as a unified whole and somewhat inevitable. Risk is the effect of uncertainty that may distort the goals of the company. To that end, the Company applies risk management as a series of coordinated efforts designed to direct and control an organization in facing risks, in which risk management principles play a key role which is believed to provide guidance to the application of risk management process.

Manajemen Risiko Korporasi (*Enterprise Risk Management/ERM*) adalah sebuah proses yang diterapkan dalam penyusunan strategi yang dirancang untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang dapat berpengaruh terhadap kemampuan Perusahaan untuk mencapai tujuan dan sasarannya. Selain itu, ERM berfungsi untuk mengelola risiko agar berada dalam tingkat yang dapat diterima dan dapat memberikan kepastian bahwa tujuan dan sasaran Perusahaan dapat tercapai. Untuk itu, diperlukan mitigasi risiko sebagai sebuah proses pengelolaan risiko yang bertujuan mengurangi kemungkinan terjadinya risiko, mengurangi dampak risiko, mentransfer sebagian atau seluruh risiko dan menghindari terjadinya risiko.

Kerangka Kerja Manajemen Risiko (*Risk Management Framework*) menjadi dasar dari mekanisme yang diterapkan oleh Perusahaan dalam mengatur aktivitas pengelolaan risiko agar dapat terlaksana secara sistematis dan terstruktur. Dalam hal tersebut, proses Manajemen Risiko diperlukan sebagai kegiatan yang dimulai dari identifikasi risiko sampai dengan pemantauan penanganan risiko, dimana filosofi Manajemen Risiko menjadi kunci dari sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Perusahaan sebagai landasan penerapan Manajemen Risiko yang memberikan suatu arahan strategis bagi seluruh pemangku kepentingan internal dan juga eksternal mengenai tujuan utama penerapan ERM di lingkungan Perusahaan.

Perusahaan juga menerapkan kriteria risiko sebagai kerangka acuan untuk menentukan besarnya eksposur risiko. Di samping itu, Perusahaan juga menyiapkan infrastruktur Manajemen Risiko sebagai sebuah kerangka kerja pengelolaan risiko yang ditetapkan guna memastikan agar penerapan ERM yang dilakukan oleh Perusahaan dapat berlangsung secara efektif, proaktif dan berkesinambungan.

Melalui Surat Keputusan DU.052/KP.503/KI-13, Direksi menunjuk Sudirman sebagai Manajer *Legal, Risk Management & GCG* untuk melaksanakan tugas dan fungsi ERM Perusahaan.

Prosedur Identifikasi Mengenai Sistem Manajemen Risiko

Dalam mengidentifikasi risiko, Perusahaan menerapkan prosedur identifikasi sistem manajemen risiko. Atasannya terkait (dari Pemilik Risiko Kunci) menentukan tujuan yang ingin dicapai perusahaan (sasaran jangka panjang perusahaan/RJPP, target rencana kerja jangka pendek/RKAP, tujuan proses bisnis/aktivitas yang

Enterprise Risk Management (ERM) is a process applied in the preparation of a strategy that is designed to identify risks that may improve Company's ability in achieving its goals and objectives. In addition, the ERM is designed to manage risks within acceptable levels and to assure the Company's goals and objectives are attained. To that end, risk mitigation is needed to be a risk management process that aims to minimize risk likelihood, reduce the risk impact, transfer part or all of the risks, and prevent the risk.

Risk Management Framework is the basis of the mechanism adopted by the Company in risk management activities so it can be implemented systematically and well structured. In such cases, risk management process is needed as an activity that starts from the risk identification to the risk management monitoring, where risk management philosophy become the key of a statement made by the Company as the basis of Risk Management implementation that provides strategic guidance for all internal and external stakeholders on the main purpose of ERM implementation in the Company.

The Company also applies risk criteria as a frame of reference to determine the amount of risk exposure. In addition, the Company also set up the risk management infrastructure as a risk management framework that is established to ensure that the ERM applied by the Company works in an effective, proactive and continuous manner.

Through Decsion Letter No. DU.052/KP.503/KI-13, Board of Directors appointed Sudirman as the Manager of Legal, Risk Management & GCG to carry out the duties and functions of the Company ERM.

Identification Procedures of Risk Management System

In identifying risks, the Company adopts the identification procedure of risk management system. The relevant Superior (from Key Risk Owner) determines the objectives to be achieved by the company (the company's long-term goals/ RJPP, the short-term work plan target/ RKAP, the purpose

menggunakan sumber daya perusahaan serta tujuan rencana kerja pelaksanaan/aktivitas proyek). Kemudian, Pemilik Risiko Kunci dan Divisi Manajemen Risiko melakukan proses identifikasi risiko yang mencakup hal-hal berikut:

- Identifikasi peristiwa risiko,
- Identifikasi penyebab risiko,
- Identifikasi sumber risiko,
- Identifikasi peristiwa risiko baru.

Risiko-risiko tersebut terdiri atas:

of business processes/ activities that utilize the company resources and the objectives of work plan implementation/ project activities). Furthermore, the Key Risks Owner and Risk Management Division conduct risk identification process that include:

- Identification of risky events,
- Identification of the cause of risk,
- Identification of sources of risk,
- Identification of new risky events.

These risks consist of:

Jenis Risiko Type of Risk	Referensi Reference
Risiko Strategis Yaitu risiko-risiko yang : - Akan mempengaruhi tercapainya tujuan bisnis perusahaan; - Mengancam reputasi perusahaan dari aktifitasnya; - Timbul karena pelanggaran terhadap GCG, hukum serta peraturan Strategic risk is risk that: - Will affect the achievement of business objectives; - Threaten the company's reputation from its activities; - Arise due to violations against GSG, law and regulation	- APBN/APBD - RJPP - RKAP - Dokumen Tender - Kontrak Kerja - Peraturan dan Perundang-undangan yang terkait, misalnya UU BUMN, Perpres Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, UU Keuangan dan Negara dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi - State Budget/Domestic Budget - Company's Long Term Plan (RJPP) - Action Plan and Budget - Tender/bidding Documents - Work Contract - Related Regulations and legislation, such as SOE Law, Presidential Decree on Procurement of Goods/ Services for the Government, Law on Public Finance and Law on the Eradication of Corruption
Risiko Operasional Yaitu risiko-risiko yang muncul karena : - Kegagalan sistem; - Lemahnya <i>quality control</i>; - Panjangnya birokrasi; <i>Human error</i> dalam proses produksi; Operational Risk Is risk that arise due to: - Failure of the system; - Lack of quality control; - The length of bureaucracy; - Human error in the production process;	- Dokumen Tender - Kontrak Kerja - Sistem dan Prosedur serta bagan alir - Tender/ bidding documents - Work contract - Systems and procedures as well as flow chart
Risiko Finansial Yaitu risiko-risiko yang mempengaruhi kemampuan perusahaan menghasilkan profit seperti : - Lemahnya pengendalian biaya; - Kurangnya modal; - Perubahan suku bunga; - Fluktuasi kurs valuta asing, termasuk didalamnya risiko akibat kredit dan likuiditas yang terkait dengan pelaksanaan proyek/kegiatan tersebut. Financial risk Is risk that affect the company's ability to generate profits, such as: - Weakness in cost control; - Lack of capital; - Changes in interest rates; - Fluctuations in foreign exchange rates, including risk of credit and liquidity related to implementation of the project / activity.	- RKAP - Laporan Keuangan - Rencana Anggaran Biaya (RAB) - Action Plan and Budget - Financial Statement - Budget Plan (RAB)

Setiap potensi risiko yang timbul akan diidentifikasi pula dampak dan mitigasinya oleh Pemilik Risiko Kunci dan Divisi/Satuan/Divisi Manajemen Risiko, hingga kemudian seluruh potensi risiko yang teridentifikasi dimasukkan ke dalam formulir Laporan Registrasi Risiko dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

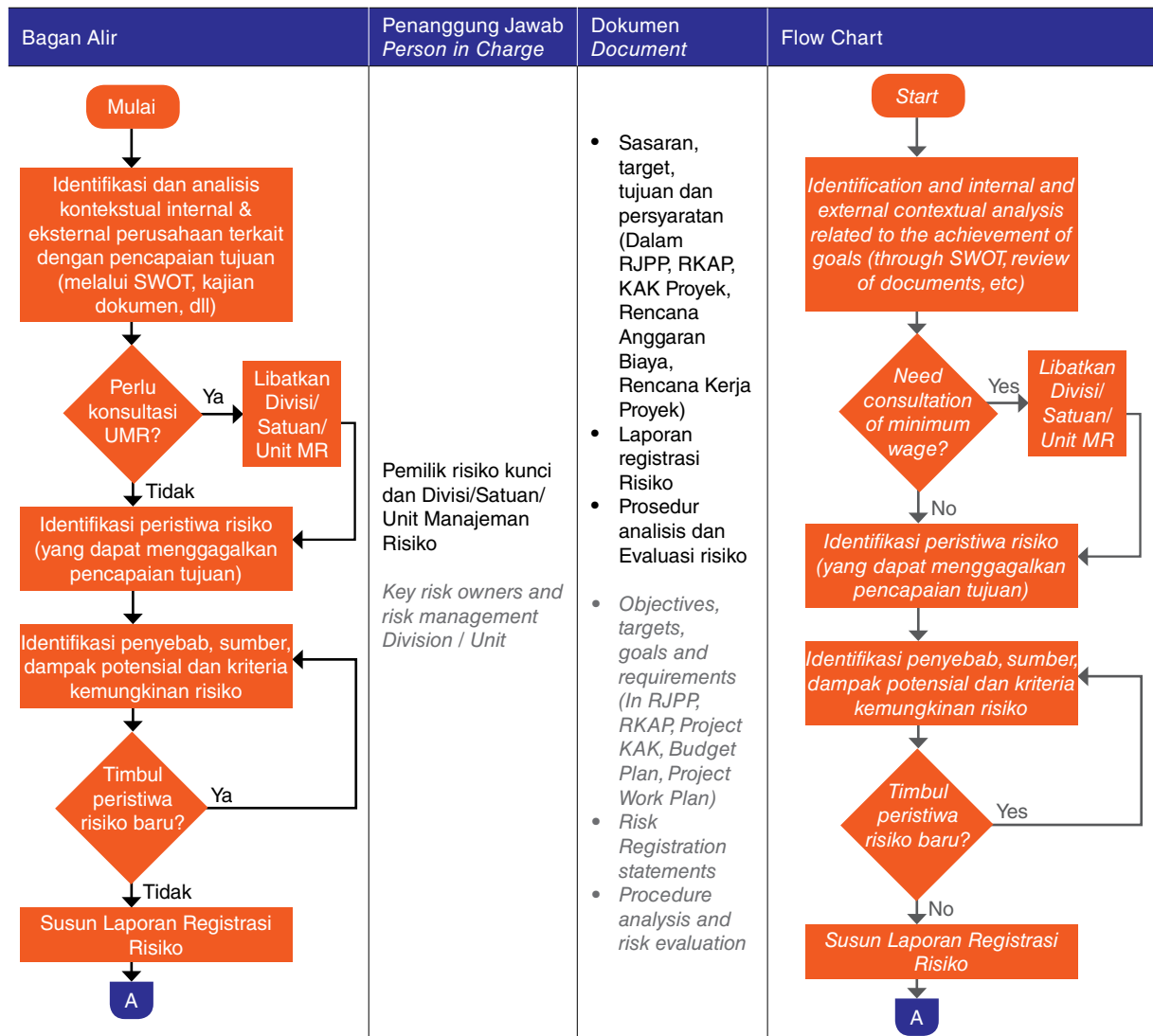
The Key Risk Owner and Risk Management Division/ Unit will not only identify every potential risk but also its impact and mitigation. All the identified potential risks are listed in the Risk Registration Statements form and signed by an authorized officer.

Alir Prosedur Identifikasi Risiko

Risk Identification Procedures

Bagan Alir Prosedur Identifikasi Risiko

Risk Identification Procedures Flow Chart



Analisis dan Evaluasi Risiko

Divisi Manajemen Risiko bersama Pemilik Risiko Kunci melakukan pengukuran dan penentuan peringkat dampak dan kemungkinan risiko yang telah teridentifikasi dengan menggunakan tera dampak dan kemungkinan risiko yang telah ditetapkan serta memperhitungkan efektivitas kontrol internal yang ada. Peringkat kemungkinan risiko yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tingkat Kemungkinan <i>Possibility Level</i>	Probabilitas Terjadinya Risiko <i>Risk Probability</i>	Frekuensi Terjadinya Risiko <i>Risk Frequency</i>
(1) Sangat Kecil (1) <i>Very Low</i>	0 - 20%	Tahunan <i>Annual</i>
(2) Kecil (2) <i>Low</i>	21 - 40%	Semester <i>Semester</i>
(3) Sedang (3) <i>Medium</i>	41 - 60%	Triwulan <i>Quarterly</i>
(4) Besar (4) <i>High</i>	61 - 80%	Bulanan <i>Monthly</i>
(5) Sangat Besar (5) <i>Very High</i>	81 - 100%	≤ Mingguan <i>≤ Weekly</i>

Peringkat dampak risiko yang digunakan adalah sebagai berikut:

Risk Analysis and Evaluation

Together with Risk Management Division, Key Risk Owner measures and rates the impact and possibility of the identified risk by using the established criteria of risk impact and possibility as well as considering the effectiveness of existing internal control. Risk possibility rating used is as follows:

Risk impact rating used is as follows:

Dampak <i>Impact</i>	Kerugian <i>Loss</i>	Hukum Sanction	Kepuasan Pelanggan <i>Customer Satisfactory</i>
(1) Sangat Kecil (1) <i>Very Low</i>	< Rp2,5 B	Sanksi Adm <i>Administrative Sanction</i>	80% - 100%
(2) Kecil (2) <i>Low</i>	Rp2,5 B - Rp5 B	Diberhentikan <i>Dismissed</i>	70% - 79%
(3) Sedang (3) <i>Medium</i>	Rp5 B - Rp7 B	Denda <i>Fine</i>	50% - 69%
(4) Besar (4) <i>High</i>	Rp7 B - Rp10 B	Penjara <i>Prison</i>	20% - 49%
(5) Sangat Besar (5) <i>Very High</i>	> Rp10 B	Denda & Penjara <i>Fine & Prison</i>	< 20%

Berdasarkan peringkat dampak dan kemungkinannya, Divisi Manajemen Risiko bersama Pemilik Risiko Kunci melakukan perhitungan nilai risiko dengan menggunakan metode berikut:

Nilai Risiko = Peringkat Dampak X Peringkat Kemungkinan

Based on Possibility and impact level, Risk Management Division with Key Risk Owner calculate the risk score using the following methods:

Risk Value = Impact Rating X Possibility Rating

Berdasarkan hasil perhitungan nilai risiko, Divisi Manajemen Risiko melakukan pengelompokan dan pemeringkatan dengan merujuk pada tabel kategori (eksposur) risiko di bawah ini:

Based on risk value calculation result, Risk Management Division conduct grouping and ranking with reference to the table of risk (exposure) categories as follows:

Tingkat Eksposur Risiko (Dampak dan Kemungkinan) terhadap Perusahaan	Nilai Risiko <i>Risk Value</i>	Kelompok / Kategori Risiko <i>Risk Group / Categor</i>	Risk Exposure Level (Impact and Possibility) to Company
Tingkat eksposur: Kecil (kondisi aman; Perusahaan perlu menjaga efektivitas pengendalian internalnya)	14	Risiko "Low"	Level of exposure: Small (safe; Company needs to maintain the effectiveness of its internal control)

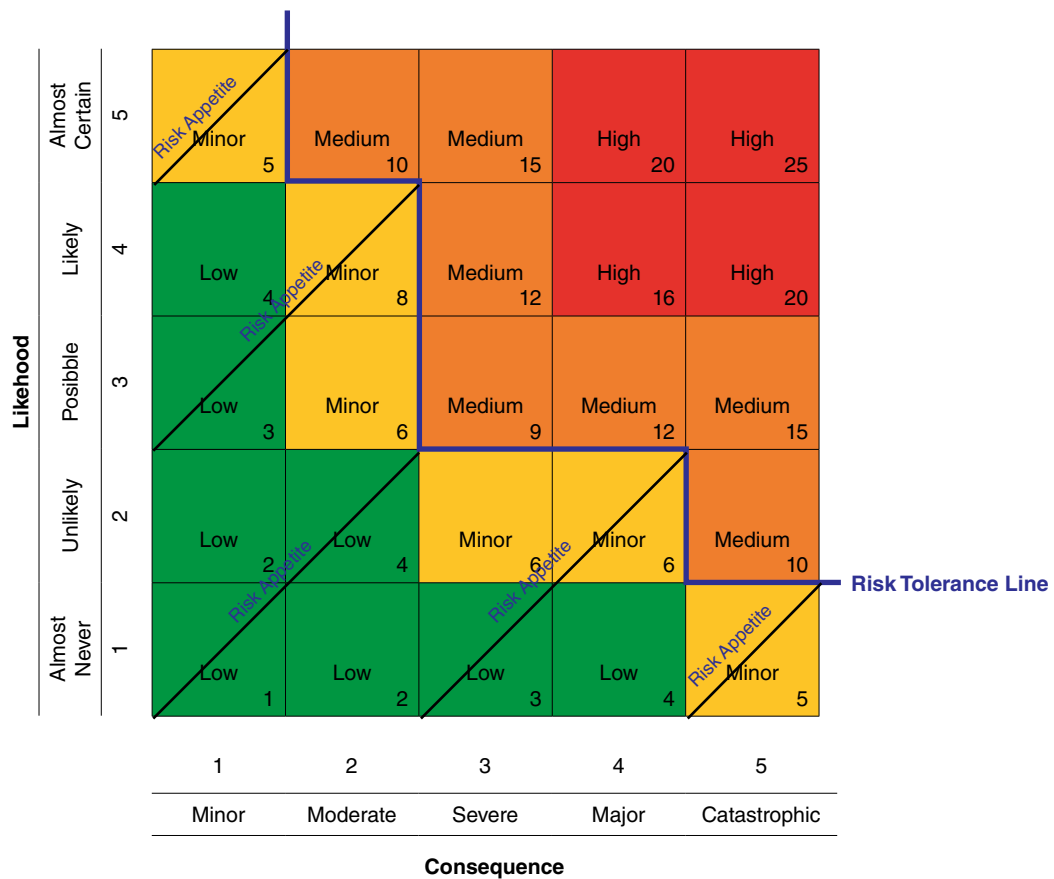
Tingkat Eksposur Risiko (Dampak dan Kemungkinan) terhadap Perusahaan	Nilai Risiko <i>Risk Value</i>	Kelompok / Kategori Risiko <i>Risk Group / Categor</i>	<i>Risk Exposure Level(Impact and Possibility) to Company</i>
Tingkat eksposur: Sedang (kondisi gangguan; Perusahaan perlu meningkatkan efektivitas pengendalian internalnya)	58	Risiko "Minor"	<i>Exposure level: Medium (fault ; Company needs to improve the effectiveness of its internal control)</i>
Tingkat eksposur: Tinggi (kondisi berbahaya; Perusahaan perlu melaksanakan rencana penanganan risiko)	9-15	Risiko "Medium"	<i>Exposure level: High (dangerous; Company needs to apply risk management plans)</i>
Tingkat eksposur: Ekstrem (kondisi tii; Perusahaan harus melakukan penanganan risiko sesegera mungkin)	16-25	Risiko "High"	<i>Exposure level: Extreme (Critical, Company must perform risk management as soon as possible)</i>

Berdasarkan pengelompokan dan pemeringkatan risiko berdasarkan kategori eksposurnya, Divisi Manajemen Risiko memetakan risiko-risiko yang telah dianalisis pada format Peta Risiko Perusahaan yang telah ditetapkan.

Based on risk grouping and ranking, according to the exposure categories, the Risk Management Division map the risks that have been analyzed in the predetermined format of Corporate Risk Map.

Pemetaan Risiko Perusahaan

Corporate Risk Mapping



Sesuai dengan hasil pemetaan, Divisi Manajemen Risiko melakukan evaluasi risiko guna menentukan risiko-risiko yang memerlukan tindakan penanganan risiko dengan merujuk pada standar respon risiko berikut:

In accordance with the results of the mapping, the Risk Management Division evaluate the risks to determine which risks require risk management actions with reference to the following risk response standard:

Standar Respon Risiko	Nilai Risiko <i>Risk Value</i>	Kelompok / Kategori Risiko <i>Risk Group / Categor</i>	<i>Risk Response Standard</i>
Pengelolaan risiko dilakukan oleh masing-masing SBU (termasuk proyek) & NBU terkait dengan pengembangan kontrol/prosedur	14	Low	<i>Risk management is conducted by each SBU (including project) and NBU associated with the control/ procedure development</i>
Pengelolaan risiko dilakukan oleh masing-masing SBU (termasuk proyek) & NBU dengan dilengkapi rencana aksi lebih lanjut	58	Minor	<i>Risk management is conducted by each SBU (including project) and NBU equipped with further action plan</i>
Pencegahan dan rencana penanganan risiko harus disusun oleh Kepala Unit dan pelaksanaannya dimonitor oleh Direksi	9-15	Medium	<i>Prevention and risk management plans must be composed by the Head of Unit and the implementation is monitored by the Board of Directors</i>
Risiko harus segera dicegah atau rencana penanganan risiko dieskalasi oleh Kepala Unit kepada Direksi, pelaksanaannya dimonitor secara intensif oleh Direksi	16-25	High	<i>Risk should be immediately prevented or risk management plan is escalated by the Head of Unit to the Board of Directors, the implementation is intensively monitored by the Board of Directors</i>

Hasil analisis dan evaluasi risiko disusun dan ditandatangani oleh Pemilik Risiko Kunci dan Kepala Divisi Manajemen Risiko dalam suatu tabel yang dinamakan "Laporan Profil Risiko". Kemudian Divisi Manajemen Risiko mengirimkan Laporan Profil Risiko ke Direksi dengan dilampiri Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disetujui oleh Direksi Terkait dan Direktur Keuangan dan Administrasi. Laporan Profil Risiko yang telah disetujui atau tidak disetujui diserahkan kembali ke Divisi/Satuan/Divisi Manajemen Risiko, kemudian Divisi Manajemen Risiko menyerahkan Laporan Profil Risiko tersebut kepada Pemilik Risiko Kunci untuk dijadikan dasar dijalankan atau tidaknya kegiatan tersebut.

Perencanaan Penangan Risiko dan Penanganan Risiko

Dalam perencanaan penangan risiko dan penanganan risiko Perusahaan, Pemilik Risiko Kunci dan Divisi Manajemen Risiko menyusun dan merancang opsi rencana penanganan risiko yang akan dilaksanakan. Beberapa jenis opsi yang dapat digunakan dalam rencana penanganan risiko:

- Menghindari risiko dengan cara tidak melakukan atau melanjutkan aktivitas-aktivitas yang dapat meningkatkan eksposur risiko;
- Mengambil risiko dengan tujuan untuk mendapatkan kesempatan;
- Menghilangkan sumber risiko;
- Mengurangi kemungkinan terjadinya risiko;
- Mengurangi konsekuensi yang ditimbulkan oleh risiko;
- Membagi risiko dengan pihak lain; dan
- Mempertahankan risiko.

Risk analysis and evaluation result is composed and signed by Key Risk Owner and Head of Risk Management Division in a table called "Risk Profile Report". Risk Management Division sends Risk Profile Report to the Board of Directors, enclosed by Budget Plan (RAB), which has been approved by the relevant Directors and the Director of Finance and Administration. Risk Profile Report which has been approved or not approved is handed back to the Division/Unit/ Risk Management Division, then the Risk Management Division submit the Risk Profile Report to the Key Risk Owner to be used as the basis of whether the activity is executed or not.

Risk Management Planning and Risk Management

In Risk Management Planning and Company Risk Management, Key Risk Owner and Risk Management Division manage and design risk management plan option to address risks. Options that can be used in risk management plan:

- Avoid risk by not doing or continuing activities that may increase the risk exposure;*
- Taking risks to get opportunities;*
- Eliminate sources of risk;*
- Reduce the possibility of risk;*
- Reduce the risk consequences;*
- Share the risk with other parties; and*
- Maintaining risk.*

Rencana penanganan risiko yang efektif dan realistis mengikutsertakan analisis biaya manfaat dengan memperhitungkan nilai persepsi dan ekspektasi para pemangku kepentingan Perusahaan dalam melakukan penyusunan rencana aksi penanganan risiko. Hasil proses penyusunan dan perancangan rencana penanganan risiko disusun oleh Pemilik Risiko Kunci disertai dengan detail rencana aksi penanganan risiko berdasarkan format yang telah ditentukan Divisi Manajemen Risiko dalam suatu tabel yang dinamakan "Laporan Rencana Aksi Penanganan Risiko".

Pemilik Risiko Kunci kemudian melaksanakan penanganan risiko sesuai dengan rencana aksi penanganan risiko yang telah disusun serta merujuk pada Standar Respon Risiko. Laporan pelaksanaan dan hasil penanganan risiko disusun oleh Pemilik Risiko Kunci berdasarkan format yang telah ditentukan Divisi Manajemen Risiko dalam suatu tabel yang dinamakan "Laporan Berkala/Hasil Penanganan".

Laporan Berkala/Hasil Penanganan Risiko ditinjau dan dievaluasi oleh atasan terkait (sesuai Standar Respon Risiko) dan Divisi/Satuan/Divisi Manajemen Risiko. Bilamana terjadi penyimpangan atas pelaksanaan rencana penanganan risiko lebih dari 50%, Divisi Manajemen Risiko wajib terinformasikan guna turut melakukan peninjauan serta memberikan rekomendasi tindakan koreksi/perbaikan yang diajukan kepada atasan terkait Pemilik Risiko Kunci (sesuai Standar Respon Risiko).

Divisi Manajemen Risiko beserta Pemilik Risiko Kunci wajib menyimpan dan memelihara data (Laporan Berkala/Hasil Penanganan Risiko berikut dokumen pendukung/pelengkap), baik berupa softcopy (minimal 10 tahun) maupun hardcopy (minimal lima tahun) agar dapat dipergunakan sewaktu diperlukan.

Effective and realistic risk management plan involves benefit cost analysis by calculating the perception value and expectations of the the Company's stakeholders in formulating risk management action plan. The result of the risk management plan drafting and design process is prepared by the Key Risk Owner, specified by detailed risk management action plan based on the format specified by Risk Management Division in a table called "Risk Management Action Plan Report".

Key Risks owner then implement risk management in accordance with the risk management action plan that has been drawn up and refer to the Risk Response Standard. Report on the risk management application and results is prepared by the Key Risk Owner based on predetermined format composed by the Risk Management Division in a table called "Periodic Report / Management Result".

Periodic Report/ Risk Management Result is reviewed and evaluated by the relevant supervisor (according to Risk Response Standard) and Division/Unit/ Risk Management Division. If the implementation of risk management plan deviates more than 50%, the Risk Management Division shall be informed in order to conduct a review and make recommendations on corrective actions which is proposed to the related superior of Key Risk Owner (according to Risk Response Standard).

Risk Management Division and Key Risk Owner shall store and maintain data (Periodic Report/ Risk Management Result and supporting documents), either in the form of soft copy (for a minimum of 10 years) or hard copy (for a minimum of 5 years) so it can be used as needed.

Pola Komunikasi dan Konsultasi Manajemen Risiko Perusahaan

Bagan Pola Komunikasi dan Konsultasi Manajemen Risiko

Risk Management Consulting and Communication Pattern

Risk Management Consulting and Communication Pattern Chart

Pihak Berkepentingan	Eksposur Risiko <i>Risk Exposure</i>	Pelaksana Komunikasi & Konsultasi <i>Communications & Consulting Executive</i>	Stakeholders
Pemangku kepentingan eksternal (Dewan Komisaris, perwakilan Pemegang Saham, dsb)	"HIGH"	Direksi (sebagai pemangku akuntabilitas pengelolaan risiko perusahaan) <i>Board of Directors (as stakeholder of Risk Management Accountability)</i>	External stakeholders (Board of Commissioners, representatives of Shareholders, etc.)
Pemangku kepentingan internal terkait (Kepala Unit Kerja, Divisi Manajemen Risiko, auditor internal, dsb)		Direksi (sebagai Pemilik Risiko Kunci) <i>Directors (as Key Risk Owner)</i>	Relevant internal stakeholders (Head of Unit, Risk Management Division, internal auditors, etc)
Direksi		Komite Manajemen Risiko (bila dibentuk oleh Direksi) <i>Risk Management Committee (if established by the Board of Directors)</i>	Board of Directors
Pemilik Risiko Kunci ditingkatkan Unit Kerja & Proyek (Kepala Unit Kerja & Pimpinan Proyek)			Key Risk Owner in Work Unit & Project (Head of Work Unit & Project Leader)
Divisi Manajemen Risiko			Risk Management Division
Pemangku kepentingan internal terkait lainnya (auditor internal, dsb)			Other relevant internal stakeholders (internal auditors, etc)
Pemilik Risiko di tingkat Unit Kerja (Kepala Seksi & staf)		Pemilik Risiko Kunci di tingkatan Unit Kerja (Kepala Unit Kerja) <i>Key Risk Owner in Work Unit Level (Head of Work Unit)</i>	Risk Owner in Work Unit Level (Section Head & staff)
Atasan terkait (sesuai Standar Respon Risiko)			Relevant Superior (according to Risk Response Standard)
Pemilik Risiko Kunci ditingkatkan Proyek (Pimpinan Proyek)			Key Risk Owner in Project Level (Project Leader)
Divisi Manajemen Risiko			Risk Management Division
Pemangku kepentingan internal terkait lainnya (Komite Manajemen Risiko, auditor internal, dsb)		Pemilik Risiko Kunci di tingkatan Proyek (Pimpinan Proyek) <i>Key Risk Owner in Project Level (Project Leader)</i>	Other relevant internal stakeholders (Risk Management Committee, internal auditors, etc)
Atasan terkait (sesuai Standar Respon Risiko)			Relevant Superior (according to Risk Response Standard)
Pemilik Risiko ditingkatkan Proyek (Manajemen Proyek)			Risk Owner in Project Level (Project Management)
Divisi Manajemen Risiko			Risk Management Division
Pemangku kepentingan internal terkait lainnya (Komite Manajemen Risiko, auditor internal, dsb)		Divisi Manajemen Risiko <i>Risk Management Division</i>	Other relevant internal stakeholders (Risk Management Committee, internal auditors, etc)
Para Pemilik Risiko Kunci (beserta Pemilik Risiko) di tiap tingkatan perusahaan			Key Risk Owners (and Risk Owners) in every level of the Company
Pemangku kepentingan eksternal (persetujuan Direksi/atasan terkait Divisi Manajemen Risiko)			External stakeholders (approval of the Board of Directors / Risk Management Division Relevant Superior)
Pemangku kepentingan internal terkait lainnya (Komite Manajemen Risiko, auditor internal, dsb)			Other relevant internal stakeholders (Risk Management Committee, internal auditors, etc)

Pihak Berkepentingan	Eksposur Risiko <i>Risk Exposure</i>	Pelaksana Komunikasi & Konsultasi <i>Communications & Consulting Executive</i>	Stakeholders
Pemangku kepentingan internal terkait (Kepala Unit Kerja, Divisi Manajemen Risiko, auditor internal, dsb)	"MEDIUM"	Direksi (sebagai pemangku akuntabilitas pengelolaan risiko perusahaan) <i>Board of Directors (as stakeholder of Risk Management Accountability)</i>	<i>Relevant internal stakeholders (Head of Work Unit, Risk Management Division, internal auditors, etc)</i>
Pemilik Risiko di tingkat Unit Kerja (KepalaSeksi & staf)		Pemilik Risiko Kunci di tingkatan Unit Kerja (Kepala Unit Kerja) <i>Key Risk Owner in Work Unit (Head of Work Unit)</i>	<i>Risk Owner in Work Unit Level (Section Head & staff)</i>
Atasan terkait (sesuai Standar Respon Risiko)			<i>Relevant Superior (according to Risk Response Standard)</i>
Pemilik Risiko Kunci ditingkatan Proyek (Pimpinan Proyek)			<i>Key Risk Owner in Project Level (Project Leader)</i>
Divisi Manajemen Risiko			<i>Risk Management Division</i>
Pemangku kepentingan internal terkait lainnya(auditor internal, dsb)		Pemilik Risiko Kunci di tingkatan Proyek (Pimpinan Proyek) <i>Key Risk Owner in Project level (Project Leader)</i>	<i>Other relevant internal stakeholders (internal auditors, etc)</i>
Pemilik Risiko di tingkatan Proyek (Manajemen Proyek)			<i>Risk Owner in Project Level (Project Management)</i>
Atasan terkait (sesuai Standar Respon Risiko)			<i>Relevant Superior (according to Risk Response Standard)</i>
Divisi Manajemen Risiko			<i>Risk Management Division</i>
Pemangku kepentingan internal terkait lainnya (auditor internal, dsb)		Divisi Manajemen Risiko <i>Risk Management Division</i>	<i>Other relevant internal stakeholders (internal auditors, etc)</i>
Para Pemilik Risiko Kunci (beserta Pemilik Risiko) di tiap tingkatan Perusahaan			<i>Key Risk Owners (and Risk Owner) in each level of the Company</i>
Pemangku kepentingan eksternal (persetujuan Direksi/atasan terkait Divisi Manajemen Risiko)			<i>External stakeholders (the approval of Board of Directors/ Risk Management Division Relevant Superior)</i>
Pemangku kepentingan internal terkait lainnya (auditor internal, dsb)			<i>Other relevant internal stakeholders (internal auditors, etc)</i>
Pemilik Risiko di tingkat Unit Kerja (Kepala Seksi & staf)	"MINOR"	Pemilik Risiko Kunci di tingkatan Unit Kerja (Kepala Unit Kerja) <i>Key Risk Owner in Work Unit level (Head of Work Unit)</i>	<i>Risk Owner in Work Unit level (SectionHead&Staff)</i>
Pemilik Risiko Kunci di tingkatan Proyek (Pimpinan Proyek)			<i>Key Risk Owner in Project Level (Project Leader)</i>
Divisi Manajemen Risiko			<i>Risk Management Division</i>
Pemangku kepentingan internal terkait lainnya (auditor internal, dsb)			<i>Other relevant internal stakeholders (internal auditors, etc)</i>
Atasan terkait (sesuai Standar Respon Risiko)		Pemilik Risiko Kunci di tingkatan Proyek (Pimpinan Proyek) <i>Key Risk Owner in Project Level (Project Leader)</i>	<i>Relevant Superior (according to Risk Response Standard)</i>
Pemilik Risiko di tingkatan Proyek (Manajemen Proyek)			<i>Risk Owner in Project Level (Project Leader)</i>
Divisi Manajemen Risiko			<i>Risk Management Division</i>
Pemangku kepentingan internal terkait lainnya (auditor internal, dsb)			<i>Other relevant internal stakeholders (internal auditors, etc)</i>
Para Pemilik Risiko Kunci (beserta Pemilik Risiko) di tiap tingkatan Perusahaan		Divisi Manajemen Risiko <i>Risk Management Division</i>	<i>Key Risk Owners (and Risk Owner) in each level of the Company</i>
Pemangku kepentingan eksternal (persetujuan atasan terkait Divisi Manajemen Risiko)			<i>External stakeholders (approval of Risk Management Division relevant supervisor)</i>
Pemangku kepentingan internal terkait lainnya (auditor internal, dsb)			<i>Other relevant internal stakeholders (internal auditors, etc)</i>

Pihak Berkepentingan	Eksposur Risiko <i>Risk Exposure</i>	Pelaksana Komunikasi & Konsultasi <i>Communications & Consulting Executive</i>	Stakeholders
Pemilik Risiko di tingkat Unit Kerja (Kepala Seksi & staf)	"LOW"	Pemilik Risiko Kunci di tingkatan Unit Kerja (Kepala Unit Kerja) <i>Key Risk Owner in Work Unit level (Head of Work Unit)</i>	<i>Risk Owner in Work Unit level (Section Head&Staff)</i>
Pemilik Risiko Kunci ditingkatan Proyek (Pimpinan Proyek)			<i>Key Risk Owner in Project Level (Project Leader)</i>
Divisi Manajemen Risiko			<i>Risk Management Division</i>
Pemangku kepentingan internal terkait lainnya (auditor internal, dsb)			<i>Other relevant internal stakeholders (internal auditors, etc)</i>
Atasan terkait (sesuai Standar Respon Risiko)		Pemilik Risiko Kunci di tingkatan Proyek (Pimpinan Proyek) <i>Key Risk Owner in Project Level (Project Leader)</i>	<i>Relevant Superior (according to Risk Response Standard)</i>
Pemilik Risiko di tingkatan Proyek (Manajemen Proyek)			<i>Risk Owner in Project Level (Project Management)</i>
Divisi Manajemen Risiko			<i>Risk Management Division</i>
Pemangku kepentingan internal terkait lainnya (auditor internal, dsb)			<i>Other relevant internal stakeholders (internal auditors, etc)</i>
Para Pemilik Risiko Kunci (beserta Pemilik Risiko) di tiap tingkatan Perusahaan		Divisi Manajemen Risiko <i>Risk Management Division</i>	<i>Key Risk Owners (and Risk Owner) in each level of the Company</i>
Pemangku kepentingan eksternal (persetujuan atasan terkait Divisi Manajemen Risiko)			<i>External stakeholders (approval of relevant supervisor related to Risk Management Division)</i>
Pemangku kepentingan internal terkait lainnya (auditor internal, dsb)			<i>Other relevant internal stakeholders (internal auditors, etc)</i>



Penerapan Sistem Manajemen Mutu (Quality System)

The Application Of Quality Management System (System Quality)

Sebagai Perusahaan yang memiliki komitmen terhadap aspek keselamatan dan mutu, maka Perusahaan telah menyusun dan mendokumentasikan sistem mutu sebagai wujud komitmen kepada para *stakeholder*. Sistem mutu yang telah dibangun ini mengacu kepada standar internasional dan nasional, yaitu ISO 9001:2008, SNI 17020, SNI 17025 dan juga standar QSCS-IACS (*Quality System for Certification Scheme - International Association of Classification Society*). Quality System ini dibangun dengan mengutamakan kebutuhan (*customer need*) dan kepuasan pemakai jasa (*customer satisfaction*) sepanjang tidak bertentangan dengan *Rules, Regulation, Code* dan Standar yang diacu oleh Perusahaan.

Perusahaan memiliki fungsi *Quality Assurance Center* (QA Center) sebagai penanggung jawab pengembangan, implementasi sekaligus fungsi kontrol dari *Quality System*. Sesuai dengan sifat bisnisnya, maka seluruh proses dan fungsi terkait dengan aktivitas Perusahaan telah disusun melalui dokumentasi sistem mutu sebagai jaminan (*assurance*) terhadap penerapannya. Masing-masing fungsi bertanggung jawab atas prosedur, petunjuk kerja dan *form-form* dalam rangka jaminan pelaksanaan pekerjaan.

Manajemen Perusahaan telah memiliki komitmen untuk menjalankan Sistem Manajemen Mutu secara konsisten dan konsekuen untuk mendukung pencapaian sasaran-sasaran yang direncanakan. Untuk itu maka Perusahaan mewajibkan semua Kepala Unit Kerja untuk:

- Memahami konsep sistem manajemen mutu ini dan menjalankannya secara konsisten.
- Mengkomunikasikan kepada karyawan tentang pentingnya mutu dan kepuasan pemakai jasa.
- Memastikan seluruh karyawan memahami esensi sistem manajemen mutu.
- Mensosialisasikan Kebijakan mutu dan sasaran-sasaran mutu yang ingin dicapai.
- Melakukan evaluasi untuk melihat efektifitas sistem manajemen mutu.
- Memastikan tersedianya sumberdaya untuk mendukung pelaksanaan sistem.
- Memastikan perbaikan terus menerus dilakukan pada semua aspek kegiatan.

Manajemen dan seluruh karyawan Perusahaan, khususnya fungsi terkait atau yang berhubungan dengan pemakai jasa, yaitu Unit Produksi diharuskan memahami kebutuhan pemakai jasa dan seoptimal mungkin memberikan pelayanan yang memuaskan pemakai jasa. Khusus untuk kegiatan jasa klasifikasi dan statutoria, kepuasan pemakai jasa diartikan sebagai dipenuhinya segala permintaan dan kebutuhan pemakai jasa sepanjang tidak menyimpang dari Peraturan/ Regulasi Klasifikasi dan Statutoria.

As a company that is committed to safety and quality aspects, the Company establish and document quality system as its commitment to the stakeholders. This quality system refers to international and national standards, such as ISO 9001:2008, ISO 17020, SNI 17025 and also QSCS-IACS (Quality System for Certification Scheme - International Association of Classification Society) standards. This Quality System is established by prioritizing customer need and customer satisfaction as long as it doesn't contradict the Rules, Regulations, Code and Standard referred to by the Company.

The company has a Quality Assurance Center (QA Center) that responsible for the development, implementation and control of the Quality System. In accordance with the nature of its business, the whole process and functions related to the Company's activities have been determined through the documentation of quality system to assure its application. Each function is responsible for procedures, work instructions and forms to ensure work implementation.

The Company's management is committed to implement the Quality Management System in consistent and consequent manner to support the achievement of the predetermined targets. For those reasons, the Company requires all Head of the Work Units to:

- Understand the concept of quality management system and implement it consistently.*
- Communicate the importance of quality and customer satisfaction to employees.*
- Ensure that all employees understand the essence of the quality management system.*
- Disseminate the quality policy and quality objectives to be achieved.*
- Evaluate the effectiveness of Quality Management System*
- Ensure the availability of resources to support system implementation*
- Ensure continuous improvement in all aspects of activity.*

The management and all employees of the Company, particularly the related functions or those related to customers, which is the Production Unit, is required to understand customer needs and optimally provide satisfactory services to customers. For classification and statutory services, customer satisfaction is defined as the fulfilment of all demands and needs of customers as long as it doesn't deviate from the Classification and Statutory Rules/ Regulations.

Untuk lebih memfokuskan kepada pemakai jasa, Perusahaan secara konsisten melakukan evaluasi atas kebutuhan (*Customer Need*) dan kepuasan pemakai jasa (*Customer Satisfaction*) dan mengkomunikasikan hasil evaluasi tersebut kepada seluruh Unit Kerja terkait. Dalam mengimplementasikan Sistem Manajemen Mutu ini, Perusahaan memiliki kebijakan mutu yang berorientasi kepada kepuasan pemakai jasa, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Kebijakan mutu adalah pernyataan resmi Perusahaan yang memuat komitmen mutu dan kepedulian terhadap kepuasan pemakai jasa dan ditanda-tangani oleh Direktur Utama.
- Karena sifat bisnis usaha yang berbeda, maka Perusahaan memiliki tiga pernyataan kebijakan mutu, yaitu Pernyataan Kebijakan Mutu Perusahaan, Pernyataan Kebijakan Mutu Jasa Klasifikasi & Statutoria dan Pernyataan Kebijakan Mutu Jasa Marine & Industrial.
- Isi Kebijakan mutu sejalan dengan visi-misi dan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Kebijakan mutu menjadi acuan untuk menetapkan sasaran mutu, mengevaluasi pencapaian sasaran serta sebagai acuan perbaikan.
- Kebijakan mutu disosialisasikan dan dipastikan dipahami oleh seluruh personil Perusahaan.
- Kebijakan mutu ditinjau secara berkala pada saat rapat Tinjauan Manajemen untuk menjamin kesesuaiannya.
- Kebijakan mutu ini tercantum pada halaman depan dari setiap Manual Kebijakan Mutu Perusahaan dan diperpampangkan pada tempat-tempat yang strategis di seluruh Perusahaan.

Selain mekanisme/prosedur yang dibakukan untuk pelaksanaan sistem manajemen mutu, Perusahaan juga menetapkan sasaran-sasaran mutu dengan ketentuan sebagai berikut:

- Secara keseluruhan Perusahaan memiliki sasaran mutu Perusahaan yang merupakan nilai-nilai keinginan/kebutuhan pemakai jasa dan juga nilai-nilai kebutuhan Perusahaan sendiri.
- Sasaran mutu Perusahaan tersebut dijabarkan kedalam sasaran mutu setiap unit kerja yang spesifik dan terukur serta terdokumentasi.
- Setiap Kepala Unit Kerja bertanggung jawab untuk memastikan unit yang dipimpinnya membuat perencanaan kerja, cara pengukuran dan memastikan sasaran mutu unit kerjanya tercapai.

Sejalan dengan prinsip manajemen *Plan-Do-Check-Action* (PDCA), maka sasaran mutu tersebut (baik sasaran mutu Perusahaan maupun per unit kerja) akan dievaluasi dan ditingkatkan secara konsisten dan periodik. Evaluasi pencapaian sasaran mutu ini dibahas dalam pertemuan Tinjauan Manajemen (*Management Review Meeting*).

To focus more on customers, the Company consistently evaluates the Customer Need and Customer Satisfaction, as well as communicate the results of these evaluations to all related Work Units. In implementing the Quality Management System, the Company determines quality policy based on customer satisfaction, with the following conditions:

- The quality policy is the Company's formal statement specifying its commitment to quality and customer satisfaction, signed by the President Director.*
- Due to the different nature of the business, the Company has three statements on quality policy: Corporate Quality Policy Statement, Classification and Statutory Service Quality Policy Statement, and Marine & Industrial Services Quality Statement.*
- The contents of the quality policy is in line with the vision, mission and objectives of the company as a whole. Quality policy is the reference to establish quality objectives, evaluate the achievement of objectives, and reference for improvement.*
- The quality policy is disseminated and understood by all Company personnels.*
- The quality policy is reviewed periodically during Management Review meetings to ensure compliance.*
- The quality policy is stated in the front page of each Quality Policy Manual of the Company and displayed in strategic places throughout the Company.*

The Company does not only establish standardized mechanism/procedure for quality management system implementation, but also quality objectives with the following conditions:

- The Company has quality objectives which is the values of customer needs, and also the values of the company needs*
- The Company's quality objectives are translated into each Work Unit's quality objectives which is specific, measurable and well-documented*
- The Head of Work Unit is responsible for ensuring that the unit under his supervision create a work plan and measurement method, as well as ensuring the achievement of quality objectives of his work unit*

In line with Plan-Do-Check-Action (PDCA) management principle, the quality objectives (of the Company and per work unit) will be consistently and periodically evaluated and improved. Evaluation of the achievement of quality objectives is discussed in Management Review Meeting.

Tugas, tanggung jawab dan wewenang karyawan/pimpinan diatur dengan jelas dan terdokumentasi dengan ketentuan sebagai berikut:

- Setiap karyawan/pimpinan dipastikan memahami tugas, tanggung jawab dan wewenangnya.
- Dokumen uraian tugas didistribusikan kepada setiap Unit Kerja dan masing-masing Kepala Unit Kerja menginformasikan kepada setiap bawahannya didalam lingkup unit kerjanya.
- Dokumen uraian tugas harus dikendalikan, isinya diperbarui bila terjadi perubahan pekerjaan.
- Uraian tugas dibuat berdasarkan nama-nama posisi yang ada dalam struktur organisasi pada masing-masing unit.
- Kendali dokumentasi uraian tugas dilakukan oleh Kepala Divisi Personalia & Umum.

Dalam menjaga konsistensi penerapan prosedur, pencapaian sasaran mutu dan penyempurnaan sistem manajemen mutu, Perusahaan telah memiliki sistem control dan pengawasan yang dilakukan secara berlapis untuk memastikan sistem manajemen mutu diimplementasikan secara efektif dan hasilnya sesuai dengan yang telah direncanakan.

Adapun sistem *quality control* yang dilakukan adalah:

- Pengawasan langsung oleh Kepala Cabang/Wakil Kepala Cabang terhadap kegiatan produksi di masing-masing cabang.
- Audit internal oleh Satuan Jaminan Mutu di setiap Unit Kerja, baik di Kantor Pusat maupun di Kantor Cabang.
- Pemeriksaan internal oleh SPI menyangkut aspek keuangan, operasional dan pemenuhan peraturan perusahaan.
- Monitoring* surveyor oleh *Principal* Surveyor yang memeriksa langsung pelaksanaan survei di lapangan.
- Verifikasi laporan survei oleh Kantor Pusat (Divisi Survei) untuk memastikan pelaporan telah dilaksanakan dengan benar sesuai prosedur.
- Audit eksternal oleh Badan Akreditasi independen setiap 2 kali/tahun, meliputi Kantor Pusat dan Kantor Cabang.

Quality System yang sudah dibangun sejak tahun 1996 dan terus dikendalikan serta disempurnakan sejalan dengan perkembangan Perusahaan, bisnis dan kebutuhan pemakai jasa. Sejak tahun 1999, *Quality System* ini telah disertifikasi oleh badan sertifikasi independen dari Inggris dengan akreditasi dari *United Kingdom Assurance System* (UKAS).

Employees/Leader's Duties, responsibilities and authority are clearly regulated and documented with the following conditions:

- Each employee/leader understands their duties, responsibilities and authority.*
- Job description document is distributed to each Work Unit, and each Head of Work Unit informs his subordinates within the scope of the work unit.*
- Job description document shall be controlled, and the content shall be updated when there are changes in job description.*
- Job Description is made based on the existing positions within the organizational structure of each unit.*
- Full documentation of the job description is made by the Head of Human Resources and General Affairs Division.*

In maintaining the consistency of procedure implementation, the achievement of quality objectives, and improvement of quality management system, the Company has a control and monitoring system which is carried out in layers to ensure the quality management system is implemented effectively and the result is according to the plan.

The implemented quality control system include:

- Branch Head/ Deputy Head directly supervise production activities at each branch.*
- The Quality Assurance Unit conduct internal audit in each Work Unit at the Head Office and Branch Offices.*
- Internal audit is conducted by IAU on the financial, operational and regulatory compliance of the company.*
- Principal Surveyor directly inspects the implementation of survey in the field.*
- The Head Office (Survey Division) verify the survey report to ensure that the reporting is conducted correctly according to the procedure.*
- An independent Accreditation Board conducts external audit twice a year, including Head Office and Branch Offices.*

The Quality System has been developed since 1996. The system is consistently controlled and improved in line with the development of the Company, business and customer needs. Since 1999, the Quality System has been certified by UK independent certification body with accreditation from the United Kingdom Assurance System (UKAS).



Perusahaan telah mengungkapkan informasi penting dalam laporan tahunan dan laporan keuangannya kepada Pemegang Saham dan instansi Pemerintah yang terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara tepat waktu, akurat, jelas dan objektif. Perusahaan menyampaikan informasi kepada khalayak umum, antara lain, melalui *website* Perusahaan yang dapat diakses melalui www.bki.co.id, *customer meeting*, pertemuan Komite Konsultasi Klasifikasi Indonesia (K3I), presentasi, BUMN *online*, brosur, *company profile*, laporan tahunan dan promosi di sejumlah media massa.

The Company has disclosed important information in annual report and financial statements to shareholders and relevant government agencies in accordance with applicable laws and regulations in timely, accurate, clear and objective manner. The Company submitted information to public through its website www.bki.co.id, customer meetings, Classification Consultancy Committee of Indonesia (K3I) meetings, presentation, SOE online, brochures, company profile, annual report, and promotion in a number of mass media.



Etika Kerja Dan Etika Bisnis

Work Ethics And Business Ethics

Etika kerja menjadi sebuah sistem nilai yang mendasari perilaku insan Perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya sebagai bagian dari elemen bisnis. Untuk itu, Perusahaan menanamkan tata nilai Perusahaan sebagai dasar bagi pedoman perilaku insan Perusahaan, khususnya dalam menerapkan aspek tata kelola Perusahaan yang diyakini dapat terus mendorong tumbuhnya Perusahaan di masa yang akan datang.

Tata Nilai Perusahaan

Tata nilai Perusahaan memberikan seluruh aspek fundamen, yaitu:

- **Integritas**
Kepribadian karyawan yang etis dan selalu memperjuangkan kebenaran melalui kejujuran, kedisiplinan, keteladanan dan dedikasi yang tinggi dengan menjunjung tinggi nama baik perusahaan.
- **Profesionalisme**
Sikap profesional setiap karyawan yang memiliki komitmen tinggi untuk mencapai hasil terbaik dan melampaui sasaran yang ditetapkan melalui inovasi dan perbaikan berkelanjutan.
- **Kerjasama**
Usaha karyawan untuk menyatukan kemampuan dan menggali potensi setiap orang melalui sinergi dan kerja tim untuk mencapai tujuan bersama melalui sikap dan perilaku empirik, proaktif, percaya dan terbuka.
- **Pelayanan Prima**
Sikap dan perilaku karyawan yang ramah, menebar salam, santun, ikhlas, proaktif dalam melayani demi kepuasan pelanggan.
- **Sadar Lingkungan**
Peran aktif karyawan untuk melestarikan lingkungan alam, lingkungan kerja dan lingkungan usaha, menjaga hubungan baik dengan mitra kerja, masyarakat, menciptakan suasana kerja yang sehat dan menyenangkan serta mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja.
- **Kepuasan Pelanggan**
Memberikan kepuasan kepada pemakai jasa melalui produk dan pelayanan prima yang bermutu berlandaskan kepada tujuan etos kerja yaitu bertindak segera, responsif, disiplin, kerja keras, kreatif, bersih dan baik sangka.

Integritas Dalam Berusaha

Penerapan standar etika dalam seluruh kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip GCG melandasi seluruh aktivitas Perusahaan dalam menjalankan usahanya. Seluruh jajaran Perusahaan telah mensosialisasikan GCG Code ini untuk mempertahankan kejujuran, transparansi, independensi, akuntabilitas, integritas, dan keadilan dalam proses kerja dan transaksi di lingkungan masing-masing.

Work ethic becomes a value system that underlies the behavior of Company personnels in carrying out their activities as part of the business element. For that reason, the Company instills company values as the basis for code of conduct of the Company personnels, particularly in applying the Company Governance which is believed to boost the Company's growth in the future.

Corporate Values

Corporate values provide all fundamental aspects, namely :

- **Integrity**
The employee's ethical personality and always fight for truth through honesty, discipline, exemplary conducts and high dedication to uphold the Company's good name.
- **Professionalism**
The professional attitude of each employee who has a commitment to achieve the best results and exceed targets through innovation and continuous improvement.
- **Cooperation**
The employee's effort to unite capabilities and explore each person potential through synergy and teamwork to achieve common goals through empirical, proactive, trusting, and open attitude and behavior.
- **Service Excellence**
The employee's friendly, polite, sincere, and proactive attitude and behavior in providing services for customer satisfaction.
- **Environmental Awareness**
The employee's active role in preserving natural environment, work environment, and business environment, maintaining good relations with partners and community, creating healthy and pleasant work atmosphere, as well as prioritizing occupational health and safety.
- **Customer satisfaction**
Give satisfaction to customers through excellent and quality products and services based on the purpose of work ethic that is prompt action, responsive, discipline, hard work, creative, clean and kind thought.

Integrity in Business

Ethical standards in all business activities based on the GCG Principles underlie all activities of the company in running its business. All levels of the company have disseminated the GCG Code to maintain honesty, transparency, impartiality, accountability, integrity and fairness in work processes and transactions in their respective environment.

Perusahaan telah menerapkan fungsi pengawasan dengan menggunakan audit berdasarkan prinsip-prinsip yang benar dan berlaku umum serta senantiasa mengupayakan agar tindakan-tindakan ilegal, tidak fair dan pelanggaran atas norma-norma dan peraturan yang berlaku dapat dikenai sanksi, baik administrasi, maupun perdata. Menjadi kewajiban setiap unit kerja untuk senantiasa menindaklanjuti setiap temuan hasil audit yang disampaikan oleh fungsi pengawasan.

Perusahaan telah menetapkan kebijakan melarang anggota Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan Perusahaan dan pihak yang terkait melakukan transaksi yang bertentangan dengan hukum dan prinsip-prinsip GCG. Apabila transaksi tersebut terbukti terjadi, maka setiap pihak yang terlibat langsung akan dikenai sanksi administratif dan tuntutan sesuai hukum yang berlaku. Pengertian yang bertentangan dengan hukum dan prinsip-prinsip GCG digunakan untuk menggambarkan setiap transaksi bisnis yang dikategorikan melawan hukum atau bertentangan dengan integritas Perusahaan. Transaksi tersebut, antara lain pemberian atau penerimaan suap dan hadiah yang diberikan dalam upaya mempengaruhi keputusan yang berkaitan dengan bisnis Perusahaan.

Data Perusahaan dan Kerahasiaan Informasi

Catatan yang akurat dan terdandan mengenai aktivitas usaha dan operasional Perusahaan telah dipelihara setiap waktu. Setiap pembayaran uang, pengalihan kepemilikan, penyelesaian pemberian layanan, dan transaksi lainnya harus terefleksikan secara penuh dan detail pada sistem akuntansi dan catatan bisnis Perusahaan. Semua pihak harus mengungkapkan semua informasi yang relevan dan bekerja sama sepenuhnya dengan auditor internal dan eksternal dalam proses audit kepatuhan atau penyidikan lainnya.

Kebijakan Perusahaan telah melarang Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan untuk mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia mengenai Perusahaan atau pelanggan kepada pihak ketiga, baik di dalam maupun di luar Perusahaan. Mengingat bahwa pengungkapan informasi rahasia tersebut dapat merugikan Perusahaan atau pelanggan dan memberikan keuntungan kepada pihak lain, maka pemberian informasi rahasia menurut keperluannya harus melalui persetujuan Direksi. Perusahaan juga bekerja dengan data khusus milik pelanggan, rekanan, dan mitra usaha. Hal ini merupakan kepercayaan yang sangat penting dan harus mendapatkan perhatian utama dari Perusahaan untuk menghargai kerjasama yang berkelanjutan dari pelanggan, rekanan, dan mitra usaha lainnya.

Oleh karena itu tidak seorangpun boleh mengungkapkan informasi rahasia tersebut kepada pihak luar tanpa persetujuan Direksi atau pejabat yang ditunjuk oleh

The Company has implemented a monitoring function by using audits based on correct and generally accepted principles, and always strives to give administrative and civil sanctions to illegal, unfair actions and violation to the prevailing norms and regulations. Each work unit is obliged to constantly follow up on any audit findings submitted by the supervisory function.

The Company has established a policy to prohibit the Board of Commissioners, Directors, all employees and related parties to engage in transactions that contradict the law and GCG principles. When the transaction is proven to occur, each party that is directly involved will be given administrative sanction and charges in accordance with the applicable law. Understanding that contradicts the law and GCG principles is used to describe every business transaction categorized as unlawful or contrary to the Company's integrity. Example of such transactions is giving or receiving bribes and gifts to influence decisions related to the Company's business.

Company Data and Information Confidentiality

Accurate and reliable records about company's business and operational activities is maintained at all times. Any payment of money, transfer of ownership, completion of delivery services and other transactions should be reflected in full and in detail on accounting system and business records of the Company. All parties must disclose all relevant information and fully cooperate with internal and external auditors in compliance audit process or other investigation.

Company policy also prohibits the Board of Commissioners, Directors and employees to disclose confidential information concerning the Company or its customers to third parties inside and outside the company. Considering that the disclosure of such confidential information could harm the Company or its customers and provide benefits to other parties, then the provision of confidential information should get the approval from Board of Directors. The company also works with special data of customers, suppliers and business partners. This is a very important trust and must receive primary attention from the company to appreciate the continuing cooperation of customers, suppliers and other business partners.

Therefore, no person may disclose confidential information to outside parties without approval of Directors or officers appointed by Board of Directors,

Direksi, atau tidak seorangpun boleh mengungkapkan informasi rahasia tersebut kepada yang lain kecuali berdasarkan kebutuhan kedinasan seperlunya.

Pernyataan Palsu, Klaim Palsu, dan Konspirasi

Seluruh jajaran Perusahaan yang berkaitan dengan tugas pemasaran, *drawing approval*, pelaksanaan survei dan inspeksi, proses sertifikasi, pembuatan kontrak/perjanjian dan administrasi keuangan termasuk akuntansi, telah menyadari pentingnya membuat pernyataan yang akurat dan klaim yang benar kepada Pimpinan, Pemerintah maupun kepada pihak lain. Hal ini mencakup setiap pernyataan lisan dan tertulis yang disampaikan kepada pimpinan pihak lain atau yang digunakan oleh Perusahaan. Kesengajaan menyampaikan pernyataan atau klaim yang tidak benar atau yang menyesatkan atau yang melibatkan adanya konspirasi dengan orang lain untuk merugikan pihak lain dapat mengakibatkan dikenakan hukuman administratif, pidana, perdata bagi personil yang bersangkutan dan pihak lain yang terlibat, termasuk mitra kerja Perusahaan dan pegawainya.

Penyelewengan, Penyimpangan dan Sejenisnya

Perusahaan telah menetapkan kebijakan untuk melarang setiap bentuk penyelewengan dan penyimpangan serta senantiasa menerapkan prosedur yang wajib ditaati dan diikuti berkaitan dengan temuan, pengakuan, pelaporan, penyelidikan, dan penyidikan terhadap kecurigaan adanya penyelewengan dan penyimpangan. Penyelewengan dan penyimpangan yang dimaksud adalah:

- Pelanggaran terhadap peraturan Perusahaan;
- Melakukan ketidakjujuran atau kebohongan berkaitan dengan pelaksanaan tugas pekerjaan;
- Melakukan penggelapan, penghilangan, atau pemindahtanganan segala sesuatu yang dapat merugikan Perusahaan secara langsung maupun tidak langsung;
- Melakukan pemalsuan atau manipulasi surat berharga Perusahaan seperti cek, giro, sertifikat, dan lain-lain;
- Menyalahgunakan aset Perusahaan;
- Melakukan pengalihan kas, surat berharga atau aset Perusahaan untuk penggunaan atau keuntungan pribadi;
- Melakukan penanganan dan pelaporan transaksi bisnis dan keuangan Perusahaan yang tidak sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku; dan
- Melakukan pemalsuan atas catatan akuntansi Perusahaan atau laporan keuangan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lain yang merugikan Perusahaan baik langsung maupun tidak langsung.

or no person may disclose confidential information to others except by official requirement as needed.

False Statement, False Claims, and Conspiracy

All of the Company's personnels related to marketing tasks, drawing approval, survey and inspection, certification process, the making of contracts / agreements and financial administration including accounting, have realized the importance of making an accurate statement and a correct claim to the Chairman, Government or to other parties. This includes any verbal or written statement submitted to the other party or used by the Company. Deliberately submitting a statement or claim that is untrue or misleading or which involve any conspiracy with others to harm the other party could result in administrative, criminal, civil punishment for the relevant personnel and other parties involved, including the Company's partners and employees.

Fraud, Deviation and its kinds

The Company has established a policy to prohibit any form of fraud and deviation, and continue to implement procedures that must be obeyed and followed related to finding, recognition, reporting, inquiry and investigation on suspicion of fraud and deviation. Fraud and deviation include:

- *Violation of company rules.*
- *Dishonesty or deceit related to the implementation of duties.*
- *Fraud, omission, or transfer of anything that could directly or indirectly harm the company.*
- *Falsification or manipulation of company's securities such as checks, demand deposits, certificates, etc.*
- *Misuse of company assets.*
- *Transfer of cash, securities or assets of the company for personal use or interest*
- *Handling and reporting of business and financial transaction of the company that do not comply with the procedures and regulations*
- *Falsification of the Company's accounting records or financial statement for personal interests or other interests that can harm the company either directly or indirectly*



Benturan Kepentingan

Conflict of Interest

Perusahaan mendefinisikan benturan kepentingan sebagai situasi terjadinya pertentangan kepentingan pribadi Dewan Komisaris, Direksi, atau karyawan dengan kepentingan Perusahaan. Benturan ini dapat melibatkan kepentingan pemakai jasa, instansi lain yang berkepentingan dengan jasa Perusahaan, rekanan, karyawan (pensiunan, aktif atau calon karyawan) atau bahkan anggota masyarakat di tempat Perusahaan beroperasi. Terdapat dua prinsip utama yang telah diikuti untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan dan implikasi lanjutan yang sering ditimbulkannya:

- Tidak memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi dan atau untuk kepentingan orang dan atau pihak lain yang terkait; dan
- Menghindari setiap aktivitas di luar dinas yang dapat berpengaruh secara negatif terhadap independensi dan objektivitas pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Aktivitas dimaksud tentunya merupakan aktivitas yang dapat bertentangan dengan kinerja jabatan atau yang dapat merugikan citra dan reputasi Perusahaan

Benturan Kepentingan dalam Keputusan Hasil Survei / Inspeksi

Dengan memprioritaskan aspek keselamatan, Perusahaan telah menyadari bahwa hasil survei, laporan, dan sertifikat yang diterbitkan mempunyai implikasi terhadap aspek keselamatan yang diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan; antara lain pemilik kapal, pemilik kargo, asuransi, galangan, penumpang, awak kapal, Pemerintah, dan masyarakat umum secara luas. Untuk itu seluruh jajaran Direksi, para Kepala Divisi, Kepala Satuan, Kepala Unit Produksi dan Wakilnya, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Surveyor, Inspektor dan staf teknik Kantor Pusat selalu menjaga independensinya dalam pengambilan keputusan, memberikan rekomendasi, keputusan hasil survei, dan pembuatan laporan. Apabila terjadi benturan kepentingan, maka pertimbangan aspek keselamatan adalah mutlak menjadi prioritas utama dengan mengacu peraturan dan regulasi yang berlaku.

Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

Dewan Komisaris, Direksi, Manajemen, dan Karyawan tidak boleh berpartisipasi dalam setiap kegiatan pengadaan yang melibatkan suatu Perusahaan dimana yang bersangkutan atau keluarga yang bersangkutan mempunyai andil atau kepemilikan saham yang signifikan, atau mempunyai kepentingan finansial tertentu. Adapun yang dimaksud dengan berpartisipasi dalam proses pengadaan adalah:

- Mengundang, memberikan persetujuan, atau membahas pekerjaan di masa mendatang dengan kontraktor dan pemasok yang berkompetisi, yaitu setiap entitas usaha yang kemungkinan di masa mendatang dapat menjadi pesaing atau pemenang kontrak dari Perusahaan.

The Company defines conflict of interest as a situation of conflict between personal interest of commissioners, directors, or employees with company interest. This conflict can involve the interest of customer, other agencies concerned with the Company's services, partners, employees (retired, active or prospective employees), or even members of community where the Company operates. There are two main principles that have been followed to prevent conflict of interests and its further implications:

- *Not using the function in office for personal benefit and or for the benefit of people and or other related party.*
- *Avoid any activity outside the agency that can negatively influence the independence and objectivity in decision-making. The referred activity is activity that may conflict with job performance or that could harm the image and reputation of the Company.*

Conflict of Interest in Decision of Survey/Inspection Results

As a company that prioritizes the safety aspect, the Company has realized that the survey results, reports and certificates issued have implications on safety aspects required by parties concerned, including ship owners, cargo owners, insurance, shipyard, passengers, crew, Government, and the general public. Therefore, all Directors, Heads of Division, Heads of Unit, Head and Deputy of Production Unit, Heads of Department, Heads of Division, Surveyors, Inspectors and technical staff of the Head Office always maintain their independence in decision making, giving recommendation, deciding survey results and preparing reports. If there is a conflict of interest, then consideration of safety aspect is an absolute priority in accordance with the applicable rules and regulations.

Conflict of Interest in Goods Procurement

Board of Commissioners, Directors, Management and Employees must not participate in any procurement activity involving the company where the individual or his family has a significant stake or share ownership, or has certain financial interest. Participating in procurement process include:

- *Invite, give approval or discuss future works with competing contractors and suppliers, which is any business entity that in the future can be a competitor or win a contract from the company.*



- Meminta atau menerima uang, pemberian/hadiah, atau hal-hal lain yang bernilai, baik secara langsung maupun tidak langsung dari kontraktor dan pemasok yang berkompetisi.
- Berusaha untuk memperoleh atau mengungkapkan informasi yang terkait dengan proses pengadaan, dan sebaliknya. Pemasok barang dan jasa/kontraktor yang diundang untuk berpartisipasi dalam proses pengadaan harus memenuhi persyaratan menghindari benturan kepentingan yang sama sebagaimana yang diberlakukan pada Komisaris, Direksi, Manajemen dan karyawan Perusahaan.

Benturan Kepentingan dengan Aktivitas Sampingan

Dewan Komisaris, Direksi, Manajemen, dan karyawan dapat diizinkan melakukan aktivitas lain di luar jam kerja yang telah ditetapkan, dengan syarat bahwa aktivitas tersebut tidak menimbulkan benturan kepentingan dengan kepentingan Perusahaan dan/atau aktivitas tersebut tidak menurunkan kemampuan untuk memenuhi tugas yang telah diamanatkan. Keterlibatan dalam aktivitas lain di luar Perusahaan tidak boleh mengurangi independensi dan objektivitas dalam

- *Solicit or accept money, gift or other things of value, either directly or indirectly from competing contractors and suppliers.*
- *Try to obtain or disclose information related to the procurement process and vice versa. Suppliers of goods and services (contractors) who are invited to participate in the procurement process must meet the requirements to avoid conflicts of interest as that imposed on the Company's Board of Commissioners, Directors, Management and Employees.*

Conflict of Interest with Side Activities

Board of Commissioners, Directors, Management and Employees may be allowed to do other activities outside the predetermined working hours, as long as such activities do not cause conflict of interests with company interest and/or the activity does not reduce the ability to fulfill the tasks that have been mandated. Involvement in other activities outside the Company

mengambil keputusan atau mempengaruhi efektivitas dan ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan karyawan yang bersangkutan.

Setiap karyawan harus menjunjung tinggi standar kinerja tanpa terkecuali dan sedapat mungkin bertindak objektif dan independen dalam setiap kegiatan sehari-hari. Apabila kemudian Direksi dan atau karyawan Perusahaan merasakan kemungkinan timbulnya benturan kepentingan dalam kegiatan yang dilaksanakan, maka yang bersangkutan wajib memberitahukan hal tersebut secara tertulis kepada Direksi. Permohonan izin untuk melakukan aktivitas sampingan harus disampaikan dan mendapatkan persetujuan dari Pejabat yang berwenang yang ditunjuk sebelum karyawan yang bersangkutan menjalankan pekerjaan sampingan tersebut atau melakukan kegiatan konsultasi selepas kerja apabila terjadi salah satu atau lebih dari beberapa hal-hal berikut:

Terdapat kemungkinan benturan kepentingan;

- Aktivitas luar dinas tersebut merupakan hasil pengetahuan yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung dengan pekerjaan di Perusahaan;
- Aktivitas luar dinas tersebut merupakan aktivitas yang tumpang tindih dengan hari dan jam kerja Perusahaan; dan
- Aktivitas tersebut melebihi enam jam kerja pada suatu hari kerja tertentu atau lebih dari 20 jam kerja pada minggu kerja tertentu.
- Dapat mengganggu kepentingan Perusahaan dan atau tugas dan tanggung jawab pokok karyawan yang bersangkutan.

may not reduce the independence and objectivity in making decision or influence the effectiveness and timeliness of work completion of those employees.

Each employee must uphold the standards of performance without exception, and wherever possible act objectively and independently in their daily activities. If then the Directors and/or employees of the company feel the possibility of conflict of interest in their activities, they shall notify it in writing to Board of Directors. Request for permission to perform side activities must be submitted and approved by the appointed authorized officer before the employee can conduct the side job or consulting activities after work in the event of one or more of the following:

There is a possibility of conflict of interest.

- *The activities outside the company come from the knowledge gained both directly and indirectly from the work within the company.*
- *Outside activities are activities that overlap with company working hours.*
- *Such activities exceed 6 working hours on a particular work day or more than 20 working hours on a particular work week.*
- *Such activities may interfere the company interest and or duties and responsibilities of those employees.*



Pelaporan Pelanggaran

Whistle Blowing System

Sistem Pelaporan Pelanggaran atau *Whistle Blowing System* (WBS) merupakan sistem pengelolaan penyaluran GCG Code yang aman, responsif, transparan, akuntabel, dan dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan bagi seluruh Pemangku Kepentingan. Penerapan *Whistle Blowing System* Perusahaan mengacu kepada Surat Keputusan Direksi No. DU.060C/LT.101/KI-14 tanggal 5 Februari 2014 tentang Pedoman Pelaporan Pelanggaran *Whistle Blowing System* (WBS). Perusahaan berupaya menerapkan *Whistle Blowing System* dengan menjamin penjagaan kerahasiaan pelapor di lingkungan kerja.

Setiap karyawan Perusahaan dapat menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap GCG Code secara pribadi melalui tertulis dengan mengirimkan surat yang ditujukan kepada Direktur Utama atau *Vice President of Internal Audit* dalam hal terlapor selain Direksi. Apabila terlapor adalah Direksi, laporan dapat ditujukan kepada Komisaris Utama.

Beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam penerapan *Whistle Blowing System* Perusahaan:

1. Pelapor disarankan untuk memberikan informasi mengenai identitas diri, yang sekurang-kurangnya memuat nama/alamat/nomor telepon/handphone/faksimili/surel dan fotokopi identitas diri.
2. Pelaporan pelanggaran harus disertai dokumen pendukung seperti dokumen yang berkaitan dengan transaksi yang dilakukan dan/atau Pelaporan Pelanggaran yang akan disampaikan.
3. Kerahasiaan identitas yang bersangkutan akan dijaga kecuali apabila pengungkapan tersebut:
 - a. Diperlukan dalam kaitan dengan laporan atau penyidikan yang dilakukan oleh Pemerintah;
 - b. Sejalan dengan kepentingan Perusahaan dan sejalan dengan tujuan GCG Code ini; dan
 - c. Diperlukan oleh Bagian Hukum untuk mempertahankan posisi Perusahaan di depan hukum.
4. Bahwa setiap laporan yang masuk tidak akan disebarluaskan kepada pihak manapun juga (*public expose*) sebelum terbukti kebenarannya.
5. Berdasarkan laporan yang masuk, Direktur Utama atau Komisaris Utama akan membentuk Tim Investigasi independen untuk setiap kasus yang dilaporkan. Untuk menjaga integritas dan akuntabilitas Tim Investigasi, maka Perseroan memiliki kebijakan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi Tim Investigasi ini.
6. Tim Investigasi memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti laporan yang dianggap sah sebagaimana ditetapkan dan setiap hasil tindak lanjut tersebut harus dilaporkan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada anggota Direksi.

Whistle Blowing System (WBS) is a distribution management system of GCG Code that is secured, responsive, transparent, accountable, and consistently and continuously performed for all Stakeholders. The application of *Whistle Blowing System* refers to the BOD Decision No. DU.060C/LT.101/KI-14 dated February 5, 2014 on Guidelines for *Whistle Blowing System* (WBS). The Company strives to apply *Whistle Blowing System* by ensuring the whistle blower confidentiality in work environment.

Each employee may report alleged violation to GCG Code personally by sending a letter addressed to the President Director or Vice President of Internal Audit if the reported party is not members of the Board of Directors. If the reported party is members of the Board of Directors, the report can be addressed to the President Commissioner.

There are several important things that must be considered in the application of Whistle Blowing System:

1. *The Rapporteur is advised to provide information on his identity, which at least contains the name/ address/phone number/mobile phone/fax/e-mail and photocopy of personal identity.*
2. *Violation report must be accompanied by supporting documents such as documents relating to transactions made and/or the Violation Report to be submitted.*
3. *The anonymity of rapporteur will be maintained unless the disclosure is:*
 - a. *Required in connection with a report or investigation conducted by the Government;*
 - b. *In accordance with the interests of the Company and for purposes of this GCG Code; and*
 - c. *Required by the Legal Department to maintain the Company's position before the law.*
4. *Every incoming report will not be disseminated to any party (public expose) before proven true.*
5. *Based on the incoming reports, the President Director or President Commissioner will create an independent investigation team for every reported case. To maintain the integrity and accountability of the Investigation Team, the Company has a policy to monitor and evaluate the Investigation Team.*
6. *Investigation team shall follow up reports that are considered valid as determined and every follow-up must be reported to the President Director with a copy to the Board of Directors.*



Pengadaan Barang/Jasa Dan Hubungan Dengan Rekanan

Perusahaan telah menerapkan proses pengadaan sesuai prinsip GCG, antara lain menjunjung prinsip-prinsip keterbukaan, kompetitif, *fair* dan dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*). Proses pengadaan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk pengadaan barang dan jasa, Perusahaan memiliki peraturan yang jelas dan tertulis untuk menjamin bahwa pelaksanaan pengadaan barang dan jasa berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut di atas. Proses yang demikian akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kepentingan Perusahaan dan memberikan kesempatan yang sama kepada semua rekanan untuk berkompetisi dalam proses pengadaan sesuai dengan kemampuan dan pengalaman mereka.

The Procurement of Goods/Services and Relationship with Partners

The Company has implemented a procurement process in accordance with GCG, i.e. upholding the principles of openness, competitive, fair and accountable. The procurement process does not conflict with applicable legislation. For goods and service procurement, the Company has clear, written rules to ensure that the implementation of the goods and service procurement in line with the principles mentioned above. Such processes will provide maximum benefit for the company interest and provide equal opportunity to all partners to compete in procurement process according to their capabilities and experience.



Dalam pemilihan rekanan untuk proses pengadaan tidak diperbolehkan menunjuk rekanan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan Dewan Komisaris, Direksi, pejabat ataupun personil di Perusahaan. Selain itu dalam pemilihan barang atau rekanan, diupayakan semaksimal mungkin untuk mempergunakan produk dalam negeri dengan tetap mempertimbangan aspek kualitas, efisien dan efektivitas serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Perkara Penting Yang Dihadapi Perusahaan

Selama tahun 2013 tidak ada perkara penting maupun perkara dalam pengadilan yang sedang dihadapi Perusahaan.

In choosing a partner for the procurement process, it was not allowed to appoint a partner that could cause conflict of interest with Board of Commissioners, Directors, officers or personnel in the Company. Moreover, in the selection of goods or partner, the Company shall try its best to use domestic products by keep considering the aspects of quality, efficiency and effectiveness, as well as compliance with the prevailing legislation.

Legal Cases

There were no important cases or legal cases faced by the Company in 2013.



Rencana Pengembangan GCG Tahun 2014

2014 GCG Development Plan



Perusahaan terus berupaya mengembangkan penerapan GCG secara kontinyu dan relevan. Selain memberikan efek positif terhadap kinerja Perusahaan, pengembangan GCG terus dilakukan agar skor GCG dapat dicapai sesuai dengan KPI korporasi berdasarkan hasil RUPS dan RKAP tahun 2014. Beberapa upaya pengembangan GCG tersebut diantaranya:

1. Menyempurnakan *Board Manual* GCG disertai dengan Surat Keputusan Direksi Perusahaan.
2. Menyempurnakan Pedoman Gratifikasi sehingga dapat terhindar dari kecurangan (*fraud*) dan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) disertai dengan Surat Keputusan Direksi.
3. Menyempurnakan Pedoman *Whistle Blowing System* (WBS) tentang pelaporan pelanggaran Kecurangan, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme disertai dengan Surat Keputusan Direksi.
4. Menyempurnakan Surat Edaran tentang pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) di tingkat Direksi, Pejabat Senior (Kepala Divisi) dan Manajer Senior.
5. Menyempurnakan Surat Edaran tentang kebijakan untuk tidak mendukung Partai Politik tertentu.
6. Melakukan penyempurnaan terhadap aplikasi penerapan 'BUMN Bersih' di level Dewan Komisaris, Direksi, Kepala Divisi dan Manajer Senior untuk menjadikan Perusahaan terus berkomitmen terhadap penerapan *Good Corporate Governance* (GCG).

The company strives to develop relevant GCG implementation continuously. Besides giving positive effect on the Company's performance, GCG development is continued in order to achieve GCG score in accordance with corporate KPIs based on the results of the 2014 GMS as well as the Company's Action Plan and Budget. The GCG development efforts include:

1. *Improving GCG Manual Board accompanied by the Decree of the Board of Directors of the Company.*
2. *Improving Gratuities Guidelines to avoid fraud and Corruption, Collusion, Nepotism accompanied by the Decree of the Board of Directors.*
3. *Improving Whistle Blowing System Guidelines (WBS) on Fraud, Corruption, Collusion and Nepotism Reporting accompanied by the Decree of the Board of Directors.*
4. *Improving the Circular Letter on State Official Wealth Report (LHKPN) at the level of the Board of Directors, Senior Officers (Head of Division) and Senior Managers.*
5. *Improving the Circular Letter on policy of not supporting any particular political party.*
6. *Improving the implementation of 'BUMN Bersih' (Clean SOE) at the level of Board of Commissioners, Directors, Division Head and Senior Managers to continue the Company's commitment on Good Corporate Governance (GCG).*

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan
This Page Is Intentionally Left Blank





Tanggung Jawab Sosial Perusahaan *Corporate Social Responsibility*





Sebagai entitas usaha yang lahir dan bergerak di Indonesia, sudah selayaknya Perusahaan memiliki komitmen untuk tumbuh bersama lingkungan; baik lingkungan sosial maupun harmonisasi lingkungan alam. Melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, atau Corporate Social Responsibility (CSR), Perusahaan terus berupaya menciptakan kesinambungan antar seluruh elemen terkait: karyawan, konsumen, maupun masyarakat umum.

Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Serta Pelestarian Lingkungan

Dalam menjalankan aktivitasnya, Perusahaan menyadari keselamatan dan kesehatan kerja serta pelestarian lingkungan harus menjadi bagian yang tak boleh dipisahkan. Kesehatan dan keselamatan kerja yang prima serta tanggung jawab terhadap lingkungan merupakan gerakan sadar lingkungan; baik lingkungan sosial dimana seluruh insan Perusahaan bergerak bersama maupun lingkungan alam yang harus memiliki keseimbangan. Karena itulah, pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja serta pelestarian lingkungan menjadi sangat penting bagi keberhasilan Perusahaan jangka panjang.

Perusahaan telah mengambil tindakan yang tepat untuk menghindari terjadinya kecelakaan dan gangguan kesehatan di tempat kerja, dimana Perusahaan telah mengusahakan agar pegawai memperoleh tempat kerja yang aman dan sehat. Untuk maksud tersebut Perusahaan telah memastikan bahwa aset-aset dan lokasi usaha serta fasilitas lainnya telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan persyaratan kesehatan dan keselamatan kerja serta pelestarian lingkungan.

Perusahaan juga memiliki kewajiban untuk senantiasa melengkapi dan menyediakan alat, sarana dan perlengkapan keselamatan dan kesehatan kerja agar seluruh surveyor dan inspektor dapat bekerja aman dan selamat. Dalam prakteknya, Perusahaan memiliki HSE (Health, Safety & Environment) Manual sebagai acuan dalam pelaksanaan dan pengendalian aspek kesehatan, keselamatan dan perlindungan lingkungan kerja.

As a business entity that was established and flourish in Indonesia, it is only fitting if the Company is committed to grow with its surrounding environment; both social and natural environment. Through its Corporate Social Responsibility (CSR) programs, the Company continues to create sustainability between all related elements: employees, customers, and the general public.

Occupational Health and Safety and Environmental Preservation

In carrying out its activities, the Company is aware that occupational health and safety and environmental preservation should be an indispensable part. An excellent occupational health and safety and environmental responsibility are environmentally conscious movement; whether it is social environment where all employees work together or the nature which should have a balance. Therefore, the management of occupational health and safety and environmental preservation are very important for the Company's long-term success.

The Company has taken appropriate measures to avoid the occurrence of accidents and health problems in the workplace by creating a safe and healthy workplace for employees. For this purpose, the Company has ensured that all assets, business premises and other facilities have met the applicable laws and regulations on requirements of occupational health and safety and environmental preservation.

The Company also has an obligation to always equip and provide tools, facilities and equipments for occupational safety and health so that all surveyors and inspectors can work safely and securely. In practice, the Company has HSE (Health, Safety & Environment) Manual as a reference in the implementation and control of occupational health, safety and environmental preservation.



“

Kepedulian berbagi dan membantu sesama adalah wujud komitmen BKI untuk memberi manfaat seluas-luasnya bagi para pemangku kepentingan

Caring for sharing and helping others is a manifestation of BKI's commitment to sharing the utmost benefits with all the stakeholders.

”



Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan

Partnership and Environmental Assistance Program (PKBL)

Prinsip Dasar Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)

Dalam rangka mendorong kegiatan dan pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan serta terciptanya pemerataan pembangunan melalui perluasan lapangan kerja, kesempatan berusaha dan pemberdayaan masyarakat, Perusahaan menganggap perlu untuk berpartisipasi memberdayakan dan mengembangkan kondisi ekonomi, kondisi sosial masyarakat dan lingkungan sekitarnya melalui Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil (Program Kemitraan) adalah program untuk meningkatkan kemampuan Usaha Kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Program ini terbagi dalam beberapa bentuk, baik itu pinjaman untuk membiayai modal kerja atau pemberian modal tetap dalam rangka meningkatkan produktivitas dan penjualan; pinjaman khusus untuk membiayai kebutuhan dana pelaksanaan kegiatan usaha Mitra Binaan yang bersifat jangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha Mitra Binaan; ataupun dana Program Kemitraan yang bisa disalurkan dalam bentuk hibah yang digunakan untuk pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, serta hal-hal lain yang menyangkut upaya peningkatan produktivitas Mitra Binaan.

Sementara Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial oleh BUMN di wilayah usaha BUMN tersebut melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Program ini bertujuan memberikan manfaat kepada masyarakat di wilayah usaha BUMN dengan jalan memberdayakan kondisi sosialnya, dengan bentuk bantuan korban bencana alam, pendidikan/pelatihan, peningkatan kesehatan, pengembangan prasarana/sarana umum, sarana ibadah, bantuan pelestarian alam, maupun pengentasan kemiskinan

Sesuai dengan prinsip dasar Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), Perusahaan kemudian membentuk unit pelaksana PKBL yang memiliki pembukuan tersendiri di luar pembukuan Perusahaan dan bertanggung jawab langsung kepada Direksi BUMN Pembina. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. DU.052/KP.503/KI-13 tanggal 24 April 2013 telah ditunjuk pengelola Unit PKBL yaitu Dandy Rukmana, S.E. sebagai Ka. Unit PKBL; dan sesuai Surat Perjanjian Kerja No. A. 0633/HK.503/KI-13 dan Surat Perjanjian Kerja No. A. 1411/HK.503/KI-13 menetapkan M. Rusdi dan Ndaru Triwibowo, S.E. untuk membantu administrasi operasional Unit PKBL.

Basic Principles of Partnership and Environmental Assistance Program (PKBL)

In order to encourage activity and growth of Economic Democracy and the creation of equitable development through expansion of employment, business opportunities and community development, the Company considers it necessary to participate in the empowerment and development of economic condition, social condition and its surrounding environment through the SOE Partnership Program with Small Businesses and Community Development Program.

SOE Partnership Program with Small Businesses (Partnership Program) is a program to improve the ability of Small Businesses to become strong and independent by utilizing funds from SOE profits. This program consists of several formats, i.e. loan to finance working capital or provision of fixed capital to increase productivity and sales; special loan to finance the implementation of Patronage Partners' short-term business activities to meet orders from their business partners; or Partnership Program funds distributed as grants for education, training, internships, marketing, promotion, and other activities to improve Patronage Partners' productivity.

While Community Development Program is a social empowerment program carried out by SOE in its surrounding area by utilizing funds from SOE profits. This program aims to provide benefits to the SOE's surrounding communities by empowering their social conditions, in the form of natural disaster relief, education/training, health improvement, development of public infrastructure/facilities, religious facilities, nature conservation aid, and poverty alleviation.

In accordance with the basic principles of the Partnership and Community Development Program (PKBL), the Company forms a PKBL implementation unit that has its own bookkeeping apart from the Company's books and is directly responsible to the SOE's BOD. Based on the Board of Directors Decision Letter No. DU.052/KP.503/KI-13 dated 24 April 2013, Dandy Rukmana, S.E. was appointed as Head of PKBL Unit; and based on Employment Agreement Letter No. A. 0633/HK.503/KI-13 and Employment Agreement Letter No. A. 1411/HK.503/KI-13, M. Rusdi and Ndaru Triwibowo, S.E. were appointed to assist the administration of PKBL Unit operations.



Seiring dengan berjalannya waktu Unit PKBL Perusahaan hingga kini telah menyalurkan dana kemitraan di 6 (enam) wilayah binaannya dengan jumlah mitra binaan sebanyak 773 Mitra Binaan dengan jumlah dana yang telah disalurkan sebesar Rp13.495.140.000,-. Jumlah tersebut terdiri dari:

- Wilayah Jabodetabek sebanyak 263 Mitra Binaan dengan total dana yang disalurkan sebesar Rp5.270.150.000,-.
- Wilayah Jawa Timur sebanyak 116 Mitra Binaan dengan total dana yang disalurkan sebesar Rp2.272.500.000,-.
- Wilayah Yogyakarta sebanyak 250 Mitra Binaan dengan total dana yang disalurkan sebesar Rp3.062.000.000,-.
- Wilayah Jawa Barat sebanyak 74 Mitra Binaan dengan total dana yang disalurkan sebesar Rp1.775.490.000,-.
- Wilayah Jawa Tengah sebanyak 68 Mitra Binaan dengan total dana yang disalurkan sebesar Rp1.095.000.000,-.
- Wilayah Sulawesi Selatan sebanyak 2 (dua) Mitra Binaan dengan total dana yang disalurkan sebesar Rp20.000.000,-.

Sumber dana Unit PKBL Perusahaan didapatkan melalui beberapa sumber, yaitu:

- Penyisihan laba setelah pajak dari Perusahaan maksimal sebesar 2% sesuai RUPS.
- Jasa administrasi pinjaman/margin/bagi hasil, deposito dan jasa giro dari dana Program Kemitraan; dan hasil bunga deposito atau jasa giro dari dana Program Bina Lingkungan.
- Pelimpahan dana Program Kemitraan dari BUMN lain.

Over time, the PKBL Unit has disbursed partnership funds in 6 (six) regions with 773 Patronage Partners and the amount of funds that have been disbursed is Rp 13,495,140,000, -. This amount consists of:

- Greater Jakarta area with 263 Patronage Partners and total funds disbursed Rp 5,270,150,000, -.*
- East Java with 116 Patronage Partners and total funds disbursed Rp 2,272,500,000, -.*
- Yogyakarta region with 250 Patronage Partners and total funds disbursed Rp 3,062,000,000, -.*
- West Java with 74 Patronage Partners and total funds disbursed Rp 1,775,490,000, -.*
- Central Java with 68 Patronage Partners and total funds disbursed Rp 1,095,000,000, -.*
- South Sulawesi with 2 (two) Patronage Partners and total funds disbursed Rp 20,000,000, -.*

PKBL Unit obtains funds through several sources, namely:

- Allowance for profit after tax of the Company at a maximum of 2% according to GMS.*
- Administration services for loan/margin/profit sharing, deposits and giro services of the Partnership Program funds; and the interests from deposit accounts or current accounts of the Community Development Program funds.*
- Delegation of Partnership Program funds from other SOE.*



Pengaruh PKBL terhadap masyarakat sekitar membawa dampak positif diantaranya dapat membantu pengurangan jumlah pengangguran dan dapat meningkatkan pendapatan bagi para pengusaha kecil. Selain itu, program ini memberikan fungsi komunikasi dan harmonisasi antara Perusahaan dengan BUMN lainnya, khususnya dalam pengelolaan dana Program Kemitraan antar sesama BUMN.

PKBL influence on the surrounding community brings positive impact such as help to decrease the number of unemployment and increase the income of small entrepreneurs. In addition, this program provides the communication and harmonization between the Company and other SOEs, particularly in the management of Partnerships Program funds among SOEs.

Realisasi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perusahaan Tahun 2013

Tahun 2013, Perusahaan mengupayakan kinerja Unit PKBL secara maksimal melalui kualitas pendampingan dan pemberdayaan secara simultan. Beberapa pencapaian diantaranya,

- Perusahaan sudah melakukan pembinaan dengan system/model cluster pada 2 (dua) wilayah, yaitu wilayah Jawa Barat yaitu Cluster Arta Mukti Raharja, Sangkan Makmur dan Saribumi di wilayah Sukabumi, Jawa Barat; dan wilayah Yogyakarta yaitu Cluster Catur Tunggal di wilayah Bantul, Yogyakarta.
- PD Karna Winajat, Mitra Binaan Sukabumi yang bergerak dalam bidang home industri produsen alat-alat dapur dari kayu resmi menjadi Mitra Binaan unit PKBL Perusahaan usai lebaran tahun 2012 lalu dan mendapatkan pinjaman lunak sebesar Rp50 juta yang dipergunakan untuk membeli mesin dan bahan baku. Mitra Binaan asal Sukabumi ini kemudian berpartisipasi dalam ajang Inacraft 2013 dan berkesempatan untuk bersentuhan dengan pembeli asal Surabaya dan Spanyol. Meski belum genap setahun menjadi Mitra Binaan Perusahaan, omset PD Karna Winajat meningkat pesat, dari Rp80 juta/bulan menjadi Rp100 juta/bulan.
- Catur Tunggal, Mitra Binaan Bantul, Yogyakarta, merupakan usaha keluarga yang diturunkan dari (Alm.) Bapak Suradi dan bergerak dibidang kerajinan industri kulit. Sejak bulan April 2013, Catur Tunggal resmi menjadi Mitra Binaan Unit PKBL Perusahaan dan mendapatkan pinjaman sebesar Rp50 juta yang 90%-nya dipergunakan untuk membeli bahan baku produk dan sisanya sebagai dana cadangan. Mitra Binaan ini berhasil meningkatkan omsetnya sebesar 20%, dari Rp60 juta/bulan menjadi Rp72 juta/bulan. Catur Tunggal turut berpartisipasi dalam Inacraft 2013 dan mendapatkan pesanan dari Negara Eropa Timur.
- Telah dilaksanakan penyaluran Bina Lingkungan di Desa Sukamanis dan Desa Cikahuripan Kecamatan Kadudampit, Sukabumi, Jawa Barat.

Komitmen Perusahaan untuk terus tumbuh bersama masyarakat tak lepas dari entitas Perusahaan sebagai salah satu badan usaha yang mengemban visi dan misi Indonesia. Di sepanjang tahun 2013, Perusahaan telah menyalurkan dana untuk Program Kemitraan sebesar Rp1.249.767.490,- dan Program Bina Lingkungan sebesar Rp1.303.061.638,-.

Realization of the Partnership and Community Development Program in 2013

In 2013, the Company strived to maximize the performance of PKBL Unit through quality mentoring and simultaneous empowerment. Some of the achievements are,

- The Company provided guidance with cluster system/model clusters in two (2) regions, i.e. West Java, namely Arta Mukti Raharja, Sangkan Makmur, and Saribumi Clusters in Sukabumi, West Java; and Yogyakarta, namely Catur Tunggal Cluster in Bantul, Yogyakarta.
- PD Karna Winajat, a Patronage Partner in Sukabumi, engaged in home industry producing wooden kitchenwares, officially became Patronage Partner of the PKBL unit after Eid in 2012 and received a soft loan of 50 million which was used to purchase machinery and raw materials. This Patronage Partner then participated in 2013 Inacraft event and had the opportunity to meet buyers from Surabaya and Spain. Although it is barely a year since PD Karna Winajat became the Company's Patronage Partner, its turnover has increased rapidly from Rp 80 million/month to Rp 100 million/month.
- Catur Tunggal, a Patronage Partners in Bantul, Yogyakarta, is a family business inherited from (the late) Mr. Suradi and engaged in leather craft industry. In April 2013, Catur Tunggal officially became the Company's PKBL Unit Patronage Partner and received a loan of Rp 50 million, of which 90% was used to purchase raw materials and the remaining amount is used as reserve fund. This Patronage Partner managed to increase its turnover by 20%, from Rp 60 million/month to Rp 72 million/month. Catur Tunggal participated in 2013 Inacraft and received orders from Eastern European countries.
- Community Development was implemented in Sukamanis and Cikahuripan Villages of Kadudampit District, Sukabumi, West Java.

The company's commitment to continue growing together with the community could not be separated from the Company's entity as as one of the business entities that carry out the vision and mission of Indonesia. Throughout 2013, the Company has distributed funds for Partnership Program amounting to Rp 1,249,767,490,- and for Community Development Program Rp 1,303,061,638, -.

Realisasi Sumber dan Penggunaan Dana Unit PKBL Perusahaan

Realization of Sources and Use of Funds by PKBL Unit

Uraian Description	Program Program
Kemitraan	Partnership
Bina Lingkungan	Community Development
Dana Tersedia	Funds available
1. Saldo Awal	1. Beginning Balance
2. Alokasi Laba dari BUMN Pembina	2. Allocation of Profit from SOE Patron
3. Pengembalian Pokok Pinjaman Mitra Binaan	3. Repayment of Loan Principal from Patronage Partners
4. Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman	4. Revenue from Loan Administration Service
5. Pendapatan Jasa Giro	5. Revenue from Giro Service
6. Pendapatan Lain - Angsuran Blm Teridentifikasi	6. Other Income - Unidentified installment
Jumlah Dana tersedia	Total funds available
Penyaluran Dana dan Biaya Operasional	Fund distribution and Operating Costs
Penyaluran Pinjaman Kepada Mitra	Distribution of Loans to Partners
Penyaluran Melalui BUMN Pembina Lain	Distribution through other SOE Patron
Penyaluran Hibah / Dana Pembinaan	Distribution of Development Grants / Funds
Penyaluran Dana Bina Lingkungan	Distribution of Community Development Fund
Penyaluran Dana BUMN Peduli	Distribution of SOE Care Fund
Biaya Operasional	Operating Costs
Jumlah Penyaluran Dana & Biaya Operasional	Total Fund distribution & Operating Costs
Dana Tersedia Per 31 Desember 2013	Funds available as of 31 December 2013

Perusahaan telah menyusun laporan keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perusahaan tahun 2013 dan melakukan audit melalui auditor eksternal KAP Husni, Mucharam & Rasidi. Seluruh temuan atas hasil audit PKBL tahun 2013 oleh KAP Husni, Mucharam & Rasidi telah dinyatakan wajar dalam semua hal yang material dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

The Company has prepared financial statements of the Partnership and Community Development Program for 2013, which was audited by external auditor Public Accountant Firm Husni, Mucharam & Rasidi. All the audit findings in 2013 by Public Accountant Firm Husni, Mucharam & Rasidi were stated as fair in all material respects and in accordance with Entities Accounting Standards Without Public Accountability (SAK ETAP).

Kendala dan Hambatan

Dalam pelaksanaan PKBL, Perusahaan menghadapi kendala dalam penyelesaian piutang bermasalah oleh Mitra Binaan. Kendala ini terjadi karena berbagai sebab, seperti kesulitan untuk menelusuri Mitra Binaan yang sudah pindah alamat, terkena musibah gempa, juga Mitra Binaan sebagian ada yang mengalami sakit dengan kategori cacat tetap, bahkan telah meninggal dunia sehingga piutang-piutang tersebut dikelompokkan dalam piutang bermasalah. Selain itu minimnya pemahaman Mitra Binaan terhadap tata cara pelaporan menyebabkan sulitnya memperoleh data perkembangan usaha Mitra Binaan. Rencana tahun 2014, Mitra Binaan yang masuk dalam kelompok piutang macet akan dilakukan penjadwalan ulang untuk memperkecil jumlah piutang bermasalah yang akan timbul.

Constraints and Obstacles

In the implementation of PKBL, the Company faces obstacles in settling problematic accounts of Patronage Partners. These obstacles were due to various reasons, such as difficulties in tracing Patronage Partners who have moved address, hit by the earthquake, and some of the Patronage Partners are sick, have permanent disability, or even had died so the receivables are classified as problematic receivables. Moreover, the Patronage Partners' lack of understanding of the reporting procedures make it difficult to obtain data on the development of their business. The plan for 2014 is to reschedule the bad debts to minimize the number of problematic receivables that will arise.

Sampai saat ini kondisi Piutang Mitra Binaan Perusahaan tergolong relatif lancar meskipun diantaranya masih ada yang diragukan dan bermasalah.

Until now, the Company Patronage Partners' Receivables condition is relatively current although some of them are still questionable and problematic.



Tanggung Jawab Kepada Konsumen

Responsibility to Customers

Sebagai penyedia jasa, Perusahaan meyakini hubungan yang baik dengan konsumen merupakan kunci dalam aktivitas bisnis Perusahaan. Komitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada konsumen diupayakan melalui berbagai bentuk saran dan konsultasi, baik konsultasi langsung maupun jalur konsultasi berbasis surat elektronik. Perusahaan melakukan koordinasi secara bertahap untuk dapat memberikan layanan saran dan konsultasi tersebut, agar kebutuhan dan harapan konsumen dapat teratasi secara efektif dan cepat. Perusahaan menyediakan saluran untuk konsumen melalui:

PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)

Kantor Pusat:

Jl. Yos Sudarso Kav.38-40

Jakarta - 14320

Telp: 62-21-4301017

Fax: 62-21-43936175

Surel: bki@bki.co.id

Situs web: www.bki.co.id

Selain itu, Perusahaan bertanggung jawab penuh terhadap kerahasiaan seluruh informasi yang terkait dengan konsumen. Kebijakan Perusahaan melarang anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan untuk mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia terkait konsumen kepada pihak ketiga, baik di dalam maupun di luar Perusahaan. Mengingat bahwa pengungkapan informasi rahasia tersebut dapat merugikan Perusahaan atau konsumen dan memberikan keuntungan kepada pihak lain, maka pemberian informasi rahasia menurut keperluannya harus melalui persetujuan anggota Direksi.

Perusahaan juga menerapkan Sistem Manajemen Mutu (Quality System) yang mengacu kepada standar internasional dan nasional, yaitu ISO 9001:2008, SNI 17020, SNI 17025 dan juga standar QSCS-IACS (Quality System for Certification Scheme - International Association of Classification Society). Penerapan Sistem Manajemen Mutu ini memberikan fokus Perusahaan kepada pengguna jasa dengan konsistensinya melakukan evaluasi atas kebutuhan (Customer Need) dan kepuasan pemakai jasa (Customer Satisfaction) dan mengkomunikasikan hasil evaluasi tersebut kepada seluruh Unit Kerja terkait.

As a service provider, the Company believes that good relationships with customers is key to the Company's business activities. Commitment to improve the quality of services provided to consumers is pursued through various forms of suggestions and consultation, either directly or thorough e-mails. The company gradually conduct coordination to provide the suggestions and consultancy service, so that the customers' needs and expectations can be resolved effectively and quickly. The company provides a channel for customers through:

PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)

Head Office:

Jl. Yos Sudarso Kav.38-40

Jakarta - 14320

Tel: 62-21-4301017

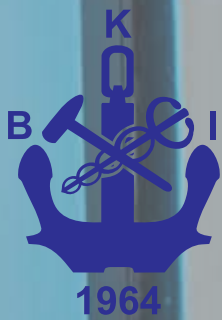
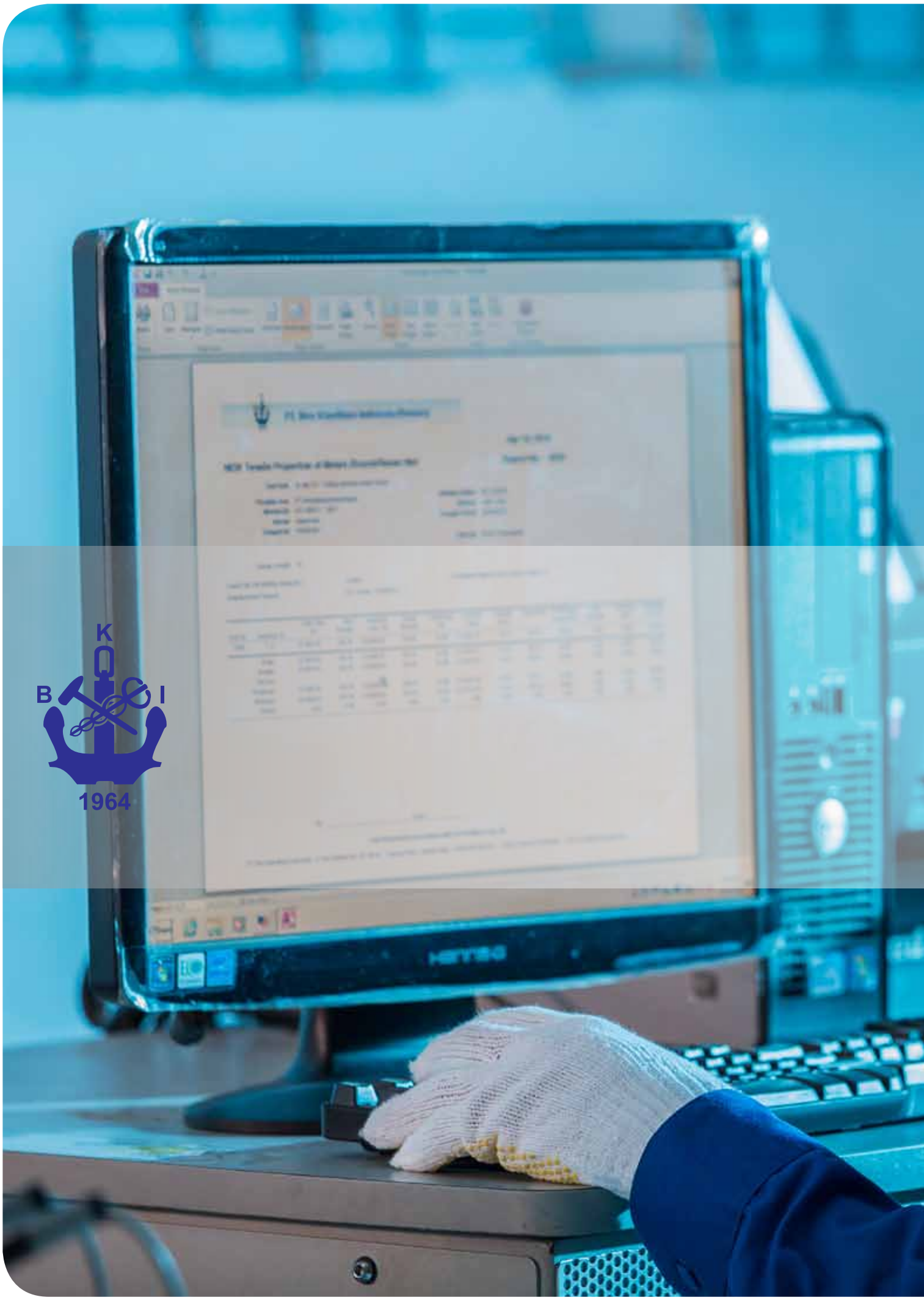
Fax: 62-21-43936175

Email: bki@bki.co.id

Website: www.bki.co.id

In addition, the Company is fully responsible for the confidentiality of all information related to customers. Company policy prohibits members of the Board of Commissioners, Board of Directors and employees to disclose customer-related confidential information to a third party, either inside and outside the Company. Given that the disclosure of confidential information could harm the Company or the customer and provide benefits to the other party, then the provision of confidential information according to its need must be approved by the Board of Directors.

The company also implemented a Quality Management System (Quality System) which refers to international and national standards, such as ISO 9001:2008, ISO 17020, SNI 17025 and also QSCS-IACS standards (Quality System for Certification Scheme - International Association of Classification Society). Implementation of Quality Management System has made the Company consistently focuses on service users by evaluating the Customer Need and Customer Satisfaction, and communicate the evalutaion results to all related Work Unit.





Informasi Perusahaan

Corporate Information



Profil Sekretaris Dewan Komisaris

Profile Of The Secretary Of The Board Of Commissioners

Meriantie

Sekretaris Dewan Komisaris

Secretary of the Board of Commissioner

Meriantie, SE MSi (41 tahun, kelahiran 15 Januari 1973) merupakan lulusan Universitas Indonesia Jakarta, jurusan *Human Resources Development*. Sebelumnya Meriantie berpengalaman sebagai staf Dewan Komisaris di PT Surabaya Industrial Estate Rungkut dan Perum Perumnas. Ia diangkat untuk mengemban tugas Sekretaris Dewan Komisaris melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KU-001/Dekom.101/III/2013 tanggal 1 Maret 2013.

Meriantie, SE MSi (41 years old, born on 15 January 1973) graduated from the University of Indonesia Jakarta, majoring in Human Resources Development. Previously, Meriantie served as a staff of the Board of Commissioners in PT Surabaya Industrial Estate Rungkut and Perum Perumnas. She was appointed as the Secretary of the Board of Commissioners based on BOC Decision Letter No. KU-001/Dekom.101/III/2013 dated 1 March 2013.

Profil Komite Audit

Profile Of The Audit Committee

Trisyu Wimartono

Anggota Komite Audit

Member of the Audit Committee

Trisyu Wimartono (54 tahun, kelahiran 24 Maret 1960) merupakan lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) Jakarta. Sebelumnya berpengalaman bekerja dalam bidang akunting di antaranya pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), PT Sempati Air, PT Asean Market Investment, PT Permodalan Nasional Madani (Persero) dan Pusat Investasi Pemerintah. Ia diangkat untuk mengemban tugas sebagai anggota Komite Audit melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KU.006/Dekom.101/X/2013 tanggal 1 Oktober 2013.

Trisyu Wimartono (54 years old, born on 24 March 1960) graduated from State College of Accounting (STAN) Jakarta. Previously, he worked in the accounting field in the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP), PT Sempati Air, PT Asean Market Investment, PT Permodalan Nasional Madani (Persero) and the Government Investment Center. He was appointed as a member of the Audit Committee based on BOC Decision Letter No. KU.006/Dekom.101/X/2013 dated 1 October 2013.

Deni Sulisty

Anggota Komite Audit

Member of the Audit Committee

Deni Sulisty (41 tahun, kelahiran 31 Januari 1973) merupakan lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) Jakarta. Sebelumnya berpengalaman bekerja dalam bidang akunting di antaranya pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan beberapa kantor akuntan publik. Ia diangkat menjadi anggota Komite Audit melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KU.006/Dekom.101/X/2013 tanggal 1 Oktober 2013.

Deni Sulisty (41 years old, born on 31 January 1973) is a graduate of State College of Accounting (STAN) Jakarta. Previously, he worked in the accounting field in the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP), National Bank Restructuring Agency (BPPN) and several public accounting firms. He was appointed as a member of the Audit Committee based on BOC Decision Letter No. KU.006/Dekom.101/X/2013 dated 1 October 2013.

Profil Komite Investasi (Pengembangan Usaha) *Profile Of Investment Committee (Business Development)*

Win Andriansyah

Anggota Komite Investasi (Pengembangan Usaha)
Member of Investment Committee (Business Development)

Win Andriansyah (39 tahun, kelahiran 15 Januari 1975) merupakan lulusan Teknik Mesin Universitas Indonesia, Jakarta. Ia berpengalaman bekerja di antaranya pada PT Surveyor Indonesia (Persero), PT Pertamina Buana Sadpetra Sebas, PT Piesta Penilai dan beberapa perusahaan lainnya. Ia diangkat menjadi anggota Komite Investasi dan Pengembangan Usaha Perusahaan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KU.003/Dekom.101/V/2013 tanggal 10 Mei 2013.

Win Andriansyah (39 years old, born on 15 January 1975) graduated from the Mechanical Engineering Department, University of Indonesia, Jakarta. Previously, he worked in PT Surveyor Indonesia (Persero), PT Pertamina Buana Sadpetra Sebas, PT Piesta Penilai and several other companies. He was appointed as a member of the Investment and the Business Development Committee based on BOC Decision Letter No. KU.003/Dekom.101/V/2013 dated 10 May 2013.

Sahat Lumban Tobing

Anggota Komite Investasi (Pengembangan Usaha)
Member of Investment Committee (Business Development)

Sahat Lumban Tobing (64 tahun, kelahiran 19 Februari 1950) merupakan lulusan University of Illinois di Urbana, Champaign, Amerika Serikat, jurusan Master of Accounting Science. Ia berpengalaman sebagai konsultan keuangan dan akunting, di antaranya di Kementerian Keuangan RI, Universitas Indonesia, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero). Ia diangkat untuk mengemban tugas sebagai anggota Komite Investasi dan Pengembangan Usaha melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KU.003/Dekom.101/V/2013 tanggal 10 Mei 2013.

Sahat Lumban Tobing (64 years old, born on 19 February 1950) holds a Master's degree in Accounting Science from the University of Illinois at Urbana, Champaign, U.S.A. He served as a financial and accounting consultant in the Ministry of Finance, University of Indonesia, Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) and PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero). He was appointed as a member of the Investment and Business Development Committee based on BOC Decision Letter No. KU.003/Dekom.101/V/2013 dated 10 May 2013.

Profil Sekretaris Perusahaan *Profile Of Corporate Secretary*

Saifuddin Wijaya (51 tahun, kelahiran 18 April 1963) menyelesaikan studi Teknik Perkapalan di Institut Teknik Surabaya (ITS). Ia memiliki pengalaman sebagai lead auditor untuk ISO 9000, ISM dan ISPS. Tugasnya sebagai Sekretaris Perusahaan didasarkan pada Surat Keputusan Direksi No. DU.052/KP.503/KI-13.

Saifuddin Wijaya (51 years old, born on 18 April 1963) graduated from the Faculty of Naval Architecture, Surabaya Institute of Technology (ITS). He has experience as a lead auditor for ISO 9000, ISM and ISPS. He was appointed as the Corporate Secretary based on BOD Decision Letter No. DU.052/KP.503/KI-13.

Profil Satuan Pengawasan Internal/Audit Internal *Profile Of Internal Audit Unit*

Asep Sutrisna S (57 tahun, kelahiran Bandung, 26 Juni 1957) meraih gelar Sarjana di bidang hukum saat menempuh pendidikan di Universitas Parahyangan Bandung. Ia memiliki pengalaman di bidang sumber daya manusia dan juga sebagai auditor. Penunjukannya dirinya untuk mengemban tugas Kepala Divisi Satuan Pengawasan Internal Perusahaan melalui surat keputusan Direksi No. DU.059/KP.503/KI-14 tertanggal 30 Januari 2014.

Asep Sutrisna S (57 years old, born in Bandung, 26 June 1957) holds a Bachelor's degree in law from Parahyangan University, Bandung. He has experience in human resources as well as an auditor. His appointment as Head of Internal Audit Division is based on BOD Decision Letter No. DU.059/KP.503/KI-14 dated 30 January 2014.

Profil Legal, Manajemen Risiko & Gcg *Profile of Legal, Risk Management & Gcg*

Sudirman (51 tahun, kelahiran Bima, 6 Agustus 1962) merupakan lulusan Sarjana Akuntansi Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pengalamannya cukup banyak di bidang Good Corporate Governance (GCG), KPKU, Pengadaan Barang dan Jasa serta Risk Management. Ia diangkat untuk mengemban tugas sebagai Manajer Manajer Legal, Risk Management & GCG melalui Surat Keputusan Direksi No. DU.052/KP.503/KI-13

Sudirman (51 years old, born in Bima, 6 August 1962) holds a Bachelor's degree in Accounting from Muhammadiyah University, Jakarta. He has many experience in the field of Good Corporate Governance (GCG), KPKU, Goods and Service Procurement, and Risk Management. He was appointed as Manager of Legal, Risk Management & GCG based on BOD Decision Letter No. DU.052/KP.503/KI-13.

Profil Unit Pkbl *Profile Of Pkbl Unit*

Dandy Rukmana (34 tahun, kelahiran Jakarta, 7 Maret 1980) merupakan lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) PERBANAS JAKARTA (2003). Ia diangkat untuk mengemban tugas sebagai Kepala Unit PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) melalui Surat Direksi Nomor DU.052/KP.503/KI-13, tanggal 24 April 2013.

Dandy Rukmana (34 years old, born in Jakarta, 7 March 1980) graduated from the School of Economics (STIE) PERBANAS JAKARTA (2003). He was appointed as Head of PKBL (Partnership and Community Development Program) Unit based on BOD Decision Letter No. DU.052/KP.503/KI-13 dated 24 April 2013.

Kronologis Pencatatan Saham Dan Efek Lainnya Serta Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Perusahaan belum melakukan penawaran umum saham dan mencatatkan sahamnya di pasar saham. Dengan demikian, tidak ada laporan tentang kronologis pencatatan saham, kronologis pencatatan efek lainnya serta laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum dalam laporan tahunan Perusahaan.

Chronology Of Listing Of Shares And Other Securities And Use Of Proceeds From Public Offering
The Company has not made a public offering of shares and listed its shares on the stock market. Therefore, there is no report on chronology of listing of shares and other securities, as well as report on the realization of use of proceeds from public offering in the Company's annual report.



Lembaga Profesi Dan Penunjang

Professional And Supporting Agencies

Perusahaan memiliki lembaga profesi dan penunjang, yaitu:

Below are the professional and supporting agencies:

No	Profesi <i>Profession</i>	Nama <i>Name</i>	Alamat <i>Address</i>
1	Kantor Akuntan Publik (KAP) <i>KAP Husni, Mucharam & Rasidi</i>	KAP Husni, Mucharam & Rasidi	Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H., No. 178A Jakarta Selatan 12870 Telp: (021) 835 1868, 831 3413 Fax: (021) 835 1978
2	Notaris <i>Notary</i>	Marthin Aliunir, S.H.	AGP Building Lt.2 Jl. Pegangsaan Timur No.1 Cikini Menteng, Jakarta Pusat Telp: (021) 319 8664 Fax: (021) 3190 8645 Email: marthinaliunir@gmail.com

Akuntan Perseroan

Auditor Eksternal merupakan sebuah badan yang bertugas memeriksa laporan keuangan Perusahaan. Penetapan Auditor Eksternal tahun buku 2013 dilakukan melalui RUPS tertanggal 14 Januari 2014, berdasarkan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan Komite Audit. Auditor Eksternal yang ditunjuk Perusahaan tidak boleh memiliki benturan kepentingan sehingga independensi dan kualitas hasil pemeriksaan Auditor Eksternal terjamin.

Company Accountant

External Auditor is an entity in charge of examining the Company's financial statements. Appointment of the External Auditor for the financial year 2013 was conducted through the AGM on 14 January 2014, based on the recommendation of the Board of Commissioners and the Audit Committee. External Auditor appointed by the Company shall not have a conflict of interest so that the independence and quality of the results of examination done by the External Auditor can be guaranteed.

Perusahaan menetapkan ketentuan dalam pemilihan Auditor Eksternal guna menjaga profesionalitas dan independensinya. Untuk itu, satu Kantor Akuntan Publik (KAP) hanya diperbolehkan melakukan audit secara berurutan maksimal 6 (enam) tahun sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008. Auditor Eksternal yang ditunjuk bertanggung jawab menyampaikan opininya atas ketaatan laporan keuangan yang diaudit terhadap standar laporan keuangan yang berlaku. Biaya jasa KAP pada tahun 2013 sebesar Rp190.120.000,00.

The Company established provisions in selection of External Auditor to maintain their professionalism and independence. To that end, a Public Accounting Firm (KAP) is only allowed to perform audits sequentially for a maximum of 6 (six) years according to the Minister of Finance Regulation No. 17/PMK.01/2008. The appointed External Auditor is responsible to submit his opinion on the compliance of the audited financial statements to the applicable financial reporting standards. KAP service costs in 2013 amounted to Rp190,120,000.00.

Audit Laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun buku 2013, 2012, 2011, 2010 dan 2009 berturut-turut dilakukan oleh Akuntan dan Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai berikut:

Audit of Financial Statements of the Company for the financial year 2013, 2012, 2011, 2010 and 2009 respectively performed by Accountants and Public Accounting Firm (KAP) as follows:

Tahun Buku <i>Fiscal Year</i>	Kantor Akuntan Publik <i>Public Accounting Firm</i>	Opini <i>Opinion</i>
2013	KAP Husni, Mucharam & Rasidi	Wajar dalam semua hal yang material <i>Fairly in all material respects</i>
2012	KAP Husni, Mucharam & Rasidi	Wajar dalam semua hal yang material <i>Fairly in all material respects</i>
2011	KAP Kanaka, Puradiredja & Suhartono	Wajar dalam semua hal yang material <i>Fairly in all material respects</i>



UPPER FORECAST DECK



Laporan Keuangan *Financial Statement*

2013

LAPORAN KEUANGAN

**UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
TANGGAL 31 DESEMBER 2013 DAN 2012**



PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)

JL. YOS SUDARSO NO. 38-40 TANJUNG PRIOK – JAKARTA

PHONE : 021-4301017, 4301703 FAX : 43936175-4353293

INSPIRATED BY: HANART DESIGNS

DAFTAR ISI

Halaman

Laporan Auditor Independen

Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan

Laporan Keuangan:

Laporan Posisi Keuangan	1-2
Laporan Laba Rugi Komprehensif	3
Laporan Perubahan Ekuitas	4
Laporan Arus Kas.....	5
Catatan atas Laporan Keuangan	6-38



Husni, Mucharam & Rasidi
Registered Public Accountants

Nomor : LAI/GA/14016

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

**Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)**

Kami telah mengaudit laporan posisi keuangan PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 serta laporan laba-rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Kami juga melakukan pengujian atas kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan, dan pengendalian intern. **Laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan pengendalian intern adalah tanggung jawab Manajemen Perusahaan.** Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan pengendalian intern berdasarkan audit kami.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Selain itu, audit mencakup pengujian atas kepatuhan perusahaan terhadap kontrak, persyaratan bantuan, dan pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan serta kepatuhan terhadap pengendalian intern. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, serta hasil usaha dan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern kami sampaikan secara terpisah dengan laporan kami nomor: LAI/UU/14016 dan LAI/IC/14016 tanggal 28 Februari 2014.

Kantor Akuntan Publik
Husni, Mucharam & Rasidi

Arry Syarif Gunawam, CPA.

Izin Praktik : AP.0085

Izin KAP : KEP-662/KM.17/1998

Jakarta, 28 Februari 2014



PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (Persero)

HEAD OFFICE

Address : Jl. Yos Sudarso No. 38 - 39 - 40, Tanjung Priok, JAKARTA - 14320, INDONESIA
Phone : (62 - 021) 4301017, 4301703, 4300993 Facsimile : (62 - 021) 43936175, 43901973
PO BOX : 1010/JKU
E-mail : bki@klasifikasiindonesia.com, Website : www.klasifikasiindonesia.com

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2013 DAN 2012 PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Ir. Rudiyanto
Alamat Kantor : PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)
Jl. Yos Sudarso No. 38-39-40, Tanjung Priok, Jakarta - 14320
Alamat Domisili : Jl. Pancoran Timur II No. 2 C, Rt.005 / Rw.002, Pancoran
Nomor Telepon : (021) 4301017
Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : Drs. Timbul Tambunan, MM
Alamat Kantor : PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)
Jl. Yos Sudarso No. 38-39-40, Tanjung Priok, Jakarta - 14320
Alamat Domisili : Jl. Tirta Perdana III blok F/73, Rt.002 / Rw. 010, Jatikramat - Jatiasih
Nomor Telepon : (021) 4301017
Jabatan : Direktur Keuangan & Administrasi

Menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas laporan keuangan dan penyajian laporan keuangan PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero);
2. Laporan keuangan PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Bertanggungjawab atas sistem pengendalian intern dalam PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero).

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 28 Februari 2014
Untuk dan atas nama Direksi,

Direktur Utama

Direktur Keuangan & Administrasi

Rudiyanto

Timbul Tambunan



PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 31 Desember 2013 dan 2012

(Dalam Rupiah)

	Catatan	2013	2012
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	3b,4	106.935.791.089	68.422.636.682
Piutang usaha (Setelah dikurangi penyisihan sebesar tahun 2013 sebesar Rp16.832.832.433 dan tahun 2012 Rp9.389.661.713)	3c,5,24a	158.182.377.752	110.887.931.361
Tagihan bruto	3d,3k,6	2.604.988.348	4.391.104.979
Aset dimiliki untuk dijual (Setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp21.822.278.370)	3j,8	296.619.856	-
Aset lancar lainnya	7	6.443.235.269	2.301.687.513
Jumlah aset lancar		274.463.012.314	186.003.360.535
ASET TIDAK LANCAR			
Aset tetap (Setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar tahun 2013 Rp56.973.931.542 dan tahun 2012 Rp69.693.595.586)	3g,8	127.713.897.697	115.036.025.662
Aset pajak tangguhan	3l,13e	2.678.802.121	2.981.968.560
Aset tidak lancar lainnya	9	604.073.260	158.731.396
Jumlah aset tidak lancar		130.996.773.078	118.176.725.618
JUMLAH ASET		405.459.785.392	304.180.086.153

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 31 Desember 2013 dan 2012

(Dalam Rupiah)

	Catatan	2013	2012
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang usaha	10,24b	2.096.995.560	3.844.956.038
Utang lain-lain	11,24b	10.709.948.100	13.089.412.174
Utang biaya	12,24b	14.355.493.656	18.124.330.158
Utang pajak	13d,24b	31.070.384.531	22.088.634.966
Utang bruto	14	4.610.232.563	3.053.871.800
Liabilitas jangka pendek lainnya	15,24b	2.450.000	5.850.000
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK		62.845.504.410	60.207.055.136
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Provisi imbalan karyawan jangka panjang	3m,16	14.016.170.291	11.607.704.906
Jumlah liabilitas jangka panjang		14.016.170.291	11.607.704.906
JUMLAH LIABILITAS		76.861.674.701	71.814.760.042
EKUITAS			
Modal saham			
Modal dasar 180.000 saham dengan nilai nominal per saham Rp1.000.000. Modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar 45.000 saham	17,25	45.000.000.000	45.000.000.000
Saldo laba			
Saldo laba yang dicadangkan	18,25	177.249.593.141	119.927.106.309
Saldo laba yang belum dicadangkan		105.114.829.743	67.438.219.802
Saldo laba dari pendapatan komprehensif lainnya - Laba kurs penjabaran laporan keuangan entitas luar negeri		1.233.687.807	-
JUMLAH EKUITAS		328.598.110.691	232.365.326.111
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		405.459.785.392	304.180.086.153

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013 dan 2012

(Dalam Rupiah)

	Catatan	2013	2012
PENDAPATAN	3k, 19	555.197.173.704	419.176.067.983
BEBAN JASA	3k, 20	(103.573.736.103)	(76.526.899.593)
LABA KOTOR		451.623.437.601	342.649.168.390
BEBAN USAHA			
Beban pemasaran & Humas	21	6.493.605.531	5.996.069.278
Beban administrasi dan umum	22	308.964.664.217	248.341.554.710
		315.458.269.748	254.337.623.988
LABA USAHA		136.165.167.853	88.311.544.402
PENDAPATAN/(BEBAN) LAIN-LAIN			
Pendapatan lain-lain	23	11.697.755.375	7.480.968.471
Beban lain-lain	23	(2.878.333.546)	(1.334.295.395)
Pendapatan lain-lain - bersih		8.819.421.829	6.146.673.076
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		144.984.589.682	94.458.217.478
MANFAAT/(BEBAN) PAJAK PENGHASILAN			
Beban pajak kini	3l, 13b	(39.566.593.500)	(27.492.281.750)
Manfaat/(beban) pajak tangguhan	3l, 13d	(303.166.439)	472.284.074
Jumlah Pajak Penghasilan		(39.869.759.939)	(27.019.997.676)
LABA BERSIH		105.114.829.743	67.438.219.802
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAINNYA SETELAH PAJAK			
- Selisih kurs penjabaran laporan keuangan dalam valuta asing	23	1.233.687.807	-
Total Pendatan komprehensif		1.233.687.807	-
LABA KOMPREHENSIF		106.348.517.550	67.438.219.802

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013 dan 2012

(Dalam Rupiah)

Keterangan	Catatan	Modal Disetor	Saldo Laba		Pendapatan Komprehensif Lain	Jumlah Ekuitas
			Telah Dicapai	Belum Dicapai		
Saldo per 31 Desember 2011		45.000.000.000	78.325.389.788	51.360.144.521	-	174.685.534.309
Pembentukan cadangan umum		-	41.601.716.521	(41.601.716.521)	-	-
<u>Pembagian laba</u>	18	-	-	(7.704.022.000)	-	(7.704.022.000)
- Dividen		-	-	(2.054.406.000)	-	(2.054.406.000)
- Program Kemitraan dan Bina Lingkungan		-	-	67.438.219.802	-	67.438.219.802
Laba tahun berjalan		-	-	-	-	-
Saldo per 31 Desember 2012		45.000.000.000	119.927.106.309	67.438.219.802	-	232.365.326.111
Pembentukan cadangan umum		-	57.322.486.832	(57.322.486.832)	-	-
<u>Pembagian laba</u>	18	-	-	(10.115.732.970)	-	(10.115.732.970)
- Dividen		-	-	-	-	-
- Program Kemitraan dan Bina Lingkungan		-	-	105.114.829.743	-	105.114.829.743
Laba tahun berjalan		-	-	-	-	-
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing entitas luar negeri		-	-	-	1.233.687.807	1.233.687.807
Saldo per 31 Desember 2013		45.000.000.000	177.249.593.141	105.114.829.743	1.233.687.807	328.598.110.691

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)

LAPORAN ARUS KAS

Untuk tahun - tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013 dan 2012

(Dalam Rupiah)

	Catatan	2013	2012
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan kas dari pelanggan		575.051.514.666	390.977.440.928
Pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan		(464.996.430.352)	(305.281.333.927)
Kas yang diperoleh dari operasi		110.055.084.314	85.696.107.001
Penerimaan lain-lain		7.524.394.207	6.705.033.134
Pembayaran pajak penghasilan		(43.307.551.827)	(21.194.259.247)
Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi		74.271.926.694	71.206.880.888
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Penambahan aset tetap	8	(22.077.106.217)	(43.500.829.868)
Penambahan uang jaminan		(165.933.100)	(10.254.000)
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi		(22.243.039.317)	(43.511.083.868)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Pembayaran dividen	18	(10.115.732.970)	(7.704.022.000)
Pembayaran dana program kemitraan dan bina lingkungan	18,22	(3.400.000.000)	(2.054.406.000)
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan		(13.515.732.970)	(9.758.428.000)
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS		38.513.154.407	17.937.369.020
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	4	68.422.636.682	50.485.267.662
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	4	106.935.791.089	68.422.636.682

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013 dan 2012

(Dalam rupiah)

1. UMUM

PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), selanjutnya disebut "Perusahaan" merupakan peralihan dari PN Biro Klasifikasi Indonesia yang didirikan tanggal 1 Juli 1964. Peralihan ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1977. Akta pendirian Perusahaan dibuat oleh Notaris Imas Fatimah, SH Nomor 57 tahun 1977 tanggal 21 April 1977 yang diperbaiki dengan Akta Nomor 35 tanggal 19 Oktober 1978 dan telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor Y.A.5/345/1978 tanggal 7 November 1978 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1979 tanggal 6 Februari 1979 (Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 58 tahun 1999).

Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 14 tanggal 11 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan H. Umaran Mansjur, SH, Notaris di Jakarta. Perubahan tersebut mengenai penyesuaian dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 45, dan perkembangan kebutuhan pengelolaan Perusahaan, perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan, perubahan modal dasar dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. AHU-03102AH.01.02 tahun 2009 tanggal 14 Januari 2009.

Perusahaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1977 berubah menjadi PT (Persero) yang merupakan peralihan dari PN Biro Klasifikasi Indonesia yang didirikan tanggal 1 Juli 1964. PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) bertugas untuk melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya di bidang jasa klasifikasi, sertifikasi, konsultasi dan supervisi di bidang kelautan serta industri jasa pada umumnya, agar terjamin keselamatan jiwa dan benda dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas yang mandiri.

Sesuai dengan Anggaran Dasarnya, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah sebagai berikut:

a) Bidang Usaha Klasifikasi dan Registrasi Kapal, yaitu:

- Pemeriksaan konstruksi, pengawasan dan pengujian serta pencatatan sertifikasi klas dan registrasi kapal;
- Pemeriksaan dan pengujian alat-alat apung dan fasilitas konstruksi lepas pantai;
- Pengujian dan sertifikasi material dan komponen;
- Pengujian dan penerbitan sertifikasi kualitas juru las, inspektur las dan ahli las;
- Melaksanakan pemeriksaan dan sertifikasi aktivitas statutoria yang mendapat otorisasi dari Pemerintah Republik Indonesia, maupun pemerintah negara lain;
- Bertindak sebagai agen dan/atau mewakili klasifikasi asing/konsultan asing; dan
- Melaksanakan sertifikasi sesuai standar Internasional.

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013 dan 2012

(Dalam rupiah)

1. UMUM (lanjutan)

b) Bidang Konsultasi dan Supervisi

- Konsultansi dan supervisi di bidang kelautan dan industri minyak dan gas, panas bumi serta pertambangan pada umumnya;
- Penilaian, perencanaan, dan pengawasan dibidang teknologi kelautan dan industri minyak dan gas, panas bumi serta pertambangan pada umumnya;
- Pengujian material dan komponen;
- Konsultansi teknik / engineering sesuai standar nasional internasional;
- Pelatihan keahlian teknik dan non teknik dibidang teknologi kelautan dan industri minyak dan gas, panas bumi serta pertambangan pada umumnya;
- Melakukan sertifikasi teknik pada umumnya;
- Kegiatan jasa rekayasa, jasa konstruksi dan jasa pemborongan non konstruksi dibidang instalasi minyak dan gas, panas bumi serta industri pertambangan pada umumnya.

c) - Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk properti, perkantoran, apartemen, dan perhotelan.

Kantor Pusat PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) berdomisili di Jakarta Jl Yos Sudarso No 38-40, Tanjung Priok, Jakarta Utara 14320. Unit kerja Perusahaan terdiri dari 1 (satu) Kantor Pusat, 4 (empat) Kantor Cabang Utama, 5 (lima) Unit Marine & Industrial, 6 (enam) Kantor Cabang Madya dan 8 (delapan) Kantor Cabang dengan rincian:

1. Kantor Pusat Jakarta

2. Cabang Utama Tanjung Priok
3. Cabang Utama Batam
4. Cabang Utama Balikpapan
5. Cabang Utama Surabaya

6. Marine & Industrial Jakarta
7. Marine & Industrial Balikpapan
8. Marine & Industrial Surabaya
9. Marine & Industrial Batam
10. Marine & Industrial Pekanbaru

11. Cabang Madya Palembang
12. Cabang Madya Semarang
13. Cabang Madya Belawan
14. Cabang Madya Banjarmasin
15. Cabang Madya Cilegon
16. Cabang Madya Singapore

17. Cabang Ambon
18. Cabang Bitung
19. Cabang Cirebon
20. Cabang Dumai
21. Cabang Pontianak
22. Cabang Makassar
23. Cabang Sorong
24. Cabang Jambi

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : DU.046/LT.101/KI-13 tanggal 20 Maret 2013, tentang Struktur Organisasi baru terjadi perubahan status dari Cabang ke Cabang Madya yaitu Cilegon dan Singapore.

Seluruh Cabang Utama menangani pekerjaan segmen Klasifikasi (Klas), Unit Marine & Industrial menangani pekerjaan segmen Konsultansi & Supervisi (KS), untuk Cabang Madya dan Cabang menangani pekerjaan segmen Klas dan segmen Konsultansi & Supervisi (KS), kecuali Cabang Madya Singapore dan Cabang Dumai hanya menangani segmen Klas.

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013 dan 2012

(Dalam rupiah)

2. DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, KOMITE AUDIT DAN KARYAWAN

Dewan Komisaris

Susunan Dewan Komisaris Perusahaan mulai tanggal 11 September 2012 berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep- 322/MBU/2012 adalah sebagai berikut :

Komisaris Utama	:	Machfud Sidik
Komisaris	:	Minto Widodo
Komisaris	:	Erwin Rosmali
Komisaris	:	Faisal Halimi

Sekretaris Dewan Komisaris : Susi Meyrista Tarigan

Terjadi pergantian Sekretaris Dewan Komisaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor : KU- 001/Dekom.101/III/2013 tanggal 1 Maret 2013 adalah sebagai berikut:

Sekretaris Dewan Komisaris : Meriantie

Direksi

Sesuai Keputusan Pemegang Saham Diluar RUPS Nomor: SK-203/MBU/2012 tanggal 25 Mei 2012, Pengurus Perseroan adalah:

Direktur Utama : Ibnu Wibowo

Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-284/MBU/2012 tanggal 3 Agustus 2012, ditetapkan pengangkatan:

Direktur Teknik & Operasi	:	Iman Satria Utama
Direktur Keuangan & SDM	:	Anang Sundana

Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-175/MBU/2013 tanggal 5 Maret 2013, ditetapkan pengangkatan:

Direktur Pemasaran & Pengembangan : Ibrahim Gause

Sehingga Pengurus Perseroan sampai dengan tanggal 18 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

Direktur Utama	:	Ibnu Wibowo
Direktur Teknik & Operasi	:	Iman Satria Utama
Direktur Keuangan & SDM	:	Anang Sundana
Direktur Pemasaran & Pengembangan	:	Ibrahim Gause

Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-424/MBU/2013 tanggal 19 Desember 2013, ditetapkan pemberhentian Sdr. Ibnu Wibowo selaku Direktur Utama dan Sdr. Anang Sundana selaku Direktur Keuangan & SDM, serta pengangkatan Sdr. Rudiyanto sebagai Direktur Utama.

Sehingga Pengurus Perseroan pada akhir periode 2013 adalah sebagai berikut:

Direktur Utama	:	Rudiyanto
Direktur Teknik & Operasi	:	Iman Satria Utama
Direktur Pemasaran & Pengembangan	:	Ibrahim Gause
(Merangkap sebagai Direktur Keuangan & SDM)		

Berdasarkan SK Menteri BUMN Nomor: SK-32/MBU/2014 tanggal 5 Februari 2014, ditetapkan pengangkatan:

Direktur Keuangan & Administrasi : Timbul Tambunan

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013 dan 2012

(Dalam rupiah)

2. DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, KOMITE AUDIT DAN KARYAWAN (lanjutan)

Komite Audit

Susunan Komite Audit Perusahaan mulai tanggal 1 Oktober 2013 sesuai dengan SK Dewan Komisaris No.006/Dekom.101/X/2013 adalah sebagai berikut:

Ketua : Minto Widodo
Anggota : Trisyu Wimartono
Anggota : Deni Sulisty

Sedangkan susunan Komite Audit sebelumnya sampai dengan 1 Oktober 2013 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: KU.005/Dekom.101/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 adalah sebagai berikut :

Ketua : Minto Widodo
Anggota : Nur Sodiq
Anggota : Soedjasmanoor

Karyawan

Pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, jumlah karyawan Perusahaan adalah 738 dan 746 orang dengan rincian sebagai berikut:

	Per 31 Des 2013			Per 31 Des 2012		
	Tetap	Tidak Tetap	Jumlah	Tetap	Tidak Tetap	Jumlah
- Teknik	338	76	414	349	80	429
- Administrasi	197	70	267	196	73	269
- Penunjang	13	44	57	14	34	48
Jumlah	548	190	738	559	187	746

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013 dan 2012

(Dalam rupiah)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

Berikut ini adalah ikhtisar kebijakan akuntansi terpenting yang digunakan Perusahaan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia, yaitu yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia.

Laporan Keuangan disusun berdasarkan konsep harga perolehan (*historical cost*), kecuali untuk akun tertentu dinyatakan berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan Keuangan disajikan dengan menggunakan dasar akrual (*accrual basis*), kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun berdasarkan metode langsung (*direct method*) dan dikelompokkan atas dasar kegiatan operasi, investasi dan pendanaan.

b. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas terdiri dari uang kas, uang yang ada di bank serta deposito berjangka yang akan jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal penempatannya dan uang jaminan atas penerbitan bank garansi berdurasi jangka pendek. Sebagai Aset Keuangan, Kas dan Setara kas dicatat pada tanggal perolehannya pada nilai wajarnya dan selanjutnya diukur pada nilai perolehan yang diamortisasi.

c. Piutang Usaha

Piutang Usaha disajikan sebesar jumlah yang diperkirakan dapat direalisasi yaitu jumlah tercatat awal dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih. Piutang Usaha mencerminkan jumlah yang telah ditagihkan kepada pelanggan atas jasa yang telah dilakukan. Adapun jumlah yang ditagihkan mengacu pada termin kontrak yang telah disepakati dengan pelanggan.

Penyisihan Piutang tak tertagih dihitung secara kolektif dengan menggunakan *roll - rate model*. Adapun parameter *probability of default* dan *loss given default* yang dipergunakan dalam model tersebut diperoleh dari hasil survei data empiris Perusahaan selama 3 sampai dengan 5 tahun terakhir.

d. Tagihan Bruto kepada Pemberi Kerja

Tagihan bruto kepada pemberi kerja mencerminkan pekerjaan jasa yang sampai dengan tanggal pelaporan keuangan masih dalam pelaksanaan. Tagihan bruto disajikan sebesar biaya jasa yang terjadi, ditambah laba (rugi) yang diakui, dikurangi dengan termin penagihan yang telah diajukan.

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013 dan 2012

(Dalam rupiah)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Transaksi dengan Pihak-Pihak Yang Berelasi

Pengungkapan pihak-pihak yang berelasi berdasarkan PSAK 7 (Revisi 2010) menyatakan bahwa karyawan kunci adalah termasuk pihak-pihak yang berelasi, pada paragraph 16 mensyaratkan pengungkapan Kompensasi terhadap manajemen kunci. Berdasarkan definisi pada paragraf 09 menyatakan sebagai berikut: "Personil manajemen kunci adalah orang-orang yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan aktivitas entitas, secara langsung atau tidak langsung, termasuk direktur dan komisaris (baik eksekutif maupun bukan eksekutif) dari entitas".

Dengan ketaatan kepada PSAK tersebut, pengungkapan kompensasi terhadap manajemen kunci adalah sebagai berikut:

Jumlah gaji & tunjangan untuk beban Komisaris dan Direksi

2013	2012
Rp12.341.781.192	Rp8.987.986.579

Definisi terkait lainnya adalah "Entitas yang berelasi dengan pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi secara signifikan oleh pemerintah". Pengungkapan transaksi dengan BUMN berupa rekening bank dan deposito, piutang dan utang kepada BUMN adalah sebagaimana disajikan pada butir 4, 5 dan 27 dalam laporan ini.

f. Transaksi dan Saldo Dalam Mata Uang Asing

Pembukuan Perusahaan diselenggarakan dalam mata uang Rupiah. Transaksi dalam mata uang asing yang terjadi sepanjang tahun dicatat berdasarkan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Pada tanggal neraca, aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dijabarkan kedalam Rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal tersebut. Laba atau rugi nilai tukar yang diakibatkan penjabaran dikreditkan atau dibebankan ke perhitungan laba rugi periode berjalan.

Kurs tengah yang digunakan pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing adalah sebagai berikut:

	2013	2012
Dolar Amerika (USD)	12.189	9.670
Dolar Singapura (SGD)	9.628	7.907
Euro	16.822	12.810

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013 dan 2012

(Dalam rupiah)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

g. Aset Tetap

Perusahaan telah menerapkan PSAK 16 (Revisi 2011) mengenai "Aset Tetap" dengan memilih menggunakan model biaya dalam mengukur aset tetapnya sebagaimana tersebut dalam paragraf 30. Sesuai dengan metode tersebut, aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutannya dan akumulasi rugi penurunan nilai (jika ada). Aset tetap kecuali hak atas tanah, disusutkan dengan menggunakan metode saldo menurun ganda (*double declining method*), kecuali bangunan/ gedung disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*) sesuai dengan tarif penyusutan sebagai berikut:

<u>Jenis Aset Tetap</u>	<u>Umur Manfaat (tahun)</u>	
Bangunan	20 - 40	tahun
Kendaraan bermotor roda 2	4 - 5	tahun
Kendaraan bermotor roda 4	5 - 8	tahun
Inventaris	4 - 16	tahun

Biaya Perolehan Aset Tetap setelah dikurangi estimasi nilai residunya disusutkan selama estimasi umur manfaat Aset Tetap yang bersangkutan. Setiap akhir periode pelaporan keuangan dilakukan kaji ulang terhadap estimasi umur manfaat dan nilai residu aset tetap. Penyesuaian beban penyusutan sebagai hasil kaji ulang tersebut diperlakukan secara prospektif.

Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya pemugaran, dan penambahan dalam jumlah signifikan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam PSAK No. 16 (Revisi 2011) tentang aset tetap, dikapitalisasi. Aset yang sudah tidak digunakan lagi atau yang dijual dikeluarkan dari kelompok aset tetap berikut akumulasi penyusutannya. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap yang bersangkutan tercermin dalam operasi tahun berjalan.

Bila nilai tercatat suatu aset melebihi taksiran jumlah yang dapat diperoleh kembali (*estimated recoverable amount*) maka nilai tersebut diturunkan ke jumlah yang dapat diperoleh kembali tersebut, yang ditentukan sebagai nilai tertinggi antara harga jual neto dan nilai pakai.

h. Aset Tak Berwujud

Pengungkapan aset tak berwujud adalah berdasarkan PSAK 19 (revisi 2010) dalam paragraf 08 didefinisikan bahwa Aset tak berwujud adalah aset nonmoneter teridentifikasi tanpa wujud fisik. Jika piranti lunak bukan merupakan bagian integral dari perangkat kerasnya, maka piranti lunak komputer diperlakukan sebagai aset tak berwujud, namun jika piranti lunak merupakan bagian integral dari perangkat kerasnya maka diperlakukan sebagai aset tetap.

i. Aset Dalam Pembangunan

Aset dalam pembangunan meliputi bangunan dan prasarana lainnya, yang dinyatakan berdasarkan biaya pembangunan, biaya pegawai langsung, biaya tidak langsung dalam pembangunan tersebut dan biaya-biaya pinjaman yang digunakan untuk membiayai aset selama masa pembangunan. Akumulasi biaya aset dalam pembangunan akan direklasifikasi ke aset tetap yang bersangkutan dan kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan pada saat pembangunan selesai dan aset tersebut siap untuk dipergunakan.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013 dan 2012

(Dalam rupiah)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

j. Aset Dimiliki Untuk Dijual

Aset dimiliki untuk dijual merupakan aset tetap yang sudah tidak dipergunakan lagi dan sudah mendapat persetujuan dari Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara untuk dijual. Aset ini dikeluarkan dari kelompok aset tetap berikut akumulasi penyusutannya. Jika nilai buku aset belum mencapai Rp 1, maka penyusutan untuk tahun bersangkutan hanya selama beberapa bulan sampai diterbitkannya Surat Persetujuan dari Menteri Negara BUMN. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap yang bersangkutan tercermin dalam operasi tahun berjalan.

k. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan dan Beban Jasa secara bertahap sesuai tahap kemajuan yang dicapai pada tiap-tiap akhir bulan. Akun Tagihan Bruto di Laporan Posisi Keuangan mencerminkan pekerjaan yang masih dalam tahap penyelesaian pada akhir periode pelaporan keuangan.

Biaya operasi yang digolongkan sebagai beban jasa adalah meliputi biaya-biaya langsung dan overhead yang dapat diatribusikan langsung atau dialokasikan secara sistematis kepada tiap-tiap kontrak. Biaya-biaya yang tidak memenuhi kriteria biaya jasa digolongkan sebagai beban usaha.

l. Perpajakan

Beban pajak kini ditetapkan berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak dalam tahun berjalan dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku.

Pajak penghasilan tangguhan disajikan dengan jumlah penuh dengan menggunakan metode kewajiban. Pajak penghasilan tangguhan timbul akibat perbedaan temporer yang ada antara aset dan kewajiban atas dasar pajak dengan nilai tercatat aset dan kewajiban dalam laporan keuangan. Tarif pajak yang berlaku atau yang secara substansial telah berlaku digunakan dalam menentukan pajak penghasilan tangguhan.

Aset pajak tangguhan diakui apabila besar kemungkinan bahwa jumlah laba fiskal pada masa mendatang akan memadai untuk mengkompensasi perbedaan temporer yang menimbulkan aset pajak tangguhan tersebut.

Koreksi terhadap kewajiban perpajakan diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima atau, jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah diterima.

m. Imbalan Jangka Panjang Bagi Karyawan

Perusahaan menyelenggarakan program imbalan jangka panjang bagi karyawan yaitu meliputi Imbalan Pensiun, Imbalan Balas Jasa dan Pengabdian, serta Imbalan Cuti Besar. Pengakuan dan pengukuran beban serta pembentukan provisi sebagai konsekuensi dari ketiga program imbalan tersebut dihitung secara aktuarial dengan menggunakan metode dan asumsi sebagai berikut :

1. Metode aktuarial yang dipergunakan : Projected Unit Credit,
2. Tingkat diskonto untuk menghitung nilai kini manfaat imbalan mengacu pada tingkat imbal hasil surat utang negara yang berdurasi relatif sama dengan rata-rata sisa masa kerja karyawan atau rata-rata sisa jatuh tempo pembayaran manfaat kepada karyawan,
3. Tingkat kenaikan gaji dasar mengacu pada rata-rata kenaikan gaji dasar pada periode-periode sebelumnya,
4. Laba / rugi aktuarial yang terjadi tidak diakui sekaligus, melainkan diamortisasi selama rata-rata sisa masa kerja karyawan untuk jumlah yang melebihi 10 % dari aset program atau 10 % dari nilai kini liabilitas,
5. Beban jasa lalu yang sudah vested diakui sekaligus, sedangkan untuk yang belum vested diamortisasi selama sisa periode sampai dengan menjadi vested.

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

n. Aset Keuangan dan Kewajiban Keuangan

Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") No. 50 (Revisi 2010) "Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan" dan PSAK No. 55 (Revisi 2011) "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" berlaku untuk laporan keuangan yang periodenya dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012, kebijakan akuntansi atas aset dan kewajiban keuangan adalah sebagai berikut:

1. Aset keuangan

Aset keuangan diklasifikasikan dalam kategori sebagai berikut (i) aset keuangan yang nilai wajarnya diakui melalui laporan laba rugi, (ii) pinjaman dan piutang, (iii) aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo, dan (iv) aset keuangan yang tersedia untuk dijual. Klasifikasi ini tergantung pada tujuan saat aset keuangan tersebut diperoleh. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat pengakuan awal.

(i) Aset keuangan yang nilai wajarnya diakui melalui laporan laba rugi

Aset keuangan yang nilai wajarnya diakui di laporan laba atau rugi adalah aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai aset untuk diperdagangkan. Sebuah aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset untuk diperdagangkan jika diperoleh terutama untuk tujuan penjualan atau pembelian kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti yang menunjukkan latar belakang untuk mengambil keuntungan jangka pendek.

(ii) Pinjaman dan piutang

Pinjaman dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan yang tidak terpengaruh oleh pasar aktif. Pinjaman dan piutang awalnya diakui sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Pinjaman dan piutang terdiri dari piutang usaha dan piutang lainnya.

2. Kewajiban keuangan

Perusahaan mengklasifikasikan kewajiban keuangan dalam kategori (i) kewajiban keuangan yang nilai wajarnya diakui melalui laporan laba rugi dan (ii) kewajiban keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

(i) Kewajiban keuangan yang nilai wajarnya diakui melalui laporan laba rugi

Kewajiban keuangan yang nilai wajarnya diakui melalui laporan laba rugi adalah kewajiban keuangan yang diklasifikasikan sebagai kewajiban yang diperdagangkan. Sebuah kewajiban keuangan diklasifikasikan sebagai kewajiban yang diperdagangkan jika diperoleh terutama untuk tujuan penjualan atau pembelian kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti yang menunjukkan latar belakang untuk mengambil keuntungan jangka pendek.

Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar derivatif yang dikelola dalam hubungannya dengan kewajiban keuangan yang dimaksud termasuk dalam "laba/rugi selisih kurs".

(ii) Kewajiban keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Kewajiban keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai kewajiban keuangan yang nilai wajarnya diakui melalui laporan laba rugi diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Kewajiban keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi adalah hutang lain-lain, beban yang masih harus dibayar, pinjaman, dan obligasi.

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013 dan 2012

(Dalam rupiah)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

n. Aset Keuangan dan Kewajiban Keuangan (lanjutan)

3. Estimasi nilai wajar

Perusahaan menggunakan harga pasar untuk menentukan nilai wajar dari instrumen keuangan yang aktif diperdagangkan di pasar.

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian. Perusahaan menggunakan metode diskonto arus kas dengan menggunakan asumsi-asumsi yang didasarkan pada kondisi pasar pada tanggal neraca yang kemudian digunakan untuk menentukan nilai wajar dari instrumen keuangan.

o. Penggunaan Estimasi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum mengharuskan Manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan kewajiban yang dilaporkan dan pengungkapan aset dan kewajiban kontijensi pada tanggal laporan keuangan serta jumlah pendapatan dan beban selama periode tahun berjalan.

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013 dan 2012

(Dalam rupiah)

4. KAS DAN SETARA KAS

	2013	2012
Kas		
Rupiah	443.699.632	436.474.783
SGD (2013: SGD 1.426,76; 2012: SGD 263,31)	13.736.845	2.121.527
	457.436.477	438.596.310
Bank		
<u>Rupiah:</u>		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	30.251.577.766	5.511.008.793
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	7.282.376.961	8.519.169.755
PT Bank BRI	1.721.000	-
PT Bank Jabar Banten	592.128.623	179.104.764
Jumlah Valuta Rupiah	38.127.804.350	14.209.283.312
<u>Mata uang asing:</u>		
Dolar Amerika:		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2013: USD394.409,81; 2012: USD14.337,60)	4.807.461.163	138.644.611
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2013:USD72.008,08; 2012: USD318.862,52)	877.706.474	3.083.400.567
Dolar Singapura:		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2013: SGD150.654,11; 2012: SGD45.702,85)	1.450.497.771	361.372.435
United Overseas Bank (UOB) Singapura (2013: SGD707.645,35; 2012: SGD403.609,39)	6.813.209.430	3.191.339.447
	13.948.874.838	6.774.757.060
Jumlah Bank	52.076.679.188	20.984.040.372

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013 dan 2012

(Dalam rupiah)

4. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

Deposito Berjangka

<u>Rupiah:</u>	2013	2012
PT Bank Tabungan Negara Syariah	13.000.000.000	12.500.000.000
PT Bank BNI	3.000.000.000	2.000.000.000
PT Bank Syariah Mandiri	13.000.000.000	13.500.000.000
PT Bank Mandiri	2.000.000.000	2.000.000.000
PT Bank Jabar Banten	16.000.000.000	17.000.000.000
PT Bank BRI	3.000.000.000	-
PT Bank BRI Syariah	4.000.000.000	-
Jumlah Deposito	54.000.000.000	47.000.000.000

Money in Transit	4.286.354	-
-------------------------	-----------	---

Jaminan Bank Garansi Jangka Pendek	397.389.070	-
---	-------------	---

Jumlah Kas dan Setara Kas	106.935.791.089	68.422.636.682
----------------------------------	------------------------	-----------------------

Money in transit adalah transfer uang dari Unit produksi ke Kantor Pusat yang belum diterima atau masih dalam perjalanan.

Jaminan Bank garansi jangka pendek adalah uang di bank Unit produksi yang sementara tidak dapat digunakan karena dijadikan jaminan garansi bank dalam durasi jangka pendek.

Deposito berjangka:

Tingkat suku bunga	4,5% - 7%	6% - 8%
Jangka waktu	1 - 3 bulan	1 - 3 bulan

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013 dan 2012

(Dalam rupiah)

5. PIUTANG USAHA

Saldo piutang usaha dirinci berdasarkan jenis usaha jasa dan penyisihan piutang sebagai berikut

	2013	2012
Piutang Jasa Klasifikasi	108.651.678.916	76.593.625.673
Piutang Jasa Konsultansi & Supervisi	66.363.531.269	43.683.967.401
Sub Jumlah	175.015.210.185	120.277.593.074
Dikurangi penyisihan piutang	(16.832.832.433)	(9.389.661.713)
Jumlah bersih	158.182.377.752	110.887.931.361

Rincian piutang berdasarkan umurnya adalah sebagai berikut:

	2013	2012
1 sampai dengan 12 bulan	155.516.935.394	111.106.953.086
13 sampai dengan 24 bulan	11.153.446.555	2.453.995.482
25 sampai dengan 36 bulan	1.642.146.500	1.067.293.445
Di atas 36 bulan	6.702.681.736	5.649.351.061
Jumlah	175.015.210.185	120.277.593.074

Perusahaan menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") No. 50 (Revisi 2006) "Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan" dan PSAK No. 55 (Revisi 2011) "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran". Sesuai dengan PSAK tersebut, Perusahaan telah melakukan penilaian kecukupan penyisihan piutang tak tertagih pada tanggal 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012. Berdasarkan penilaian yang dilakukan, pada tanggal 31 Desember 2013 Perusahaan menambah penyisihan piutang usaha sebesar Rp7.443.170.720, sehingga saldo penyisihan piutang per 31 Desember 2013 berjumlah Rp16.832.832.433. Tambahan penyisihan tersebut seluruhnya dibebankan pada tahun 2013. Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan yang telah dibentuk cukup memadai untuk mengantisipasi kerugian piutang tak tertagih.

Pada tanggal 31 Desember 2013, piutang usaha sebesar Rp8.000.000.000 dijadikan agunan atas fasilitas Bank Garansi dari PT Bank Mandiri (Catatan 26).

Ikhtisar mutasi saldo penyisihan piutang usaha per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

	2013	2012
Saldo awal tahun	9.389.661.713	2.692.929.061
Penyisihan dibentuk	7.443.170.720	6.696.732.652
Saldo akhir tahun	16.832.832.433	9.389.661.713

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013 dan 2012

(Dalam rupiah)

6. TAGIHAN BRUTO

	2013	2012
Biaya Jasa yang telah terjadi	2.082.748.469	2.708.305.054
Laba (Rugi) Kotor yang diakui	522.239.879	1.682.799.925
-/- Penagihan Termin	-	-
Jumlah Tagihan Bruto	2.604.988.348	4.391.104.979

Seluruh saldo tagihan bruto di atas mencerminkan nilai pekerjaan segmen Marine & Industry (Konsultasi dan Supervisi) yang per 31 Desember 2013 dan 2012 masih dalam tahap penyelesaian dan belum dilakukan penagihan termin.

7. ASET LANCAR LAINNYA

	2013	2012
Pendapatan bunga deposito yang akan diterima	143.313.536	138.763.617
Piutang karyawan	1.088.577.770	32.836.334
Uang muka pembelian barang & jasa	1.242.351.040	984.787.500
Pajak dibayar dimuka	2.266.861.999	171.736.321
Asuransi	1.100.746.592	298.952.958
Tunjangan perumahan	282.018.295	348.200.000
Survey klasifikasi	137.203.260	222.402.700
Sewa	116.249.995	71.900.000
Pemeliharaan kendaraan	55.490.352	32.108.083
Lain - lain	10.422.430	-
Jumlah	6.443.235.269	2.301.687.513

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013 dan 2012

(Dalam rupiah)

8. ASET TETAP, ASET DALAM PEMBANGUNAN DAN ASET TERSEDIA UNTUK DIJUAL

	31 Desember 2013				
	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo Akhir
Nilai perolehan					
<u>Pemilikan langsung</u>					
- Tanah	14.252.366.818	370.000.000	-	-	14.622.366.818
- Bangunan	37.554.949.888	970.095.950	-	43.064.829.927	81.589.875.765
- Kendaraan bermotor	34.967.579.085	561.085.400	-	(13.515.383.401)	22.013.281.084
- Inventaris gol I	22.931.322.862	11.774.667.181	-	(3.918.544.069)	30.787.445.974
- Inventaris gol II	11.037.007.017	370.360.058	-	(2.521.261.131)	8.886.105.944
- Inventaris gol III	24.996.674.828	2.481.750.930	-	(2.163.709.625)	25.314.716.133
- Aset dalam pelaksanaan	38.989.720.750	5.549.146.698	-	(43.064.829.927)	1.474.037.521
Jumlah aset tetap	184.729.621.248	22.077.106.217	-	(22.118.898.226)	184.687.829.239
Aset tersedia dijual	-	-	-	22.118.898.226	22.118.898.226
Nilai Perolehan	184.729.621.248	22.077.106.217	-	-	206.806.727.465

	31 Desember 2013				
	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo Akhir
Akumulasi Penyusutan					
<u>Pemilikan langsung</u>					
- Bangunan	10.280.938.458	1.752.262.970	-	-	12.033.201.428
- Kendaraan bermotor	22.489.920.809	659.867.272	-	(13.515.383.313)	9.634.404.768
- Inventaris gol I	19.727.228.699	3.891.669.855	-	(3.914.808.739)	19.704.089.815
- Inventaris gol II	8.324.924.173	711.360.531	-	(2.481.825.856)	6.554.458.848
- Inventaris gol III	8.870.583.447	2.087.453.698	-	(1.910.260.462)	9.047.776.683
Jumlah	69.693.595.586	9.102.614.326	-	(21.822.278.370)	56.973.931.542
Aset tersedia					
<u>untuk dijual</u>	-	-	-	21.822.278.370	21.822.278.370
	69.693.595.586	9.102.614.326	-	-	78.796.209.912

Nilai Buku Aset Tetap	127.713.897.697
Nilai Buku Aset tersedia untuk dijual	296.619.856

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013 dan 2012

(Dalam rupiah)

8. ASET TETAP, ASET DALAM PEMBANGUNAN DAN ASET TERSEDIA UNTUK DIJUAL (lanjutan)

31 Desember 2012					
	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo Akhir
Nilai perolehan					
<u>Pemilikan langsung</u>					
- Tanah	12.111.562.933	-	-	2.140.803.885	14.252.366.818
- Bangunan	33.500.803.554	434.620.176	-	3.619.526.158	37.554.949.888
- Kendaraan bermotor	32.640.958.085	2.326.621.000	-	-	34.967.579.085
- Inventaris gol I	20.727.664.564	2.203.658.298	-	-	22.931.322.862
- Inventaris gol II	9.853.229.266	1.183.777.751	-	-	11.037.007.017
- Inventaris gol III	21.133.043.876	3.863.630.952	-	-	24.996.674.828
- Aset dalam pelaksanaan	10.104.996.834	33.488.521.691	-	(4.603.797.775)	38.989.720.750
Jumlah aset tetap	140.072.259.112	43.500.829.868	-	1.156.532.268	184.729.621.248
Aset tersedia untuk dijual	1.270.486.777	-	113.954.509	(1.156.532.268)	-
Nilai Perolehan	141.342.745.889	43.500.829.868	113.954.509	-	184.729.621.248

31 Desember 2012					
	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo Akhir
Akumulasi Penyusutan					
<u>Pemilikan langsung</u>					
- Bangunan	9.142.871.729	833.955.422	-	304.111.306	10.280.938.457
- Kendaraan bermotor	21.918.631.389	571.289.422	-	-	22.489.920.811
- Inventaris gol I	17.165.342.377	2.561.886.321	-	-	19.727.228.698
- Inventaris gol II	7.523.442.781	801.481.392	-	-	8.324.924.173
- Inventaris gol III	6.772.395.359	2.098.188.088	-	-	8.870.583.447
Jumlah	62.522.683.635	6.866.800.645	-	304.111.306	69.693.595.586
Aset tersedia untuk dijual	342.436.306	-	38.325.000	(304.111.306)	-
	62.865.119.941	6.866.800.645	38.325.000	-	69.693.595.586
Nilai Buku Aset Tetap					115.036.025.662
Nilai Buku Aset tersedia untuk dijual					-

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013 dan 2012

(Dalam rupiah)

8. ASET TETAP, ASET DALAM PEMBANGUNAN DAN ASET TERSEDIA UNTUK DIJUAL (lanjutan)

Aset tersedia untuk dijual adalah berdasarkan surat Dewan Komisaris Nomor A.013/DK.201/V/KI-13 tanggal 22 Mei 2013 perihal Persetujuan Penghapusbukuan Aset yang mengacu pada Keputusan RUPS PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) tanggal 4 Juni 2013 tentang Pengesahan RKAP tahun buku 2013 butir 5, Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-02/MBU/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aset Tetap milik BUMN khususnya pasal 3 dan pasal 14.

Tata Cara pelaksanaan penjualan Aset dimaksud ditetapkan dalam SK Direksi Nomor DU.044/KP.008/KI-14 tanggal 21 Januari 2014 tentang Penetapan Nilai Harga Jual Minimum dan Tata Cara Penjualan & Penghapusbukuan Aset Tetap sesuai Surat Dewan Komisaris tentang Persetujuan Penghapusan aset Nomor A.013/DK.201/V/KI-13 tanggal 22 Mei 2013.

Aset tersedia untuk dijual :

Jenis	Nilai Pembelian	Akum. Penyusutan	Nilai Buku
- Kendaraan Roda Empat	13.515.383.401	13.515.383.313	88
- Inventaris	8.603.514.825	8.306.895.057	296.619.768
	22.118.898.226	21.822.278.370	296.619.856

Seluruh Biaya Penyusutan dibebankan sebagai Beban Administrasi dan Umum.

Ikhtisar perubahan saldo Aset Dalam Pelaksanaan selama tahun 2013 dan tahun 2012 dapat disajikan sebagai berikut:

	2013	2012
Saldo awal	38.989.720.750	10.104.996.834
Penambahan	5.549.146.698	33.488.521.691
Reklasifikasi ke aset bangunan	(43.064.829.927)	(4.603.797.775)
Saldo per 31 Desember 2013	1.474.037.521	38.989.720.750

Rincian aset dalam penyelesaian per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut;

	2013	2012
Kantor Pusat	-	37.591.491.750
Marine & Industri Unit Balikpapan	1.474.037.521	1.398.229.000
Jumlah	1.474.037.521	38.989.720.750

Aset tetap perusahaan berupa bangunan, kendaraan dan inventaris Kantor Pusat telah diasuransikan dengan nilai pertanggungan yang cukup untuk menutupi segala risiko yang mungkin timbul.

Manajemen perusahaan berpendapat bahwa tidak terdapat perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai Aset tetap.

Pada tanggal 31 Desember 2013, aset tetap Perusahaan berupa tanah dan bangunan Kantor Pusat dijadikan agunan atas fasilitas Bank Garansi dari PT Bank Mandiri sebesar Rp16.000.000.000 (Catatan 26).

9. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA

	2013	2012
Jaminan Sewa Gedung Cabang Singapura	354.872.675	153.418.596
Nilai hak pakai atas tanah	262.316.405	15.938.400
dikurangi : akumulasi amortisasi	(13.115.820)	(10.625.600)
	604.073.260	158.731.396

Hak pemakaian atas tanah di atas adalah milik PT Pelabuhan Indonesia III yang berlokasi di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya untuk masa sampai dengan 2018.

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013 dan 2012

(Dalam rupiah)

10. UTANG USAHA

Akun ini merupakan kewajiban Perusahaan atas bagian kerjasama kepada partner asing maupun dalam negeri yang pembayarannya dilakukan secara periodik. Saldo hutang usaha per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing adalah sebagai berikut:

	2013	2012
American Bureau of Shipping	2.096.995.560	1.804.735.500
Nippon Kaiji Kyokai	-	2.040.220.538
Jumlah	2.096.995.560	3.844.956.038

11. UTANG LAIN-LAIN

	2013	2012
PT Intraco Lestari	-	9.390.180.809
Koperasi BKI	-	502.754.545
Wearnes Automotive, Pte. Ltd.	856.322.500	1.130.701.000
PT Pratita Prama Nugraha	148.147.840	153.068.877
ITB	-	160.000.000
PT Gamma Buana Persada	-	158.375.000
PT Aplika Nusa Lintasartha	144.820.500	136.570.500
PT Bina Karya	-	107.800.000
Mina Trisni Notaris	-	181.250.000
PT Indonesia Hijau Lestari	-	70.000.000
PT Wiganti Teknikindo	-	74.560.000
Hotel Nam Centre	-	81.435.000
Jamsostek	178.900	357.402.500
PT Monas Adi Karya	63.570.850	63.570.850
PT Neo Dunia Persada	14.900.000	164.100.000
Purna Sarana Karya	-	68.000.000
Binaman Utama	543.312.000	-
Tunas Auto Graha	165.802.304	-
Gita Menata Jaya	1.560.121.177	-
Limawira Wisesa	101.000.000	-
PT Telekomunikasi Indonesia	4.976.000.000	-
Inet Global Indonesia	232.000.000	-
Permata Sejahtera Buana	208.000.000	-
Terakom Internasional	175.700.000	-
PT Dewadaru Aditech	1.030.165.000	-
Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967	108.000.000	-
Xeloxindo Grafika	234.700.000	-
Lain-lain (dibawah Rp50 juta sebanyak: tahun 2013 : 14 kreditur; tahun 2012 : 25 kreditur)	147.207.029	289.643.093
Jumlah	10.709.948.100	13.089.412.174

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013 dan 2012

(Dalam rupiah)

12. UTANG BIAYA

	2013	2012
Beban Personel	11.425.256.062	12.519.060.590
Beban Direksi dan Komisaris	2.507.792.042	1.892.204.480
Beban produksi konsultasi & supervisi	-	3.068.003.915
Beban fasilitas kerja	83.518.645	320.387.718
Beban pengembangan operasi	210.624.757	55.356.000
Beban produksi klasifikasi	-	159.015.733
Beban pemasaran	476.900	90.754.990
Beban pemeliharaan	2.059.500	18.535.732
Beban humas	-	1.011.000
Perencanaan & perizinan bangunan	125.765.750	-
Jumlah	14.355.493.656	18.124.330.158

Beban yang masih harus dibayar atas beban Personel dan beban Direksi dan Komisaris terdiri atas pembebanan atas insentif jasa produksi karyawan dan tantiem Direksi dan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham dan dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

13. PERPAJAKAN**a. Pajak Dibayar Dimuka**

	2013	2012
Saldo Pajak (PPN) Masukan yang dapat dikreditkan	2.266.861.999	171.736.321
Jumlah	2.266.861.999	171.736.321

b. Taksiran Pajak Penghasilan

	2013	2012
Pajak kini	(39.566.593.500)	(27.492.281.750)
Penghasilan/(beban) pajak tangguhan	(303.166.439)	472.284.074
Jumlah	(39.869.759.939)	(27.019.997.676)

c. Beban Pajak atas Pendapatan Komprehensif Lain

	2013	2012
Pendapatan komprehensif atas laba kurs valuta asing	1.644.916.807	-
Beban pajak 25%	(411.229.000)	-
Jumlah	1.233.687.807	-

d. Utang Pajak

	2013	2012
Pajak Penghasilan Pasal 21 Wapu	15.123.842.682	7.542.119.757
Pajak Penghasilan Pasal 23 Wapu	99.187.693	43.186.806
Pajak Penghasilan Pasal 25	1.289.000.000	542.621.568
Pajak Penghasilan Pasal 26	47.664.000	-
Pajak Penghasilan Pasal 29	2.778.349.473	6.854.457.232
PPh Final	2.199.999	121.763.636
PPN masukan - Wapu	1.231.096.124	1.249.732.041
Pajak Pertambahan Nilai (Pajak keluaran)	10.499.044.560	5.734.753.926
Jumlah	31.070.384.531	22.088.634.966

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013 dan 2012

(Dalam rupiah)

13. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Rekonsiliasi Fiskal

Rekonsiliasi antara laba sebelum taksiran pajak penghasilan seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dengan taksiran penghasilan kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

	2013	2012
Laba sebelum pajak	144.984.589.682	94.458.217.478
<u>Beda tetap:</u>		
Pendapatan jasa giro	(272.817.503)	(186.513.253)
Pendapatan bunga deposito	(2.714.615.891)	(2.119.128.215)
Pengembangan perusahaan	820.000.000	750.000.000
Biaya perolehan proyek	8.405.050.000	8.365.610.074
Rekreasi dan olahraga	136.000.000	125.000.000
Koreksi beban pendapatan tahun lalu	447.013.548	678.852.145
Listrik, air, telepon (rumah dinas)	87.210.000	78.515.918
Laba penjualan aktiva	-	(871.985.491)
Cinderamata	64.000.000	50.000.000
Sumbangan dan biaya duka	79.440.000	54.690.000
	152.035.869.836	101.383.258.656
<u>Beda waktu:</u>		
Penyisihan piutang	7.443.170.720	6.696.732.652
Provisi Imbalan Kerja Jangka Panjang Karyawan	2.408.465.385	5.827.373.784
Penyusutan aset	(3.621.131.140)	(3.938.237.488)
Taksiran laba kena pajak bersih tahun berjalan	158.266.374.801	109.969.127.604
Taksiran laba fiskal dibulatkan	158.266.374.000	109.969.127.000
Taksiran pajak penghasilan badan (25%)	39.566.593.500	27.492.281.750
<u>Kredit pajak:</u>		
Pajak Penghasilan pasal 23	4.919.121.086	3.118.676.768
Pajak Penghasilan pasal 24 Luar Negeri	1.344.351.941	-
Pajak Penghasilan pasal 25	30.936.000.000	17.519.147.750
Jumlah kredit pajak	37.199.473.027	20.637.824.518
Hutang Pajak Penghasilan Badan	2.367.120.473	6.854.457.232

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013 dan 2012

(Dalam rupiah)

13. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Aset pajak tangguhan

Pajak tangguhan dihitung berdasarkan pengaruh dari perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan kewajiban menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan kewajiban adalah sebagai berikut:

	1 Jan 2013	Manfaat/(Beban) Pajak tangguhan	31 Des 2013
Kewajiban manfaat karyawan	2.901.926.227	602.116.346	3.504.042.573
Penyisihan piutang ragu-ragu	673.232.265	-	673.232.265
Penyusutan aset	(593.189.932)	(905.282.785)	(1.498.472.717)
	2.981.968.560	(303.166.439)	2.678.802.121

	1 Jan 2012	Manfaat/(Beban) Pajak tangguhan	31 Des 2012
Kewajiban manfaat karyawan	1.445.082.781	1.456.843.446	2.901.926.227
Penyisihan piutang ragu-ragu	673.232.265	-	673.232.265
Penyusutan aset	391.369.440	(984.559.372)	(593.189.932)
	2.509.684.486	472.284.074	2.981.968.560

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013 dan 2012

(Dalam rupiah)

14. UTANG BRUTO

	2013	2012
Bidang klasifikasi	2.883.052.880	2.255.142.800
Bidang konsultansi dan supervisi	1.727.179.683	798.729.000
Jumlah	4.610.232.563	3.053.871.800

Utang Bruto untuk bidang klasifikasi dan bidang konsultansi dan supervisi adalah saldo uang muka survey yang diterima dari perusahaan pelayaran/rekanan yang akan diperhitungkan dengan invoice terbit yaitu pada saat pekerjaan telah selesai dilaksanakan.

15. LIABILITAS JANGKA PENDEK LAINNYA

Akun ini merupakan iuran pegawai kepada DPLK BNI dan Dana Pensiun BKI serta kontribusi Perusahaan yang belum disetor, yaitu sebagai berikut:

	2013	2012
DPLK BNI	2.450.000	5.850.000
Jumlah	2.450.000	5.850.000

16. PROVISI IMBALAN KERJA JANGKA PANJANG KARYAWAN

	2013	2012
Provisi Imbalan Pensiun	4.556.853.648	3.152.034.512
Provisi Imbalan Balas Jasa & Pengabdian	8.373.611.581	7.523.459.130
Provisi Imbalan Cuti Besar	1.075.874.998	932.211.264
Provisi Iuran Program DPLK	9.830.064	-
Jumlah	14.016.170.291	11.607.704.906

a. Imbalan Pensiun

Manfaat Pensiun diberikan kepada karyawan yang telah memasuki usia pensiun atau berhenti bekerja oleh sebab lainnya yang diatur dalam peraturan dana pensiun. Besarnya manfaat pensiun yang diberikan ditentukan oleh masa kerja karyawan dan besarnya Penghasilan Dasar Pensiun terakhir (gaji pokok ditambah tunjangan keluarga).

Pendanaan program pensiun ini dibentuk setiap bulan dari iuran karyawan sebesar 6% dan iuran yang ditanggung Perseroan sebesar 15,4% dari gaji dasar karyawan.

Pengelolaan dana program pensiun dilakukan oleh Dana Pensiun PT Biro Klasifikasi Indonesia. Adapun peraturan dana pensiunnya yang terakhir kali ditetapkan oleh Keputusan Direksi PT. Biro Klasifikasi Indonesia No. B.0038D/KP903/KI-05 tanggal 01 Januari 2005 dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Keuangan No. Kep-049/KM.12/2006 tanggal 03 Agustus 2006.

Rekonsiliasi status pendanaan program ini pada posisi 31 Desember 2013 dan 2012:

	2013	2012
Aset Program	47.607.103.690	46.929.181.835
Nilai Tunai Manfaat Pensiun	(66.240.926.464)	(88.579.099.110)
Surplus/(Defisit) Pendanaan	(18.633.822.774)	(41.649.917.275)
Biaya Jasa Lalu yang belum diakui	29.809.746.854	32.117.002.803
Laba/Rugi Aktuarial belum diakui	(15.732.777.728)	6.380.879.960
Biaya Dibayar Dimuka/(Provisi) Pensiun	(4.556.853.648)	(3.152.034.512)

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013 dan 2012

(Dalam rupiah)

16. PROVISI IMBALAN KERJA JANGKA PANJANG KARYAWAN (lanjutan)

Rekonsiliasi perubahan saldo Provisi Imbalan Pensiun selama tahun 2013 dan 2012:

	2013	2012
Saldo awal tahun	3.152.034.512	-
Beban pensiun tahun berjalan	5.608.049.893	6.691.167.611
Kontribusi iuran ke Dana Pensiun	(4.203.230.757)	(3.539.133.099)
Saldo akhir tahun	4.556.853.648	3.152.034.512

Adapun beban yang diakui pada tahun 2013 dan 2012 terdiri dari komponen sebagai berikut:

	2013	2012
Beban jasa kini	2.818.160.651	3.995.301.336
Beban bunga	5.175.551.477	4.580.723.324
-/- Imbal Hasil investasi	(4.692.918.184)	(4.192.112.998)
Beban amortisasi Jasa Lalu	2.307.255.949	2.307.255.949
Amortisasi Laba/Rugi Aktuarial	-	-
Beban yang diakui	5.608.049.893	6.691.167.611

Komposisi Aset Program Pensiun yang dikelola oleh Dana Pensiun PT Biro Klasifikasi Indonesia selama tahun 2013 dan 2012 terdiri dari:

a. Obligasi, Sukuk, Surat Utang Negara	56,20%
b. Deposito Berjangka	24,30%
c. Saham, Reksadana, Penempatan	12,90%
d. Properti	6,60%
Jumlah	100,00%

Pengalaman Penyesuaian pada Liabilitas dan Aset Program selama tahun 2012:

a. Pengalaman Penyesuaian Atas Aset	(5.898.319.261)
Presentase	12,40%
b. Pengalaman Penyesuaian atas Liabilitas	6.058.355.740
Presentase	9,10%

b. Imbalan Balas Jasa dan Pengabdian Masa Kerja

Penyelenggaraan Program Balas Jasa didasarkan pada Peraturan Direksi No.DU.249a/KP.106/KI-08 tanggal 31 Desember 2008. Manfaat Balas Jasa berupa pembayaran jumlah lumpsum diberikan kepada karyawan yang memasuki usia pensiun atau berhenti bekerja oleh sebab lain yang diatur dalam Peraturan Direksi tersebut. Adapun jumlah lumpsum yang diberikan ditentukan berdasarkan besarnya gaji terakhir dikalikan dengan angka indeks tertentu yang besarnya ditentukan oleh golongan gaji pegawai yang bersangkutan.

Adapun Pengabdian masa kerja adalah imbalan yang diberikan kepada karyawan yang telah bekerja selama 25 tahun. Imbalan diberikan berupa uang pengharagaan 1 (satu) kali THP (*Take Home Pay*), peniti emas 8 gram dan piagam perlengkapan.

Penyelenggaraan program imbalan ini didanai secara internal Perusahaan.

Rekonsiliasi status pendanaan program ini pada posisi 31 Desember 2013 dan 2012:

	2013	2012
Aset Program	-	-
Nilai Tunai Kewajiban Manfaat	23.241.787.713	20.141.692.899
Defisit Pendanaan	(23.241.787.713)	(20.141.692.899)
Kewajiban Jasa Lalu yg belum diakui	5.781.704.621	6.166.126.471
Labar/Rugi Aktuarial yg belum diakui	9.086.471.511	6.452.107.298
Biaya Dibayar Dimuka/(Provisi)	(8.373.611.581)	(7.523.459.130)

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013 dan 2012

(Dalam rupiah)

16. PROVISI IMBALAN KERJA JANGKA PANJANG KARYAWAN (lanjutan)

Rekonsiliasi perubahan saldo Provisi 2013 dan 2012:

	2013	2012
Saldo Provisi awal tahun	7.523.439.130	5.780.331.124
Beban yang dibentuk	3.049.578.656	3.332.405.009
Imbalan yang dibayarkan	(2.199.426.205)	(1.589.297.003)
Saldo Provisi akhir tahun	8.373.591.581	7.523.439.130

Adapun beban yang dibentuk selama tahun 2013 terdiri dari:

	2013	2012
Beban jasa kini	1.311.941.377	1.297.444.629
Beban bunga	1.076.536.002	662.084.537
Amortisasi Beban Jasa Lalu	276.679.427	1.120.761.792
Amortisasi Laba / Rugi Aktuarial	384.421.850	252.134.051
Beban Yang Diakui	3.049.578.656	3.332.425.009

Pengalaman Penyesuaian pada Liabilitas dan Aset Program selama tahun 2013 :

	2013	2012
Pengalaman Penyesuaian Atas Aset	5.898.319.261	1.577.546.742
Presentase	12,4%	7,8%

c. Imbalan Cuti Besar

Perusahaan memberikan imbalan cuti besar sebesar 1 (satu) kali THP (*Take Home Pay*) yang diberikan setiap 5 tahun sekali pada saat karyawan menjalani hak cuti besar. Penyelenggaraan program imbalan ini didanai secara internal Perusahaan.

Rekonsiliasi status pendanaan program ini pada posisi 31 Desember 2013 :

	2013	2012
Aset Program	-	-
Nilai Tunai Kewajiban Manfaat	(1.075.874.998)	(932.211.264)
Defisit Pendanaan	(1.075.874.998)	(932.211.264)
Kewajiban Jasa Lalu yang belum diakui	-	-
Labar/Rugi Aktuarial yang belum diakui	-	-
Biaya Dibayar Dimuka/(Provisi) Imbalan Cuti	(1.075.874.998)	(932.211.264)

Rekonsiliasi perubahan saldo Provisi selama tahun 2013 dan 2012:

	2013	2012
Saldo Provisi awal tahun	932.211.264	767.057.156
Beban yang dibentuk	793.574.615	439.756.820
Imbalan yang dibayarkan yang dibayarkan	(649.910.881)	(274.602.712)
Saldo Provisi akhir tahun	1.075.874.998	932.211.264

Adapun beban yang dibentuk selama tahun 2013 dan 2012 terdiri dari:

	2013	2012
Beban jasa kini	152.261.301	177.093.294
Beban bunga	16.938.023	46.023.429
Beban amortisasi kewajiban transisi	-	-
Amortisasi Laba/Rugi Aktuarial	624.375.291	216.640.097
Beban Yang Diakui	793.574.615	439.756.820

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013 dan 2012

(Dalam rupiah)

16. PROVISI IMBALAN KERJA JANGKA PANJANG KARYAWAN (lanjutan)

d. D P L K

Rekonsiliasi status pendanaan program ini pada posisi 31 Desember 2013:

Aset Program	-
Nilai Tunai Kewajiban Manfaat	(7.179.730)
Defisit Pendanaan	(7.179.730)
Kewajiban Jasa Lalu yang belum diakui	-
Laba/Rugi Aktuarial yang belum diakui	(2.650.334)
Biaya Dibayar Dimuka/(Provisi)	(9.830.064)

Rekonsiliasi perubahan saldo Provisi selama tahun 2013 :

Saldo Provisi awal tahun	-
Beban yang dibentuk	9.830.064
Imbalan yang dibayarkan yang dibayarkan	-
Saldo Provisi akhir tahun	9.830.064

Adapun beban yang dibentuk selama tahun 2013 terdiri dari:

Beban jasa kini	3.964.162
Beban bunga	455.521
Biaya jasa lalu	5.410.381
Amortisasi Laba/Rugi Aktuarial	-
Beban Yang Diakui	9.830.064

Asumsi Aktuarial

Perhitungan beban dan kewajiban aktuarial tersebut di atas dihitung oleh aktuaris independen PT Dian Artha Tama. Perhitungan aktuaris dilakukan dengan frekuensi setahun sekali, adapun asumsi aktuarial yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

- (1) metode perhitungan yang dipergunakan : Projected Unit Credit,
- (2) tingkat bunga diskonto yang dipergunakan per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah 9% p.a, dan 6% p.a.
- (3) tingkat bunga imbal hasil investasi aset program per 31 Desember 2013 adalah 10% p.a.,
- (4) tingkat kenaikan gaji berkala 5% per tahun,
- (5) tabel mortalita yang dipergunakan: GAM-1971
- (6) usia pensiun 56 tahun.
- (7) jumlah pegawai peserta program imbalan di atas per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah 580 dan 552 orang.

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013 dan 2012

(Dalam rupiah)

17. MODAL SAHAM

Modal saham Perusahaan per 31 Desember 2013 dan 2012 sebesar Rp45.000.000.000 seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Nomor 14 tanggal 11 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan H. Umaran Mansjur, SH., Notaris di Jakarta, pemegang saham menyetujui peningkatan modal dasar dari sebanyak 24.000 saham atau sebesar Rp24.000.000.000 menjadi sebanyak 180.000 saham atau sebesar Rp180.000.000.000 dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh dari sebanyak 6.000 saham atau sebesar Rp6.000.000.000 menjadi sebanyak 45.000 saham atau sebesar Rp45.000.000.000 yang berasal dari kapitalisasi cadangan Perusahaan sebesar Rp39.000.000.000. Akta Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. AHU-03102AH.01.02 tahun 2009 tanggal 14 Januari 2009.

18. PEMBAGIAN LABA

Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan pada tanggal 4 Januari 2013 dan Keputusan RUPS Nomor : RIS-01/D4. MBU/2013 tanggal 25 April 2013 pemegang saham telah menetapkan penggunaan laba bersih tahun 2012 dan 2011 sebagai berikut:

	Pembagian laba tahun buku 2012	Pembagian laba tahun buku 2011
Pembagian dividen	10.115.732.970	7.704.022.000
Penyisihan dana kemitraan dan bina lingkungan	-	2.054.406.000
Penyisihan cadangan umum	57.322.486.832	41.601.716.521
	67.438.219.802	51.360.144.521

Saldo cadangan umum per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

	2013	2012
Saldo awal	119.927.106.309	78.325.389.788
Pemindahan dari laba	57.322.486.832	41.601.716.521
Saldo akhir	177.249.593.141	119.927.106.309

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013 dan 2012

(Dalam rupiah)

19. PENDAPATAN JASA

	2013	2012
Jasa klasifikasi	363.468.731.342	276.059.218.043
Jasa konsultasi dan supervisi	212.958.252.684	148.764.087.758
Bagian partner kerjasama	(21.229.810.322)	(5.647.237.818)
Jumlah	555.197.173.704	419.176.067.983

Rincian pendapatan jasa klasifikasi, jasa konsultasi dan supervisi dan bagian partner kerjasama untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

A. Pendapatan Jasa Klasifikasi

	2013	2012
1) Klas tunggal (Single Class)		
<u>Klas BKI (Dalam Negeri) oleh BKI</u>		
- Penerimaan klas	141.507.084.174	107.632.643.271
- Mempertahankan klas	97.106.787.836	72.176.658.688
- Material dan komponen	27.710.266.553	21.623.297.685
- Statutoria	46.759.845.674	33.148.830.245
	313.083.984.237	234.581.429.889
<u>Klas BKI (Luar Negeri) oleh BKI</u>		
- Penerimaan klas	5.901.852.172	6.603.624.411
- Mempertahankan Klas	5.101.220.820	3.952.708.768
- Material dan komponen	2.897.998.390	1.710.969.352
- Statutoria	5.008.796.964	4.793.782.396
	18.909.868.346	17.061.084.927
Jumlah Klas tunggal BKI	331.993.852.583	251.642.514.816
2) Kerjasama dengan klas asing		
<u>Klas BKI (Luar Negeri) oleh asing</u>		
- Mempertahankan klas	26.060.000	10.700.000
- Statutoria	5.665.000	2.200.000
	31.725.000	12.900.000
<u>Klas ganda / dual class (Dalam Negeri)</u>		
- Penerimaan klas	9.775.432.687	4.238.629.358
- Mempertahankan klas	4.318.702.970	3.115.532.907
- Material dan komponen	264.713.520	283.153.430
- Statutoria	2.053.143.266	859.252.500
	16.411.992.443	8.496.568.195
<u>Klas ganda / dual class (Luar Negeri)</u>		
- Penerimaan klas	10.950.984.982	6.130.750.953
- Mempertahankan klas	2.282.330.988	9.247.708.421
- Statutoria	1.784.995.346	528.775.658
	15.018.311.316	15.907.235.032
<u>Klas asing di Indonesia</u>		
- Statutoria	12.850.000	-
	12.850.000	-
Jumlah kerjasama dengan klas asing	31.474.878.759	24.416.703.227
Jumlah pendapatan jasa klasifikasi	363.468.731.342	276.059.218.043

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013 dan 2012

(Dalam rupiah)

19. PENDAPATAN JASA (lanjutan)

B. Pendapatan Jasa Konsultansi dan Supervisi

	2013	2012
Bidang pengujian	64.963.926.398	50.620.934.345
Bidang inspeksi	67.400.513.953	56.176.134.569
Bidang rekayasa teknik	7.913.415.531	6.206.599.205
Bidang jasa marine	69.365.548.842	30.261.794.790
Lain-lain	3.314.847.960	5.498.624.849
Jumlah	212.958.252.684	148.764.087.758

C. Bagian Partner Kerjasama

	2013	2012
Kerjasama klas tunggal (<i>single class</i>)	-	-
Kerjasama klas ganda (<i>dual class</i>)	-	2.047.940.158
Kerjasama konsultansi dan supervisi	21.229.810.322	3.599.297.660
Jumlah	21.229.810.322	5.647.237.818

Bagian partner kerjasama adalah bagian pendapatan yang diberikan kepada mitra kerja asing dan lokal atas hasil kerjasama survey dan inspeksi.

20. BEBAN JASA

	2013	2012
Beban perjalanan dinas survey	43.586.375.852	33.337.617.272
Beban material	7.284.613.168	5.989.458.757
Beban tenaga kerja proyek	22.645.213.544	11.172.202.265
Beban mobilisasi dan demobilisasi	8.861.157.562	6.647.333.343
Beban komitmen dan rekayasa proyek	19.010.360.640	17.038.831.519
Beban pelaporan	2.186.015.337	2.341.456.437
Jumlah	103.573.736.103	76.526.899.593

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013 dan 2012

(Dalam rupiah)

21. BEBAN PEMASARAN

	2013	2012
Beban pemasaran	4.825.770.700	4.951.406.570
Beban humas	1.667.834.831	1.044.662.708
Jumlah	6.493.605.531	5.996.069.278

22. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

	2013	2012
Beban direksi & komisaris	12.341.781.192	8.987.986.579
Beban personel	199.626.962.345	144.272.164.747
Beban fasilitas kerja segmen	25.405.147.424	31.086.479.136
Beban pendidikan dan riset	7.762.758.714	13.314.085.870
Beban perjalanan dinas	6.071.737.468	4.263.853.660
Beban pengembangan operasi	20.139.871.524	16.641.536.881
Beban audit	1.158.364.422	312.624.839
Beban pemeliharaan	7.058.814.868	4.943.485.817
Beban penyusutan	9.102.614.326	6.866.800.645
Beban penyisihan piutang usaha	7.443.170.720	6.696.732.652
Beban provisi imbalan jangka panjang karyawan	9.453.441.214	10.955.803.884
Beban Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)	3.400.000.000	-
Jumlah	308.964.664.217	248.341.554.710

Beban personel merupakan biaya-biaya yang berkaitan dengan pembayaran kepada karyawan baik di Kantor Pusat maupun cabang-cabang. Biaya personel tersebut terdiri dari: gaji dasar, gaji merit, gaji pangkat, tunjangan kesejahteraan, honorarium, tunjangan pengobatan, tunjangan cuti, tunjangan perumahan, asuransi dan tunjangan PPh pasal 21. Sedangkan beban Direksi dan Komisaris terdiri dari honorarium, tunjangan perumahan, tunjangan pengobatan, tunjangan listrik/PAM, uang cuti, asuransi, Tantiem, tunjangan komunikasi, tunjangan operasional dan fasilitas kendaraan. Pembebanan tersebut adalah sesuai dengan RKAP tahun 2013 yang telah disyahkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT BKI (Persero) tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun 2013 tanggal 4 Januari 2013.

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013 dan 2012

(Dalam rupiah)

23. PENDAPATAN/(BEBAN) LAIN-LAIN**Pendapatan lain-lain**

	2013	2012
Pendapatan bunga deposito bersih	2.714.615.891	2.119.128.215
Selisih kurs laba	8.069.983.643	3.659.845.203
Jasa Giro	272.817.503	186.513.253
Laba penjualan Aktiva	-	871.985.491
Sewa rumah	-	83.000.000
Revisi Pendapatan Jasa Konsultasi & Supervisi	30.196.800	22.670.000
Lain-lain Pendapatan	610.141.538	537.826.309
Jumlah	11.697.755.375	7.480.968.471

Beban lain-lain

	2013	2012
Beban bunga	25.041.171	15.792.283
Selisih kurs rugi	1.520.431.321	257.785.537
Revisi Pendapatan Jasa Klasifikasi	31.046.400	593.559.540
Revisi Pendapatan Jasa Konsultasi & Supervisi	415.967.148	85.292.605
Denda pajak kurang bayar	230.025.339	10.286.731
Beban Bank	360.925.161	238.081.851
Beban denda	38.719.550	21.891.716
Beban duka	95.345.000	54.690.000
Lain-lain Beban	160.832.456	56.915.132
Jumlah	2.878.333.546	1.334.295.395

Pendapatan Komprehensif Lainnya

Akun ini berasal dari laba kurs penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing sebagai berikut :

	Dollar Amerika Serikat	Dollar Singapura	LABA KURS
- Piutang	154.827,00	1.226.756,61	1.498.377.098
- Kas dan Setara Kas	-	146.830,45	77.031.230
- Deposit (Jaminan Sewa)	-	36.858,40	69.508.479
			1.644.916.807
- Beban Pajak 25%			(411.229.000)
Pendapatan komprehensif lainnya setelah pajak			1.233.687.807

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013 dan 2012

(Dalam rupiah)

24. MANAJEMEN RISIKO FINANSIAL

Dari kegiatan usaha yang dijalankannya, Perusahaan menghadapi risiko-risiko keuangan yang meliputi:

1. Risiko Kredit
2. Risiko Likuiditas
3. Risiko Pasar

Pengelolaan risiko-risiko tersebut saat ini dijalankan oleh Divisi Keuangan di Kantor Pusat dengan mengacu limit-limit risiko yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

Penjabaran mengenai kebijakan pengelolaan ketiga jenis risiko tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Risiko Kredit

Risiko Kredit adalah risiko kerugian yang akan diderita Perusahaan apabila pelanggan gagal melunasi baik sebagian maupun seluruh kewajibannya kepada Perusahaan. Terdapat tiga faktor utama yang dapat menyebabkan pihak pelanggan mengalami gagal bayar yaitu kondisi makro ekonomi atau kondisi usaha pelanggan yang kurang baik, kesulitan keuangan yang dialami pelanggan, atau karakter/itikad baik pelanggan.

Berdasarkan pengalaman secara empiris, eksposur risiko kredit yang signifikan terdapat pada pos Piutang Usaha. Besarnya eksposur risiko kredit Piutang Usaha adalah sebagaimana yang tertera di Laporan Posisi Keuangan per 31 Desember 2013 dan 2012 sebagai nilai tercatat Piutang Usaha (Catatan 5).

Sesuai arahan yang tertera dalam RKAP 2013 dan 2012, kebijakan yang ditetapkan Manajemen Perusahaan dalam membatasi eksposur risiko kredit tersebut adalah dengan menetapkan maksimal *Collection Period* piutang usaha untuk tahun 2013 dan 2012 adalah 66 hari.

Dalam realisasinya, *collection period* piutang usaha selama tahun 2013 dan 2012 tercatat mencapai 104 hari dan 96 hari. Oleh karena itu, dalam tahun 2013 dan 2012, Perusahaan terus meningkatkan pencadangan untuk mengantisipasi timbulnya kerugian tidak tertagihnya Piutang Usaha tersebut. Sebagaimana tertera dalam Catatan No. 5 atas laporan keuangan, Perusahaan telah menambah cadangan kerugian penurunan nilai piutang selama tahun 2013 sebesar Rp7.443.170.720 dan tahun 2012 sebesar Rp6.696.732.652.

b. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko ketidakmampuan Perusahaan untuk melunasi kewajiban keuangannya kepada pihak ekstern. Risiko ini timbul akibat ketidaksesuaian periode penerimaan kas dari penagihan piutang usaha dan periode jatuh tempo pembayaran kepada pihak ekstern (*maturity mismatch*). Risiko likuiditas berkaitan erat dengan risiko kredit, yaitu semakin panjang *collection period* atas piutang usaha maka Perusahaan akan semakin rentan mengalami risiko likuiditas.

Untuk menggambarkan eksposur risiko likuiditas per 31 Desember 2013, berikut ini diuraikan periode jatuh tempo liabilitas jangka pendek selama periode 12 bulan ke depan yaitu sebagai berikut:

	Periode Jatuh Tempo Selama 2013			
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Utang Usaha	2.096.995.560	-	-	-
Utang Lain-lain	10.709.948.100	-	-	-
Utang Biaya	12.500.000.000	1.855.493.656	-	-
Utang Pajak	28.570.384.531	2.500.000.000	-	-
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	2.450.000	-	-	-

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013 dan 2012

(Dalam rupiah)

24. MANAJEMEN RISIKO FINANSIAL (lanjutan)

Sesuai arahan yang tertera dalam RKAP 2013 dan 2012, kebijakan yang ditetapkan Manajemen Perusahaan dalam membatasi eksposur risiko likuiditas tersebut adalah dengan menjaga pencapaian *Cash Ratio* adalah masing-masing 73,69% dan 60,54% dari jumlah liabilitas jangka pendek.

Dalam realisasinya, *cash ratio* per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing mencapai 170,16% dan 113,65%.

c. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko terjadinya laba/rugi kurs akibat pertukaran mata uang asing yaitu USD atau SGD ke dalam Rupiah dan dari selisih penilaian kurs penutup saldo aset dan liabilitas keuangan dalam mata uang asing.

Eksposur risiko pasar dari nilai tukar mata uang asing yang dimiliki Perusahaan pada posisi 31 Desember 2013 dan 2012 dapat digambarkan sebagai berikut:

31 Desember 2013				
	Dolar Amerika Serikat	Dolar Singapura	Euro	Setara Rupiah
<u>Aset</u>				
Kas dan setara kas	466.418	859.726	-	13.962.611.707
Piutang usaha	1.769.089	1.382.737	-	34.876.412.453
	<u>2.235.507</u>	<u>2.242.463</u>	<u>-</u>	<u>48.839.024.160</u>
<u>Kewajiban</u>	172.040	-	-	2.096.995.560
Jumlah aset bersih	2.063.467	2.242.463	-	46.742.028.600
31 Desember 2012				
	Dolar Amerika Serikat	Dolar Singapura	Euro	Setara Rupiah
<u>Aset</u>				
Kas dan setara kas	333.200	449.581	-	6.774.757.060
Piutang usaha	1.472.236	1.839.541	-	28.781.772.418
	<u>1.805.436</u>	<u>2.289.122</u>	<u>-</u>	<u>35.556.529.478</u>
Kewajiban	6.555	143.000	3.965	1.244.878.533
Jumlah aset bersih	1.798.881	2.146.122	(3.965)	34.311.650.945

Hingga saat ini Perusahaan belum menetapkan kebijakan limit risiko pasar.

Sebagaimana tertera pada Catatan No. 23 atas laporan laba rugi komprehensif untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013 dan 2012, Besarnya laba/rugi kurs yang terjadi adalah sebagai berikut:

	2013	2012
Laba Kurs	8.069.983.643	3.659.845.203
Rugi Kurs	(1.520.431.321)	(257.785.537)
Laba/(Rugi) Netto	6.549.552.322	3.402.059.666

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013 dan 2012

(Dalam rupiah)

25. MANAJEMEN PERMODALAN

Manajemen Perusahaan melakukan pengelolaan kecukupan permodalan dengan tujuan menjaga kemampuan Perusahaan dalam menjamin kelangsungan usahanya sehingga Perusahaan dapat memenuhi seluruh komitmennya baik kepada Pemegang Saham, Fiskus, rekanan penyedia barang/jasa, maupun karyawan.

Sesuai arahan RKAP 2013 dan 2012, Perusahaan terus berupaya menjaga rasio kecukupan modal dengan mengacu rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset yang masing-masing ditargetkan 83,18% dan 83,41%. Rasio tersebut dihitung sebagai perbandingan antara jumlah seluruh aset (di luar aset yang belum jelas statusnya) dibagi dengan jumlah modal sendiri (di luar dana yang belum jelas statusnya).

Dalam realisasinya per 31 Desember 2013 dan 2012, rasio modal terhadap total aset mencapai 80,90% dan 76,39 %.

26. PERJANJIAN SIGNIFIKAN

Perusahaan memperoleh fasilitas garansi bank dari Bank Mandiri Kantor Pusat berdasarkan Perjanjian Pemberian Fasilitas Garansi Bank dengan Nomor: KP-COD/011/PGB/2004 tanggal 23 Juni 2004. Perjanjian ini telah diperbaharui beberapa kali dan terakhir dengan Addendum X tentang Perpanjangan Jangka Waktu dan peningkatan plafond Fasilitas Garansi Bank sesuai surat Bank Mandiri Nomor: TOP.CRO/CLA.275/ADD/2013 tanggal 21 Juni 2013 dan mengacu pada surat Bank Mandiri Nomor: IBG.IB.1/SPPK/D04.002/2013 tanggal 20 Juni 2013. Addendum ini berlaku selama 1 tahun sampai dengan tanggal 23 Juni 2014. Dengan perjanjian ini perusahaan tidak perlu mengeluarkan uang tunai untuk penerbitan Garansi Bank. Besarnya plafond sebesar Rp15.000.000.000 dari plafond sebelumnya sebesar Rp8.000.000.000.

Fasilitas ini dijamin oleh piutang usaha dan sebidang tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Nomor: 2131/Kebon Bawang yang terletak di Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok. Bidang tanah dan bangunan ini telah dibebani dengan Hak Tanggungan dengan nilai total sebesar Rp24.000.000.000.

Tujuan penggunaan: Penerbitan tender bond (untuk mengikuti tender), *advance payment bond*, *performance bond* (atas dasar kontrak kerja atau SPK), *retensi bond* (surat penegasan dari *bowheer* bahwa proyek telah memasuki masa retensi). Jumlah fasilitas Bank Garansi yang dipergunakan sampai dengan 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp10.883.254.645.

27. INFORMASI MENGENAI PIHAK BERELASI

	2013	2012
<u>Utang Lain-Lain:</u>		
Koperasi BKI	-	502.754.545
Jumlah	-	502.754.545
Prosentase terhadap Utang Lain-Lain	0,00%	3,84%
<u>Beban Jasa dan Beban Usaha</u>		
Koperasi BKI (Pembayaran Sewa Kendaraan)	988.684.000	204.606.000
Jumlah	988.684.000	204.606.000
Prosentase terhadap Beban Jasa dan Beban Usaha	0,24%	0,06%

28. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA

Sampai dengan laporan keuangan ini diterbitkan, tidak terdapat peristiwa tanggal neraca yang dapat mempengaruhi laporan keuangan secara signifikan.

29. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013 dan setuju untuk diterbitkan pada tanggal 28 Februari 2014.